

2025 Laporan Tahunan
Annual Report



Berkolaborasi Membangun UMKM Tangguh & Berkelanjutan

Together, we strengthen MSMEs for a sustainable future.

2025 Laporan Tahunan
Annual Report

Berkolaborasi Membangun UMKM Tangguh & Berkelanjutan

Together, we strengthen MSMEs for a sustainable future.



Tahun 2025 menjadi momentum strategis bagi JAMKRIDA Jakarta dalam menegaskan perannya sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan mandat pembangunan nasional melalui penguatan ekosistem pembiayaan UMKM. Dengan mengusung tema “Berkolaborasi Membangun UMKM Tangguh dan Berkelanjutan”, Laporan Tahunan ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk menghadirkan fungsi penjaminan sebagai bagian dari upaya sistemik dalam memperluas akses pembiayaan, memperkuat ketahanan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

Tema ini mencerminkan keyakinan bahwa penguatan UMKM memerlukan orkestrasi kebijakan, sinergi kelembagaan, serta keterpaduan peran antara pemerintah daerah, sektor keuangan, dan pelaku usaha. Dalam konteks tersebut, JAMKRIDA Jakarta berperan sebagai simpul yang menjembatani kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan pembiayaan dunia usaha, melalui penyediaan skema penjaminan yang memperluas akses, menurunkan risiko, dan meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan produktif.

Keberlanjutan dipahami tidak hanya sebagai keberlanjutan usaha Perseroan, tetapi juga sebagai keberlanjutan ekosistem UMKM itu sendiri. Oleh karena itu, fokus pengembangan diarahkan pada penciptaan portofolio penjaminan yang berkualitas, penguatan kapasitas UMKM agar lebih adaptif terhadap transformasi ekonomi dan digital, serta dukungan terhadap praktik usaha yang semakin efisien, bertanggung jawab, dan berdaya saing. Melalui pendekatan kolaboratif yang terstruktur, JAMKRIDA Jakarta berupaya memperkuat fondasi UMKM sebagai pilar ekonomi yang tangguh, sekaligus sebagai kontributor utama bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

The year 2025 was a strategic momentum for JAMKRIDA Jakarta to affirm its role as a Regional-Owned Enterprise (BUMD) that carries out the national development mandate through the strengthening of MSME financing ecosystem. With the theme “Collaborate to Build Resilient and Sustainable MSMEs”, this Annual Report reflects the Company’s commitment to providing guarantee function as part of the systemic effort to expand access to financing, strengthen business resilience, as well as encourage inclusive economic growth in Indonesia.

The theme reflects the belief that strengthening MSMEs requires policy orchestration, institutional synergy and role integration among the regional government, the financial sector and business players. In this context, JAMKRIDA Jakarta takes the role as a node that bridges regional development policies with the financing needs of the business sector by providing guarantee schemes that expand the access, reduce the risk and increase the trust of the financial institutions in distributing productive financing.

Sustainability is not only understood as the Company’s business sustainability, but also as MSME ecosystem’s sustainability itself. For this purpose, the development focus is directed towards the creation of quality guarantee portfolio, strengthening MSME’s capacity so as to be more adaptive to economic and digital transformations, as well as the support towards more efficient, responsible and competitive business practices. Through a structured collaborative approach, JAMKRIDA Jakarta strives to strengthen the MSME foundation as a resilient economic pillar, and at the same time, as the main contributor to a an inclusive and sustainable long-term growth.

Kesinambungan Tema

Continuity Theme



2024

Laporan Tahunan
Annual Report

Meraih Peluang Bisnis Menuju Pertumbuhan yang Maksimal dan Optimal

Seizing Business Opportunities Towards Maximum and Optimal Growth

Sebagai Lembaga keuangan, PT JAMKRIDA Jakarta memiliki peran menunjang program pemerintah di bidang pengembangan UMKM, khususnya di DKI Jakarta melalui kegiatan usaha penjaminan kredit yang diberikan Lembaga keuangan perbankan, serta Lembaga non perbankan. Hal ini menjadikan Jamkrida Jakarta terus bersikap optimistis, adaptif, dan tidak berhenti berinovasi untuk memaksimalkan peluang bisnis dan membangun pertumbuhan yang berkelanjutan.

As a financial institution, PT JAMKRIDA Jakarta plays a role in supporting government's programs in the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), specifically in the Special Capital Region (DKI) of Jakarta (DKI Jakarta) through business activities in credit guarantee provided by bank and non-bank financial institutions. This makes Jamkrida Jakarta continuously optimistic, adaptive, and unceasingly innovative to maximize business opportunities and build sustainable growth.



2023

Laporan Tahunan
Annual Report

Kiprah Jamkrida Jakarta Menuju Bisnis Penjaminan yang Berkelanjutan

Jamkrida Jakarta's Journey Towards Sustainable Guarantee Business

Nilai-nilai keberlanjutan telah menjadi inti dari bisnis yang dijalankan PT Jamkrida Jakarta ("Jamkrida Jakarta"). Maka dari itu, Jamkrida Jakarta berusaha untuk terus tumbuh secara positif didorong oleh berbagai upaya transformasi berkesinambungan, baik melalui beragam inovasi produk ataupun layanan yang diluncurkan seraya tetap memegang komitmen untuk tidak berhenti memberikan kontribusi dukungan dan sinergi melalui berbagai pihak agar UMKM binaan Pemprov DKI Jakarta dapat naik kelas dan berdaya saing tinggi. Dengan mengarahkan perhatian pada keharmonisan bisnis yang memerhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, Jamkrida Jakarta optimis dapat melanjutkan kisah sukses di masa depan dengan merangkul pertumbuhan pendapatan yang lebih besar dan harapannya jumlah UMKMK yang dijamin pun semakin bertambah. Dengan cara inilah, Jamkrida Jakarta memiliki peluang untuk dapat terus berkarya dan mengukir makna keberlanjutan pada jangka panjang.

Sustainability values have become the core of the business of PT Jamkrida Jakarta ("Jamkrida Jakarta"). For this reason, Jamkrida Jakarta strives to continuously grow positively induced by various continual transformation efforts, both through various product and service innovations while maintaining the commitment to continue to provide support and synergy through various parties so that MSMECOs fostered by the DKI Jakarta Provincial Government can raise its level and be highly competitive. By directing the attention to business harmony that takes into account economic, social and environmental aspects, Jamkrida Jakarta is optimist to continuing its successful journey in the future by embracing greater revenue growth and the hope to increase the number of guaranteed MSMEs. This way Jamkrida Jakarta has the opportunity to continue to be productive and carve the true meaning of sustainability in the long term.



2022

Laporan Tahunan
Annual Report

Meraih Peluang Bisnis Menuju Pertumbuhan yang Maksimal dan Optimal

Seizing Business Opportunities Towards Maximum and Optimal Growth

Begitu banyak nilai-nilai kearifan yang diperoleh dari delapan tahun perjalanan Jamkrida Jakarta. Mulai dari pertama kali didirikan di tahun 2015, hingga peluncuran produk dan/atau layanan yang inovatif, dan jalinan kemitraan yang terus berkembang dengan berbagai pihak, semuanya itu membuktikan rekam jejak keberhasilan kami dalam menavigasi segala bentuk tantangan yang datang silih berganti selama sepuluh berkarya.

So many values of wisdom gained from the eight years of Jamkrida Jakarta's journey. From when it was first established in 2015 until the launch of the innovative products and/or services, and the established partnership with various parties that continued to grow, all of which are proofs of our successful track record in navigating all forms of challenges that came and passed during the eight years in business.

Daftar Isi

Table of Contents



IKHTISAR KINERJA

Performance Overview

Ikhtisar Kinerja 2025 2025 Performance Overview	10
Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	12
Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators	17
Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Soundness Level	19
Penghargaan Tahun 2025 Awards in 2025	20
Peristiwa Penting Tahun 2025 Significant Events in 2025	22



LAPORAN MANAJEMEN

Management Reports

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report	34
Laporan Direksi The Board of Director Report	46



PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

Identitas Perusahaan Corporate Identity	60	Sumber Daya Manusia Human Resources	100
Strategi dan Tujuan Perusahaan Company Strategy and Objectives	62	Informasi Tentang Struktur Modal dan Pemegang Saham Information About Capital and Shareholders	104
Sekilas Jamkrida Jakarta Jamkrida Jakarta at a Glance	64	Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Ventura Bersama Subsidiaries, Associated Companies, Joint Ventures Companies	105
Tonggak Sejarah Milestones	70	Kronologi Pencatatan Saham Dan Efek Lainnya Chronology of Listing of Shares and Other Securities	105
Visi & Misi Vission and Mission	72	Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan Institutions and Professions Supporting the Company	106
Nilai-nilai Perseroan Corporate Values	73	Informasi pada Situs Web Perseroan Information on Company Website	106
Asas dan Tujuan Principles and Objectives	75	Website dan Alamat Kantor PT Jamkrida Jakarta PT Jamkrida Jakarta Website and Office Address	107
Kegiatan Usaha Business Activities	76		
Produk dan Layanan Products and Services	78		
Wilayah Operasional Operational Areas	79		
Struktur Organisasi Organizational Structure	80		
Keanggotaan dalam Asosiasi dan Organisasi Membership in Associations and Organizations	81		
Perubahan Komposisi Manajemen Change in Management Composition	82		
Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners	86		
Profil Direksi Profile of the Board of Directors	88		
Profil Dewan Pengawas Syariah Profile of the Sharia Supervisory Board	92		
Profil Kepala Divisi Profile of the Head Division	94		



108



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion & Analysis

Tinjauan Ekonomi, Perkembangan UMKM, dan Industri Penjaminan Review of the Economic, MSMEs Development, and Guarantee Industry	110
Tinjauan Bisnis Business Review	113
Tinjauan Operasional Operational Review	114
Tinjauan Keuangan Financial Review	119



134



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

Tentang Tata Kelola Perusahaan About Good Corporate Governance	136
Mekanisme GCG GCG Mechanism	139
Penilaian Penerapan GCG Tahun 2025 Assessment of GCG Implementation in 2025	141
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS)	142
Dewan Komisaris Board of Commissioners	145
Direksi Board of Directors	154
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors	162

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama	163
Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Nomination and Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors	164
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	166
Komite Audit Audit Committee	170
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	174
Satuan Pengawas Internal (SPI) Internal Supervisory Unit (SPI)	179
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	185
Sistem Manajemen Risiko Risk Management System	188
Kepatuhan Compliance	192
Perkara Hukum Legal Cases	194
Sanksi Administratif Administrative Sanction	194
Kode Etik Code of Conduct	194
Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Providing Long-Term Compensation	197
Kebijakan Transparansi Kepemilikan Saham Policy On Tranparency Of Share Ownership	197
Sistem Pelaporan Pelanggaran Violation Reporting System	198
Kebijakan Anti-Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Policy On Anti-Corruption And Gratuity Control	203
Keterbukaan Informasi dan Akses Informasi Information Disclosure And Access To Company Information	207



210



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Performance Overview

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility	212
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (OHS)	218
Lembar Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2025 Liability Statement of the 2025 Annual Report	241



242



LAPORAN KEUANGAN

Financial Report

Filosofi Logo

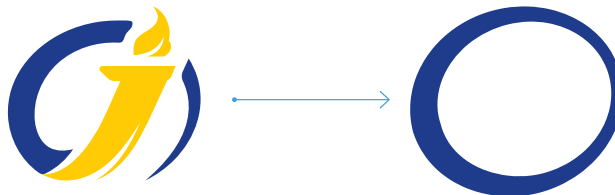
Logo Transition



Tangan Terbuka
Open Hands

Visualisasi tangan terbuka pada logo Jamkrida Jakarta memiliki filosofi bahwa Jamkrida Jakarta senantiasa memberikan pelayanan terbuka, serta mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Jakarta melalui kegiatan menjalankan usaha penjaminan kredit dan bantuan konsultasi manajemen untuk terciptanya kemajuan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Jakarta.

Visualization of the open hands on the Jamkrida Jakarta logo retains the philosophy that Jamkrida Jakarta always provides open services, as well as supports and encourages economic growth of the Jakarta region through activities in credit guarantee business and management consulting assistance to generate advancement in the Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSME and Cooperatives) in order to improve the welfare of the people of Jakarta.



Sustainability Secara 6 Nilai (BETAWI)
Sustainability According to 6 Corporate Values (BETAWI)

Lingkaran berwarna biru secara filosofis melambangkan Sustainability secara 6 Nilai Betawi, yang meliputi: Building Trust (Membangun Kepercayaan) untuk menciptakan ikatan yang kuat. Excellent Service (Pelayanan Terbaik) mampu memberikan dan terciptanya kepuasan yang optimal. Teamwork (Kerja Sama Tim) untuk mencapai tujuan bersama atau dapat menyelesaikan tugas dengan cara yang efektif dan efisien. Accountable (Akuntabel) bertanggung jawab dan siap menghadapi dan menyelesaikan masalah. Wish (Harapan) langkah yang akan menuntun ke kesuksesan dan keberhasilan. Innovative (Inovatif) gagasan atau ide yang dapat mengembangkan Jamkrida Jakarta..

The blue circle philosophically symbolizes Sustainability of the 6 "BETAWI" Values which include the following: Building Trust to create strong ties; Excellent Service capable of providing and generating optimal satisfaction; Teamwork to accomplish common goals or to complete tasks effectively and efficiently; Accountable to take responsibility and be ready to face and manage problems to completion; Wish for the steps to take that lead to success and achievement. Innovative with notions or ideas to develop Jamkrida Jakarta.

Jamkrida Jakarta Resmi Melangkah ke Skala Nasional

Jamkrida Jakarta Officially Moves to the National Level



Pada 9 Mei 2025, JAMKRIDA Jakarta kembali mencatatkan transformasi yang signifikan seiring ditetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/D.05/2025 tentang Persetujuan atas Perubahan Lingkup Wilayah Operasional dari Provinsi menjadi Nasional. Tonggak sejarah ini menandai perluasan mandat usaha JAMKRIDA Jakarta ke tingkat nasional sekaligus membuka babak baru penguatan peran Perseroan dalam mendukung pembiayaan UMKM di seluruh Indonesia.

In 9 May 2025, JAMKRIDA Jakarta again recorded a significant transformation as the Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-44/D.05/2025 was made regarding the Approval of the Changes in the Scope of Operational Area from Provincial to National. This milestone signifies the expansion of JAMKRIDA Jakarta's business mandate to the national scale and at the same time opens a new phase in the strengthening of the Company's role in supporting MSME financing throughout Indonesia.

Seiring diraihnya Persetujuan tersebut, JAMKRIDA Jakarta memasuki fase transformasi menuju lembaga penjaminan berskala nasional, dengan agenda strategis untuk memperluas jangkauan layanan, memperkuat kemitraan lintas daerah, serta membangun kapasitas kelembagaan yang berdaya dukung kuat bagi pelaksanaan mandat baru. Penguatan kapabilitas operasional, sistem manajemen risiko, dan infrastruktur teknologi menjadi prioritas untuk memastikan bahwa ekspansi dilakukan secara terukur, terkendali, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian.

Along with the above Approval in hand, JAMKRIDA Jakarta enters a new phase of transformation towards a national-scale guarantee institution, with a strategic agenda to expand its services' reach, strengthen its partnership across regions, as well as build its institutional capacity that is sufficiently strong to support the implementation of the new mandate. The strengthening of its operational capabilities, risk management system, and technological infrastructure have become priorities to ensuring that expansion is carried out in structured and controlled manners based on prudence principle.

Dalam kerangka tersebut, JAMKRIDA Jakarta menegaskan komitmennya untuk menjaga kepatuhan penuh terhadap regulasi dan menegakkan standar tata kelola yang tinggi. Komitmen ini diarahkan untuk menghadirkan layanan penjaminan yang andal dan berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah yang semakin besar bagi pemangku kepentingan dan ekosistem pembiayaan UMKM di tingkat nasional.

In this context, JAMKRIDA Jakarta asserts its commitment to maintain full compliance with regulations and upholds high governance standards. This commitment is directed towards providing reliable and sustainable guarantee services, as well as providing greater added-value to the stakeholders and MSME financing ecosystem at the national level.

Alamat Baru Kantor Pusat

Head Office New Address



HEAD OFFICE

Gedung Jaya Lantai 3 | 3rd Floor

Jl. M. H. Thamrin No. 12,
Kelurahan Kebon Sirih,
Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI
Jakarta – 10340

CONTACTS

Phone: (021) 31927872

Email: mail@jamkrida-jakarta.co.id



Bunderan Patung Selamat Datang
Jakarta Pusat



Ikhtisar Kinerja

Performance Highlight



Ikhtisar Kinerja 2025

2025 Performance Overview



MODAL USAHA
Business Capital

Rp600 Miliar
Billion



**YANG DIJAMIN SAMPAI
AKHIR TAHUN 2025**
Increase in Business Capital

Rp5.214.433 UMKM
MSMEs



**REALISASI
PENJAMINAN KREDIT**
Realization of Credit
Guarantees

Rp31,85 Triliun
Trillion



**PEMBUKUAN LABA
BERSIH**
Net Profit for
the year

Rp16,00 Miliar
Billion



**PENERIMAAN IJP/IJK
SECARA KAS**
IJP/IJK Cash receipts

Rp420,21 Miliar
Billion



**PERSEROAN BERHASIL
MEMPEROLEH PENDAPATAN**
The Company's
Guaranteed Revenue

Rp450,43 Miliar
Billion

*per 31 Desember 2025 | as of 31 December 2025



**SKOR SELF
ASSESEMENT GCG**

GCG Self-Assessment
Score

94,54



**JUMLAH
PENGELOLAAN
INVESTASI**

Total Investment
Management

Rp1,12 Triliun
Trillion



**PENINGKATAN JUMLAH
KARYAWAN PERSEROAN**

Increase in the Company's
Total Employees

100% ↑
79 Karyawan
Employees



Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

Laporan Posisi Keuangan

Statement Of Financial Position

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah

Aset Asset	2025	2024	2023
ASET LANCAR CURRENT ASSETS			
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	85.553	102.618	97.169
Investasi Investment			
Deposito Time Deposit	100	129.610	55.750
Reksa dana Mutual Fund	200.770	84.772	39.709
Obligasi Bond	10.480	-	-
Simpanan berjangka Term Deposit	-	-	100
Piutang hasil investasi Investment Receivables	8.628	7.881	6.144
Piutang penjaminan ulang Re-Guarantee Receivables	50.042	16.536	30.637
Piutang penjaminan Bersama Joint Guarantee Receivables	38.857	8.853	6.291
Aset penjaminan ulang Re-Guarantee Assets	96.617	81.650	25.775
Pajak dibayar di muka Prepaid Tax	561	127	176
Biaya dibayar di muka dan uang muka jangka pendek Prepaid Expenses and Short-Term Advances	32.433	32.833	3.280
Jumlah Aset Lancar Total Current Asset	622.940	464.880	265.034
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS			
Investasi Investment			
Obligasi dimiliki hingga jatuh tempo Bonds held to maturity	619.324	614.241	459.722
Deposito yang dibatasi penggunaannya Restricted Deposits	104.000	83.000	63.000
Reksadana Mutual Funds	-	-	10.102
Biaya dibayar di muka dan uang muka jangka Panjang Prepaid Expenses and Long-Term Advances	146.011	124.412	12.614

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

Aset Asset	2025	2024	2023
Aset pajak tangguhan Deferred Tax Assets	3.835	3.611	1.426
Aset tetap – bersih Fixed Assets – net	3.121	669	424
Aset hak guna – bersih Right of Use Assets – net	2.121	758	1.432
Aset lain-lain bersih Other Assets – net	-	52	103
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	878.411	826.743	548.825
Jumlah Aset Total Assets	1.501.352	1.291.623	813.859
LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES			
Utang pajak Tax Payables	961	8.131	6.164
Utang penjaminan ulang Re-Guarantee Receivables	60.281	23.114	20.241
Utang penjaminan Bersama Co-Guarantee Payables	51.811	15.835	7.763
Utang sewa pembiayaan Lease Payables	560	567	647
Beban akrual Accrued Expenses	24.408	22.997	15.027
Cadangan klaim Claim Reserves	259.985	189.085	100.585
Pendapatan ditangguhkan Deferred Income	62.688	61.497	32.921
Liabilitas lain-lain dalam penyelesaian Other Liabilities in Progress	44.310	27.998	32.251
Jumlah liabilitas jangka pendek Total Current Liabilities	505.006	349.225	215.603
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES			
Utang sewa pembiayaan Lease Payables	1.549	202	850
Pendapatan ditangguhkan Deferred Income	345.608	302.514	177.966
Liabilitas imbalan kerja jangka Panjang Long-Term Employee Benefits Liabilities	1.999	1.588	1.069
Jumlah liabilitas jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	349.156	304.304	179.886
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	854.163	653.529	395.490

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

	EKUITAS EQUITY	2025	2024	2023
Modal Saham Capital Stock		600.000	600.000	400.000
Komponen ekuitas lainnya Other Equity Components		5.425	1.201	721.156
Saldo laba Retained Earnings				
Ditentukan penggunaannya Appropriated		27.365	10.923	18.110
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated		14.399	25.969	(462)
Jumlah Ekuitas Total Equity		647.189	638.094	418.369
	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	1.501.352	1.291.624	813.859

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Report On Profit Loss And Other Comprehensive Income

Dalam Jutaan Rupiah

In Million Rupiah

	Pendapatan Penjaminan Guarantee Revenues	2025	2024	2023
Imbal jasa penjaminan/Kafalah Guarantee Services Compensation/Kafalah		374.180	324.906	289.992
Pendapatan penjaminan lainnya Other Guarantee Revenues		21.276	24.112	26.902
Jumlah Pendapatan Penjaminan Total Guarantee Revenues		396.086	349.018	316.895

	Beban Penjaminan Guarantee Expenses	2025	2024	2023
Beban klaim Claim Expenses		(150.827)	(124.012)	(100.950)
Beban penjaminan ulang Re-Guarantee Expenses		(160.299)	(137.369)	(131.441)
Beban fee-based income Fee-Based Income Expenses		(17.711)	(16.062)	(14.539)
Kenaikan (penurunan) estimasi klaim Increase (Decrease) in Estimated Claims		(55.972)	(32.624)	(43.025)
Beban restitusi Restitution Expenses		(271)	(1.276)	(874)
Jumlah Beban Penjaminan Total Guarantee Expenses		(385.081)	(311.343)	(290.831)

Ikhtisar Keuangan

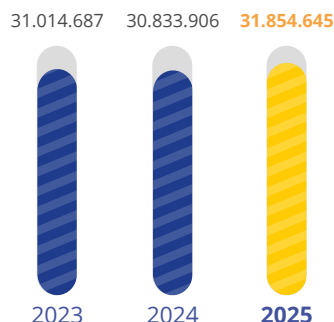
Financial Highlights

Pendapatan Investasi Investment Income	2025	2024	2023
Pendapatan Investasi Investment Income	54.342	49.251	34.034
Beban Usaha Operating Expenses	2025	2024	2023
Beban sumber daya manusia Personnel Expenses	(25.424)	(24.539)	(18.764)
Beban operasional Operating Expenses	(7.572)	(4.841)	(5.062)
Beban cadangan kerugian penurunan diri Allowance for Impairment Losses	(543)	(14.243)	(4.884)
Beban administrasi dan umum General and Administrative Expenses	(6.446)	(7.972)	(4.725)
Beban sistem, teknologi dan pengembangan usaha System, Technology and Operating Development Expenses	(881)	(698)	(832)
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	(40.867)	(52.294)	(34.269)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	2025	2024	2023
Lain-lain, bersih Others, net	(407)	(1.273)	(686)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	2025	2024	2023
Pajak kini Current Tax	(8.250)	(8.033)	(5.907)
Pajak tangguhan Deferred Tax	177	2.079	1.053
Laba (rugi) tahun berjalan Current Year Profit (Loss)	16.000	27.403	19.460
Penghasilan komprehensif lain Other Comprehensive Income	4.056	724	724
Laba (rugi) Komprehensif Comprehensive Income (Loss)	20.056	28.127	19.535
Uraian Description	2025	2024	2023
Kredit Penjaminan Credit Guarantee	31.854.645	30.833.906	31.014.687
Jumlah UMKMK Total MSMECOS	5.214.433	5.114.149	5.487.429
Jumlah Tenaga Kerja Total Work Force	7.842.713	6.198.703	5.656.934

Kredit Penjaminan

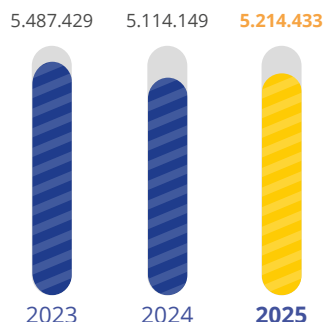
Credit Guarantee

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah



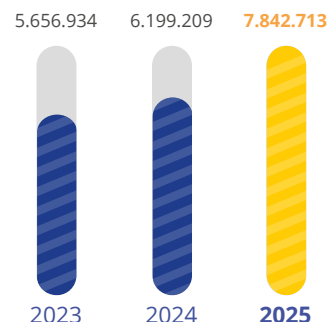
Jumlah UMKMK

Total MSMECOs



Jumlah Tenaga Kerja

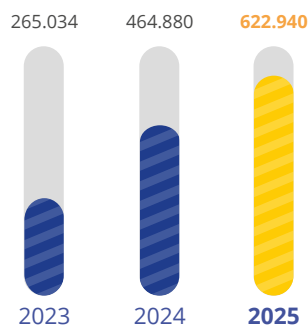
Total Work Force



Jumlah Aset Lancar

Total Current Assets

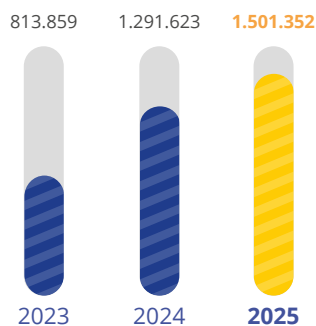
dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah



Jumlah Asset

Total Assets

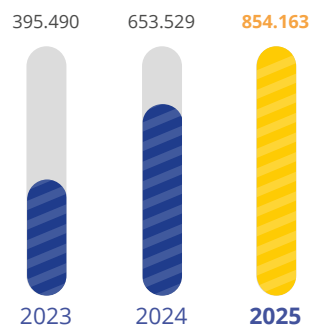
dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah



Jumlah Liabilitas

Total Liabilities

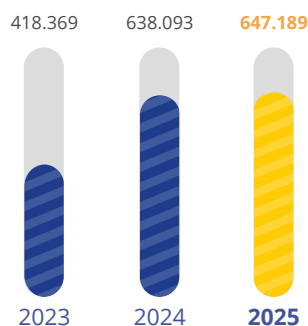
dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah



Jumlah Ekuitas

Total Equity

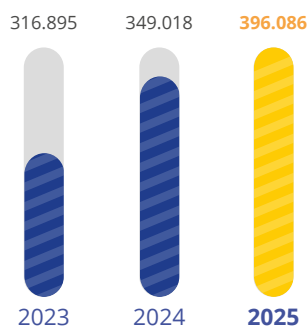
dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah



Jumlah Pendapatan Penjaminan

Total Guarantee Expenses

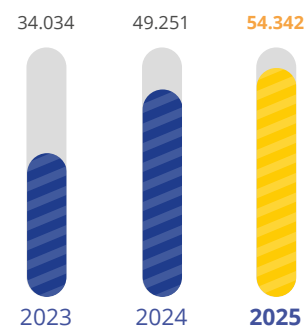
dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah



Pendapatan Investasi

Investment Income

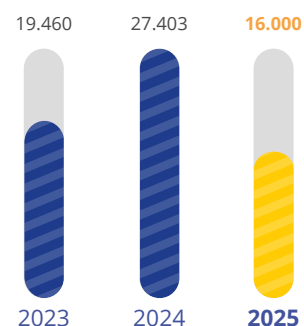
dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah



Laba (rugi) tahun berjalan

Current Year Profit (Loss)

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah



Indikator Kinerja Utama

Key Performance Indicators

Pada awal tahun, Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta dengan Direksi Jamkrida Jakarta telah bersama-sama menetapkan Kontrak Kinerja Tahun 2025. Per 31 Desember 2025, realisasi Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*/"KPI") tersebut adalah sebagai berikut:

At the beginning of the year, Head of the DKI Jakarta Province's BUMD Development Agency and the Board of Directors of Jamkrida Jakarta have jointly established the 2025 Performance Contract. As of 31 December 2025, realization of the Key Performance Indicators ("KPI") is as follows:

No	Sasaran Strategis Strategic Target	Target 2025 2025 Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Realisasi Realization	Bobot Weight	Realisasi Bobot Weight Realization	Total Bobot Total Weight
Perspektif Finansial Financial Perspective							
1	Meningkatkan profitabilitas usaha Increase business profitability	31,28	16,00	51,15%	10%	5,12%	23,26%
2	Meningkatkan efisiensi biaya Increase cost efficiency	52,00%	49,00%	106,12%	5%	5,31%	
3	Meningkatkan kemampuan Perusahaan menghasilkan laba Improve Company's capability to generate profits	4,67%	2,47%	52,94%	5%	2,65%	
4	Meningkatkan Kapasitas Penjaminan Increase Guarantee Capacity	24,66	22,36	110,29%	5%	5,51%	
5	Meningkatkan Pendapatan Increase Revenue	14,00%	13,10%	93,55%	5%	4,68%	
Perspektif Pelanggan Customer Perspective							
1	Meningkatkan portofolio penjaminan kredit Increase credit guarantee portfolio	5,95%	2,00%	33,60%	7,5%	2,52%	16,59%
2	Diversifikasi produk Penjaminan Diversification of guarantee products	5,67	3,78	66,67%	5,0%	3,33%	
3	Meningkatkan Portofolio Mitra Enhance Partner Portfolio	17,00%	11,87%	69,82%	7,5%	5,24%	
4	Meningkatkan kepuasan pelanggan Improve customer satisfaction	4,00	4,40	110,00%	5%	5,50%	

Indikator Kinerja Utama

Key Performance Indicators

No	Sasaran Strategis Strategic Target		Target 2025 2025 Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Realisasi Realization	Bobot Weight	Realisasi Bobot Weight Realization	Total Bobot Total Weight
Perspektif Internal Proses Bisnis								
Internal Business Process Perspective								
1	Dashboard Data Penjaminan, Klaim dan Subrogasi Claim and Subrogation, Guarantee Data Dashboard		100,00%	100,00%	100,00%	5%	5,00%	24,48%
2	Meningkatkan Kualitas Layanan (SLA) Klaim Improve Claim Service Quality (SLA)		100,00%	100,00%	100,00%	5%	5,00%	
3	Pengembangan Turunan Produk Penjaminan Derivative Development Guarantee Products		100,00%	100,00%	100,00%	5%	5,00%	
4	Memperkuat Keandalan Sistem GCG Strengthen the Reliability of the GCG System		79,00	80,00	101,27%	5%	5,06%	
5	Tindak Lanjut Penilaian Manajemen Resiko Follow-Up on Risk Management Assessments		68,00	60,00	88,24%	5%	4,41%	
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan								
Learning and Growth Perspective								
1	Membuat Sistem Core Finance Create a Core Finance System		100,00%	25,00%	25,00%	5%	1,25%	16,25%
2	Meningkatkan kapabilitas SDM Improve HR capability		25	25	100,00%	5%	5,00%	
3	Meningkatkan Budaya Perusahaan Improve Corporate Culture		100,00%	100,00%	100,00%	5%	5,00%	
4	Penilaian BUMD Sehat Healthy BUMD Assessment		Sehat	Sehat	100,00%	5%	5,00%	
							Total Skor Total Score	80,58%

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company Soundness Level

Jamkrida Jakarta secara konsisten melakukan evaluasi atas tingkat kesehatan Perusahaan guna memastikan kinerja yang dapat diandalkan. Pada tahun 2025, Hasil Perhitungan Penilaian Kesehatan Perusahaan sesuai surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) adalah sebagai berikut:

Jamkrida Jakarta consistently assess the Company's soundness level in order to ensure reliable performance. In the year 2025, Results of the Company's Soundness Assessment, in line with the circulation letter of the Financial Services Authority (SEOJK), are as follows:

No	Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	Hasil Result	Indikator Indicator
1	Rasio Likuiditas Liquidity Ratio	123,35%	2
2	Gearing Ratio Gearing Ratio	22,36	1
3	Rentabilitas Profitability		
a.	Rasio <i>Return on Asset</i> Return on Asset Ratio	1,71%	3
b	Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Operating Costs on Operational Income (BOPO)	91,33%	3
c.	Rasio Klaim Terhadap Pendapatan IJP Ratio of Claims on IJP Income	100,38%	5
4	Self-Assessment Self-Assessment	94,54	1
Total Skor Total Score			2,05 (Sehat)

Penghargaan Tahun 2025

Awards in 2025



TOP GRC Award 2025
TOP GRC Award 2025

**Mitra Pemerintah Daerah Pendukung Penjaminan
Usaha Mikro Terbaik Anugerah Mitra Usaha Mikro
2025**

Best Local Government Partner Supporting Micro
Business Guarantee 2025 Micro Business Partner Award



Patung Tani
Jakarta Pusat

Peristiwa Penting Tahun 2025

Significant Events in 2025

17 JANUARI January



Town Hall Meeting PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)

Town Hall Meeting of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)

21 JANUARI January



Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerjasama di Bidang Perdata dan Tata Usaha di kantor Kejaksaan Tinggi DKI

Signing of Memorandum of Understanding for Cooperation in Civil and Administrative Fields at the DKI High Prosecutor's Office

04 FEBRUARI February



Seminar Pengelolaan Kegiatan dan mitigasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog Digitalisasi

Seminar on the Management of Activities and Mitigation of the Implementation of Goods and Services Procurement through E-Catalog Digitalization

06 MARET March



FGD Program Pembiayaan & Penjaminan Omah Wong Sekeng, bersama Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah di Hotel Borobudur Jakarta

FGD Program on the Financing & Guarantee of Omah Wong Sekeng, jointly with Commission C of the Central Java Province Regional People's Representative Assembly (DPRD) at Borobudur Jakarta Hotel

Peristiwa Penting Tahun 2025

Significant Events in 2025

13 MARET March



Audiensi Dengan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

In audience with the Deputy Governor of DKI Jakarta Province

14 MARET March



Tasyakuran Kantor Baru PT Jamkrida Jakarta

The Opening of PT Jamkrida Jakarta New Office

19 MARET March



Kunjungan Kerja dari PT Jamkrida Sumatera Selatan

Working Visit by PT Jamkrida South Sumatera

21 MARET March



Kunjungan Kerja Bank Delta Artha (Perseroda)

Working Visit by Delta Artha Bank (Perseroda)

Peristiwa Penting Tahun 2025

Significant Events in 2025

24 MARET March



Penandatanganan PKS KUH antara PT Jamkrida Jakarta dengan KB Bukopin

The Signing of PKS KUH (KUH? Cooperation Agreement ?) between PT Jamkrida Jakarta with KB Bukopin

27 MARET March



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Jamkrida Jakarta

The Annual General Meeting of Shareholders (RUPST) of PT Jamkrida Jakarta

10 MEI May



PKS dengan PT MPM Insurance Broker tentang Pengelolaan Program Penjaminan

PKS (Cooperation Agreement) with PT MPM Insurance Broker on the Management of Guarantee Program

23 MEI May



Entry Meeting Audit Surveillance ISO 37001 2016

Entry Meeting on ISO 37001 20226 Audit Surveillance

Peristiwa Penting Tahun 2025

Significant Events in 2025

03 JUNI June



Penandatanganan PKS dengan PT Jasa Advisindo Sejahtera tentang Pengelolaan Asuransi Jiwa Kredit

The Signing of PKS (Cooperation Agreement) with PT Jasa Advisindo Sejahtera on the Management of Credit Life Insurance

13 JUNI June



Employee Gathering PT Jamkrida Jakarta

Employee Gathering of PT Jamkrida Jakarta

14 JULI July



Forum Pengawasan Produk Hukum Daerah Oleh DPRD Komisi C

Forum on the Monitoring of Regional Legal Product by DPRD Commission C

15 JULI July



Audiensi Produk Surety Bond bersama Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara dan Kontraktor

In Audience with the North Jakarta Public Works Sub-Department on Surety Bond Products

Peristiwa Penting Tahun 2025

Significant Events in 2025

20 AGUSTUS August



Launching sistem Penjaminan Digital dan Penandatanganan PKS dengan PT Solusi Penjaminan Aman

Launching of Digital Guarantee System and PKS (Cooperation Agreement) signing with PT Solusi Penjaminan Aman

04 SEPTEMBER September



Audiensi dengan Jajaran dibawah naungan Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik DKI Jakarta tentang Penjaminan Pengadaan Barang dan ayau Jasa *Surety Bond* PT Jamkrida Jakarta

In Audience with officials under the auspices of the DKI Jakarta Communication, Informatics and Statistics Agency regarding the Guarantee of the Procurement of Surety Bond Goods and/or Services of PT Jamkrida Jakarta

08 SEPTEMBER September



Menerima Penghargaan TOP GRC AWARDS 2025

Accepting the 2025 TOP GRC AWARDS

16 SEPTEMBER September



Kunjungan Kerja dari PT Jamkrida Sumatera Selatan

Working Visit by PT Jamkrida South Sumatera

Peristiwa Penting Tahun 2025

Significant Events in 2025

16 SEPTEMBER September



Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Socialization on the Procurement of Goods and Services within the DKI Jakarta Provincial Government

26 SEPTEMBER September



Audiensi dengan PT Transjakarta terkait produk Surety Bond PT Jamkrida Jakarta

In Audience with PT Transjakarta with regard to Surety Bond products of PT Jamkrida Jakarta

14 OKTOBER October



Kunjungan Kerja dari PT Jamkrida Kalimantan Selatan perihal pengelolaan klaim dan subrogasi di PT Jamkrida Jakarta

Working Visit by Jamkrida of South Kalimantan regarding the management of claims and subrogation at PT Jamkrida Jakarta

22 OKTOBER October



Audiensi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta tentang Penjaminan Pengadaan Barang dan Jasa Surety Bond PT Jamkrida Jakarta melalui Platform E-Guarantee

In Audience with the Department of Public Housing and Settlement Areas of DKI Jakarta Province regarding the Guarantee of Surety Bond Goods and Services of PT Jamkrida Jakarta through the E-Guarantee Platform

Peristiwa Penting Tahun 2025

Significant Events in 2025

23 OKTOBER October



Acara silaturahmi & Koordinasi Agen PT Jamkrida Jakarta
Agent Gathering and Coordination Event of PT Jamkrida Jakarta

29 OKTOBER October



Podcast Rabu Belajar episode 207 tentang “Peran PT Jamkrida Jakarta dalam mengembangkan UMKM”
Study Wednesday Podcast Episode 207 on “The Role of Jamkrida Jakarta in MSME Development”

31 OKTOBER October



Kunjungan Kerja PT Jamkrida Sumatera Barat
Working Visit by PT Jamkrida West Sumatera

31 OKTOBER October



Penandatanganan Treaty Renewal 2025 dengan FLRe dan BOARe

The Signing of the 2025 Treaty Renewal with FLRe and BOARe

Peristiwa Penting Tahun 2025

Significant Events in 2025

05 NOVEMBER November



Santunan Panti Asuhan Muhammadiyah Tanah Abang dan Yayasan Amal Sejahtera

Donation to the Muhammadiyah Tanah Abang Orphanage and the Sejahtera Charity Foundation

10 NOVEMBER November



HUT PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)

The Anniversary of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)

09 DESEMBER December



Audiensi dengan Jajaran Dibawah Naungan Walikota Jakarta Barat tentang Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Surety Bond PT Jamkrida Jakarta melalui Platform E-Guarantee.

In Audience with the Officials under the auspices of the West Jakarta Mayor Office regarding the the Guarantee of Surety Bond Goods and Services of PT Jamkrida Jakarta through the E-Guarantee Platform

16 DESEMBER December



Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Produk Surety Bond dan Kontra Bank Garansi dalam Acara Vendor Gathering PT Transjakarta

Socialization on the Procurement of Surety Bond Goods and Services and the Contra Bank Guarantee of PT Transjakarta

Peristiwa Penting Tahun 2025

Significant Events in 2025

17 DESEMBER December



Pemprov DKI Jakarta melalui BPBUMD DKI Jakarta bersama PT Jamkrida Jakarta meraih prestasi dalam kategori Mitra Pemerintah Daerah Pendukung Penjaminan Usaha Mikro Terbaik Anugerah Mitra Usaha Mikro 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian UMKM RI

The Provincial Government of DKI Jakarta, through the BPBUMD of DKI Jakarta and PT Jamkrida Jakarta, received the award in the category of Best Regional Government Partner Supporting Micro Business Guarantees at the 2025 Micro Business Partner Award held by the Ministry of MSMEs of the Republic of Indonesia

19 DESEMBER December



RUPSLB PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) dengan agenda Pengesahan RKA Tahun 2026

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) with the agenda on the Ratification of the 2026 Work Plan And Budget



Tugu Monumen Nasional
Jakarta Pusat



Laporan **Manajemen**

Management Reports



Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report



**Andrianto
Wahyu Adi**

Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioner Report



Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menunjukkan kepemimpinan yang solid dan adaptif dalam menghadapi dinamika ekonomi dan industri sepanjang tahun 2025. Strategi yang dijalankan mampu menjaga stabilitas pertumbuhan secara beriringan dengan upaya mendorong transformasi digital dan inovasi penjaminan yang efektif. Penerapan tata kelola yang konsisten, efisiensi yang meningkat, serta pengelolaan risiko yang disiplin menjadi fondasi bagi pencapaian kinerja positif Perseroan tahun ini.

the Board of Commissioners appraised that the Board of Directors have shown solid and adaptive leadership in facing the dynamics of the economy and industry throughout the year 2025. Strategies implemented were able to maintain growth stability simultaneously with efforts that encourage effective digital transformation and guarantee innovation. Implementation of consistent governance, increasing efficiency as well as disciplined risk management became the foundation for the Company's positive performance achievement in 2025

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, PT JAMKRIDA Jakarta dapat melalui tahun 2025 dengan baik serta mencatat sejumlah pencapaian yang memperkuat fondasi usaha Perseroan. Dengan penuh rasa hormat, kami Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan, kepercayaan, dan kerja sama yang terjalin sepanjang tahun ini.

Kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Insan JAMKRIDA Jakarta atas dedikasi dan komitmennya dalam menjaga kualitas layanan dan konsistensi kinerja. Upaya kolektif tersebut menjadi modal berharga bagi Perseroan dalam memperkuat perannya sebagai lembaga penjaminan milik daerah yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM) di Provinsi DKI Jakarta.

Sejalan dengan amanat yang diemban, Dewan Komisaris tetap berkomitmen untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Kami senantiasa memelihara komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan Direksi dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan penerapan tata kelola yang baik dan keberlanjutan arah strategi Perseroan.

Distinguished Shareholders and Stakeholders,

We also present our highest acknowledgement to all personnel of JAMKRIDA Jakarta for their dedication and commitment in maintaining our quality of service and consistency in our performance. Such collective effort has become a valuable capital for the Company in strengthening its role as a regional-owned guarantee institution that supports the development of the Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSMECO) in the Province of DKI Jakarta.

In line with our mandate, the Board of Commissioners remains committed to carrying out its supervisory function and provide advice with full integrity and accountability. We continuously maintain open and constructive communication with the Board of Directors and all stakeholders in order to ensure the implementation of good corporate governance and sustainability of the Company's strategic direction.

Through this Annual Report, the Board of Commissioners conveys its review of the performance of the Board of Directors, the effectiveness of governance implementation, as well as the Company's progress throughout the fiscal year of 2025. We hope that this Report provides a comprehensive illustration of how development, challenges, and strategic steps undertaken by the Company during the year, as well as the projections set for the coming year.

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioner Report

Melalui Laporan Tahunan ini, Dewan Komisaris menyampaikan penilaian atas kinerja Direksi, efektivitas pelaksanaan tata kelola, serta perkembangan Perseroan sepanjang tahun buku 2025. Kami berharap Laporan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kemajuan, tantangan, langkah strategis yang telah ditempuh Perseroan selama tahun berjalan, dan proyeksi untuk tahun mendatang.

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI DIREKSI

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya dari tahap yang paling strategis, yaitu memastikan bahwa perumusan strategi oleh Direksi disusun berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kondisi makroekonomi, perkembangan industri penjaminan, karakter segmen UMKMK, serta mandat Perseroan sebagai lembaga penjaminan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kerangka ini, Dewan Komisaris menilai keselarasan antara visi jangka panjang, arah kebijakan, dan kesiapan alternatif strategi untuk menghadapi berbagai skenario ekonomi agar Perseroan tetap berada pada jalur pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dalam memastikan proses perumusan strategi berjalan secara *prudent* dan terstruktur, Dewan Komisaris menerapkan sejumlah mekanisme pengawasan yang mencakup koordinasi rutin dengan Direksi untuk membahas arah kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang, telaah atas dokumen strategis seperti RKAP, RJPP, kebijakan risiko, dan kebijakan keuangan, serta keterlibatan aktif dalam komite-komite di bawah Dewan Komisaris, khususnya Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Selain itu, *reviu berkala* terhadap pencapaian KPI menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas implementasi strategi serta memastikan keselarasan antara sasaran korporasi dan pelaksanaannya di seluruh organisasi.

Pada tahap implementasi, Dewan Komisaris memantau konsistensi pelaksanaan strategi melalui penilaian terhadap efektivitas mekanisme pengendalian, capaian operasional, serta keselarasan antara kebijakan dan eksekusi di lapangan. Fokus pengawasan diarahkan pada proses inti penjaminan yang mencakup penilaian kelayakan, persetujuan penjaminan, dan pemantauan kualitas portofolio sebagai langkah menjaga prinsip kehati-hatian dan mengendalikan risiko kredit. Pemantauan ini diperkuat melalui laporan bulanan dan triwulanan dari Direksi,

In gratitude to the presence of God Almighty for the abundance of His grace and blessings bestowed upon us, PT JAMKRIDA Jakarta soundly passed through the year 2025 with a number of achievements that strengthened the Company's business foundation. With due respect, we, the Board of Commissioners, hereby extend our appreciation to all stakeholders for the support, trust, and cooperation we have established thus far.

BOARD OF COMMISSIONERS' SUPERVISION ON STRATEGY FORMULATION AND IMPLEMENTATION BY THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners carries out its supervisory function from the most strategic stage, namely to ensure that strategy formulation by the Board of Directors is set based on a comprehensive analysis on macroeconomic conditions, development of the guarantee industry, characteristics of the MSMECO sector, as well as the mandate of the Company as the DKI Jakarta Provincial government-owned guarantee institution. In this framework, the Board of Commissioners assesses the alignment between long-term vision, policy direction, and readiness of alternative strategies to face various economic scenarios so that the Company remains on a sustainable growth path.

In ensuring a prudent and structured process of formulating the strategies, the Board of Commissioners applies a number of supervisory mechanisms that include routine coordination with the Board of Directors to discuss the direction of short, medium and long-term policies, analysis of strategic documents such as Company Work Plan and Budget (RKAP), Company Long-Term Plan (RJPP), risk policies, and financial policies, as well as active involvement in committees under the Board of Commissioners, especially the Audit Committee and Risk Monitoring Committee. In addition, periodic reviews on Key Performance Indicator (KPI) achievements have become important instruments to assess the effectiveness of strategy implementation as well as to ensure alignment between corporate targets and their implementation throughout the organization.

At the implementation stage, the Board of Commissioners monitors the consistency of strategy implementation through assessment on the effectiveness of control mechanism, operational achievement, as well as the alignment between policies and execution in the field. The focus of its supervision is directed towards the main process of guarantee that includes feasibility assessment, guarantee approval, and monitoring of portfolio quality as a step to maintain the precautionary principle and credit risk control. This monitoring is reinforced

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioner Report

monitoring progres tindak lanjut keputusan rapat melalui *Gantt Chart* yang diperbarui oleh seluruh divisi, serta pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi untuk mengevaluasi hambatan implementasi strategi. Selain itu, Dewan Komisaris mengandalkan hasil audit internal dan kajian SPI untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan selaras dengan SOP dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan.

Sepanjang tahun 2025, bentuk pengawasan Dewan Komisaris diintegrasikan melalui forum rapat gabungan berkala, penyampaian pemaparan isu strategis, serta pemberian nasihat dan rekomendasi atas rencana bisnis yang akan ditetapkan atau disempurnakan. Rekomendasi Dewan Komisaris menjadi bagian integral dalam proses pengambilan keputusan strategis, yang kemudian diterjemahkan ke dalam target kinerja, perencanaan operasional, program kerja, dan indikator pencapaiannya. Rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi sepanjang tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Memperkuat kolaborasi dengan perbankan dan lembaga keuangan untuk perluasan market share.
2. Meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi layanan *Artificial Intelligence Interface* CAC untuk nasabah terpilih, otomatisasi proses akuntansi, guna meningkatkan daya saing.
3. Melakukan peningkatan kompetensi SDM pada aspek risiko, produk seperti *Letter of Credit*, dan digital.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi pencapaian Perseroan. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dengan mencakup kondisi makroekonomi, dinamika industri penjaminan dan perkembangan sektor UMKMK, serta efektivitas implementasi strategi yang telah ditetapkan. Evaluasi ini menjadi dasar bagi Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa arah pengelolaan Perseroan tetap sejalan dengan mandat dan tujuan jangka panjang yang diemban.

Kinerja Direksi sepanjang tahun 2025 tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi global dan domestik yang terus berkembang. Dewan Komisaris mencermati bahwa kondisi ekonomi global masih menghadapi tantangan yang signifikan.

through monthly and quarterly reports from the Board of Directors, progress monitoring of meeting decision follow-ups through *Gantt Chart* updated by all divisions, as well as the implementation of joint-meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors to evaluate on obstacles in strategy implementation. Apart from that, the Board of Commissioners relies on results of internal audits and SPI reviews to assure that policy implementation runs in line with SOP and applied risk management framework.

Throughout the year 2025, the form of supervision of the Board of Commissioners was integrated through the periodic joint-meeting forums, presentation of strategic issues, as well as provision of advices and recommendations on business plan to be established or refined. Recommendations of the Board of Commissioners becomes an integral part of strategic decision-making process, which then translated into performance targets, operating plans, work programs, and achievement indicators. Recommendations provided by the Board of Commissioners to the Board of Directors during the year 2025, among others, are as follows:

1. Strengthening collaboration with banks and financial institutions to expand market share.
2. Improve operational efficiency through digitalization of CAC *Artificial Intelligence Interface* services to selective customers, accounting process automation, in order to enhance competitiveness.
3. Improve HR competencies in such aspects as risk, product (i.e. *Letter of Credit*), and digital.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BASIS OF ASSESSMENT

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners periodically evaluates the performance of the Board of Directors with consideration of various factors that influence the Company's achievements. Assessment is done comprehensively covering macroeconomic condition, guarantee industry dynamics and MSMECO sector's development, as well as the effectiveness of the set strategy implementation. This assessment becomes the basis for the Board of Commissioners to ensure that the direction of the Company's management remains in line with the mandate and long-term goal it carries.

The performance of the Board of Directors throughout the year 2025 was not apart from the effects of the continuously developing global and domestic economic conditions. The Board of Commissioners learned that the global economy

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioner Report

Dinamika geopolitik seperti perang tarif dan konflik di beberapa kawasan, serta perlambatan ekonomi di dua negara dengan PDB terbesar, memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi global. *International Monetary Fund* (IMF) dalam *World Economic Outlook* (WEO) edisi Oktober 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mencapai 3,2% pada tahun ini, turun dari 3,3% pada 2024.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) menilai prospek ekonomi domestik tetap solid, dengan rentang proyeksi pertumbuhan 2025 di kisaran 4,6%-5,1% sebagaimana disampaikan oleh Gubernur BI pada September 2025, sementara Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2025 sebesar 5,04% *year-on-year* (YoY). Pertumbuhan pasar uang M2 dan kredit perbankan mengalami penurunan dibandingkan 2024. Kendati demikian, beberapa indikator seperti *Purchasing Managers' Index* dan *Consumer Confidence Index* tetap berada di zona ekspansi dan menunjukkan pemulihan pada Oktober 2025. Inflasi juga terjaga dalam kisaran target, mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia yang ditopang konsumsi domestik serta meningkatnya aktivitas sektor jasa dan industri pengolahan.

Bagi industri penjaminan, tahun 2025 ditandai dengan meningkatnya permintaan penjaminan kredit, baik dari sektor perbankan maupun lembaga keuangan non-bank, terutama untuk sektor UMKMK dan proyek-proyek strategis. Namun di sisi lain, NPL perbankan khususnya dari sektor UMKMK juga cenderung meningkat. Hal ini tercermin dari naiknya angka klaim ke Perseroan yang berasal dari nasabah utama. Dewan Komisaris terus memastikan bahwa kondisi tersebut dapat semakin mendorong JAMKRIDA Jakarta untuk terus tumbuh dengan menyeimbangkan portofolio penjaminan dan memperluas wilayah operasi sekaligus memperkuat perannya sebagai katalis pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam situasi ekonomi yang dinamis dan kompetisi industri yang semakin kompleks, Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah menunjukkan kemampuan adaptasi dan bijak dalam menetapkan keputusan strategis. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada pertumbuhan bisnis penjaminan yang konsisten pada sektor konvensional, syariah, *surety bond*, dan *customs bond* serta upaya terus menerus untuk memperdalam hubungan dan mengakuisisi nasabah baru. Selain itu, kinerja operasional juga menjadi semakin efisien seiring implementasi digitalisasi proses penjaminan dan

remained with significant challenges. Such geopolitical dynamics as tariff war and conflicts in several regions, as well as the economic slowdown in two countries with the biggest Gross Domestic Product, have rendered pressures on global economic stability. International Monetary Fund (IMF) in *World Economic Outlook* (WEO) of October 2025 edition indicated that global economic growth estimated to reach 3.2% in 2025, a decline from 3.3% in 2024.

On the other hand, Bank Indonesia (BI) assessed that domestic economic prospect remained solid, with growth projection range in 2025 around 4.6%-5.1% as stated by BI Governor in September 2025, meanwhile the Central Statistic Bureau (BPS) reported that Indonesia's economic growth in Quarter III-2025 was recorded at 5.04% year-on-year (yoy). M2 money market and banking credit dropped compared to the year 2024. Nevertheless, several indicators such as *Purchasing Managers' Index* and *Consumer Confidence Index* remained within the expansion zone and showed recovery in October 2025. Inflation was also maintained within target range which reflected Indonesia's economic resilience as supported by domestic consumption as well as increase in activities in the service and manufacturing industry sectors.

For the guarantee industry, the year 2025 was marked by an increase in demand for credit guarantee, both in banking sector as well as non-bank financial institutions, especially for the MSMECO sector and strategic projects. However, on the other hand, banking's NPL specifically in the MSMECO sector also tend to improve. This is reflected from the rising number of claims to the Company that originated from the main customers. The Board of Commissioners always ensure that such condition can increasingly drive JAMKRIDA Jakarta to keep growing by balancing its guarantee portfolio and expanding its operational areas while at the same time strengthen its role as the region's economic growth catalyst.

In such a dynamic economic situation and an increasingly competitive industry, the Board of Commissioners views that the Board of Directors has shown its adaptive and wise capabilities in applying its strategic decisions. As visible from the consistent growth of the guarantee business in the conventional, sharia, *surety bond* and *customs bond* sectors as well as the continuous effort to intensify relationships and acquire new customers. In addition, operational performance was also increasingly efficient in line with the implementation of digitalization in guarantee processing and improvement

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioner Report

peningkatan kualitas layanan. Seluruhnya bermuara pada rasio keuangan yang relatif sehat sebagaimana terlihat pada penguatan ekuitas dan perbaikan *gearing ratio*.

Secara keseluruhan, Perseroan mampu menjaga stabilitas kinerja di tengah tekanan eksternal, sekaligus mencatatkan kinerja yang baik. Dari sisi operasional, sepanjang tahun 2025 Perseroan merealisasikan penjaminan sebesar Rp31.8 triliun dengan jumlah UMKMK yang dijamin sebanyak 5.214.433 UMKMK dan tenaga kerja yang terserap sebanyak 7.842.713 tenaga kerja. Sementara itu, jumlah beban klaim per 31 Desember 2025 dibukukan sebesar Rp150.8 miliar, meningkat 115% dari tahun sebelumnya sebesar Rp131.2 miliar. Dari sisi rentabilitas, Direksi beserta jajaran manajemen lainnya juga telah menunjukkan kemampuannya dalam membukukan peningkatan laba bersih dari sebesar Rp27,40 miliar pada 2024 menjadi sebesar Rp16 miliar pada tahun 2025.

Dari aspek operasional, Dewan Komisaris menilai Direksi berhasil memulai implementasi penjaminan digital melalui *e-Guarantee* yang menjadi bagian strategis dari transformasi layanan Perseroan. Dewan Komisaris juga mencatat bahwa Direksi telah menyesuaikan strategi penjaminan untuk mengantisipasi dinamika kebijakan daerah dan penyesuaian program pemberdayaan UMKMK seiring pergantian kepemimpinan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyesuaian ini mencakup peningkatan koordinasi dengan lembaga keuangan mitra agar skema penjaminan tetap selaras dengan arah prioritas pembangunan daerah dan program pembiayaan UMKMK yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Dewan Komisaris menilai kesiapan Direksi dalam menghadapi peningkatan beban klaim pada 2025. Langkah-langkah penguatan proses manajemen risiko, peningkatan monitoring portofolio, dan pengelolaan klaim yang lebih disiplin dipandang tepat untuk menjaga kesehatan portofolio penjaminan.

Atas seluruh pencapaian tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menunjukkan kepemimpinan yang solid dan adaptif dalam menghadapi dinamika ekonomi dan industri sepanjang tahun 2025. Strategi yang dijalankan mampu menjaga stabilitas pertumbuhan secara beriringan dengan upaya mendorong transformasi digital dan inovasi penjaminan yang efektif. Penerapan tata kelola yang konsisten, efisiensi yang meningkat, serta pengelolaan risiko yang disiplin menjadi fondasi bagi pencapaian kinerja positif Perseroan

in service quality. Altogether all the above accomplishments sourced back to a relatively sound financial ratio as apparent in the strengthening of equity and improvement in gearing ratio.

Overall, the Company managed to maintain performance stability amidst external pressures, and at the same time recorded a satisfying performance. From operational point of view, throughout the year 2025, the Company actualized the amount of guarantee of Rp31,8 trillion with a total number of 5,214,433 guaranteed MSMECO and workforce absorbed at 7,842,713 manpower. Meanwhile, the total amount of claim borne reached Rp150,8 billion, an increase of 115% from previous year's Rp131,2 billion. From rentability aspect, the Board of Directors and its management team also demonstrated their capability to record an increase in net profit of Rp27.40 billion in 2024 to Rp16 billion in 2025.

From operational aspect, the Board of Commissioners assessed the Board of Directors as successful in starting to implement digital guarantee through *e-Guarantee* that became a strategic part in the Company's service transformation. The Board of Commissioners also noted that the Board of Directors made adjustments in the guarantee strategy to anticipate the dynamics of regional policies and adjustments in MSMECO's empowerment program as leadership in the DKI Jakarta Provincial Government changed. These adjustments include the improvement in coordination with partner financial institutions so that guarantee schemes remained in line with the direction of the regional development priorities and MSMECO financial program established by DKI Jakarta Provincial Government. Aside from that, the Board of Commissioners appraised the Board of Directors' preparedness in facing the increasing claim burden in 2025. Steps to strengthen risk management process, portfolio monitoring improvement, and a more disciplined claim management were regarded as appropriate to maintain soundness in guarantee portfolio.

With all of the abovementioned accomplishments, the Board of Commissioners appraised that the Board of Directors have shown solid and adaptive leadership in facing the dynamics of the economy and industry throughout the year 2025. Strategies implemented were able to maintain growth stability simultaneously with efforts that encourage effective digital transformation and guarantee innovation. Implementation of consistent governance, increasing efficiency as well as disciplined risk management became the foundation for the

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioner Report

tahun ini. Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah mengelola Perseroan dengan baik secara selaras dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta nilai keberlanjutan yang menjadi dasar strategi JAMKRIDA Jakarta.

Di samping catatan positif tersebut, Dewan Komisaris juga menilai bahwa terdapat sejumlah area strategis yang perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan kinerja di tahun-tahun mendatang. Direksi perlu mempercepat ekspansi bisnis, khususnya pada sektor penjaminan syariah, *customs bond*, dan *surety bond* yang memiliki peluang pertumbuhan tinggi. Keseimbangan portofolio juga perlu terus ditingkatkan melalui akuisisi nasabah sasaran baru serta pendalaman hubungan dengan mitra di luar nasabah utama, termasuk melalui perluasan kerja sama pada produk-produk baru. Penguatan manajemen risiko tetap menjadi prioritas, terutama dalam pengelolaan klaim dan *Own Risk* agar profitabilitas dan kesehatan keuangan Perseroan tetap terjaga. Selain itu, Dewan Komisaris menekankan pentingnya penyelesaian implementasi *core system* sesuai jadwal sebagai bagian dari modernisasi sistem inti Perseroan. Kepatuhan terhadap POJK 10/2024 dan POJK 11/2024 juga harus dipastikan melalui reviu internal yang menyeluruh sebelum batas implementasi penuh pada 6 November 2025.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Dalam pandangan Dewan Komisaris, strategi usaha yang disusun oleh Direksi harus dilihat dalam kerangka proyeksi perekonomian global dan nasional untuk tahun mendatang. Dari sisi global, IMF dalam *World Economic Outlook* edisi Oktober 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai 3,2% pada 2026. Meskipun terdapat potensi penurunan inflasi, Dewan Komisaris mencatat bahwa ketidakpastian tetap tinggi, terutama akibat kondisi pasar tenaga kerja global serta dampak dari volatilitas komoditas dan ketegangan geopolitik.

Di tingkat nasional, proyeksi dari Bank Indonesia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dapat mencapai sekitar 5,33%, dengan potensi hingga 5,4% jika pengeluaran fiskal dipercepat. Sementara itu, menurut analisis lembaga riset nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diperkirakan berada di kisaran 4,9% hingga 5,0%.

Company's positive performance achievement in 2025. Overall, the Board of Commissioners viewed that the Board of Directors has satisfactorily managed the Company in alignment with the principle of prudence, good corporate governance, and sustainability values as basis of JAMKRIDA Jakarta's strategy.

In addition to the above positive notes, the Board of Commissioners also assessed that there were several strategic areas that require strengthening to ensure performance sustainability in the years to come. The Board of Directors need to accelerate business expansion, specifically in such sectors as sharia guarantee, customs bond, and surety bond that bring high growth opportunity. Balance in portfolio must also be enhanced through the acquisition of new customer targets as well as intensification of relationships with partners outside of the main customers, including through the expansion of cooperation on new products. Strengthening of risk management remains as priority, especially in managing claims and Own Risk so that the Company's profitability and sound financial position can be maintained. Moreover, the Board of Commissioners stressed on the importance of completing the implementation of core system in accordance with the schedule as part the modernization of the Company's core system. Compliance with POJK 10/2024 and POJK 11/2024 must also be assured through thorough internal reviews prior to full implementation limitation on 6 November 2025.

VIEWS ON BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

In the Board of Commissioners' view, the business strategy prepared by the Board of Directors must be looked at from the framework of both global and national economic projections for the upcoming year. From the global aspect, IMF in the World Economic Outlook of October 2025 edition predicted that the world's economic growth will reach 3.2% in 2026. Although there could be a potential decline in inflation, the Board of Commissioners noted that uncertainty remains high, especially due to global workforce market condition and the impact from the volatility of commodities and geopolitical tensions.

At the national level, projections from Bank Indonesia stated that Indonesia's economic growth in 2026 can reach around 5.33% and potentially up to 5.4% if fiscal expenditure is accelerated. Meanwhile, according to analysis by the national research institution, Indonesia's economic growth in 2026 is estimated at around 4.9% to 5.0%.

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioner Report

Dari perspektif industri, Dewan Komisaris memandang bahwa arah penyaluran kredit UMKM pada tahun 2026 akan dipengaruhi oleh belanja pemerintah, pemulihan konsumsi domestik, serta penyesuaian kebijakan perbankan. Kebijakan pemerintah terkait program Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan ultra mikro juga akan berdampak langsung terhadap permintaan penjaminan, terutama bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan dukungan akses pembiayaan. Perluasan izin operasional nasional membuka peluang pertumbuhan bagi JAMKRIDA Jakarta, namun pembangunan kapasitas internal dan penguatan manajemen risiko menjadi syarat utama agar ekspansi tetap terkendali. Transformasi digital melalui *e-Guarantee* juga akan menjadi fondasi penting untuk peningkatan efisiensi operasional dan perluasan jangkauan layanan.

Untuk menjawab kebutuhan peningkatan kinerja pada tahun 2026, Dewan Komisaris memberikan sejumlah rekomendasi strategis. Perseroan perlu melakukan pengkinian dan penyesuaian SOP agar selaras dengan regulasi OJK terbaru, termasuk ketentuan dalam POJK Penjaminan dan POJK Manajemen Risiko. Dewan Komisaris juga mendorong pengembangan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat real-time dan terintegrasi dengan *core system*, sehingga proses pemantauan dan mitigasi risiko dapat dilakukan secara lebih cepat dan komprehensif. Penguatan budaya kepatuhan di seluruh jenjang organisasi dipandang penting untuk memastikan bahwa tata kelola berjalan secara konsisten. Di samping itu, *reviu berkala* atas SOP perlu dilakukan untuk menyesuaikan dinamika bisnis dan regulasi. Dewan Komisaris juga menekankan peningkatan kualitas komunikasi dan pelaporan dari Direksi kepada Dewan Komisaris agar proses monitoring dan pengambilan keputusan strategis dapat berlangsung secara lebih efektif.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan usaha dan peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris memastikan bahwa Perseroan telah mengimplementasikan GCG secara konsisten di seluruh lini kegiatan usaha. Penerapan GCG dilakukan tidak semata untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menuntun setiap keputusan bisnis agar tetap berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab.

From the industrial perspective, the Board of Commissioners views that the direction of MSME credit distribution in 2026 will be affected by the government's spending, domestic consumption recovery, as well as adjustments in banking policies. The government's policy related to the People's Business Credit (KUR) program and financing for the ultra-micro will also directly impact demand for guarantee, especially for the small-scale enterprises that require support for financing access. The expansion of national operational permits opens the opportunity for JAMKRIDA Jakarta's growth, however, development of the internal capacity and the strengthening of risk management are the main requirements for expansion to remain under control. Digital transformation through *e-Guarantee* will also become an important foundation for the improvement of operational efficiency and expansion of service reach.

To meet the needs for improving performance in the year 2026, the Board of Commissioners provided a number of strategic recommendations. The Company needs to update and adjust its SOP so as to align with the latest OJK regulations, including provisions in POJK Guarantee and POJK Risk Management. The Board of Commissioners also encourages the development of the risk management information system that is real-time and integrated with the core system, so that risk monitoring and mitigation process are carried out faster and comprehensively. Enhancing the compliance culture throughout all levels of the organization is regarded as important to ensure that governance is consistently carried out. In addition, periodic review of the SOP is necessary in order to adapt with business dynamics and prevailing regulations. The Board of Commissioners also emphasizes on quality improvement in communication and reporting from the Board of Directors to the Board of Commissioners so that monitoring and strategic decision-making processes are more effective.

VIEWS ON CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

In carrying out the supervisory function, the Board of Commissioners views that the application of Good Corporate Governance principles is the main foundation for business sustainability and enhancement of the stakeholders' trust. During the year 2025, the Board of Commissioners ensures that the Company has consistently implemented GCG throughout all lines of business activities. GCG implementation is executed not merely to comply with regulatory provisions, but also as a value system that guides all business decisions so as to maintain integrity, transparency, and accountability.

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioner Report

Dewan Komisaris secara aktif memberikan arahan terkait penguatan struktur dan proses tata kelola, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penjaminan, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Pengawasan dilaksanakan melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta melalui telaah atas laporan kepatuhan dan hasil audit internal. Seiring dengan transformasi digital yang dijalankan Perseroan, Dewan Komisaris memberikan perhatian khusus terhadap penguatan tata kelola teknologi informasi, termasuk keamanan data, pengelolaan risiko TI, dan kesiapan infrastruktur digital yang mendukung layanan *e-Guarantee*. Penguatan tata kelola TI menjadi penting untuk memastikan bahwa digitalisasi berlangsung secara aman, terkontrol, dan sesuai ketentuan.

Bagi Dewan Komisaris, pengawasan tidak hanya difokuskan pada pencapaian hasil, tetapi juga pada proses yang mengarah pada hasil tersebut. Setiap proses harus selaras dengan regulasi dan prosedur yang berlaku. JAMKRIDA Jakarta menunjukkan peningkatan progresif dalam kualitas penerapan GCG, yang tercermin dari semakin kuatnya mekanisme pengendalian, keterbukaan informasi, dan disiplin dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan praktik GCG guna menjaga standar tata kelola yang tinggi. Dewan Komisaris meyakini bahwa ketekunan dalam menjaga dan menyempurnakan penerapan tata kelola merupakan bagian integral dari pertumbuhan dan kesuksesan JAMKRIDA Jakarta secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan berkelanjutan tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa terdapat beberapa aspek GCG yang perlu diperkuat untuk memastikan kesiapan Perseroan menghadapi tantangan industri yang berkembang. Penguatan *Enterprise Risk Management* menjadi prioritas, khususnya dalam memastikan proses identifikasi *emerging risks* dan portofolio berisiko dilakukan secara lebih terstruktur dan sistematis. Selain itu, penetapan *terms and conditions* penjaminan perlu semakin diseimbangkan antara tingkat risiko dan potensi imbal hasil, sehingga keputusan bisnis dapat diambil secara lebih *prudent*.

Dari sisi proses bisnis, Dewan Komisaris memandang perlunya penyempurnaan SOP yang mendukung operasional digital serta pengembangan infrastruktur keamanan data untuk memastikan integritas dan keandalan sistem. Pelaporan kinerja dan risiko juga perlu ditingkatkan agar tetap presisi dan tepat

The Board of Commissioners actively provides directives related to strengthening governance structure and process, specifically which relate to guarantee mechanism, risk management, and internal control. Supervision is carried out through joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as through reviews on governance report and results of internal audit. In line with digital transformation conducted by the Company, the Board of Commissioners pays special attention to enhancing information technology governance, including data security, IT risk management and the readiness of digital infrastructure that supports *e-Guarantee* services. Reinforcing IT governance becomes important to ensure that digitalization is executed safely, controlled, and in accordance with applicable provisions.

For the Board of Commissioners, supervision is not only focused on result oriented, but also on the process towards the results. Each process must be aligned with applicable regulations and procedures. JAMKRIDA Jakarta has shown progressive improvement in GCG implementation quality, which is reflected in the increasingly strong control mechanisms, information transparency, and discipline in applying precautionary principles. The Company is committed to continually improve GCG practices in order to maintain high standard governance. The Board of Commissioners is assured that diligence in maintaining and improving the implementation of governance is an integral part of the sustainable growth and success of JAMKRIDA Jakarta.

As part of the efforts to enhance such sustainability, the Board of Commissioners assessed that there are several aspects of GCG that require reinforcement to ensure the Company's preparedness to face the growing industry challenges. Strengthening *Enterprise Risk Management* has become a priority, specifically in ensuring that the process of identifying emerging risks and risky portfolio is carried out in a more structured and systematic manner. In addition, establishing the terms and conditions of guarantee needs to be even more balanced between the level of risk and potential return, so that business decisions can be taken with more prudence.

From the business process point of view, the Board of Commissioners regards the need for refining the SOP that supports digital operation as well as the development of data security infrastructure to ensure system integrity and reliability. Reporting of performance and risk must also be enhanced so

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioner Report

waktu sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih kuat. Di samping itu, Dewan Komisaris menilai bahwa penyempurnaan SOP bisnis terkait klaim, *underwriting*, manajemen operasional, serta mekanisme pengadaan barang dan jasa harus terus dilakukan secara berkala agar tetap sejalan dengan dinamika regulasi dan kebutuhan bisnis.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris mendapatkan dukungan penting dari Komite Audit. Komite ini berperan sebagai perpanjangan tangan Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan Perseroan, mulai dari tata kelola, pelaporan keuangan, hingga kepatuhan terhadap regulasi, dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab.

Dewan Komisaris juga mencermati kontribusi Komite yang menjadi semakin strategis di tengah transformasi digital dan perluasan izin operasional nasional yang memerlukan penguatan proses pengawasan. Melalui rapat yang diselenggarakan secara berkala, Komite Audit melakukan diskusi mendalam dengan Direksi, Unit Audit Internal, dan auditor eksternal untuk memastikan setiap temuan ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang konkret. Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman kerja dan regulasi yang berlaku.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2025 terjadi perubahan pada komposisi Dewan Komisaris seiring bergabungnya Bapak Iman Satria sebagaimana disahkan oleh Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 51 Tahun 2025 tanggal 24 Juli 2025. Bapak Iman Satria dinyatakan lolos *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 7 November 2025 dan ditetapkan dalam Akta Nomor 29 tanggal 24 November 2025. Dengan demikian, per 31 Desember 2025 jajaran Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris, yaitu:

- Komisaris Utama/Independen: Bapak Andrianto Wahyu Adi
- Komisaris: Bapak Iman Satria

that precision and on-time requirements are maintained that it becomes a stronger basis for decision-making. Apart from that, the Board of Commissioners views that refining the business SOP related to claims, underwriting, operation management, as well as procurement mechanism of goods and services must continue to be carried out periodically so that it remains in line with the dynamics of business regulations and needs.

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

In executing its supervisory function and in providing advice, the Board of Commissioners has the important support of the Audit Committee. This committee takes the role as the extension of the Board of Commissioners in ensuring that each aspect of the Company's management, starting from governance, financial reporting, to compliance with regulations, are carried out in transparent and accountable manner.

The Board of Commissioners also pay close attention to the Committee's increasingly strategic contribution in the midst of digital transformation and expansion of national operational permits that require the enhancement of supervision process. Through periodic meetings, the Audit Committee hold in-depth discussions with the Board of Directors, the Internal Audit Unit, and external auditor to assure that each finding is followed-up with concrete improvement step. During the year 2025, the Audit Committee has executed its duty and responsibility in accordance with applicable work guidelines and regulations.

CHANGE IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In the year 2025, a change in the composition of the Board of Commissioners was marked by the newly joined Iman Satria based on the Decree of the Shareholders No. 51 Year 2025 dated 24 July 2025. Iman Satria was declared to have passed the fit and proper test by the Financial Service Authority (OJK) on 7 November 2025 and stipulated under Deed No. 29 dated 24 November 2025. Thus, as of 31 December 2025 the Board of Commissioners consists of 1 (one) President Commissioner concurrently as Independent Commissioner and 1 (one) Commissioner, namely:

- *President Commissioner/Independent: Andrianto Wahyu Adi*
- *Commissioner: Iman Satria*

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioner Report

APRESIASI DAN PENUTUP

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi mendalam kepada Badan Pembina BUMD, jajaran Direksi, manajemen, dan seluruh karyawan atas dedikasi, integritas, serta kerja keras yang telah diaktualisasikan sepanjang tahun 2025. Dewan Komisaris juga berterima kasih kepada pihak Terjamin, mitra usaha, dan pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungan yang menjadi kekuatan bagi JAMKRIDA Jakarta dalam menjalankan perannya.

Semangat kolaborasi yang terbangun antara Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh insan JAMKRIDA Jakarta menjadi landasan penting dalam menjaga konsistensi arah dan keberlanjutan langkah Perseroan. Kami meyakini bahwa dengan sinergi yang solid, komitmen terhadap tata kelola yang baik, serta inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan, JAMKRIDA Jakarta akan mampu memberikan manfaat sekaligus dampak sosial yang nyata bagi kemajuan Indonesia.

APPRECIATION AND CLOSING

The Board of Commissioners extends its sincere appreciation to the BUMD Advisory Board, the Board of Directors, the management, and all of the employees for the dedication, integrity, and hard work performed throughout the year 2025. The Board of Commissioners also convey our gratitude to the Guaranteed parties, business partners, and other stakeholders for the trust and support that have become our source of strength for JAMKRIDA Jakarta to take on its role.

The spirit of collaboration built among the Board of Commissioners, the Board of Directors and all personnel of JAMKRIDA Jakarta has become an important foundation in maintaining the Company's consistent direction and sustainable steps. We believe that solid synergy, commitment to good governance, as well as sustainability-oriented innovation, JAMKRIDA Jakarta will be able to provide benefits and at the same time a real social impact for the advancement of Indonesia.

Atas Nama Dewan Komisaris
On Behalf of the Board of Commissioners



Andrianto Wahyu Adi
Komisaris Utama
President Commissioner



Andrianto Wahyu Adi

Komisaris Utama
President Commissioner

Iman Satria

Komisaris
Commissioner

Laporan Direksi

The Board of Director Report



Agus Supriadi

Direktur Utama
President Director

Laporan Direksi

Report of the Board of Director

Selama tahun 2025, Direksi mengambil langkah-langkah strategis yang disusun melalui evaluasi menyeluruh atas kondisi internal dan eksternal. Strategi tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan usaha, memperkuat kualitas portofolio, serta membuka ruang pertumbuhan yang lebih sehat ke depan.



During the year 2025, the Board of Directors took strategic steps prepared through comprehensive assessment of both internal and external conditions. The strategy was directed to maintain business continuity, strengthen portfolio quality, as well as open opportunity for more soundly growth in the future.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan kami,

Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya JAMKRIDA Jakarta mampu melalui tahun 2025 dengan ketahanan dan pembelajaran yang sangat berarti. Tahun ini merupakan tahun yang cukup menantang bagi industri penjaminan, namun dengan upaya kolektif seluruh Insan Perseroan, JAMKRIDA Jakarta tetap mampu menunjukkan kinerja operasional yang solid, menjaga keberlanjutan fungsi penjaminan, dan menyiapkan fondasi transformasi yang lebih kuat untuk tahun-tahun mendatang.

Praise to the presence of God Almighty for His grace and blessings, JAMKRIDA Jakarta was able to pass through the year 2025 with resilience and meaningful learning experience. The year was quite a challenging one for guarantee industry, however, with collective effort of all personnel of the Company, JAMKRIDA Jakarta remained capable of exhibiting solid operational performance, maintained sustainability of guarantee function, and prepared stronger transformation foundation for years to come.

Direksi berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil sepanjang tahun 2025 selaras dengan mandat Perseroan sebagai BUMD yang mendukung pemberdayaan UMKMK di Provinsi DKI Jakarta. Seluruh aktivitas usaha dijalankan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta dorongan perbaikan berkelanjutan, baik dalam aspek operasional, teknologi, maupun manajemen risiko.

The Board of Directors was fully committed to ensure that each strategic step undertaken during the year 2025 was in line with the Company's mandate as a BUMD that supports the empowerment of MSMECO in DKI Jakarta Province. All business activities were carried out with close attention to the principle of prudence, good governance, as well as to encourage sustainable improvement, both in the operational, technological and risk management aspects.

Melalui Laporan Tahunan ini, kami menyampaikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, tantangan, dan arah kebijakan yang ditempuh Perseroan sepanjang tahun 2025. Laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja keuangan dan operasional, serta sebagai gambaran langkah strategis JAMKRIDA Jakarta menuju pertumbuhan yang semakin sehat dan berkelanjutan.

Through this Annual Report, we present a comprehensive view of the conditions, challenges, and policy direction undertaken by the Company during the year 2025. We present this report as a form of our accountability for the financial and operational performance, as well as an illustration of JAMKRIDA Jakarta's strategic steps towards a more sound and sustainable growth

Laporan Direksi

Report of the Board of Director

PANDANGAN TERHADAP KONDISI MAKROEKONOMI DAN INDUSTRI

Tahun 2025 ditandai dengan kondisi ekonomi global yang masih sarat ketidakpastian. *International Monetary Fund* (IMF) melalui *World Economic Outlook* edisi Oktober 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini mencapai 3,2% (*year on year*). Meskipun hanya sedikit lebih rendah dari 2024 yang tercatat sebesar 3,3%, komposisi pertumbuhan menunjukkan perlambatan yang lebih dalam di negara maju yang masih dipengaruhi oleh suku bunga tinggi dan pelemahan konsumsi. Di sisi lain, ekonomi negara berkembang mulai menunjukkan pemulihan yang lebih merata, terutama didorong peningkatan investasi dan aktivitas perdagangan.

Berbagai indikator menunjukkan kebijakan tarif AS berdampak pada melambatnya ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi di negara maju yakni AS, Eropa, dan Jepang dalam tren menurun di tengah ditempuhnya kebijakan fiskal ekspansif dan pelonggaran kebijakan moneter di negara tersebut. Ekonomi Tiongkok pun melambat akibat menurunnya ekspor terutama ke AS di tengah perlambatan permintaan domestik, sedangkan ekonomi India diperkirakan tumbuh baik terutama didorong oleh masih kuatnya investasi.

Dari perspektif makroekonomi nasional, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 berada dalam kisaran 4,6-5,4%. Berbagai respons kebijakan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi permintaan domestik maupun eksternal. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil Pemerintah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh 5,04% secara tahunan pada kuartal III 2025. Pertumbuhan tersebut tercermin pada struktur PDB yang tetap tumbuh solid, terutama disumbang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi yang terus menguat, sekaligus memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi domestik berada pada jalur ekspansi yang stabil.

Perkembangan UMKM di Indonesia sepanjang tahun 2025 menunjukkan dinamika yang positif meskipun berada di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Kementerian Kominfo mencatat bahwa jumlah UMKM yang telah bertransformasi digital mencapai lebih dari 24,8 juta unit, meningkat dari 22,4 juta unit pada 2024. Peningkatan ini didorong oleh program UMKM Level Up yang semakin diperluas

VIEWS ON MACROECONOMIC AND INDUSTRIAL CONDITIONS

The year 2025 was marked by global economic conditions that remained full of uncertainties. The International Monetary Fund (IMF), through the *World Economic Outlook* of October 2025 edition, projected the global economic growth for the year would reach 3.2% (*year on year*). Although it was slightly lower than the 3.3% in 2024, the composition of growth indicated a deeper slowdown in developed countries was still affected by high interest rates and weakening consumption. On the other hand, the economy in developing countries began to show a more evenly distributed recovery, especially reinforced by the increase in investment and trade activities.

Various indicators show that US tariff policies have impacted the slowing-down of the world economy. Economic growth in developed countries such as the US, Europe and Japan were in declining trend in the midst of their expansionary fiscal policies and easing of monetary policies. China's economy as well slowed down due to the decline in its export especially to the US amidst diminishing domestic demand, while India's economy was projected to grow soundly especially encouraged by the continued sturdiness of investment.

From national macroeconomic perspective, Bank Indonesia projected economic growth in 2025 would stand within the range of 4.6-5.4%. Various policy responses continued to be reinforced in order to boost economic growth, both from both domestic and external demand aspects. Bank Indonesia also continued to strengthen the synergy to reinforce economic growth through building up the mix of monetary, macroprudential and payment system policies, with the Government's fiscal and real sector stimulus policies. Data at the Central Bureau of Statistics show that Indonesia's economy grew by 5.04% year on year in 3rd Quarter of 2025. This growth is reflected in the GDP which remained with solid growth, especially contributed by such sectors as manufacturing industry, trade, and transportation which continued to grow strong and altogether reflect that domestic economic activities were in a stable expansionary path.

MSME development in Indonesia throughout the year 2025 shows such positive dynamics despite global economic conditions that remained full of uncertainties. The Ministry of Communication and Information recorded that a number of MSME that have transformed digitally reached more than 24.8 million units, an increase from 22.4 million units in 2024. This increase was supported by the MSME Level Up program

Laporan Direksi

Report of the Board of Director

melalui pelatihan literasi digital, pendampingan intensif, dan integrasi UMKM ke berbagai platform perdagangan serta layanan pembayaran digital.

Di sisi pembiayaan, tahun 2025 diwarnai oleh penyesuaian kebijakan KUR, pengetatan seleksi kredit oleh perbankan, serta meningkatnya risiko pasca-berakhirnya restrukturisasi kredit. Kondisi ini menyebabkan penyaluran KUR secara nasional mengalami perlambatan dan berdampak pada penurunan volume penjaminan KUR, termasuk bagi JAMKRIDA Jakarta. Meskipun demikian, perbankan tetap mencatat pertumbuhan kredit UMKM sebesar 5-6% YoY, menandakan bahwa permintaan pembiayaan produktif tetap kuat di sektor perdagangan, jasa, dan usaha mikro berbasis digital.

Jumlah UMKM nasional pada tahun 2025 tercatat mencapai sekitar 66 juta unit, dengan DKI Jakarta yang merupakan episentrum aktivitas bisnis nasional, tetap menjadi salah satu provinsi dengan populasi UMKM terbesar, yaitu lebih dari 1,1 juta unit. Pertumbuhan UMKM di DKI Jakarta mencapai sekitar 15% YoY, didorong oleh ekspansi sektor kuliner, perdagangan, jasa kreatif, serta meningkatnya UMKM yang lahir dari ekosistem digital.

Tren ini membawa implikasi langsung bagi industri penjaminan. Di satu sisi, kebutuhan penjaminan meningkat seiring dengan ketatnya proses seleksi kredit oleh perbankan. Di sisi lain, meningkatnya risiko kredit UMKM pasca-berakhirnya stimulus restrukturisasi mendorong perlunya penguatan manajemen risiko, monitoring portofolio, serta mekanisme peringatan dini dalam pengelolaan risiko penjaminan.

PERAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Performa JAMKRIDA Jakarta tahun 2025 tentunya tidak terlepas dari lanskap ekonomi dan industri yang bergerak dengan sangat dinamis. Perubahan tersebut mendorong Direksi untuk memastikan bahwa setiap strategi dan proses bisnis dijalankan dengan fokus, disiplin, dan mempertimbangkan risiko secara menyeluruh.

Direksi telah menetapkan kebijakan strategis dan strategi usaha yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan sepanjang tahun 2025. Dalam proses perumusannya, Direksi memimpin penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan yang memuat arah kebijakan serta prioritas strategis yang menjadi dasar pelaksanaan operasional.

which continued to expand through training activities in digital literacy, intensive assistance, and MSME integration into various trade platforms as well as digital payment services.

On the financing side, the year 2025 was marked by People's Business Credit (KUR) policy adjustment, tightening of credit selection by banks, as well as the increased risk following the end of credit restructuring. Such a condition has caused KUR national distribution to slow down and a decline in KUR guarantee volume, including for JAMKRIDA Jakarta. Nevertheless, banking still recorded MSME credit growth of 5-6% YoY, indicating that demand for productive financing remained strong in the trade, service, and digital-based micro business sectors.

The number of national MSME in 2025 was recorded around 66 million units, with DKI Jakarta as the epicentrum of national business activities and remained as one of the provinces with the largest MSME population, namely more than 1.1 million units. MSME growth in DKI Jakarta reached around 15% YoY, heightened by the expansion of the culinary, trade and creative service sectors, as well as the increase in MSME that generated from the digital ecosystem.

This trend brought about direct implication for the guarantee industry. On the one hand, the need for guarantee increased with the tightening credit selection process by the banks. On the other hand, the increase in MSME credit risk following the end of restructuring stimulus supported the need for strengthening risk management, portfolio monitoring as well as early warning mechanism in guarantee risk management.

THE ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN STRATEGY FORMULATION AND IMPLEMENTATION

The performance of JAMKRIDA Jakarta in 2025 was surely connected to the very dynamic economic and industrial landscape. Such development has driven the Board of Directors to assure that each strategy and business process are implemented with focus, discipline, and consideration of the overall risks.

The Board of Directors established strategic policies and business strategies needed to support the Company's goal achievement in the year 2025. In the process of formulating, the Board of Directors led the preparation of the Company's Work Plan and Budget (RKA) containing the policy direction as well as strategic priorities as basis for operational implementation.

Laporan Direksi

Report of the Board of Director

Pada tahap implementasi, Direksi melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa strategi yang telah ditetapkan berjalan efektif, melalui telaah terhadap laporan kinerja yang disampaikan secara rutin serta pembahasan dalam berbagai rapat Direksi dan manajemen. Melalui rapat rutin mingguan, bulanan, dan triwulanan, Direksi mengevaluasi seluruh aspek operasional dan keuangan untuk memastikan fokus organisasi tetap selaras dengan target tahun berjalan serta tujuan jangka panjang Perseroan.

KEBIJAKAN STRATEGIS DAN IMPLEMENTASI STRATEGI DIREKSI

Selama tahun 2025, Direksi mengambil langkah-langkah strategis yang disusun melalui evaluasi menyeluruh atas kondisi internal dan eksternal. Strategi tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan usaha, memperkuat kualitas portofolio, serta membuka ruang pertumbuhan yang lebih sehat ke depan.

Tantangan utama Perseroan sepanjang tahun 2025 masih berkaitan dengan peningkatan rasio klaim. Tekanan ini tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan produksi penjaminan yang secara natural meningkatkan eksposur risiko, tetapi juga merupakan dampak lanjutan dari berakhirnya program restrukturisasi kredit pasca Covid-19. Sejalan dengan normalisasi kebijakan tersebut, kualitas kredit UMKM secara nasional mengalami penyesuaian, yang pada gilirannya meningkatkan probabilitas klaim pada skema penjaminan, termasuk yang dikelola JAMKRIDA Jakarta.

Tingginya klaim menyebabkan tekanan pada likuiditas, sehingga penguatan disiplin risiko menjadi prioritas Direksi pada tahun berjalan. Dalam struktur bisnis penjaminan, Perseroan menerapkan skema berbagi risiko (*interest sharing*) bersama perusahaan reasuransi, dengan proporsi 60% ditanggung JAMKRIDA Jakarta dan 40% ditanggung mitra reasuransi, termasuk dalam pembagian Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Mekanisme ini membantu menjaga ketahanan portofolio, namun tetap menuntut selektivitas yang tinggi dalam memilih produk penjaminan yang memberikan kualitas risiko terbaik.

Sebagai upaya mitigasi, Direksi memperketat kebijakan manajemen risiko melalui evaluasi ulang terhadap *risk appetite* dan penyesuaian struktur tarif. Untuk menjaga rasio klaim tetap terkendali, pemantauan portofolio dilakukan secara

At the implementation stage, the Board of Directors conducted assessment periodically to ensure that established strategies are effectively carried out, through analysis on performance reports presented regularly as well as discussions during various Board of Directors and management meetings. Through weekly, monthly and quarterly routine meetings, the Board of Directors evaluated all aspects of the operations and finance to make sure that the organization's focus remains in line with the Company's current annual targets and long-term goals.

STRATEGIC POLICIES AND STRATEGY IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

During the year 2025, the Board of Directors took strategic steps prepared through comprehensive assessment of both internal and external conditions. The strategy was directed to maintain business continuity, strengthen portfolio quality, as well as open opportunity for more soundly growth in the future.

A major challenge for the Company throughout the year 2025 was still related to the increase in claim ratio. Such a pressure was not only caused by the growth in guarantee production which naturally increased risk exposure, but also a continued impact of the end of the post-Covid 19 credit restructuring program. In line with the normalization of such policy, the MSME credit quality nation-wide experienced some adjustments, which in turn increased the probability of claims under guarantee schemes, including those managed by JAMKRIDA Jakarta.

The high level of claims has caused pressure on liquidity that strengthening risk discipline became the Board of Directors' priority during the current year. In the guarantee business structure, the Company applied the interest sharing scheme jointly with a reinsurance company, whereby 60% proportion was accounted for by JAMKRIDA Jakarta and 40% by a reinsurance company, including the distribution of Guarantee Service Fees (IJP). This mechanism helps maintain portfolio resilience, yet demanding high selectivity in choosing guarantee products that provide the best risk quality.

As an effort of mitigation, the Board of Directors tightened risk management policy through reassessment on risk appetite and tariff structure adjustments. To maintain claim ratio under control, portfolio monitoring was conducted in a more

Laporan Direksi

Report of the Board of Director

lebih sistematis, didukung oleh pengembangan mekanisme peringatan dini (*early warning system*) yang memungkinkan identifikasi risiko lebih cepat dan tindakan mitigasi yang lebih proaktif. Pendekatan ini memastikan bahwa pertumbuhan yang dicapai Perseroan tetap berada dalam batas risiko yang dapat dikelola secara sehat.

Transformasi digital juga menjadi fokus strategi utama tahun 2025 dimana Perseroan secara resmi meluncurkan Penjaminan Digital (*e-Guarantee*) sebagai langkah nyata transformasi digital BUMD penjaminan di Provinsi DKI Jakarta. Melalui Penjaminan Digital, JAMKRIDA Jakarta menghadirkan layanan penjaminan berbasis platform elektronik yang modern, efisien, transparan, dan aman. Tahap awal layanan ini difokuskan pada produk *Surety Bond* (jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan) sebelum diperluas ke produk penjaminan lainnya. Transformasi digital ini adalah wujud komitmen JAMKRIDA Jakarta dalam mendukung visi Jakarta sebagai kota global yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Dengan *e-Guarantee*, Perseroan dapat memberikan kepastian usaha, mempercepat proses penjaminan, serta memperluas akses pembiayaan, terutama bagi UMKM yang *feasible* namun belum sepenuhnya *bankable*.

Penjaminan Digital Perseroan bukan hanya inovasi, tetapi juga platform kolaborasi untuk memperkuat ekosistem penjaminan di Jakarta. Selaras dengan instruksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perseroan memperluas kerja sama penjaminan dengan SKPD dan BUMD, serta membuka peluang penjaminan pada sektor-sektor strategis yang mendukung pembangunan daerah. Di tengah tekanan klaim, Direksi mengedepankan pertumbuhan yang berkualitas dibanding pertumbuhan yang ekspansif namun berisiko tinggi.

Beberapa pembenahan mendasar terus disempurnakan, khususnya dalam lingkup Tata Kelola Perusahaan, penerapan prinsip Manajemen Risiko yang lebih menyeluruh, pemutakhiran *Standard Operating Procedure* (SOP), integrasi proses kerja dengan teknologi informasi, serta pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seluruh inisiatif tersebut diyakini menjadi fondasi penting bagi konsistensi pencapaian kinerja perusahaan dalam jangka panjang, sekaligus memastikan bahwa transformasi operasional berjalan searah dengan kebutuhan industri penjaminan yang semakin kompleks.

systematic manner, reinforced by an early warning mechanism system development that allowed faster risk identification and more proactive mitigation action. This approach ensured that growth reached by the Company remained within the risk limit that can be managed soundly.

Digital transformation was also a main strategy focus in 2025 where the Company officially launched e-Guarantee as an actual step in digital transformation for guarantee BUMD in DKI Jakarta Province. Through Digital Guarantee, JAMKRIDA Jakarta presented an electronic platform-based guarantee service that is modern, efficient, transparent, and safe. The initial stage of this service was focused on Surety Bond (implementation guarantee, downpayment guarantee, and maintenance guarantee) before it was expanded to other guarantee products. This digital transformation is the manifestation of JAMKRIDA Jakarta's commitment to supporting Jakarta's vision as an innovative and highly competitive global city. With e-Guarantee, the Company can provide business certainty, accelerate guarantee process, and expand financing access, especially for MSMEs that are feasible though not fully bankable.

The Company Digital Guarantee is not just an innovation, but also a collaboration platform to strengthen guarantee ecosystem in Jakarta. In line with the instruction of the Government of DKI Jakarta Province, the Company expanded its guarantee cooperation with SKPD and BUMD, as well as opened up guarantee opportunity to strategic sectors that support regional development. In the midst of claim pressures, the Board of Directors put forward growth of quality as compared to growth that is expansive yet with high risks.

Some fundamental improvements continued to be refined, specifically within the scope of Corporate Governance, implementation of a more thorough Risk Management principle, update on the Standard Operating Procedure (SOP), integration of the work process with information technology, as well as the fulfilment and improvement of human resource quality. All such initiatives are believed to be the important foundation for the consistency of the Company's achievement performance in the long run, and at the same time to ensure that operational transformation runs in the same direction with the needs of the increasingly complex guarantee industry.

Laporan Direksi

Report of the Board of Director

PERBANDINGAN ANTARA HASIL YANG DICAPAI DENGAN TARGET TAHUN 2025

Tahun 2025 menjadi tahun konsolidasi dan penyesuaian strategis bagi JAMKRIDA Jakarta. Tekanan klaim di industri penjaminan dan dinamika kebijakan pembiayaan berdampak pada kinerja keuangan, sehingga Perseroan mencatat beberapa target RKA yang belum tercapai.

Meskipun demikian, sejumlah pencapaian operasional menunjukkan tren positif dan menjadi dasar untuk pertumbuhan pada tahun-tahun berikutnya. Volume penjaminan tumbuh di sejumlah segmen strategis, hubungan kerja sama dengan lembaga keuangan semakin luas, dan pendapatan usaha non-KUR meningkat signifikan. Pendapatan investasi dan subrogasi juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Kinerja penjaminan Perseroan per 31 Desember 2025 dibukukan mencapai Rp31,85 triliun atau 93% dari target RKA 2025 sebesar Rp34,07 triliun dengan realisasi serapan UMKMK yang dijamin sebanyak 5.214.433 UMKMK dan tenaga kerja yang terserap sebanyak 7.842.713 tenaga kerja. Pendapatan IJP/IJK secara kas tercatat sebesar Rp420,21 miliar atau 109% dari target RKA 2025 sebesar Rp386,18 miliar. Pengakuan IJP/IJK dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, diakui secara accrual basis sebesar Rp374,81 miliar atau terealisasi 96% dari anggaran 2025 sebesar Rp375,72 miliar, sesuai jangka waktu kredit yang dijamin.

Aset Perseroan tercatat sebesar Rp1.501 miliar di akhir 2025 atau tercapai 125% dari target RKA 2025 sebesar Rp1.196 miliar. Dari sisi bottom line, Perseroan mencatatkan kinerja laba bersih sebesar Rp 16,00 miliar, tercapai 51% dari RKA senilai Rp31,28 miliar.

Dari sisi operasional, realisasi beban operasional Perseroan sebesar Rp7,6 miliar atau 94% dari target RKA 2025 sebesar Rp8,1 miliar. Perseroan mencatatkan realisasi pembayaran klaim sebesar Rp150.827 miliar di akhir 2025 atau tercapai 115% dari target RKA 2025. Adapun realisasi Beban SDM Perseroan tercatat sebesar Rp25,424 miliar atau 85% dari target RKA 2025 sebesar Rp29,97 miliar.

Selain kinerja yang dijabarkan di atas, Perseroan juga memperoleh pendapatan dari investasi dalam bentuk deposito, obligasi dan reksadana. Pada tahun 2025, Perseroan memperoleh pendapatan dari investasi yaitu sebesar Rp54,34 miliar, atau tercapai 107% dari

COMPARISON BETWEEN TARGETS AND RESULTS ACHIEVED IN 2025

2025 was the year of strategic consolidation and adjustment for JAMKRIDA Jakarta. Claim pressures in guarantee industry and the dynamics of financing policies have impacted on financial performance that the Company recorded several RKA targets that have not been accomplished.

Nevertheless, a number of operational achievements indicated a positive trend and became the foundation for growth in the years to come. Guarantee volume grew in several strategic segments, cooperation with financial institutions expanded, and non-KUR operating income significantly increased. Income from investment and subrogation also proved to have accomplished a better performance compared to the previous year.

The Company's guarantee performance as of 31 December 2025 was recorded to have reached Rp31,85 trillion or 93% of 2024 RKA target of Rp 34,07 trillion with realization of guaranteed MSMECO absorption of some Rp5.214.433 MSMECO units and workforce of about 7.842.713 manpower. IJP/IJK cash income was logged at Rp420,21 trillion or 109% of Rp386.186 billion of 2025 RKA target. IJP/IJK acknowledgement was carried out based on applicable financial accounting standards, acknowledged on accrual basis at the amount of Rp374,81 trillion or actualized 96% from 2025 budget of Rp375,72 trillion, in line with the guaranteed credit timeframe.

The Company's asset was recorded at a total of Rp1.501 billion by the end of the year 2025 or 125% achieved of the Rp1.196 billion in 2025 RKA target. From the bottom-line side, the Company noted the net profit performance at Rp16.00 billion, 51% achieved of the Rp31.28 billion in RKA.

From the operational side, realization of the Company's operational expenses was logged at Rp7.6 billion or 94% of the 2025 RKA target of Rp8.1 billion. The Company recorded the realization of claim payment for a total of Rp150.827 billion by the end of the year 2025 or 115% achieved of the 2025 RKA target. Meanwhile realization of the Company's HR Expenses was noted at Rp25.424 billion or 85% of the Rp29.97 billion in 2025 RKA target.

Aside from the performance achievements mentioned above, the Company also managed to book income from investment in the forms of deposit, obligation and mutual fund. In the year 2025 the Company recorded income from investment

Laporan Direksi

Report of the Board of Director

target RKA 2025 sebesar Rp50,92 miliar. Subrogasi juga berperan penting dalam menambah pendapat perusahaan, subrogasi *own risk* mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 1%.

Direksi mengawasi secara cermat perbandingan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan dalam RKA, memastikan bahwa setiap deviasi dianalisis dan ditindaklanjuti dengan langkah korektif yang terukur. Walaupun hasil keuangan belum mencapai target yang direncanakan, Perseroan mencatatkan sejumlah capaian operasional yang signifikan, termasuk perluasan kemitraan, peningkatan produksi di segmen tertentu, serta kemajuan nyata dalam transformasi digital dan penguatan tata kelola. Direksi menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan kontribusinya, dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja Perseroan di tahun-tahun mendatang

PROSPEK USAHA

Prospek usaha JAMKRIDA Jakarta ke depan dibentuk oleh dinamika makroekonomi global dan domestik yang terus bergerak dengan cepat. IMF melalui WEO edisi Oktober 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun mendatang akan sedikit melemah pada kisaran 3,1%. Proyeksi tersebut mencerminkan pemulihan yang berlangsung secara bertahap di tengah tekanan inflasi yang masih tinggi, kebijakan suku bunga ketat di banyak negara maju, serta ketidakpastian geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasokan energi dan pangan. Meskipun demikian, aktivitas ekonomi Asia menunjukkan ketahanan yang lebih kuat, terutama melalui kontribusi konsumsi domestik dan peningkatan investasi digital yang terus berkembang.

Di tingkat nasional, perekonomian Indonesia diperkirakan berada pada jalur pertumbuhan positif. Bank Indonesia dalam publikasi resmi bulan September 2025 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada dalam rentang 5,3%-5,7% seiring dengan agenda investasi besar di sektor infrastruktur, reformasi fiskal dan peningkatan ekspor berbasis nilai tambah. Badan Pusat Statistik juga mencatat pertumbuhan PDB kuartal III 2025 sebesar 5,04 persen secara tahunan yang menandakan bahwa daya beli dan aktivitas usaha tetap berada pada jalur ekspansif.

Dari sisi kebutuhan pasar, peluang pertumbuhan masih sangat besar. Berbagai studi menunjukkan bahwa UMKM masih menghadapi kesenjangan pembiayaan yang signifikan. Lembaga riset internasional memperkirakan bahwa kebutuhan pembiayaan UMKM Indonesia pada tahun 2026 dapat mencapai sekitar Rp4.300 triliun pada 2026, sementara kemampuan *supply*

a total amount of Rp54.34 billion, or 107% achieved of the Rp50.92 billion in 2025 RKA target. Subrogation also played an important role in supporting additional company income, *own risk* subrogation increased by 1% from the year 2024.

The Board of Directors closely monitored the comparison between realization and target set within the RKA, to ensure that each deviation is analysed and followed-up with measurable corrective steps. Although financial results have not reached targets as planned, the Company recorded a number of significant operational achievements, including expanding partnerships, increasing production in certain segments, as well as real advancement in digital transformation and enhancement in governance. The Board of Directors expresses its appreciation to all employees for their dedication and contribution, and is committed to continue to improve the Company's performance in the years to come.

BUSINESS PROSPECTS

JAMKRIDA Jakarta's future business prospect is shaped by both global and domestic macroeconomic dynamics that continue to move rapidly. IMF, through WEO of October 2025 edition, projected that global economic growth for the coming year is estimated to slightly drop by around 3.1%. Such a projection reflects that recovery is progressing in stages amidst inflation pressure which remains high, tight interest rate policy in many developed countries, as well as the uncertainty in geopolitics which potentially disrupt energy and food supply chains. Nevertheless, economic activities in Asia still show stronger resilience, especially through domestic consumption and increase in digital investment which continue to develop.

At the national level, Indonesia's economy is estimated to remain in positive growth path. Bank Indonesia in its official publication in September 2025 projected that economic growth for the year 2026 ranges around 5.3-5.7% in line with big investment agenda in such sectors as infrastructure, fiscal reformation and increase in added-value export. The Central Bureau of Statistics also noted GDP growth in 3rd Quarter of 2025 was at 5.04% YoY indicating that purchasing power and business activities remain in expansive track.

From market needs side, growth opportunity remains high. Several studies show that MSME still faces significant financing gap. International research institutions predicted that financing needs of Indonesia's MSME in the year 2026 may reach around Rp4,300 trillion, meanwhile supply capability is estimated to only fulfil a portion of that requirement or around Rp1,900 trillion.

Laporan Direksi

Report of the Board of Director

diperkirakan hanya mampu memenuhi sebagian atau sekitar Rp1.900 triliun dari kebutuhan tersebut. Kesenjangan pembiayaan ini menciptakan ruang yang luas bagi industri penjaminan untuk memperkuat akses UMKMK terhadap pembiayaan produktif.

Direksi memandang prospek usaha tahun 2026 dengan optimisme yang terukur. Permintaan terhadap penjaminan pembiayaan diperkirakan meningkat seiring stabilnya pertumbuhan ekonomi nasional dan dinamika kebijakan pembiayaan UMKMK. Lembaga penjaminan memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan, menurunkan risiko pembiayaan bagi lembaga keuangan, serta memperkuat struktur ekonomi daerah.

Izin operasional nasional yang diterima Perseroan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2025 menjadi pendorong utama bagi perluasan usaha JAMKRIDA Jakarta. Dengan cakupan operasional yang kini menjangkau seluruh Indonesia, Perseroan memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk membangun kemitraan baru, memperluas produk penjaminan, serta mengelola risiko portofolio secara lebih seimbang. Izin nasional ini juga menjadi landasan strategis bagi pembukaan Kantor Perwakilan Surabaya pada awal 2026 sebagai pintu masuk penetrasi pasar di wilayah Indonesia bagian timur. Ekspansi ini diharapkan memperkuat kontribusi Perseroan dalam mendukung pembiayaan UMKMK pada tingkat nasional sekaligus meningkatkan skala usaha secara bertahap.

Dengan fondasi kebijakan, tata kelola, dan transformasi teknologi yang diperkuat sepanjang 2025, Direksi meyakini bahwa JAMKRIDA Jakarta berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target usaha 2026. Perseroan siap melanjutkan perannya sebagai lembaga penjaminan yang modern, adaptif, dan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi pemberdayaan UMKMK dan perekonomian daerah.

IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

JAMKRIDA Jakarta mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai fondasi utama dalam memastikan keberlangsungan usaha dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Bagi Direksi, penerapan prinsip GCG tidak hanya dipandang sebagai kewajiban regulasi, tetapi sebagai instrumen strategis untuk menciptakan proses bisnis yang sehat, transparan, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang.

This financing gap creates a big space in guarantee industry to strengthen MSMECO's access to productive financing.

The Board of Directors view business prospects in the year 2026 with measurable optimism. Requests for financing guarantee is estimated to increase in line with the stable growth in domestic economy and dynamics in MSMECO financing policy. Guarantee institutions play a strategic role in expanding financing access, reducing financing risk for financial institutions, as well as strengthening regional economic structure.

The national operational permit received by the Company from the Financial Service Authority in 2025 is a major reinforcement for the expansion of JAMKRIDA Jakarta business development. With operational coverage now spans nation-wide, the Company has greater flexibility to build new partnerships, expand its underwriting products, and manage portfolio risks in a more balanced manner. This national permit also serves as a strategic foundation for the opening of the Surabaya Representative Office in early 2026 as a gateway to market penetration in the eastern part of Indonesia. Such an expansion is hoped to strengthen the Company's contribution in support of MSMECO financing at the national level and at the same time gradually increase business scale.

With the foundation of the policies, governance, and technology transformation strengthened during the year 2025, the Board of Directors is assured that JAMKRIDA Jakarta is on the right track to reach its business targets in 2026. The Company is prepared to continue its role as a modern and adaptive guarantee institution that is capable of generating significant impact on the empowerment of MSMECO and regional economy.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

JAMKRIDA Jakarta implements Good Corporate Governance (GCG) as the main foundation in ensuring business sustainability and maintain the trust of stakeholders. For the Board of Directors, the implementation of GCG principles is not only viewed as regulatory obligation, but also as a strategic instrument to creating a sound, transparent, accountable and long-term oriented business process.

Laporan Direksi

Report of the Board of Director

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 terus diperkuat melalui evaluasi berkala, sosialisasi internal, serta perbaikan prosedur untuk memastikan efektivitas pengendalian anti penyuapan. Pembaruan SOP inti operasional menjadi salah satu capaian penting pada tahun 2025, seiring meningkatnya kebutuhan pengendalian internal di tengah transformasi digital dan perluasan lingkup usaha. Penyempurnaan SOP ini memastikan bahwa standar operasional Perseroan tetap relevan, adaptif, dan mampu mendukung kualitas layanan yang konsisten.

Dalam rangka membangun lingkungan bisnis yang sehat, berintegritas, dan memiliki reputasi yang kuat sebagai BUMD penjaminan yang terpercaya, Perseroan juga telah menyusun Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS). WBS berfungsi sebagai saluran pelaporan independen bagi seluruh pihak untuk menyampaikan dugaan pelanggaran hukum, kecurangan, pelanggaran kode etik, maupun benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Perseroan. Direksi memastikan bahwa setiap laporan yang masuk ditangani secara objektif, rahasia, dan sesuai prosedur yang berlaku.

Sejalan dengan meningkatnya peran digitalisasi dalam operasional penjaminan, Direksi turut memperkuat tata kelola teknologi informasi, termasuk aspek keamanan data, ketersediaan sistem, serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan data. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa platform penjaminan digital (*e-Guarantee*) berkembang sesuai standar pengendalian internal dan dapat meningkatkan kepercayaan mitra serta para pemangku kepentingan lainnya.

Seluruh langkah tersebut dijalankan sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Transparansi, akurasi, dan pertanggungjawaban dalam penyampaian informasi material terus dijaga untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Perseroan juga memastikan bahwa setiap hak dan kewajiban para pihak dijalankan secara adil, sehingga hubungan usaha yang sehat dan bertanggung jawab dapat terbentuk secara berkelanjutan.

Penilaian Kinerja Komite Perseroan

Seluruh komite yang berada di bawah koordinasi Direksi menjalankan tugas dengan baik sepanjang tahun 2025. Komite Penjaminan, Komite Klaim, Komite Manajemen Risiko, Komite Investasi, Komite Pengarah Teknologi Informasi, dan Komite SDM telah berperan aktif dalam memastikan bahwa

The implementation of ISO 37001 Anti-Bribery Management System is continuously reinforced through periodic assessment, internal socialization, as well as procedure improvement, to make sure that effectiveness of anti-bribery control is obtained. Update of core operational SOP is one of the important achievements in 2025, in line with the increase in the need for internal control amidst digital transformation and expansion of business coverage. Refinement of such SOP ensures that the Company's operational standards remain relevant, adaptive, and capable of supporting consistent service quality.

In the effort to develop a sound business environment, with integrity and a strong reputation as a trusted guarantee BUMD, the Company also prepares the Whistleblowing System (WBS). WBS functions as an independent reporting channel for all parties to be able to submit allegation on violations of the law, fraud, violations of the code of ethics, or conflicts of interest that occur within the Company. The Board of Directors ensures that each submitted report is handled objectively, confidentially, and in accordance with applicable procedures.

In line with the increasing role of digitalization in guarantee operations, the Board of Directors takes part in strengthening information technology governance, including such aspects as data security, system availability, as well as compliance with data management regulations. This effort is carried out to ensure that digital guarantee (*e-Guarantee*) platform is developed in accordance with internal control standards and can enhance the trust of partners and other stakeholders.

All such steps taken are part of the Company's commitment to implementing good corporate governance. Transparency, accuracy, and accountability in presenting material information is continuously maintained to improve the trust of shareholders and stakeholders. The Company also ensures that each right and obligation of all parties is carried out fairly, so that sound and responsible business relationship may be generated sustainably.

Performance Assessment of the Company's Committees

All committees under the coordination of the Board of Directors have appropriately carried out their duties throughout the year 2025. Guarantee Committee, Claim Committee, Risk Management Committee, Investment Committed, Information Technology Steering Committee and HR Committee have taken

Laporan Direksi

Report of the Board of Director

implementasi kebijakan dan proses operasional berjalan sesuai ketentuan, prinsip kehati-hatian, serta standar tata kelola Perseroan.

PENUTUP DAN APRESIASI

Sebagai penutup, Direksi menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dewan Komisaris atas arahan, rekomendasi, dan pengawasan yang konsisten sepanjang tahun 2025. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga fokus strategi Perusahaan dan memastikan setiap langkah yang ditempuh tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik.

Direksi juga menyampaikan apresiasi yang tulus kepada para pemegang saham, regulator, Badan Pembina BUMD, mitra usaha, dan pihak Terjamin atas dukungan serta kepercayaannya kepada JAMKRIDA Jakarta sepanjang tahun 2025. Kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan, Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, disiplin, dan ketangguhan dalam menjalankan tugas di tengah lingkungan bisnis yang dinamis. Komitmen setiap insan JAMKRIDA Jakarta menjadi fondasi utama Perusahaan untuk menjaga kinerja yang solid dan terus memperluas penciptaan nilai.

Dengan semangat transformasi berkelanjutan, Direksi berkomitmen untuk memperkuat kapasitas Perseroan. Dengan sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, Direksi meyakini JAMKRIDA Jakarta dapat mencapai hasil yang lebih baik dan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sektor UMKMK serta perekonomian daerah.

active roles in making sure that the implementation of policies and operational processes is conducted in accordance with the provisions, prudential principles, and corporate governance standards of the Company.

CLOSING AND APPRECIATION

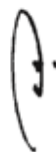
In closing this report, the Board of Directors extends its highest appreciation to the Board of Commissioners for their consistent directives, recommendations and supervision throughout the year 2025. This support has been an important part in our efforts to maintain the Company's strategy focus and ensures that each step taken remains within the corridor of good corporate governance.

The Board of Directors also expresses our sincere gratitude to the shareholders, regulators, BUMD Advisory Board, business partners and the Guaranteed parties for their continuous support and trust for JAMKRIDA Jakarta during the year 2025. To all management members and employees, the Board of Directors extends our highest appreciation for your dedication, discipline, and resilience in carrying out your duties amidst the dynamic business environment. The commitment of every JAMKRIDA Jakarta employee is the Company's primary foundation for maintaining solid performance and continuously expanding value creation.

With the spirit of sustainable transformation, the Board of Director is committed to reinforcing the Company's capacity. With the synergy and commitment of all stakeholders, the Board of Director believes that JAMKRIDA Jakarta can achieve better results and provide real contributions for the strengthening of MSME sector as well as regional economy.

Jakarta, 13 April 2026
Jakarta, April 13, 2026

Atas Nama Direksi
On behalf of Directors



Agus Supriadi
Direktur Utama
President Director

Direksi

The Board of Director



Agus Supriadi

Direktur Utama
President Director

Jimmi Setya Budi

Direktur Operasional
Director of Operations



Profil Perusahaan

Company Profile

jamkrida

kar



Identitas Perusahaan

Corporate Identity



	Nama Perusahaan Name of Company PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroda)		NPWP Taxpayer Identification Number 0716 3082 8306 1000
	Nama Panggil Call Sign PT Jamkrida Jakarta ("Jamkrida Jakarta")		NIB Business Registration Number 1221000412197
	Tanggal Pendirian Date of Establishment 10 November 2014		Modal Ditempatkan dan Disetor Issued and Paid-Up Capital Rp600.000.000.000,00
	Status Perusahaan Company Status BUMD Provinsi DKI Jakarta Regional Owned Enterprise of Special Capital Region (DKI) Jakarta Province		Modal Dasar Authorized Capital Rp1.600.000.000.000,00
	Tanggal Beroperasi Date of Operation 28 Agustus 2015 28 August 2015		Komposisi Pemegang Saham Composition of Shareholders - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (99,167%) - Perumda Pasar Jaya (0,833%) - Government of DKI Jakarta Province (99,167%) - Pasar Jaya Regional Company (Perumda) (0,833%)
	Bidang Usaha Line of Business Penjaminan Kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) Credit Guarantee for Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives		Jumlah Karyawan (per 31 Desember 2025) Total Number of Employees (as of 31 December 2025) 79 karyawan 79 Employees
	Bentuk Badan Hukum Legal form of Entity Perseroan Terbatas Limited Liability Company		



	Situs Web Website www.jamkrida-jakarta.co.id
	Alamat Surat Elektronik Electronic Letter Address mail@jamkrida-jakarta.co.id
	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Regina Kristiningsih
	Alamat Address Gedung Jaya Lantai 3 3rd Floor Jl. M. H. Thamrin No. 12, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta – 10340

	Telepon Telephone (021) 31927872
	Sosial Media Social Media Facebook : Jamkrida Jakarta X : @JamkridaJakarta Instagram : @jamkridajakarta Linked : Jamkrida Jakarta

Strategi dan Tujuan Perusahaan

Company Strategy and Objectives

Aspek Strategis Strategic Aspect

Persiapan perusahaan untuk mengajukan Izin Nasional demi perluasan bisnis.

Prepare for company to apply for National Permit for business expansion.

Aspek GRC GRC Aspect

Memastikan seluruh aktivitas berpedoman pada prinsip Tata Kelola Perusahaan (TARIF), penerapan manajemen risiko, dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah

Ensure all activities are guided by Corporate Governance principles (TARIF), implementation of risk management, and compliance with government regulations

Aspek Konsumen Customer Aspect

Peningkatan layanan, pengembang inovasi dan menawarkan solusi terbaik terhadap seluruh kebutuhan stakeholder.

Improve services, develop innovations and offer the best solutions to all stakeholders' needs.

Aspek SDM & IT Human Resources & IT Aspect

Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis.

Develop the capacity and capability of the Human Resource and Information Technology to meet business needs.

Aspek Bisnis Business Aspect

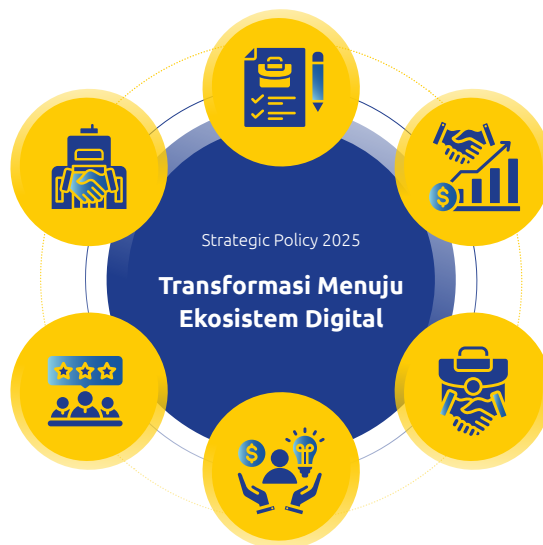
Mengakses bisnis melalui penguatan mesin pertumbuhan, perluasan ekosistem, peningkatan sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan.

Access business through strengthening of growth machine, ecosystem expansion, continuous increase in synergy and collaboration

Aspek Dukungan Pemprov Government Support Aspect

Mendukung kebijakan dan program Pemprov Jakarta menuju ekonomi digital dalam rangka pemantapan Kota Global yang berdaya saing kuat.

Support Jakarta Provincial Government's policies and programs towards digital economy in the context of strengthening the Global City with strong competitiveness.





Sekilas Jamkrida Jakarta

Jamkrida Jakarta at a Glance



Sejak awal pendiriannya, PT Jamkrida Jakarta diarahkan untuk menjadi mitra strategis yang menyediakan layanan penjaminan kredit yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Since the beginning of its establishment, PT Jamkrida Jakarta was directed to become a strategic partner that professionally and accountably provides credit guarantee services, and that is sustainability-oriented.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) sebagai fondasi penting yang menjaga dinamika ekonomi daerah tetap tumbuh dan inklusif. Namun, kebutuhan permodalan yang berkelanjutan sering kali menjadi tantangan utama bagi pelaku UMKMK sehingga dibutuhkan sebuah lembaga yang mampu memperluas akses pembiayaan sekaligus memperkuat kepercayaan lembaga keuangan terhadap sektor ini. Dari kesadaran inilah gagasan pendirian PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (selanjutnya disebut JAMKRIDA Jakarta/ Perseroan) muncul sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pembiayaan bagi UMKMK di Ibu Kota.

JAMKRIDA Jakarta kemudian resmi dibentuk sebagai Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 13 tahun 2013 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah.

The Regional Government of DKI Jakarta views the sector of Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (MSMECO) as an important foundation that maintains the dynamics of regional economy to continue to grow and remains inclusive. However, the needs for sustainable capital often stand as a major challenge for players of MSMECO that it becomes imperative for an institution to be able to expand its financing access and at the same time strengthen the trust of financial institutions in this sector. It is from this awareness that the idea of the founders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (further referred to as JAMKRIDA Jakarta/ Company) appeared as a strategic step to strengthen the financing ecosystem for MSMECO in the Capital City of Jakarta.

JAMKRIDA Jakarta was officially established as a Regional-Owned Enterprise (BUMD) based on the Regional Regulations of the Province of DKI Jakarta No. 13 of year 2013 regarding the Establishment of the Regional-Owned Enterprise of

Sekilas Jamkrida Jakarta

Jamkrida Jakarta at a Glance

Landasan ini diwujudkan lebih lanjut melalui Akta Pendirian No. 9 tanggal 10 November 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn. Sejak awal pendiriannya, Perseroan diarahkan untuk menjadi mitra strategis yang menyediakan layanan penjaminan kredit yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Komitmen tersebut dipertegas melalui izin usaha Perseroan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan No. KEP-62/D.05/2015 yang menetapkan JAMKRIDA Jakarta sebagai lembaga keuangan nonbank penyelenggara kegiatan penjaminan yang memenuhi standar tata kelola dan prinsip kehati-hatian.

Seiring pertumbuhan UMKMK yang semakin dinamis, Perseroan terus memperluas peran dan kontribusinya. Melalui layanan penjaminan yang terstruktur dan bantuan konsultasi manajemen yang diberikan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Perseroan berupaya meningkatkan kapasitas usaha mitra serta memperkuat kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan secara lebih inklusif.

Memasuki tahun 2025, JAMKRIDA Jakarta menunjukkan kinerja yang solid di tengah dinamika perekonomian Jakarta yang terus berkembang. Pertumbuhan besaran modal, volume penjaminan, peningkatan jumlah mitra lembaga keuangan, serta bertambahnya pelaku usaha yang memperoleh akses pembiayaan mencerminkan peran aktif Perseroan dalam mendorong pemerataan ekonomi.

Hal tersebut sebagaimana tercermin pada peningkatan besaran modal yang tercatat sejak awal berdiri hingga 31 Desember 2025, yaitu sebagai berikut:

17 Desember 2014	Rp55 miliar
30 Desember 2014	Rp60 miliar
18 Desember 2015	Rp100 miliar

Limited Liability Companies for Regional Credit Guarantee. This foundation was further established thru the Deed of Establishment No. 9 dated 10 November 2014, made before Notary Yualita Widyadhani, S.H., M.Kn. Since the beginning of its establishment, the Company was directed to become a strategic partner that professionally and accountably provides credit guarantee services, and that is sustainability-oriented.

Such commitment was emphasized through the Company's business permit obtained from the Financial Services Authority through Decision Letter No. KEP-62/D.05/2015 which set JAMKRIDA Jakarta as the non-bank financial institution that organizes guarantee activities that meet governance standards and applies the principles of prudence.

As MSMECO grows dynamically, the Company continues to expand its role and contribution. Through structured guarantee services and management consulting assistance provided in line with the Articles of Association, the Company's endeavor to improve business partners' capacity as well as strengthen the trust of financial institutions for financing distribution in a more inclusive manner.

Entering the year 2025, JAMKRIDA Jakarta continues to demonstrate solid performance amidst the dynamics of Jakarta's ever-growing economy. Capital growth, guarantee volume, increasing number of financial institution partners, as well as the increasing number of business actors who gain access to financing reflect the Company's active role in boosting economic equality.

This is reflected in the rising amount of capital recorded since its establishment up to 31 December 2025, namely as follows:

17 December 2014	Rp55 billion
30 December 2014	Rp60 billion
18 December 2015	Rp100 billion

Sekilas Jamkrida Jakarta

Jamkrida Jakarta at a Glance

21 Desember 2016	Rp300miliar
27 Desember 2017	Rp400miliar
30 Januari 2024	Rp600miliar

Di tahun ini, Perseroan juga memperkuat pengendalian risiko, meningkatkan kinerja operasional, serta mengembangkan inovasi layanan untuk memastikan proses penjaminan berjalan lebih cepat, akurat, dan selaras dengan kebutuhan pasar. Dengan fondasi historis yang kuat dan pencapaian kinerja yang konsisten, JAMKRIDA Jakarta terus melangkah maju sebagai katalisator pertumbuhan UMKMK yang lebih tangguh, kompetitif, dan berdaya saing.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA

Sepanjang perjalanan bisnisnya, JAMKRIDA Jakarta telah mengalami 1 (satu) kali perubahan nama. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 9 Juni 2023, dimana PT Jamkrida Jakarta resmi mengubah nama dari PT Jaminan Kredit Daerah Jakarta menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah).

DASAR HUKUM PENDIRIAN DAN LEGALITAS OPERASIONAL

Dasar hukum pendirian dan legalitas operasional JAMKRIDA Jakarta antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Penjaminan;
3. PT Jamkrida Jakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan BUMD Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;
4. Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta No. 9 tanggal 10 November 2014 yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-34446.40.10.2014 tanggal 13 November 2014;
5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah);
6. Sejak 9 Mei 2025, PT Jamkrida Jakarta telah mendapatkan izin perubahan lingkup operasional menjadi nasional berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/D.05/2025 Tentang

21 December 2016	Rp300 billion
27 December 2017	Rp400 billion
30 January 2024	Rp600 billion

In the year 2025, the Company also strengthened risk control, increased operational performance, as well as developed service innovations to ensure that the underwriting process runs faster, more accurately, and in line with market needs. With a strong historical foundation and consistent performance achievement, JAMKRIDA Jakarta continues to step forward as an even stronger and more competitive MSMECO growth catalyst.

INFORMATION ON NAME CHANGE

Throughout its business course, JAMKRIDA Jakarta has once made a change in its name, carried out based on Notarial Deed No. 14 dated 9 June 2023, whereby PT Jamkrida Jakarta officially changed its name from PT Jaminan Kredit Daerah Jakarta to PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Regional Company).

LEGAL BASIS OF ESTABLISHMENT AND OPERATIONAL LEGALITY

The legal basis of establishment and operational legality of JAMKRIDA Jakarta, among others, include the following:

1. Law No. 40 of year 2007 regarding Limited Liability Companies;
2. Law No. 1 of year 2016 regarding Guarantee Business;
3. PT Jamkrida Jakarta was established based on Regional Regulations of the Province of DKI Jakarta No. 13 Year 2013 regarding the Establishment of BUMD Limited Liability Companies of Jakarta Regional Credit Guarantee;
4. Deed of Establishment of Limited Liability Company (Persero) of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta No. 9 dated 10 November 2014 approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decision No. AHU-34446.40.10.2014 dated 13 November 2014;
5. Regional Regulations of the Province of DKI Jakarta No. 1 year 2023 dated 14 March 2023 regarding Changes in the Legal Form of Limited Liability Companies of Jakarta Regional Credit Guarantee (Regional Company);
6. Since 9 May 2025, PT Jamkrida Jakarta has obtained the permit for a change in the scope of operational area to nationwide based on the Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority

Sekilas Jamkrida Jakarta

Jamkrida Jakarta at a Glance

Persetujuan Atas Perubahan Lingkup Wilayah Operasional Provinsi Menjadi Nasional PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah).

7. Akta No. 29 tanggal 24 November 2025 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, Mkn, Notaris di Jakarta dan telah diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0361872 tanggal 28 November 2025;

REGULASI USAHA PENJAMINAN

Dalam menjalankan kegiatan usaha Penjaminan, JAMKRIDA Jakarta mengacu pada regulasi usaha penjaminan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Penjaminan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin;
5. Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-58/NB.223/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;
6. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-1315/NB.223/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pencatatan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penjaminan Syariah pada Unit Usaha Syariah PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;
7. Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-62/D.05/2015 tanggal 15 Mei 2015;
8. Pencatatan laporan produk penjaminan *Surety Bond* PT Jamkrida Jakarta di OJK No. S/5425/NB.2/2015 tanggal 7 Oktober 2015;
9. Pencatatan laporan produk penjaminan Kontra Bank Garansi PT Jamkrida Jakarta di OJK No. S/5431/NB.III/2015 tanggal 7 Oktober 2015;
10. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-595/NB.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan, dan Konsorsium yang Dapat Memasarkan Produk *Suretyship*;

No. KEP-44/D.05/2025 Regarding Approval on the Change in the Scope of Operational Area from Provincial to National of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Regional Company);

7. Deed No. 29 dated 24 November 2025, made before Ashoya Ratam, SH, Mkn, Notary in Jakarta and has received and registered in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0361872 dated 28 November 2025;

REGULATIONS ON UNDERWRITING BUSINESS

In running its underwriting business activities, JAMKRIDA Jakarta refers to underwriting business regulations, among others, as follows:

1. Law No. 1 of year 2016 on Underwriting Business;
2. Financial Services Authority (OJK) Regulations No. 10 of Year 2025 on Change to Financial Services Authority Regulations No. 1/POJK.05/2017 regarding Business Licensing and the Institutional Aspects of Guarantee Institutions;
3. Financial Services Authority (OJK) Regulations No. 11 of Year 2025 regarding the Operation of Guarantee Institutions;
4. Financial Services Authority (OJK) Regulations No. 3/POJK.05/2017 regarding Good Corporate Governance of Guarantee Institutions;
5. Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-58/NB.223/2019 dated 30 August 2019 regarding the Granting of Permit for the Establishment of Company Sharia Business Unit To PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;
6. Financial Services Authority (OJK) Letter No. S-1315/NB.223/2019 dated 26 December 2019 on the Documentation of the Implementation of Sharia Guarantee Business Activities in Sharia Business Unit of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;
7. Business Permit from the Financial Services Authority No. KEP- 62/D.05/2015 dated 15 May 2015;
8. Report documentation of Surety Bond guarantee products of PT Jamkrida Jakarta in OJK No. S/5425/NB.2/2015 dated 7 October 2015;
9. Report documentation of guarantee products of Bank Counter Guarantee of PT Jamkrida Jakarta in OJK No. S/5431/NB.III/2015 dated 7 October 2015;
10. Financial Services Authority (OJK) Letter No. S-595/NB.2/2018 dated 4 October 2018 regarding the List of Insurance Companies, Guarantee Companies, and Consortiums Allowed to Market Suretyship Products;

Sekilas Jamkrida Jakarta

Jamkrida Jakarta at a Glance

11. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-497/NB.111/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Pencatatan Laporan Produk Penjaminan Kepabeanaan (Custom Bond) PT Jamkrida Jakarta;
12. Akta Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn No. 61 Tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jakarta dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0143902 tanggal 05 April 2024;
13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 51 tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Terkait Untuk Penyediaan dan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai dasar bagi PT Jamkrida Jakarta untuk melaksanakan penjaminan atas penyaluran kredit/ pembiayaan perolehan rumah bagi MBR (Penjaminan KPR DP 0 Rupiah);
14. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-248/ NB.22/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Pencatatan Kegiatan Usaha Penjaminan Pembukaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dengan Prinsip Syariah (Kafalah Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri/SKBDN) dan Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Kafalah *Surety Bond*) PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;
15. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-20/ NB.213/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pencatatan Kegiatan Usaha Kafalah Kontra Bank Garansi PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;
11. Financial Services Authority (OJK) Letter No. S-497/ NB.111/2018 dated 30 January 2018 regarding Report Documentation of Custom Bond Guarantee Products of PT Jamkrida Jakarta;
12. Notarial Deed of Ashoya Ratam, SH, MKn No. 61 Tahun 2024 dated 22 March 2024 regarding the Reappointment of the Sharia Supervisory Board of PT Jamkrida Jakarta and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0143902 dated 05 April 2024;
13. Regulations of the Governor of DKI Jakarta Province No. 51 of year 2019 regarding the Appointment of Related Regional-Owned Enterprises For the Provision and Financing of Housing Acquisition for Low-Income Communities (MBR) as basis for PT Jamkrida Jakarta to provide guarantee in extending credit/financing to acquire housing for MBR (Guaranteed mortgage with 0 Rupiah downpayment);
14. Letter of the Financial Services Authority (OJK) No. S-248/NB.22/2020 dated 17 July 2020 regarding the Documentation of Business Activities Guaranteeing the Opening of Domestic Documented Letters of Credit with Sharia Principles (Kafalah Domestic Documented Letters of Credit/SKBDN) and the Guarantee of Procurement of Goods and/or Services (Surety Bond Kafalah) of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;
15. Letter of the Financial Services Authority (OJK) No. -20/ NB.213/2021 dated 11 January 2021 regarding the Documentation of Business Activities of Kafalah Bank Counter Guarantee of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;

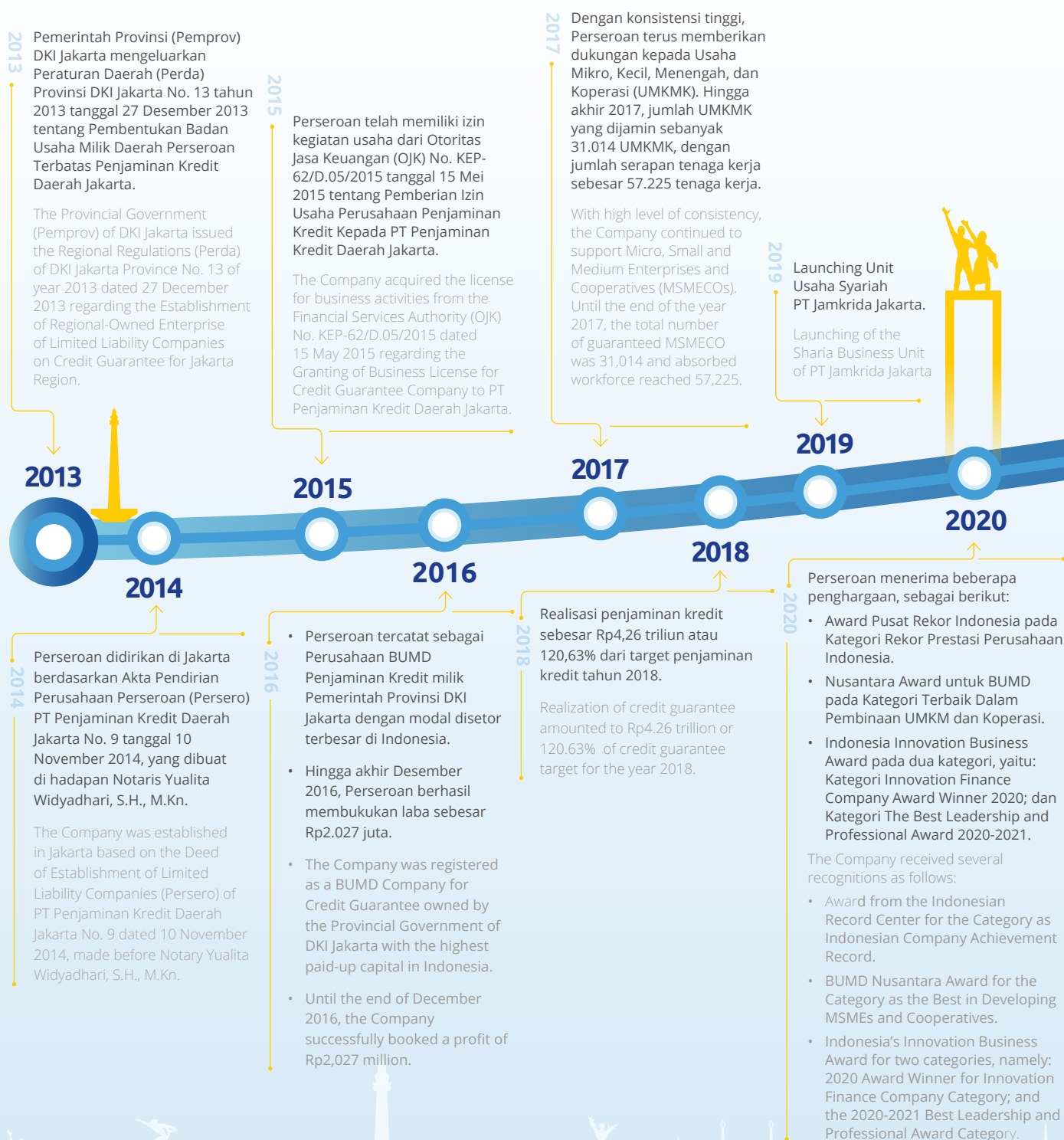
Sekilas Jamkrida Jakarta

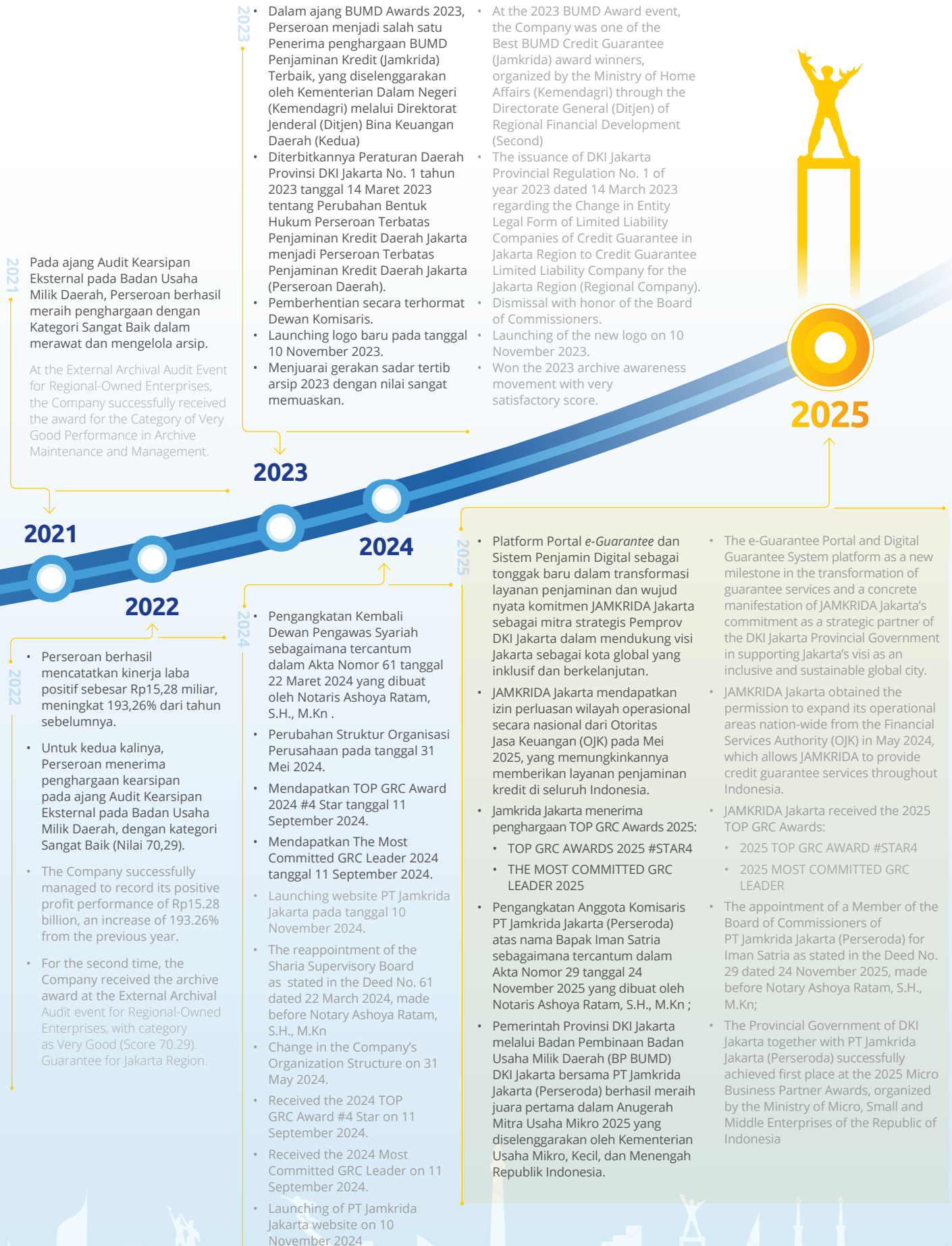
Jamkrida Jakarta at a Glance

16. Surat Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan No. S-367/NB.222/2021 tentang PT Jamkrida Jakarta sebagai Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR);
17. Surat Rekomendasi KUR Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-409/NB.213/2022 tanggal 31 Maret 2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Rekomendasi terkait Penunjukkan Unit Usaha Syariah (UUS) Jamkrida Jakarta Sebagai Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah;
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.05/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Penilaian Kualitas Atas Tagihan Subrogasi, Kegiatan Penjaminan, dan *Suretyship*.
19. Sejak 9 Mei 2025, PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) telah mendapatkan izin perubahan lingkup operasional menjadi nasional berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/D.05/2025 Tentang Persetujuan Atas Perubahan Lingkup Wilayah Operasional Provinsi Menjadi Nasional PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah).
16. Letter of Recommendation of the Financial Services Authority No. S-367/NB.222/2021 regarding PT Jamkrida Jakarta as the People's Business Credit (KUR) Guarantee Company;
17. Letter of Recommendation of Sharia KUR from the Financial Services Authority (OJK) No. S-409/NB.213/2022 dated 31 March 2022 regarding the Response to the Request for Recommendations on the Appointment of the Sharia Business Unit (UUS) of Jamkrida Jakarta as a Guarantor for Sharia People's Business Credit (KUR);
18. Circulation Letter of the Financial Services Authority No. 9/SEOJK.05/2024 dated 27 September 2024 regarding the Quality Assessment of Subrogation Billings, Guarantee Activities, and *Suretyship*;
19. Since 5 May 2025, PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) has obtained the permission to change the scope of operations to nation-wide based on the Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-44/D.05/2025 Regarding the Approval to Change the Regional to National in the Scope of Operational Areas of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Regional Company).

Tonggak Sejarah

Milestones





Visi & Misi

Vission and Mission

Visi Vision

Menjadi mitra yang peduli terhadap perkembangan UMKMK dan ekonomi daerah.

To become a partner that cares for the development of MSME and Cooperatives and the local economy.



Misi Mission

Menjalankan kegiatan usaha penjaminan untuk kemajuan UMKMK serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

01

To become a partner that cares for the development of MSME and Cooperatives and the local economy.

Memberikan manfaat berkesinambungan bagi para pemangku kepentingan: shareholder, karyawan, mitra kerja, dan masyarakat.

02

To provide sustainable benefits for the stakeholders: shareholders, employees, partners, and the community.



TINJAUAN ATAS VISI DAN MISI

Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala melakukan evaluasi terhadap kesesuaian visi dan misi Perseroan untuk memastikan bahwa arah strategis yang ditetapkan tetap sejalan dengan tujuan jangka panjang Perseroan. Berdasarkan hasil peninjauan pada tahun 2025, Dewan Komisaris dan Direksi menyimpulkan bahwa visi dan misi yang berlaku masih relevan dengan dinamika bisnis serta tantangan industri yang dihadapi. Dengan demikian, Perseroan menilai belum diperlukan perubahan terhadap visi dan misi tersebut.

REVIEW OF THE VISION AND MISSION

The Board of Commissioners and the Board of Directors periodically assess the conformity of the vision and mission of the Company to ensure that the strategic direction as set forth remains in line with the Company's long-term objectives. Based on reviews in the year 2025, the Board of Commissioners and the Board of Directors concluded that the vision and mission in effect are still relevant with the industry's business dynamics as well as challenges faced. Thus, the Company assessed that there are no requirement to make any alteration to the vision and mission concerned.

Nilai-Nilai Perseroan

Corporate Values

Nilai-Nilai Perseroan

PT Jamkrida Jakarta menerapkan nilai-nilai BETAWI (*Building Trust, Excellent Service, Teamwork, Accountable, Wise, dan Innovative*) sebagai budaya kerja yang membentuk karakter serta perilaku seluruh insan Jamkrida Jakarta. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam bekerja, berinteraksi, dan memberikan pelayanan, sehingga setiap individu dapat berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan Perseroan. Nilai BETAWI tersebut menyatu dalam semangat budaya perusahaan dengan slogan MK5JJ (Militansi, Kesehatan, Komunikasi, Kolaborasi, Koordinasi, Kontribusi untuk Jamkrida Jakarta).

Corporate Values

PT Jamkrida Jakarta applies the values of BETAWI (*Building Trust, Excellent Service, Teamwork, Accountable, Wise and Innovative*) as the work culture that forms the character and behavior of all personnels of Jamkrida Jakarta. These values have become the guidelines to carry out work, interaction, and provide services that each individual can contribute optimally in obtaining the Company's goals. These BETAWI values are integrated into the spirit of the corporate culture with the slogan MC5JJ (Militancy, Health, Communication, Collaboration, Coordination, Contribution, for Jamkrida Jakarta).



Building Trust

Berperilaku yang mencerminkan kesesuaian hati, perkataan, perbuatan, serta mengutamakan integritas dan profesionalisme di lingkungan kerja.

Behave in a way that reflects the harmony of the heart, words, and actions, and prioritize integrity and professionalism in the work environment.



Excellent Service

Berpenampilan menarik dan memberikan layanan prima serta mampu memberikan kesan baik secara konsisten kepada mitra kerja internal dan eksternal.

Maintain an attractive appearance and provide excellent services and consistently give good impression to internal and external partners.



Teamwork

Membina kerja sama, menjaga kekompakan, saling memotivasi, dan berpikir positif antar karyawan sehingga menghasilkan sinergi untuk mencapai tujuan Perseroan.

Foster cooperation, maintain solidarity, motivate each other, and think positively among employees to create synergy to achieve Company goals.



Accountable

Kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua perilaku yang ditampilkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi

Maintain the ability to take responsibility for all behavior displayed in order to achieve organizational goals.



Wise

Bersikap bijaksana dengan menghargai, menghormati, memiliki toleransi dan empati tinggi terhadap sesama karyawan serta mitra kerja.

Maintain the attitude to appreciate, respect, with high tolerance and empathy towards fellow employees and partners.



Innovative

Kemampuan berpikir dan bertindak yang menghasilkan ide baru secara berkesinambungan di unit kerja masing-masing untuk keberlangsungan bisnis Perseroan.

The ability to think and act to continuously generate new ideas in each work unit for the sustainability of the Company's business

Nilai-Nilai Perseroan

Corporate Values



Militansi Militancy

Militansi bukan sekadar keberanian, tapi semangat juang yang menyala—teguh pada tujuan, loyal terhadap misi perusahaan, dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan.

Militancy is not merely of courage, but also a burning fighting spirit – steadfast in one's goals, loyal to the corporate mission, and never give up in facing challenges.



Kesehatan Health

Karyawan yang sehat secara fisik dan mental akan bekerja lebih optimal, berpikir jernih, dan memberi dampak positif tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi juga lingkungan kerja secara keseluruhan.

Physically and mentally healthy employees will work more optimally, thinking clearly, and provide positive impact not only to him or herself, but also to the overall working environment.



Komunikasi Communication

Tanpa komunikasi yang baik, semangat kerja tim akan mudah rapuh. Komunikasi menciptakan saling pengertian dan menghindarkan dari kesalahpahaman.

Without good communication, the team's working spirit may be easily become fragile. Communication creates mutual understanding and prevents misunderstanding.



Kolaborasi Collaboration

Kolaborasi adalah seni menyatukan perbedaan untuk tujuan yang sama. Di dalamnya ada kepercayaan, saling melengkapi, dan kesadaran bahwa keberhasilan bersama jauh lebih besar daripada pencapaian individu.

Collaboration is the art of integrating differences for the same goal. In it there is trust, complementarity, and the awareness that collective success is far greater than individual achievement.



Kontribusi Contribution

Kontribusi adalah aktualisasi nilai diri dalam kerja nyata. Ini bukan hanya soal tugas, tapi bagaimana setiap individu memberi makna dan dampak positif bagi perusahaan.

Contribution is the actualization of self value in working reality. This is not merely a matter of assignment, but how each individual provides meaning and positive impact to the company.



Jamkrida Jamkrida



Jakarta Jakarta

Asas dan Tujuan

Principles and Objectives



Asas Principles

Kegiatan usaha penjaminan di Perseroan dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, *responsibility*, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalisme, efisiensi berkeadilan, edukasi, dan perlindungan konsumen.

Guarantee business activities in the Company are carried out based on the principles of national interest, legal certainty, responsibility, transparency, accountability, professionalism, equitable efficiency, education, and consumer protection.

Tujuan Objectives



Menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha, khususnya UMKMK, serta usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan;

Support government policies, especially in the context of encouraging business independency and empowerment, specifically with regard to MSME and Cooperatives, as well as other prospective business to financing sources;



Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya;

Loan guarantee channeled by savings and loan cooperatives or cooperatives with savings and loan business for their members;



Mendorong pertumbuhan pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis;

Encourage financing growth and generate conducive business climate for the improvement of strategic economic sectors;



Meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi;

Improving national production capabilities with high competitiveness;



Mendukung pertumbuhan perekonomian nasional;

Support the national economic growth;



Meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional.

Increase the level of the national financial inclusivity.

Kegiatan Usaha

Business Activities



KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

Mengacu pada Anggaran Dasar terakhir, Perseroan merupakan lembaga keuangan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Tujuan utamanya adalah mendukung program Pemerintah dalam bidang usaha penjaminan kredit, terutama untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM) di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Perseroan menyalurkan dan menjamin kredit yang berasal dari berbagai lembaga keuangan, termasuk perbankan, lembaga nonbank, dan badan usaha lainnya. Selain itu, Perseroan juga memberikan bantuan konsultasi manajemen terkait kegiatan usaha penjaminan dan kegiatan usaha lainnya. Seluruh kegiatan usaha tersebut dijalankan dengan izin dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Secara ringkas, kegiatan usaha Perseroan untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan yang sesuai dengan Akta No. 4 tanggal 3 Agustus 2015, meliputi:

1. Penjaminan kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari lembaga keuangan;
2. Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi dengan unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
3. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman dalam program kemitraan yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai bagian dari program kemitraan dan bina lingkungan.

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Referring to the latest Articles of Association, the Company is a financial institution established by the Provincial Government (Pemprov) of DKI Jakarta. The main objective is to support the Government in the field of credit guarantee business, especially to the Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives in DKI Jakarta Province.

The Company channels and guarantees credits from various financial institutions, including banks, non-bank institutions and other business entities. In addition, the Company also provide management consulting assistance related to guarantee business activities and other business activities. All such activities are carried out with the permission and supervision from the Financial Services Authority (OJK).

In brief, the Company's business activities to support the achievement of the Company's goals in line with Deed No. 60 dated 22 March 20244 – Reinstatement of the Company's Deed and Change in DPS Term of Office to 4 Years, which covers the following:

1. Guarantee for credit, financing, or financing based on the sharia principles from financial institutions;
2. Guarantee for loan channeled by Savings and Loan Cooperatives or Cooperatives with savings and loan business unit for its members; and
3. Guarantee for credit and/or loan within a partnership program channeled through by the State-Owned Enterprises as part of the partnership and environment-fostering programs.

Kegiatan Usaha

Business Activities



Selain usaha penjaminan, Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha lain sesuai dengan ketentuan undang-undang sesuai UU nomor 1 tahun 2016 tentang penjaminan seperti:

1. Penjaminan atas surat utang;
2. Penjaminan pembelian barang secara angsuran;
3. Penjaminan transaksi dagang;
4. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*Surety Bond*);
5. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
6. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
7. Penjaminan *Letter of Credit* (L/C);
8. Penjaminan kepabeanan (*Customs Bond*);
9. Penjaminan cukai;
10. Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan; dan
11. Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan.

Aside from guarantee business, the Company also carries out other business activities with the provisions set under Law No. 1 of year 2016 regarding such guarantees as follows:

1. Guarantee of debt securities;
2. Guarantee of goods purchased in installments;
3. Guarantee of trade transactions;
4. Guarantee of procurement of goods and/or services (*Surety Bond*);
5. Guarantee of bank guarantee (bank counter guarantee);
6. Guarantee of domestic documented credit letter;
7. Guarantee of Letter of Credit (L/C);
8. Guarantee of customs (*Custom Bond*);
9. Guarantee of excise;
10. Provide management consulting services related to guarantee business activities; and
11. Other business activities upon approval from the Financial Services Authority.

Produk dan Layanan

Products and Services

KEGIATAN USAHA TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tetap menjalankan kegiatan usaha penjaminan secara konsisten untuk memperkuat akses pembiayaan bagi sektor UMKMK di DKI Jakarta. Perseroan fokus meningkatkan kualitas layanan, memperluas kemitraan dengan lembaga keuangan, serta memastikan proses penjaminan berjalan lebih efisien dan akurat. Per 31 Desember 2025, produk dan layanan JAMKRIDA Jakarta adalah sebagai berikut:

BUSINESS ACTIVITIES IN 2025

Throughout the year 2025, the Company remained effectively consistent with its guarantee business activities to strengthen financial access for MSMECO sector in DKI Jakarta. The Company focused on improving the quality of services, expand partnership with financial institutions, as well as ensuring that guarantee process runs more efficiently and accurately. As of December 2025, products and services of JAMKRIDA Jakarta are as follows:



Produk Penjaminan

Guarantee Products

1. Penjaminan Kredit Mikro, Kecil dan Menengah; 2. Penjaminan Kredit Multiguna; 3. Penjaminan KPR; 4. Penjaminan Kredit Konstruksi; 5. Penjaminan Kredit Usaha; 6. Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi); 7. Penjaminan Kepabeanaan (<i>Custom Bond</i>); 8. <i>Surety Bond</i>; 9. Penjaminan <i>Letter of Credit</i> (L/C); 10. Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN); 11. Penjaminan Cukai; 12. Penjaminan Surat Utang (Anjak Piutang) dan Penjaminan berbasis <i>invoicing</i> lainnya; 13. Penjaminan Transaksi Dagang; 14. Penjaminan Pembelian Barang Secara Angsuran.	1. Credit Guarantee for Micro, Small and Medium Enterprises; 2. Multipurpose Credit Guarantee; 3. Mortgage Guarantee; 4. Construction Credit Guarantee; 5. Business Credit Guarantee; 6. Bank Guarantee (Contra Bank Guarantee); 7. Customs Guarantee (Custom Bond); 8. Surety Bond; 9. Letter of Credit (L/C) Guarantee; 10. Domestic Documented Credit Guarantee (SKBDN); 11. Excise Guarantee; 12. Debt Securities Guarantee (Factoring) and other invoicing-based Guarantee; 13. Trade Transaction Guarantee; 14. Installment Purchase Guarantee



Produk Penjaminan Syariah

Sharia Products Guarantee

1. Kafalah Pembiayaan Mikro, Kecil dan Menengah; 2. Kafalah Pembiayaan Multiguna; 3. Kafalah Pembiayaan KPR; 4. Kafalah Pembiayaan Konstruksi; 5. Kafalah Pembiayaan Usaha; 6. Kafalah <i>Surety Bond</i>; 7. Kafalah Bank Garansi (Kontra Bank Garansi); 8. Kafalah SKBDN; 9. Kafalah <i>Letter of Credit</i>; 10. Kafalah Kepabeanaan (<i>Custom Bond</i>); 11. Kafalah Transaksi Dagang.	1. Kafalah for Micro, Small and Medium Financing; 2. Kafalah for Multipurpose Financing; 3. Kafalah for Mortgage Financing; 4. Kafalah for Construction Financing; 5. Kafalah for Business Financing; 6. Kafalah for Surety Bond; 7. Kafalah for Bank Guarantee (Contra Bank Guarantee); 8. Kafalah for SKBDN; 9. Kafalah for Letter of Credit; 10. Kafalah for Customs (Custom Bond); 11. Kafalah for Trade Transaction.

Wilayah Operasional

Operational Areas



PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) telah memperoleh izin perubahan lingkup wilayah operasional menjadi nasional berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/D.05/2025 tanggal 9 Mei 2025

PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) obtained the permission to change the scope of the operational areas to national based on the Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-44/D.05/2025 dated 9 May 2025

KANTOR PUSAT

Gedung Jaya Lantai 3

Jl. M. H. Thamrin No. 12, Kelurahan Kebon Sirih,
Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi
DKI Jakarta – 10340



Struktur Organisasi

Organizational Structure

Struktur organisasi Perseroan melibatkan berbagai fungsi, termasuk, namun tidak terbatas pada:

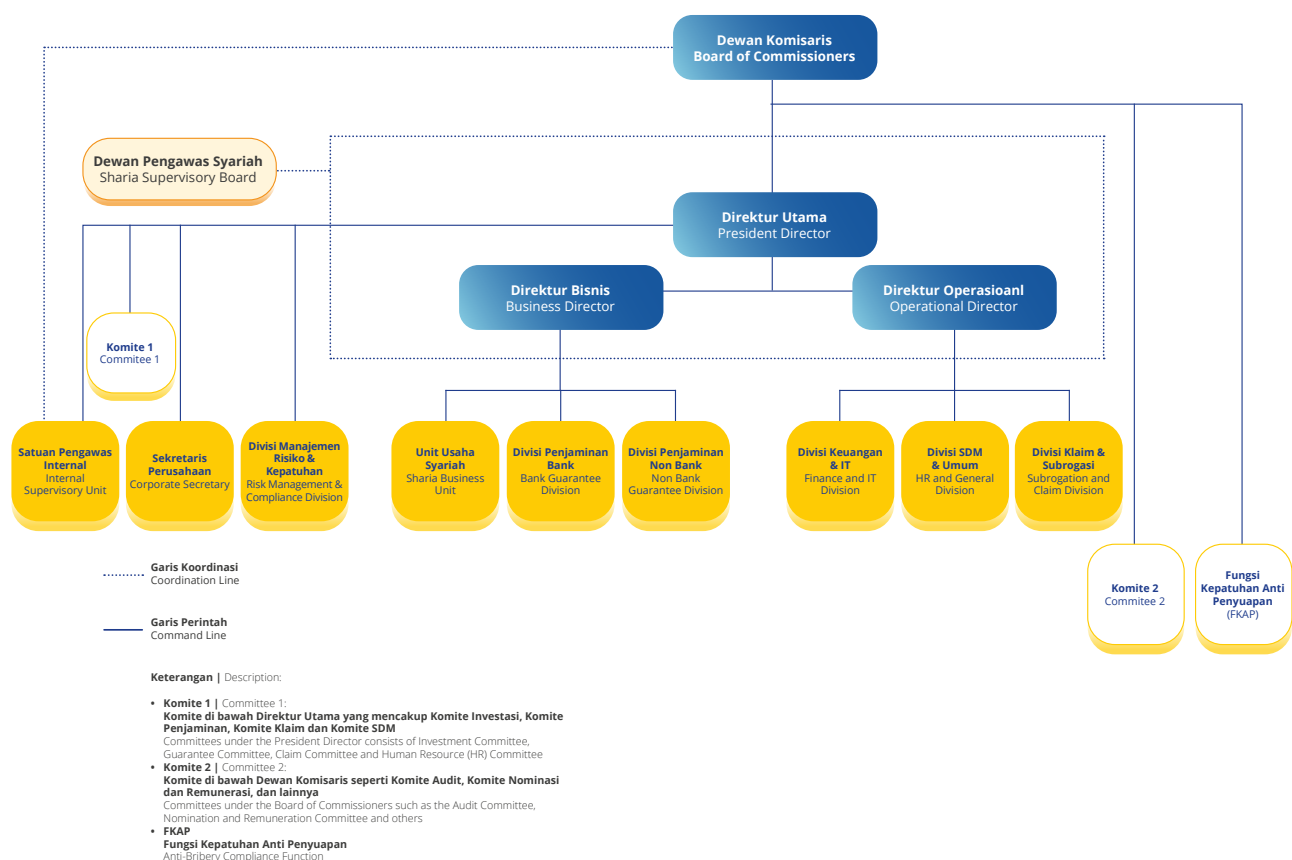
1. Fungsi Satuan Pengawas Internal
2. Fungsi Sekretaris Perusahaan
3. Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan
4. Fungsi Penjaminan Bank
5. Fungsi Penjaminan Non Bank
6. Fungsi Unit Usaha Syariah (UUS)
7. Fungsi Keuangan dan IT
8. Fungsi SDM dan Umum
9. Fungsi Klaim dan Subrogasi

Berdasarkan SK No. 990.10/JJ-1/KRW.04.01/KEPBER/2024 tentang Penetapan atas Pemberlakuan Masa Transisi Struktur Organisasi Perusahaan Tahun 2024 tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

The Company's organizational structure comprises of various functions, including but not limited to the following:

1. Internal Supervisory Unit Function
2. Corporate Secretary Function
3. Risk Management and Compliance Function
4. Bank Guarantee Function
5. Non-Bank Guarantee Function
6. Sharia Business Unit (UUS) Function
7. Finance and IT Function
8. HR and General Affairs Function
9. Claim and Subrogation Function

Based on Decree No. 990.10/JJ-1/KRW.04.01/KEPBER/2024 on Determining the Implementation of the Transition Period for the Company's Organizational Structure of Year 2024 dated 3 June 2024 is as follows:



Keanggotaan dalam Asosiasi dan Organisasi

Membership in Associations and Organizations

Untuk memperluas jaringan kemitraan dan memperkuat posisi dalam ekosistem industri penjaminan, Perseroan tidak hanya berpartisipasi sebagai anggota tetapi juga memegang peran strategis di sejumlah asosiasi dan organisasi. Keterlibatan aktif ini membuka ruang kolaborasi yang lebih luas sekaligus meningkatkan kredibilitas Perseroan di tingkat nasional. Keanggotaan dan kontribusi Perseroan dalam berbagai asosiasi tersebut antara lain:

To expand the partnership network and strengthen the position within the guarantee industry's ecosystem, the Company not only participate as member but also take strategic role in a number of associations and organizations. Its active involvement has opened space for more extensive collaboration and at the same time improve the Company's credibility at the national level. The Company's membership and contribution in various associations, among others, include the following:

No	Nama Asosiasi dan Organisasi	Posisi Perseroan dalam Asosiasi dan Organisasi Position of Company within Association and Organization	Lingkup Nasional atau Internasional National or International Scope	Name of Association and Organization
1	Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO)	Sekretaris Jenderal (Sekjen) Secretary General	Nasional / National	Indonesian Association of Guarantee Companies (ASIPPINDO)
2	Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (ASPENDA)	Wakil I Deputy I	Nasional / National	Regional Association of Guarantee Companies (ASPENDA)
3	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)	Anggota Member	Nasional / National	Association for Alternative Dispute Settlement (LAPS)

Perubahan Komposisi Manajemen

Change in Management Composition

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025, terdapat penambahan Dewan Komisaris.

CHANGE IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout the year 2025, several additions took place in the Board of Commissioners.

Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris per 31 Desember 2025

Composition of Members of the Board of Commissioners as of 31 December 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa dan Periode Jabatan Term and Period of Office
Andrianto Wahyu Adi	Komisaris Utama President Commissioner	- Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 871 Tahun 2023 dan 527/072 tanggal 15 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Perseroan. Shareholders Decree No. 871 of Year 2023 and 527/072 dated 15 December 2023 on the Dismissal and Appointment of the Company's Commissioners. - Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-111/PD.02/2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Andrianto Wahyu Adi Selaku Calon Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta. Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-111/PD.02/2024 dated 7 Maret 2024 on Results of Competency and Compliance Assessment of Andrianto Wahyu Adi as Candidate of President Commissioner Concurrently as Independent Commissioner of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta. - Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) atau disingkat "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" Nomor 37 tanggal 15 Maret 2024. Deed of Statement of Decision Outside of the General Assembly of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Regional Company) or "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" for short No. 37 dated 15 March 2024.	15 Desember 2023- 15 Desember 2027 15 December 2023- 15 December 2027
Iman Satria	Anggota Komisaris Member Commissioner	- Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 14 Tahun 2025 dan 267/072 tanggal 30 Juni 2025 tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) Shareholders Decree Outside of the General Assembly of Shareholders No. 14 of Year 2025 and 267/072 dated 30 June 2025 on the Changes in the Management Composition of the Credit Guarantee Limited Liability Company of Jakarta Region (Regional Company) - Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-600/PD.02/2025 tanggal 7 November 2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Iman Satria Selaku Calon Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-600/PD.02/2025 dated 7 November 2025 on the Results of competency and Compliance Assessment of Iman Satria as Candidate of Commissioner of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Regional Company) - Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) atau disingkat "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" Nomor 29 tanggal 24 November 2025 Deed of Statement of Decision Outside of the General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Regional Company) or in short as "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" No. 29 dated 24 November 2025	7 November 2025- 7 November 2029 7 November 2025- 7 November 2029

Perubahan Komposisi Manajemen

Change in Management Composition

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi.

CHANGE IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout the year 2025, there were no changes in the composition of the Board of Directors.

Susunan Keanggotaan Direksi per 31 Desember 2025

Composition of Members of the Board of Directors as of 31 December 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa dan Periode Jabatan Term and Period of Office
Agus Supriadi	Direktur Utama President Director	Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta Nomor 18 tanggal 21 Maret 2023 Deed of Statement of Decision Outside of the General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta No. 18 dated 21 March 2023	21 Maret 2023- 3 September 2026 21 March 2023- 3 September 2026
Jimmi Setya Budi	Direktur Operasional Director of Operations	Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta Nomor 18 tanggal 21 Maret 2023 Deed of Statement of Decision Outside of the General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta No. 18 dated 21 March 2023	21 Maret 2023- 6 Maret 2028 21 March 2023- 6 March 2028

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Pengawas Syariah.

CHANGE IN COMPOSITION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Throughout the year 2025, there were no changes in the composition of the Sharia Supervisory Board.

Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2025

Composition of Members of the Sharia Supervisory Board as of 31 December 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa dan Periode Jabatan Term and Period of Office
Masykuri Abdillah	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) atau disingkat "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" Nomor 61 tanggal 22 Maret 2024 Deed of Statement of Decision of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Regional Company) or "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" for shor No. 61 dated 22 March 2024.	22 Maret 2024- 21 Maret 2028 22 March 2024- 21 March 2028
Euis Amalia	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of the Sharia Supervisory Board	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) atau disingkat "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" Nomor 61 tanggal 22 Maret 2024 Deed of Statement of Decision of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Regional Company) or "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" No. 61 dated 22 March 2024	22 Maret 2024- 21 Maret 2028 22 March 2024- 21 March 2028

Perubahan Komposisi Manajemen

Change in Management Composition

KEPALA DIVISI

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Kepala Divisi.

DIVISION HEAD

Throughout the year 2025, there were no changes in the composition Division Heads.

Komposisi Kepala Divisi per 31 Desember 2025

Composition of Division Heads as of 31 December 2025

Nama Name	Jabatan Position
Wirendra Satwika Bimantara	Plt. Kepala SPI Acting Head of SPI and Compliance
Regina Kristiningsih	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
Mohamad Irwan Ramdhan	Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan Plt. Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi Head of Risk Management and Compliance Division Acting Head of Claim and Subrogation Division
Sonny Setiawan	Kepala Divisi Penjaminan Bank Head of Bank Guarantee Division
Reza Putra Yodhana	Plt. Kepala Divisi Penjaminan Non Bank / Acting Head of Non-Bank Guarantee Division
Sapto Bintoro	Kepala Unit Usaha Syariah / Head of Sharia Business Unit
Subhan Sahlan	Kepala Divisi Keuangan dan Informasi Teknologi (IT) / Head of Finance and Information Technology (IT) Division
Akhmad Fariz	Plt. Kepala Divisi SDM dan Umum / Acting Head of HR and General Affairs Division



Monumen Tugu Pancoran
Jakarta Pusat

Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners



Andrianto Wahyu Adi

Komisaris Utama
President Commissioner

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara : Indonesia Usia : 61 tahun Domisili : DKI Jakarta Nationality : Indonesia Age : 61 years Domicile : DKI Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) No. 37 tanggal 15 Maret 2024 Deed of Statement of Shareholders' Decision Outside of the General Meeting of Shareholders (Circular) No. 37 dated 15 March 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S1 Ekonomi Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (1989) • S2 Magister <i>Marketing and Finance</i> dari Emory University, Atlanta, Georgia (1997). • Bachelor's degree (S1) in Management from Universitas Gadjah Mada (29189) • Master's degree (S2) in Marketing and Finance from Emory University, Atlanta, Georgia, USA (197)
Riwayat Karier Professional Background	• Departemen <i>Head Trade Finance & Services</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2010); • <i>Group Head Wholesale Transaction Banking Solution</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011-2014); • <i>Group Head Product</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014-2015); • <i>Group Head Transaction Banking Wholesale Product</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015); • <i>Head of Transaction Banking 1</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2017); • Direktur Pengadaan Perum Bulog (2017-2018); • Direktur Komersial Perum Bulog (2018). • Head of Trade Finance & Services Department at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2010); • Group Head of Wholesale Transaction Banking Solution at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011-2014); • Group Head of Product at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014-2015); • Group Head of Transaction Banking Wholesale Product at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015); • Head of Transaction Banking 1 at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2017); • Director of Procurement at Food Logistics (Bulog) Public Corporation (2017-2018); • Director of Commerce at Food Logistics (Bulog) Public Corporation (2018).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• <i>Advisory Whosale Transactional Banking</i> PT Bank DKI • Komisaris Pabrik Gula Madubaru Yogyakarta • <i>Advisory Whosale Transactional Banking</i> PT Bank DKI • Commissioner of Madubaru Sugar Factory Yogyakarta
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali. No affiliation with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, as well as with Major/Controlling Shareholders.

Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners

Iman Satria

Anggota Komisaris
Member Commissioner



Data Pribadi Personal Data	Warga Negara : Indonesia Usia : 62 tahun Domisili : DKI Jakarta Nationality : Indonesia Age : 62 years Domicile : DKI Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) atau disingkat "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" Nomor 29 tanggal 24 November 2025. Deed of Statement of Decision Outside of the General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Regional Company) or in short as "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" No. 29 dated 24 November 2025.
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S1 <i>Bachelor of Finance</i> dari Indiana Universty, Bloomington, USA (1988) • S2 <i>Magister Management</i> dari Universitas Borobudur, Indonesia (2012). • Bachelor's degree (S1) of Finance from Indiana University, Bloomington, ISA (1988) • Master's degree (S2) in Management from Universitas Borobudur, Indoneia (2012).
Riwayat Karier Professional Background	• Manager Bank International Indonesia (BII) (1992 - 1993). • <i>Senior Manager Position</i>: Sub-branch Manager BII Time Square, Kuningan -Jakarta (1996 - 1998); • <i>Assistant Vice President Position</i>: Coordinator of Loan Work Out Collections Main Branch, Thamrin-Jakarta (1998 - 2002) • <i>Vice President Position</i>: Branch Manager BII Fatmawati, Jakarta (2002 - 2006) • Anggota Komisi E (Bidang Pembangunan) DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra (2009 - 2014) • Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra (2014 - 2019) • Ketua Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra (2019 - 2024) • Manager at Bank International Indonesia (BII) (1992 - 1993). • Senior Manager Position: Sub-branch Manager at BII Time Square, Kuningan -Jakarta (1996 - 1998); • Assistant Vice President Position: Coordinator of Loan Work Out Collections at Main Branch, Thamrin-Jakarta (1998-2002); • Vice President Position: Branch Manager at BII Fatmawati, Jakarta (2002-2006); • Member of Commission E (Field of Development) of DKI Jakarta Province from Gerindra Party Fraction (2009-2014); • Chairman of Commission D (Field of Development) of the Regional People's Representative Assembly (DPRD) of DKI Jakarta Province from Gerindra Party Fraction (2014-2019); • Chairman of Commission E (Field of Public Welfare) of the Regional People's Representative Assembly (DPRD) of DKI Jakarta Province from Gerindra Party Fraction (2019-2024);
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di Perseroan dan Perusahaan lain. No concurrent position at the Company and other Companies.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali. No affiliation with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, as well as with Major/ Controlling Shareholders.

Profil Direksi

Profile of the Board of Directors



Agus Supriadi

Direktur Utama
President Director

Data Pribadi Personal Data

Warga Negara : Indonesia
Usia : 58 tahun
Domisili : DKI Jakarta
Nationality : Indonesia
Age : 58 years
Domicile : DKI Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta Nomor 18 tanggal 21 Maret 2023
Deed of Statement of Decision Outside of the General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta No. 18 dated 21 March 2023.

Riwayat Pendidikan Educational Background

- Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada (1992);
- Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Islam Indonesia (1993);
- Magister Manajemen dari Universitas Andalas (2002).
- Bachelor's degree (Sarjana) in Law from Universitas Gadjah Mada (1992);
- Bachelor's degree (Sarjana) in Economic Management from Universitas Islam Indonesia (1993);
- Master's degree (Magister) in Management from Universitas Andalas (2002).

Riwayat Karier Professional Background

- Staf Muda I Bagian Penjaminan Komoditi Industri di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (1996-1998);
- Staf Muda Bagian Pengendalian, Divisi Penjaminan Bank di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (1996-2000);
- Staf Muda I Kantor Cabang Padang di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2000-2003);
- Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Samarinda di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2003-2005);
- Kepala Bagian SDM di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2005-2007);
- Kepala Bagian Pengelola Gedung, Divisi SDM dan Umum di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2007-2008);
- Kepala Bagian Operasional Samarinda di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2008-2009);
- Kepala Bagian Pengendalian Syariah di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2009-2010);
- Kepala Bagian Penjaminan Syariah 2 di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2010-2012);
- Kepala Bagian Operasional 1, Kantor Cabang DKI di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2012);
- Pemimpin Kantor Anak Cabang Banjarmasin di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2012-2013);
- Pemimpin Kantor Cabang Banjarmasin di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2013-2016);
- Pemimpin Kantor Cabang Samarinda di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2015-2016);
- Pemimpin Kantor Cabang Semarang di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2016);
- Pemimpin Kantor Cabang Surabaya di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2016-2017);
- Pranata Utama Direktorat Bisnis Penjaminan di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2017);

Profil Direksi

Profile of the Board of Directors

	• Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2017-2018); • Pemimpin Wilayah III Jakarta di PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2018-2021); • Direktur Bisnis dan Plt. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko di PT Jamkrida Jakarta (2021-2022); • Plt. Direktur Utama di PT Jamkrida Jakarta (2022-2023). • Junior Staff I of Industrial Commodity Guarantee Division at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (1996-1998); • Junior Staff of Control Section, Bank Guarantee Division at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (1996-2000); • Junior Staff I of Padang Branch Office at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2000-2003); • Head of Operational Section of Samarinda Branch Office at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2003-2005); • Head of HR Section at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2005-2007); • Head of Building Management of HR and General Affairs Division at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2007-2008); • Head of Samarinda Operational Section at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2008-2009); • Head of Sharia Control Section at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2009-2010); • Head of Sharia 2 Guarantee Section at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2010-2012); • Head of Operations 1 Section of DKI Branch Office at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2012); • Head of Banjarmasin Subsidiary Branch Office at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2012-2013); • Head of Banjarmasin Branch Office at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2013-2016); • Head of Samarinda Branch Office at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2015-2016); • Head of Semarang Branch Office at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2016); • Head of Surabaya Branch Office at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2016-2017); • Main Officer of Guarantee Business Directorate at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2017); • Head of Claim and Subrogation Division at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2017-2018); • Head of Jakarta Region III at PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (2018-2021); • Business Director and Acting Director of Finance and Risk Management at PT Jamkrida Jakarta (2021-2022); • Acting President Director at PT Jamkrida Jakarta (2022-2023).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di Perseroan dan Perusahaan lain. No concurrent position at the Company and other Companies.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali. No affiliation with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, as well as with Major/Controlling Shareholders.

Profil Direksi

Profile of the Board of Directors



Jimmi Setya Budi

Direktur Operasional
Director of Operations

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara : Indonesia Usia : 45 tahun Domisili : DKI Jakarta Nationality : Indonesia Age : 45 years Domicile : DKI Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta Nomor 18 tanggal 21 Maret 2023 Deed of Statement of Decision Outside of the General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta No. 18 dated 21 March 2023.
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Brawijaya (2002); • Magister Universitas IPWJJA Jakarta bidang Manajemen (2025) • Bachelor's degree (Sarjana) of Civil Engineering from Universitas Brawijaya (2002); • Master's degree (Magister) in Management from Universitas IPWJJA Jakarta (2025)
Riwayat Karier Professional Background	• Operation Officer di PT Bank Danamon Indonesia (2004-2007); • <i>Flying Operational Officer</i> di PT Bank Danamon Indonesia (2007-2008); • <i>Unit Manager</i> di PT Bank Danamon Indonesia (2009-2012); • <i>Flying Unit Manager</i> di PT Bank Danamon Indonesia (2012-2013); • <i>Cluster Manager</i> di PT Bank Danamon Indonesia (2013-2017); • Kepala Divisi Klaim, Subrogasi, dan Manajemen Risiko di PT Jamkrida Jakarta (2018-2023). • Operation Officer at PT Bank Danamon Indonesia (2004-2007); • Flying Operational Officer at PT Bank Danamon Indonesia (2007-2008); • Unit Manager at PT Bank Danamon Indonesia (2009-2012); • Flying Unit Manager at PT Bank Danamon Indonesia (2012-2013); • Cluster Manager at PT Bank Danamon Indonesia (2013-2017); • Head of Claim, Subrogation and Risk Management Division at PT Jamkrida Jakarta (2018-2023).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di Perseroan dan Perusahaan lain. No concurrent position at the Company and other Companies.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali. No affiliation with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, as well as with Major/Controlling Shareholders.

Profil Direksi

Profile of the Board of Directors

Rr. Satridia Juliandini

Direktur Bisnis
Director of Business

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara : Indonesia Usia : 42 tahun Domisili : DKI Jakarta Nationality : Indonesia Age : 42 years Domicile : DKI Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 8 Tahun 2026 dan No. 30 Tahun 2026 PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta tanggal 10 Maret 2026 Deed of statement of shareholder decisions outside the general meeting of shareholders No. 8 of 2026 and No. 30 of 2026 of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta dated March 10, 2026
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Sarjana Teknik Informatika (Rekayasa Perangkat Lunak). - Institut Teknologi Bandung (ITB) - Teknik Informatika, 2001-2006 - Magister Administrasi Bisnis dan Manajemen, Umum) - Universitas Duke - Sekolah Bisnis Fuqua, 2014-2016 - Magister Business Administration and Management, General) - Duke University - The Fuqua School of Business, 2014-2016 - Bachelor of Informatics Engineering (Computer Software Engineering). - Institut Teknologi Bandung (ITB) - Teknik Informatika, 2001-2006,
Riwayat Karier Professional Background	- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. AVP-Program Loyalitas & Aktivasi Agu 2016-Mar 2019 - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. AVP-Kebijakan Risiko Hipotek & Perjanjian Pengembang Apr 2019-Mei 2021 - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Wakil Presiden - Risiko & Analisis Kartu Kredit Jun 2021-Dec 2024 - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. VP-Risiko & Analisis Hipotek Jan-Dec 2025 - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. AVP-Loyalty & Activation Programs Aug 2016-Mar 2019 - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. AVP-Mortgage Risk Policy & Developer Agreement Apr 2019-May 2021 - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. VP - Credit Card Risk & Analytics Jun 2021-Dec 2024 - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. VP-Mortgage Risk & Analytics Jan-Dec 2025
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di Perseroan dan Perusahaan lain. No concurrent position at the Company and other Companies.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali. No affiliation with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, as well as with Major/Controlling Shareholders.

* Dalam proses fit and proper test OJK | In the process of OJK's fit and proper test

Profil Dewan Pengawas Syariah

Profile of the Sharia Supervisory Board



Masykuri Abdillah

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Chairman of the Sharia Supervisory Board

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara : Indonesia Usia : 67 tahun Domisili : Tangerang Selatan, Banten Nationality : Indonesia Age : 67 years Domicile : South Tangerang, Banten
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Akta Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn No. 61 Tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jakarta dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0143902 tanggal 05 April 2024. Notarial Deed of Ashoya Ratam, SH, MKn No. 61 of Year 2024 dated 22 March 2024 regarding the Re-Appointment of the Sharia Supervisory Board of PT Jamkrida Jakarta and registered in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH. 01.09-0143902 dated 05 April 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Muda dari Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ), Jakarta (1981); • Sarjana Jurusan Muamalat dari Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1985); • Doktor (S3) Bidang Studi Islam, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Timur Tengah dari Universitas Hamburg, Jerman (1995). • Bachelor's degree (Sarjana Muda) from Faculty of Sharia of Al-Quran Science College (PTIQ), Jakarta (1981); • Bachelor's degree (Sarjana) in Muamalat from Faculty of Sharia of IAIN Syarif Hidayatulla, Jakarta (1985); • Doctorate degree (S3) in Islam Studies of the Faculty of Middle Eastern History and Culture from Hamburg University, Germany (1995).
Riwayat Karier Professional Background	• Ketua Jurusan Muamalat/Ekonomi Islam, Fakultas Syariah di IAIN Jakarta (1997-1998); • Pembantu Rektor IV (Bidang Kerja Sama) di IAIN Jakarta (2000-2002); • Pembantu Rektor I (Bidang Akademik) di UIN Jakarta (2003-2007); • Sekretaris Anggota Wantimpres (2008-2014); • Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Asuransi Squeslife Syariah (2008-2012); • Direktur Sekolah Pascasarjana (SPs) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015-2019); • Staf Khusus Wakil Presiden RI (2019-2024); • Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Jamkrida Jakarta (2019-sekarang). // • Head of Faculty of Muamalat/Islamic Economy, of Faculty Faculty of Sharia at IAIN Jakarta (1997-1998); • Assitant Chancellor IV (Field of Cooperation) at IAIN Jakarta (2000-2002); • Assistant Chancellor I (Field of Academics) at UIN Jakarta (2003-2007); • Secretary to Members of Wantimpres (2008-2014); • Chairman of Sharia Supervisory Board (DPS) at Squeslife Sharia Insurance (2008-2012); • Director of Postgraduate School (SPs) at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015-2019); • Special Staff to the President of the Republic of Indonesia (2019-2024); • Chairman of the Sharia Supervisory Board (DPS) at Jamkrida Jakarta (2019-present).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Dosen/Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum serta Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1996 sekarang) Professor of the Faculty of Sharia and Law and Postgraduate School at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1996-present)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali. No affiliation with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, as well as with Major/Controlling Shareholders.

Profil Dewan Pengawas Syariah

Profile of the Sharia Supervisory Board



Euis Amalia

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Member of the Sharia Supervisory Board

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara : Indonesia Usia : 54 tahun Domisili : Tangerang Selatan, Banten Nationality : Indonesia Age : 54 years Domicile : South Tangerang, Banten
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Akta Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn No. 61 Tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jakarta dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0143902 tanggal 05 April 2024. Notarial Deed of Ashoya Ratam, SH, MKn No. 61 of Year 2024 dated 22 March 2024 regarding the Re-Appointment of the Sharia Supervisory Board of PT Jamkrida Jakarta and registered in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH. 01.09-0143902 dated 05 April 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Jurusan Peradilan Agama dari UIN Syarif Hidayatullah (1995); • Magister Pengkajian Islam dari UIN Syarif Hidayatullah (1999); • Doktor Pengkajian Islam/Konsentrasi Ekonomi Islam dari UIN Syarif Hidayatullah (2008). // • Bachelor's degree (Sarjana) Religious Court from UIN Syarif Hidayatullah (1995); • Master's degree (Magister) in Islamic Studies from UIN Syarif Hidayatullah (1999); • Doctorate degree in Islamic Studies/Concentration on Islamic Economy from UIN Syarif Hidayatullah (2008).
Riwayat Karier Professional Background	• Ketua Jurusan/Program Studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ekonomi Islam (2006-2014); • Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014-2019). • Head of Department/Study Program at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta of Islamic Economy (2006-2014); • Assistant Dean of the Academic Department of the Faculty of Sharia and Law at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014-2019).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN (S1, S2), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (S1, S3) dan Pascasarjana UIN (S2, S3) (2019-sekarang). • Dewan Pengawas syariah PT MBK Ventura • Professor at Faculty of Sharia and Law of UIN (S1, S2), Faculty of Economics and Business (S1, S3) and Postgraduate of UIN (S2, S3) (2019-present). • Sharia Supervisory Board of PT MBK Ventura
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali. No affiliation with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, as well as with Major/Controlling Shareholders.

Profil Kepala Divisi

Profile of the Head Division



Wirendra Satwika Bimantara

Plt. Kepala SPI

Acting Head of SPI and Compliance

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara : Indonesia Usia : 38 tahun Domisili : DKI Jakarta	Nationality : Indonesia Age : 38 years Domicile : DKI Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Tarumanegara; - Magister Manajemen dari PPM School of Management. - Bachelor's degree (Sarjana) of Mechanical Engineering from Universitas Tarumanegara; - Master's degree (Magister) in Management from PPM School of Management.	
Riwayat Karier Professional Background	- General Manager Assistant for R&D di PT Inter Pratama Studio Laboratorium (Interstudio) (2011-2012) - Mengawali karier di PT Jamkrida Jakarta sebagai Staf Keuangan, SDM dan Administrasi Umum (sejak 2016); - Mendapat tugas tambahan sebagai Staf Dewan Komisaris (2021-2022); - Kepala Bagian SDM (2021-2024); - Plt. Kepala SPI (2024-sekarang). - Assistant to General Manager of R&D at PT Inter Pratama Studio Laboratorium (Interstudio) (2011-2012) - Began career at PT Jamkrida Jakarta as Staff in Finance, HR and General Administration Department (since 2016); - Additional assignment as Staff to the Board of Commissioners (2021-2022); - Head of HR Section (2021-2024); - Acting Head of SPI (2024-present).	



Regina Kristiningsih

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara : Indonesia Usia : 51 tahun Domisili : DKI Jakarta	Nationality : Indonesia Age : 51 years Domicile : DKI Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Manajemen Keuangan dari Universitas Dr. Soetomo, Surabaya. Bachelor's degree (Sarjana) in Financial Management from Universitas Dr. Soetomo, Surabaya.	
Riwayat Karier Professional Background	- Manajer Keuangan, SDM, dan Administrasi Umum di PT Jamkrida Jatim (2009-2014); - Mengawali karier di PT Jamkrida Jakarta sebagai Manajer Keuangan, SDM, dan Administrasi Umum (sejak 2014); - Manajer Penjaminan Non Bank (2017-2019) - Kepala SPI dan Kepatuhan (2019-2022); - Plt. Kepala SPI dan Kepatuhan (2022-2024) - Sekretaris Perusahaan (2022-sekarang) - Finance, HR and General Administration Manager at PT Jamkrida Jatim (2009-2014); - Began career at PT Jamkrida Jakarta as Finance, HR and General Administration Manager (since 2014); - Manager of Non-Bank Guarantee (2017-2019); - Head of SPI and Compliance (2019-2022); - Acting Head of SPI and Compliance (2022-2024) - Corporate Secretary (2022-present)	

Profil Kepala Divisi

Profile of the Head Division

Mohamad Irwan Ramdhan

Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Plt. Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi

Head of Risk Management and Compliance Division

Acting Head of Claim and Subrogation Division

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara : Indonesia	Nationality : Indonesia
	Usia : 41 tahun	Age : 41 years
	Domisili : Bekasi, Jawa Barat	Domicile : Bekasi, West Java
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Bachelor's degree in International Relations from Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)	
Riwayat Karier Professional Background	- Operational Banking di Bank Muamalat (2008-2013); - Financing/Credit Analyst Manager di Bank Muamalat (2014-2019); - Credit Risk & Policy Department Head di Bank Sahabat Sampoerna (2019-2022); - Credit & Risk Manager di TaniHub Grup (2022); - Mengawali karier di PT Jamkrida Jakarta sebagai Kepala Divisi Klaim, Subrogasi dan Manajemen Risiko (sejak 2024); - Kepala Plt. Divisi Klaim dan Subrogasi (2024-sekarang); - Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan (2023-sekarang). - Operational Banking at Bank Muamalat (2008-2013); - Manager of Financing/Credit Analyst at Bank Muamalat (2014-2019); - Head of Credit Risk & Policy Department at Bank Sahabat Sampoerna (2019-2022); - Manager of Credit & Risk at TaniHub Grup (2022); - Began career at PT Jamkrida Jakarta as Head of Claim, Subrogation and Risk Management Division (since 2024); - Acting Head of Claim and Subrogation Division (2024-present); - Head of Risk Management and Compliance Division (2023-present).	

Sonny Setiawan

Kepala Divisi Penjaminan Bank

Head of Bank Guarantee Division

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara : Indonesia	Nationality : Indonesia
	Usia : 48 tahun	Age : 48 years
	Domisili : Depok, Jawa Barat	Domicile : Depok, West Java
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi, Jurusan Manajemen dari Universitas Merdeka Malang Bachelor of Economics, Department of Management at Merdeka Malang University	
Riwayat Karier Professional Background	- Kepala Gudang Area Malang, Penagihan Area Surabaya, dan Salesman Area Malang di PT Megacahaya Teknikatama (distributor resmi Phillips Lighting) (2002 – 2004) - Sales Officer Unit Lawang, Unit Manager Singosari dan Batu, Flying Unit Manager Malang, Cluster Manager Jember dan Banyuwangi, Regional Funding dan Services Manager Malang di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2004 – 2015) - Mengawali karier di PT Jamkrida Jakarta sebagai Kepala Divisi Penjaminan (sejak 2015) - Head of Malang Area Warehouse, Surabaya Area Billing, and Malang Area Salesman at PT Megacahaya Teknikatama (official distributor of Phillips Lighting) (2002 – 2004) - Sales Officer for Lawang Unit, Unit Manager for Singosari and Batu, Flying Unit Manager for Malang, Cluster Manager for Jember and Banyuwangi, Regional Funding & Services Manager for Malang at PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2004 – 2015) - Started his career at PT Jamkrida Jakarta as Head of Guarantee Division (since 2015)	

Profil Kepala Divisi

Profile of the Head Division



Reza Putra Yodhana

Plt. Kepala Divisi Penjaminan Non Bank

Acting Head of Non-Bank Guarantee Division

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara : Indonesia Usia : 36 tahun Domisili : DKI Jakarta	Nationality : Indonesia Age : 36 years Domicile : DKI Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Agribisnis dari Universitas Padjajaran Bachelor's degree (Sarjana) in Agribusiness from Universitas Padjajaran	
Riwayat Karier Professional Background	• Staf Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Kehutanan dan Pertanian (2014-2017); • Mengawali karier di PT Jamkrida Jakarta sebagai Staf Divisi Penjaminan (sejak 2017); • Kepala Bagian Penjaminan Non Bank di PT Jamkrida (2021-2024); • Plt. Kepala Divisi Penjaminan Non Bank di PT Jamkrida (2024-sekarang). • Staff in Agriculture Field of the Food, Forestry and Agriculture Security Agency (2014-2017); • Began career at PT Jamkrida Jakarta as Staff of Guarantee Division (since 2017); • Head of Non-Bank Guarantee Section at PT Jamkrida (2021-2024); • Acting Head of Non-Bank Guarantee Division at PT Jamkrida (2024-present).	



Sapto Bintoro

Kepala Unit Usaha Syariah

Head of Sharia Business Unit

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara : Indonesia Usia : 49 tahun Domisili : Bekasi, Jawa Barat	Nationality : Indonesia Age : 49 years Domicile : Bekasi, West Java
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta Bachelor's degree (Sarjana) in Economics from the Institute of Economic Science of Ahmad Dahlan Jakarta	
Riwayat Karier Professional Background	• <i>Officer Development Program (ODP)/Risk and Collection Officer Divisi BSK (Bisnis Kartu)</i> di PT Bank BNI (2000 - 2001); • <i>Manager Risk and Collection Divisi Card Business Division (CBD)</i> di PT Bank BNI Syariah (2010-2019); • Direktur Bisnis PT BPRS ATTAQWA (2019-2020); • <i>Head Collection Region 3 Semarang, Jawa Tengah</i> di PT Home Credit Indonesia (2020 - 2021); • <i>Deputy General Manager Administrasi Pembiayaan, Remedial dan Recovery Division</i> PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah (2021-2024); • Mengawali karier di PT Jamkrida Jakarta sebagai Kepala Unit Usaha Syariah (sejak 2024-sekarang). • Officer Development Program (ODP) / Risk and Collection of BSK (Card Business) Division at PT Bank BNI (2000 - 2001); • Manager of Risk and Collection of Card Business Division (CBD) at PT Bank BNI Syariah (2010 - 2019); • Director of Business at PT BPRS ATTAQWA (2019-2020); • Head of Collection of Region 3 Semarang, Jawa Tengah at PT Home Credit Indonesia (2020 - 2021); • Deputy General Manager of Financing Administration, Remedial and Recovery Division at PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah (2021-2024); • Began career at PT Jamkrida Jakarta as Head of Sharia Business Unit (since 2024-present).	

Profil Kepala Divisi

Profile of the Head Division



Subhan Sahlan

Kepala Divisi Keuangan dan i nformasi Teknologi (IT)

Head of Finance and Information Technology (IT) Division

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara : Indonesia Usia : 44 tahun Domisili : DKI Jakarta	Nationality : Indonesia Age : 44 years Domicile : DKI Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Akuntansi dari Universitas Brawijaya Bachelor's degree (Sarjana) in Accounting from Universitas Brawijaya	
Riwayat Karier Professional Background	- Akuntan di Kantor Akuntan Publik Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan (2006-2014); - Mengawali karier di PT Jamkrida Jakarta sebagai Manajer Akuntansi (sejak 2015). - Kepala Unit Usaha Syariah di PT Jamkrida (2019-2021); - Kepala Divisi Keuangan, IT & SDM Umum di PT Jamkrida (2021-2024); - Kepala Divisi Keuangan & IT (2024-sekarang). // - Accountant at Bambang, Sutjipto Ngumar and Partners Public Accounting Office (2006-2014); - Bagan career at PT Jamkrida Jakarta as Accounting Manager (since 2015). - Head of Sharia Business Unit at PT Jamkrida (2019-2021); - Head of Finance, IT & General HR Division at PT Jamkrida (2021-2024); - Head of Finance & IT Division (2024-present).	



Akhmad Fariz

Plt. Kepala Divisi SDM dan Umum

Acting Head of HR and General Affairs Division

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara : Indonesia Usia : 35 tahun Domisili : Depok, Jawa Barat	Nationality : Indonesia Age : 35 years Domicile : Depok, West Java
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Jenderal Soedirman Bachelor's degree in Electrical Engineering from Universitas Jenderal Soedirman	
Riwayat Karier Professional Background	<i>Project Manager</i> Super Camp Singapore Infinity (2014-2015) - Mengawali karier di PT Jamkrida Jakarta sebagai Staf Divisi Penjaminan (sejak 2015); - Kepala Bagian Penjaminan Bank (2021-2024); - Plt. Kepala Divisi SDM dan Umum (2024-sekarang). <i>Project Manager</i> of Super Camp Singapore Infinity (2014-2015) - Began career at PT Jamkrida Jakarta as Staff of Guarantee Division (since 2015); - Head of Bank Guarantee Section (2021-2024); - Acting Head of HR and General Affairs Division (2024-present).	

Profil Kepala Divisi

Profile of the Head Division



Rizqy Zulkarnaen

Plt. Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi

Acting Head of Claim and Subrogation Division

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara : Indonesia		Nationality	: Indonesia
	Usia : 36 tahun		Age	: 36 years
	Domisili : Depok - Jawa Barat		Domicile	: Depok - West Java
Riwayat Pendidikan Educational Background	Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember tahun 2011 Faculty of Agricultural Technology, University of Jember, year 2011			
Riwayat Karier Professional Background	• Karyawan BNI Syariah Cabang Sidoarjo (2012-2013) • Karyawan Bank Jatim Cabang Sidoarjo (2013-2017) • Mengawali Karier di PT Jamkrida Jakarta sebagai Staf Klaim dan Subrogasi (sejak Februari 2017) • Kepala Bagian Klaim dan Subrogasi (2023-2024) • Kepala Bagian Subrogasi (2024-2026) • Plt Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi (2026-sekarang) • BNI Syariah Employee Sidoarjo Branch (2012-2013) • Employee of Bank Jatim Sidoarjo Branch (2013-2017) • Starting a Career at PT Jamkrida Jakarta as a Claims and Subrogation Staff (since February 2017) • Head of Claims and Subrogation Section (2023-2024) • Head of Subrogation Division (2024-2026) • Acting Head of Claims and Subrogation Division (2026-present)			

* SK Direksi pertanggal 20 Februari 2026 | Board of Directors Decree dated February 20, 2026



Monumen Selamat Datang Bundaran HI
Jakarta Pusat

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Perseroan berkomitmen menerapkan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi dalam seluruh proses ketenagakerjaan sebagai fondasi penting dalam mendukung operasional penjaminan yang profesional dan akuntabel. Proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan adil berdasarkan kualifikasi serta kompetensi yang dibutuhkan, sehingga setiap posisi diisi oleh talenta yang tepat dan mampu mendukung kualitas analisis risiko, pelayanan penjaminan, serta hubungan kemitraan dengan lembaga keuangan. Prinsip kesetaraan gender diterapkan secara konsisten mulai dari seleksi hingga perlakuan kerja, termasuk kesempatan promosi dan pemenuhan hak karyawan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau faktor lain yang tidak relevan dengan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya dan mengembangkan karier berdasarkan kompetensi dan kontribusinya.

Untuk menjaga kualitas kinerja yang selaras dengan standar industri penjaminan, Perseroan menerapkan sistem evaluasi berbasis *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditinjau setiap tahun. KPI mencakup aspek pencapaian kerja, kepatuhan terhadap kebijakan internal, ketepatan analisis risiko, kualitas pelayanan penjaminan, serta perilaku yang mencerminkan tata nilai BETAWI. Hasil penilaian menjadi dasar pengambilan keputusan terkait pengembangan kompetensi, peningkatan kesejahteraan, serta pemetaan jenjang karier karyawan.

Pada tahun 2025, Perseroan melakukan penyesuaian KPI guna meningkatkan objektivitas penilaian, menyelaraskan indikator dengan kebutuhan bisnis penjaminan yang semakin kompleks, serta memastikan setiap karyawan memiliki arah pencapaian yang lebih terukur dan relevan dengan target strategis Perseroan. Penyesuaian ini diharapkan semakin memperkuat budaya kerja yang produktif, meningkatkan akurasi proses penjaminan, serta mendukung pengembangan SDM yang kompeten di bidang mitigasi risiko dan layanan pembiayaan UMKMK.

Promosi jabatan dan penetapan grade dilaksanakan melalui seleksi berjenjang yang mengacu pada hasil penilaian kinerja serta kesiapan kompetensi. Perseroan juga menyediakan berbagai program pelatihan, baik teknis maupun manajerial, untuk memperkuat pemahaman karyawan terkait manajemen risiko, proses penjaminan, literasi keuangan, serta layanan pelanggan sebagai bagian dari pengembangan karier jangka panjang.

The Company is committed to implementing the principles of equality and non-discrimination throughout the employment process as an important foundation in supporting guarantee operation that is professional and accountable. Recruitment process is carried out in transparent and fair manner based on qualifications as well as competencies required, so that each position is filled by the right talent and capable of supporting the quality of risk analysis, guarantee services, as well as partnership relations with financial institutions. The principle of gender equality is applied consistently, starting from the selection stage up to work behavior, including the opportunity for promotion and fulfilment of employees' rights without prejudice of gender, ethnicity, religion, race and other factors that are not relevant with the needs of the organization. Thus, each employee has the same chance to work and develop career based on competency and contribution.

To maintain performance quality in line with the standards of the guarantee industry, the Company applies an assessment system based on Key Performance Indicator (KPI) reviewed annually. KPI covers the aspects of work achievement, compliance towards internal policies, accuracy of risk analysis, guarantee services quality, as well as behaviors that reflect BETAWI values. Assessment results serve as basis to decision making related to competency development, welfare improvement, as well as employee career path mapping.

In the year 2025, the Company made adjustments to the KPIs in order to improve objectivity of the assessments, align indicators with the increasingly complex needs of the guarantee business, and ensure that each employee has a more measurable direction of achievement that is relevant to the Company's strategic targets. These adjustments are expected to increasingly strengthen the productive work culture, increase accuracy in underwriting process, as well as encourage HR development that is competent in risk mitigation field and MSMECO financing services.

Job promotion and determining grade are carried out through tiered selection that refers to performance assessment results as well as competency readiness. The Company also provides various training programs, both technical and managerial, to strengthen employees' understanding of risk management, guarantee process, financial literacy, as well as customer service as part of long-term career development.

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Dalam suasana kerja yang menghargai keberagaman, Perseroan memandang perbedaan latar belakang sebagai nilai tambah yang dapat memperkaya sudut pandang dalam pengambilan keputusan dan penyusunan strategi bisnis. Semangat kebersamaan ini menjadi kekuatan bagi Perseroan dalam membangun tim kerja yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing.

In a working environment that respects diversity, the Company views differences in background as an added value that enriches point of view in making decisions and setting business strategies. Such spirit of togetherness becomes a strength for the Company in building a working team that is inclusive, adaptive and competitive.

DEMOGRAFI KARYAWAN

Per 31 Desember 2025, Perseroan mempekerjakan total 79 karyawan yang terdiri atas karyawan tetap dan tidak tetap. Angka ini menunjukkan pertumbuhan 10% dibandingkan jumlah karyawan tahun 2024 yang berjumlah 72 orang. Penambahan tenaga kerja tersebut selaras dengan kebutuhan organisasi dalam menjaga kelancaran operasional penjaminan dan meningkatkan kualitas layanan. Rincian lebih lanjut mengenai profil dan komposisi karyawan Perseroan disajikan sebagai berikut:

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

As of 31 December 2025, the Company engages 79 employees of both permanent and non-permanent status. This total shows a growth of 10% compared to the 72 total number of employees in the year 2024. This increase was in line with the needs of the organization in maintaining the smooth run of the assurance operation and improvement of service quality. Further details on the profile and composition of the Company's employees are presented in the tables below:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Employee Composition based on Gender

Jenis Kelamin	2025		2024		Gender
	Jumlah	Total	Jumlah	Total	
Laki-laki	49	62	43	60	Male
Perempuan	30	38	29	40	Female
Jumlah	79	100	72	100	Total

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Employee Composition based on Level of Education

Jenjang Pendidikan	2025		2024		Level of Education
	Jumlah	Total	Jumlah	Total	
Magister (S2)	6	8	6	8	Master (S2)
Sarjana (S1)	60	76	54	75	Bachelor (S1)
Diploma (D1-D3)	4	5	3	4	Diploma (D1-D3)
SMA atau Jenjang Sederajat	9	11	9	13	High School or Equivalent Level
Jumlah	79	100	72	100	Total

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

Employee Composition based on Level of Position

Level Jabatan	2025	%	2024	%	Position Level
Kepala Divisi	8	10	8	11	Division Head
Kepala Bagian	10	13	12	17	Section Head
Staf & Pelaksana	61	77	52	72	Executor Staff
Jumlah	79	100	72	100	Total

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Employee Composition based on Age

Usia	2025		2024		Age
	Jumlah	Total	Jumlah	Total	
<20 tahun	1	1	-	0	<20 years
21-30 tahun	31	39	23	32	21-30 years
31-40 tahun	34	43	35	49	31-40 years
41-50 tahun	10	13	11	15	41-50 years
>50 tahun	3	4	3	4	>50 years
Jumlah	79	100	72	100	Total

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

Penguatan kapasitas SDM manusia merupakan salah satu prioritas strategis Perseroan dalam mendukung kualitas layanan penjaminan yang akurat, andal, dan sesuai standar industri. Di tengah persaingan talenta yang semakin kompetitif, JAMKRIDA Jakarta berupaya menarik dan mempertahankan SDM terbaik dengan menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, kesempatan pengembangan karier yang jelas, serta budaya kerja yang mendorong kinerja berkelanjutan.

Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis penjaminan yang terus berkembang. Fokus pelatihan diarahkan pada peningkatan kapasitas analisis risiko, literasi keuangan, pelayanan penjaminan, serta keterampilan digital untuk mendukung proses kerja yang semakin terotomatisasi dan *future fit*. Selain itu, Perseroan juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan melalui program yang mendukung kesehatan fisik dan mental agar setiap insan Perseroan dapat bekerja secara optimal.

EMPLOYEE TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT

Strengthening of employees' competency is one of the Company's strategic priorities in supporting guarantee services quality that is accurate, reliable, and in line with industry standards. In the midst of increasingly competitive talent race, JAMKRIDA Jakarta takes effort to attract and retain the best HR talents by providing a conducive working environment, a clear career development opportunity, as well as a working culture that encourages sustainable performance.

This commitment is manifested through the implementation of training and competency development programs in order to fulfil the needs of the continuously expanding guarantee business. Training focus is directed on the improvement of risk analysis capacity, financial literacy, guarantee services, as well as digital skills to support work process that is increasingly automated and future fit. In addition, the Company also pays attention on employees' welfare through programs that support physical and mental health so that each Company personnel can work optimally.

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Sepanjang tahun 2025, Perseroan melaksanakan berbagai program pelatihan internal maupun eksternal, termasuk program *Continuous Professional Education* yang wajib diikuti oleh karyawan pemegang sertifikasi manajemen risiko guna menjaga dan meningkatkan kompetensi profesionalnya. Program ini memastikan seluruh karyawan yang terlibat dalam proses penjaminan mampu menjalankan tugas sesuai standar tata kelola dan mitigasi risiko yang berlaku. Sertifikasi kompetensi yang dimiliki karyawan Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Throughout the year 2025, the Company held various internal and external training programs, including the Continuous Professional Education program which is mandatory for employees with risk management certification in order to maintain and improve their professional competency. This program ensures that all employees who are involved in guarantee process are able to carry out their duties in accordance with governance standards and applicable risk mitigation. Competency certification held by Company employees as of 31 December 2025 is as follows:

No	Jenis Sertifikasi Kompetensi/Profesi Type of Competency/Profession Certification	Jumlah Karyawan Pemegang Sertifikasi Number of Certified Employee
1	Sertifikasi Skema Komisaris Certification of Commissioners Scheme	1
2	Sertifikasi LSP Penjaminan Skema Direktur Penjaminan/Bisnis LSP Guarantee Certification for Guarantee/Business Director Scheme	1
3	Sertifikasi Kompetensi Skema Pejabat Eksekutif Bidang Pemasaran Certification of Competency for Marketing Executive Official Scheme	1
4	Sertifikasi LSP Penjaminan Skema Tenaga Ahli Penjaminan LSP Guarantee Certification for Guarantee Expert Scheme	3
5	Sertifikasi LSP Penjaminan Skema Tenaga Ahli Penjaminan Syariah LSP Guarantee Certification for Sharia Guarantee Expert Scheme	1
6	Sertifikasi LSP Penjaminan Skema Staf Analis Klaim & Subrogasi LSP Guarantee Certification for Claim & Subrogation Analyst Staff Scheme	7
7	Sertifikasi LSP Penjaminan Skema Staf Analis Penjaminan LSP Guarantee Certification for Guarantee Analyst Staff Scheme	4
8	Sertifikasi Nasional CRMO (Certified Risk Management Office) Level II National CRMO Certification (Certified Risk Management Office) Level II	4
9	Pendidikan & Uji Kompetensi Auditor Hukum Asosiasi Education & Competency Examination for Law Auditor Association	1
10	Sertifikasi <i>Digital Marketing</i> Certification for Digital Marketing	1
11	Sertifikasi Internal Audit Certification for Internal Audit	1

Informasi Tentang Struktur Modal dan Pemegang Saham

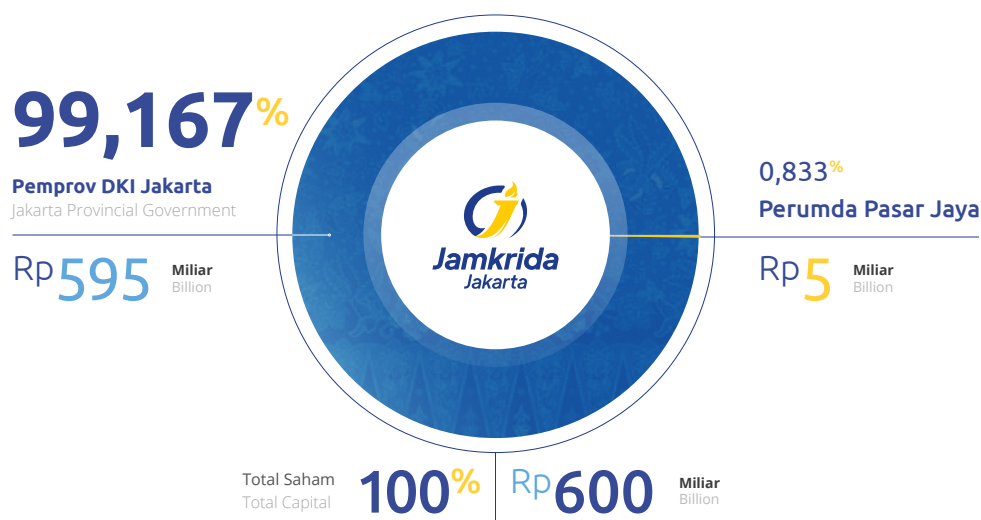
Information About Capital and Shareholders

STRUKTUR MODAL

Per 31 Desember 2025, modal disetor Perseroan tercatat sebesar Rp600 miliar (enam ratus miliar rupiah) yang terdiri dari 600.000 (enam ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per lembar. Dari modal yang disetor tersebut, Pemprov DKI Jakarta merupakan Pemegang Saham Pengendali dengan kepemilikan 99,167%, sementara 0,833% sisanya dimiliki oleh Perumda Pasar Jaya sebagai Pemegang Saham Non-Pengendali.

CAPITAL STRUCTURE

As of 31 December 2025, the Company's paid-up capital was recorded at Rp600 billion (six hundred billion rupiah) consisting of 600,000 (six hundred thousand) shares with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah) per share. From this paid-up capital, the Provincial Government of DKI Jakarta is the Controlling Shareholder with 99.167% owners, while the remaining 0.833% is owned by the Regional Company of Pasar Jaya as the Non-Controlling Shareholder.



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Hingga akhir tahun 2025, tidak terdapat perubahan pada komposisi pemegang saham Perseroan. Komposisi pemegang saham Perseroan per 1 Januari 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

Until the end of the year 2025, there were no changes in the composition of the Company's shareholders. The Company's shareholders composition as of 1 January 2025 and 31 December 2025 is as follows:

Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham (Lembar) Number of Share (Share)	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rupiah) Amount of Capital Issued and Fully Paid-Up (Rupiah)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership
Pemprov DKI Jakarta	595.000	595.000.000.000	99,167%
Perumda Pasar Jaya	5.000	5.000.000.000	0,833%
Jumlah Total	600.000	600.000.000.000	100%

KEPEMILIKAN SAHAM LANGSUNG ATAUPUN TIDAK LANGSUNG OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hingga 31 Desember 2025, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan keluarga ataupun Direksi Perseroan dan keluarga yang tercatat sebagai pemegang saham Perseroan baik langsung ataupun tidak langsung.

DIRECT OR INDIRECT SHARE OWNERSHIP BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Until 31 December 2025, there were no members of the Board of Commissioners and family or the Board of Directors of the Company and family registered as shareholders of the Company, either direct or indirectly.

Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Ventura Bersama

Subsidiaries, Associated Companies, Joint Ventures Companies

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, atau keterlibatan dalam perusahaan ventura bersama.

Until 31 December 2025, the Company has no subsidiary entities, associated entities, nor involvement in joint companies.

Kronologi Pencatatan Saham Dan Efek Lainnya

Chronology of Listing of Shares and Other Securities

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan beroperasi sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh kepemilikan sahamnya berada pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perseroan tidak melakukan pencatatan saham maupun penerbitan efek lainnya pada Bursa Efek Indonesia atau bursa efek manapun. Oleh karena itu, Perseroan tidak memiliki riwayat pencatatan saham atau efek lain yang diperdagangkan di pasar modal, sehingga informasi mengenai Kronologi Pencatatan Saham dan Efek Lainnya tidak relevan untuk disampaikan pada Laporan Tahunan ini.

Until 31 December 2025, the Company operates as a Regional-Owned Enterprise whose entire share ownership is held by the DKI Jakarta Provincial Government. The Company does not list shares or issue other securities on the Indonesia Stock Exchange or any other stock exchange. For this reason, the Company does not have a history of listing shares or other securities traded on the capital market, thus, information regarding the Chronology of Listing Shares and Other Securities is not relevant to be presented in this Annual Report.

Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan

Institutions and Professions Supporting the Company

Kantor Akuntan Publik

Public Accounting Firm

Nama Kantor Akuntan Publik	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Name of Public Accounting Firm
Jaringan/Aliansi	Nexia International	Network/Alliance
Nama Kantor Akuntan Publik	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Name of the Public Accounting office
Nama Auditor	Florus Daeli. SE., MM., Ak., CA., CPA., CRA., CLI., CFI., CACP., ASEAN CPA.	Name of Auditor
Alamat	Wisma Bumiputera 1912. Lantai 12. Jl. Jend. Sudirman Kav. 75. Jakarta 12910	Address
Jasa yang Diberikan	Jasa Audit Laporan Keuangan Perusahaan & Laporan Kepatuhan (Compliance Audit) Audit Services for the Company's Financial Report & Compliance Audit Report	Services Provided
Jasa Lainnya	KAP hanya memberikan jasa audit dan tidak memberikan jasa non-audit lainnya kepada Perseroan. KAP only provides the Company with audit services and not other non-audit services	Other Services
Biaya	Rp 271.482.450,-	Fee
Periode Penugasan	Tahun Buku 2025 / 2025 Fiscal Year	Period of Assignment

Informasi pada Situs Web Perseroan

Information on Company Website

JAMKRIDA Jakarta menyediakan berbagai informasi terkini mengenai Perseroan melalui situs web resmi jamkrida-jakarta.co.id sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan keterbukaan informasi. Melalui *platform* ini, Perseroan berupaya memberikan kemudahan akses serta pengalaman layanan yang lebih informatif dan responsif sesuai standar tata kelola perusahaan yang baik.

Seluruh konten yang disajikan pada situs web diperbarui secara berkala untuk memastikan ketersediaan data yang akurat, mudah diakses, dan relevan bagi seluruh pemangku kepentingan. Informasi yang ditampilkan diantaranya mencakup profil singkat Perseroan, struktur manajemen, produk dan layanan penjaminan, skema pengajuan penjaminan, laporan berkala, publikasi terkait kegiatan operasional. Kontak, dan sistem pengaduan atas pelanggaran/gratifikasi.

Pembaharuan terakhir dilakukan pada tahun 2025 yang merejuvenasi tampilan *website*, peningkatan aksesibilitas dan informasi, serta Integrasi Jamkrida Portal Sistem (JPS)

JAMKRIDA Jakarta provides the latest information on the Company through the official website jamkrida-jakarta.co.id as part of the commitment to information transparency and openness. Through this platform, the Company strives to provide easy access as well as a more informative and responsive service experience in accordance with good corporate governance standards.

The entire content presented on the website is updated periodically to ensure the availability of accurate date, easily accessed, and relevant for all stakeholders. Information displayed, among others, include the Company's brief profile, management structure, guarantee products and services, guarantee application scheme, periodic reports, publications related to operational activities, contact and system for complaints on violation/gratification.

The latest feature update was conducted in November 2024 which rejuvenated the presentation of the website, improved accessibility and information, as well as integration of Jamkrida Porta System (JPS).

Website dan Alamat Kantor PT Jamkrida Jakarta

PT Jamkrida Jakarta Website and Office Address



Website Perusahaan

Company Website

jamkrida-jakarta.co.id



Alamat Kantor Jamkrida Jakarta

Jamkrida Jakarta Office Address

HEAD OFFICE

Gedung Jaya Lantai 3 | 3rd Floor

Jl. M. H. Thamrin No. 12,
Kelurahan Kebon Sirih,
Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Provinsi DKI Jakarta – 10340

CONTACTS

Phone: (021) 31927872

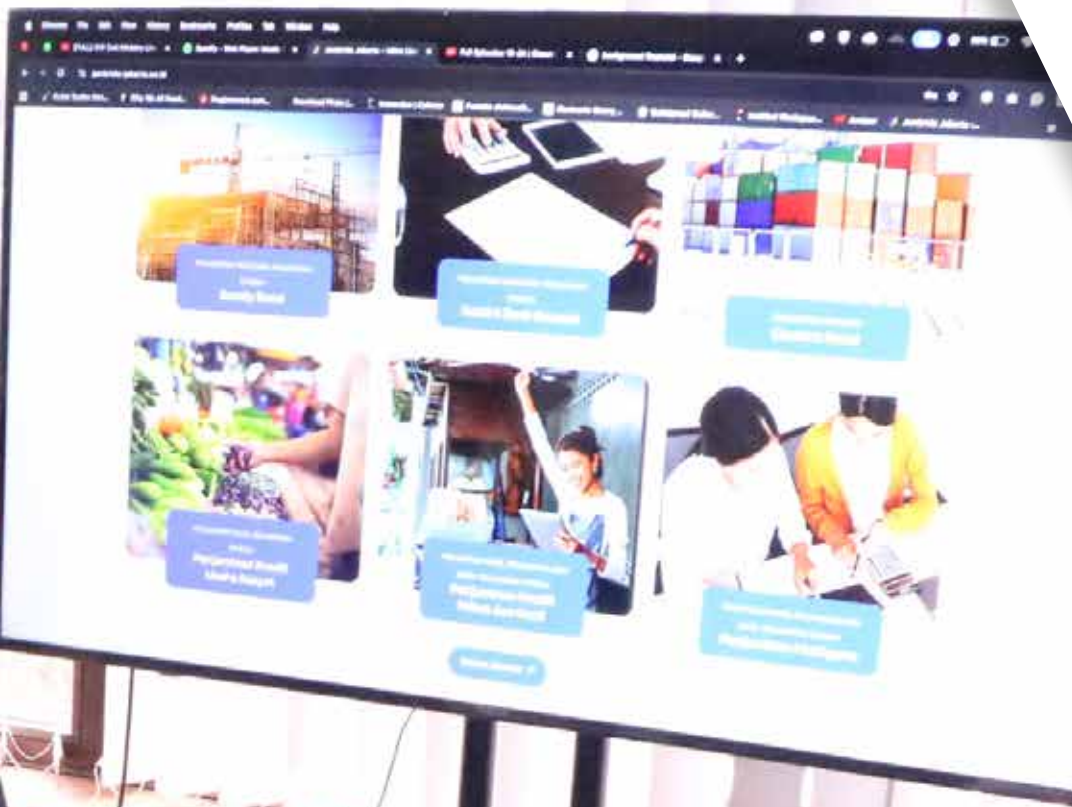
Email: mail@jamkrida-jakarta.co.id





Analisis & **Pembahasan** **Manajemen**

Management Discussion & Analysis



Tinjauan Ekonomi, Perkembangan UMKM, dan Industri Penjaminan

Review of the Economic, MSMEs Development, and Guarantee Industry



Sepanjang tahun 2025, dunia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam seperti konflik geopolitik dan dagang negara besar yang masih terasa dampaknya hingga saat ini.

Throughout the year 2025, the world faced such various complex and diverse challenges as geopolitical and trade conflicts between major countries, of which the impact is still felt today.

Sepanjang tahun 2025, perekonomian Indonesia mempertahankan tren pertumbuhan positif dengan ketahanan yang relatif kuat meskipun diwarnai oleh dinamika global dan risiko eksternal. Menjelang akhir tahun, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 akan meningkat seiring perkuatan konsumsi rumah tangga, investasi yang lebih baik, serta dorongan dari kebijakan fiskal dan moneter yang sinergis untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi domestik secara luas. Proyeksi tersebut didukung oleh ekspektasi bauran kebijakan yang memperkuat permintaan domestik serta kehadiran stimulus fiskal pada periode liburan akhir tahun. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7-5,5 persen, mencerminkan stabilitas dan ketahanan makroekonomi di tengah ketidakpastian global.

Sampai dengan triwulan III 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,04% secara tahunan (*Year-on-Year/YoY*) dibandingkan

Throughout the year 2025, Indonesia's economy maintained a positive growth trend with a relatively strong resistance amidst global dynamics and external risks. Towards the end of the year, Bank Indonesia estimated that economic growth in quarter IV of 2025 will improve in line with the strengthening of household consumption, improvement in investment and support of synergic fiscal and monetary policies to maintain the momentum of broad domestic economic recovery. This projection was supported by a mix policy expectation that strengthens domestic demand as well as the presence of a fiscal stimulus during the year-end holiday period. Overall, Indonesia's economic growth during the year 2025 was forecasted in a range of 4.7-5.5 percent, reflecting stability and macroeconomic resilience in the midst of global uncertainty.

Until quarter III of 2025, the Central Bureau of Statistics (BPS) recorded that Indonesia's economic growth reached 5.04% year-on-year compared to the same period in the previous year. This

Tinjauan Ekonomi, Perkembangan UMKM, dan Industri Penjaminan

Review of the Economic, MSMEs Development, and Guarantee Industry



periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan kekuatan aktivitas ekonomi domestik yang tetap solid di tengah tantangan global seperti perlambatan permintaan eksternal dan ketidakpastian perdagangan internasional.

Perkembangan positif ini tidak terlepas dari peran konsumsi rumah tangga dan investasi yang menjadi pendorong utama pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga pada 2025 terus menunjukkan perbaikan, tercermin dari meningkatnya belanja ritel dan keyakinan konsumen yang lebih tinggi, sedangkan aktivitas investasi didukung oleh ekspansi sektor manufaktur dan proyek-proyek strategis pemerintah.

Hal tersebut juga terlihat pada Kinerja intermediasi perbankan yang stabil dengan profil risiko yang terjaga dan aktivitas operasional perbankan tetap optimal untuk memberikan layanan keuangan bagi masyarakat. Pada Agustus 2025, kredit tumbuh 7,56% YoY menjadi Rp8.075,0 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi sebesar 13,86%, diikuti oleh Kredit Konsumsi 7,89%, sedangkan Kredit Modal Kerja tumbuh 3,53% YoY. Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 10,79%, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 1,35%.

Peran sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia. Pada 2025, UMKM terus menjadi kontributor utama terhadap perekonomian nasional dengan porsi kontribusi terhadap PDB yang tetap dominan di sekitar 61,9%. Pencapaian tersebut membuktikan peran sentral UMKM sebagai tulang punggung aktivitas produksi dan mata pencaharian masyarakat. Pemerintah terus mendorong pemberdayaan UMKM melalui berbagai program pemberdayaan, peningkatan akses pembiayaan, dan dukungan penguatan kapasitas, terutama di tengah transisi menuju digitalisasi ekonomi yang lebih luas.

number reflects the strength of domestic economic activities which remained solid amidst such global challenges as the slowing down of external demand and the uncertainty in international trade.

This positive development was connected to the role of household consumption and investment which served as the main support of the growth. Household consumption in 2025 continued to show improvement, as reflected in the increased retail spending and higher consumers' confidence, while investment activities were supported by the expansion in manufacturing sector and strategic government projects.

This was also visible in the stable performance of banking intermediation with a maintained risk profile and optimal banking operational activities that provide financial services to the public. In August 2025, credit grew by 7.56% yoy to Rp8,075.0 trillion. Based on the type of usage, Investment Credit gained the highest by 13.86%, followed by Consumption Credit of 7.89%, while Working Capital Credit grew by 3.53% yoy. From debtor category aspect, corporate credit increased by 10.79% while MSME credit gained by 1.35%.

The role of the Micro, Small and Medium-Scale Enterprises (MSMEs) remained fundamental in Indonesia's economic structure. In 2025, MSME remained as the main contributor to the national economy with a dominant contributing portion to GDP at around 61.9%. This achievement proved that the central role of MSME is the backbone of production activities and community livelihoods. The government continued to encourage MSME empowerment through various empowerment programs, increase in financing access, and support capacity strengthening, especially in the midst of transition towards expanding digitalization of the economy.

Tinjauan Ekonomi, Perkembangan UMKM, dan Industri Penjaminan

Review of the Economic, MSMEs Development, and Guarantee Industry

Transformasi digital menjadi salah satu pendorong utama dinamika UMKM di 2025. Ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai nilai yang signifikan, ditopang oleh penetrasi internet yang tinggi, perkembangan *e-commerce*, serta adopsi teknologi digital dalam proses bisnis UMKM. Seiring dengan agenda strategis digital nasional, pemerintah dan pemangku kepentingan terus memperluas akses teknologi, memperkuat literasi digital, serta memperluas jangkauan layanan digital untuk usaha mikro dan kecil.

Dalam konteks industri penjaminan, peran lembaga penjaminan semakin menonjol sebagai bagian dari ekosistem keuangan yang mendukung pembiayaan bagi UMKM dan pelaku usaha lainnya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mengambil peran dalam mengelola risiko finansial yang dihadapi masyarakat dalam memitigasi risiko seperti saat sakit, kecelakaan, kerusakan properti atau kendaraan, serta memberikan solusi untuk perencanaan masa depan termasuk tersedianya sumber pendapatan berkelanjutan saat memasuki usia non-produktif. Selain itu, industri PPDP melalui lembaga penjaminan menjadi katalisator bagi pelaku usaha termasuk UMKM dalam memperoleh akses permodalan yang lebih luas. Pada perusahaan penjaminan, per Agustus 2025 nilai aset tercatat tumbuh 1,94% YoY menjadi Rp48,83 triliun.

Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan serta sinergi antara pemangku kepentingan sektor keuangan mendorong peningkatan peran penjaminan dalam mitigasi risiko pembiayaan. Industri penjaminan tidak hanya menjadi fasilitator akses modal, tetapi juga katalis untuk memperluas inklusi finansial, khususnya bagi usaha yang memiliki keterbatasan agunan dan riwayat kredit.

Kolaborasi antara regulator, lembaga penjaminan, penyedia jasa keuangan, dan pelaku UMKM menjadi faktor penting dalam memperkuat peran industri penjaminan sebagai pendukung utama pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Dengan demikian, pada 2025, sinergi strategis ini diharapkan dapat semakin mengokohkan fondasi perekonomian nasional serta memperluas dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas usaha, dan perluasan partisipasi UMKM dalam rantai nilai ekonomi yang lebih luas.

Digital transformation became one of the main drivers of MSME dynamics in 2025. Indonesia's digital economy was estimated to reach significant value, supported by the high internet penetration, the development of *e-commerce*, and the adoption of digital technology in MSME business processes. In line with the national digital strategic agenda, the government and stakeholders continued to expand technology access, strengthen digital literacy, as well as expand the reach of digital services for the micro and small businesses.

In the context of guarantee industry, the role of guarantee institutions is increasingly prominent as part of the financial ecosystem that supports financing for MSMEs and other business actors. According to the Financial Services Authority, the Insurance, Guarantee and Pension Fund Industry (PPDP) takes on the role in managing financial risks faced by society such as when in sickness, accident, property or vehicle damage, as well as to provide solutions for future planning which include the availability of sustainable income sources upon entering non-productive age. In addition, PPDP industry through guarantee institutions became a catalyst for business players including MSME to obtain a wider capital access. In guarantee companies, as of August 2025, the recorded asset value grew by 1.94% yoy to the amount of Rp48.83 trillion.

Regulations and policies issued by the financial authorities and a synergy between the stakeholders in the financial sector encourages the improvement of the guarantee's role in financing risk mitigation. Guarantee industry has not only become a facilitator to capital access, but also as a catalyst to expand financial inclusion, specifically for businesses with limited collateral and credit history.

The collaboration between regulator, guarantee institutions, financial service providers and MSMEs has become an important factor in strengthening the role of the guarantee industry as the main supporter of an inclusive national economic growth. Thus, in 2025, this strategic synergy was expected to further strengthen the foundation of the national economy and expand the positive impact on job creation, increasing business productivity, and expanding the participation of MSMEs in the broader economic value chain.

Tinjauan Bisnis

Business Review



Di tengah kondisi yang cukup menantang, kinerja bisnis penjaminan JAMKRIDA Jakarta sepanjang tahun 2025 tercatat positif. Hal tersebut tercermin pada beberapa pencapaian utama sebagai berikut:

1. Realisasi penjaminan kredit adalah sebesar Rp31,85 triliun atau 93% dari target penjaminan kredit tahun 2025. Realisasi dari target 2025 untuk penjaminan bank sebesar 95%, nonbank sebesar 93%, dan Unit Usaha Syariah sebesar 94%;
2. Penerimaan IJP/IJK secara kas sampai 31 Desember 2025 adalah 420,21 miliar atau 109% dari target tahun 2025 sebesar Rp386,18 miliar. Realisasi dari target 2025 untuk penjaminan bank sebesar 112%, nonbank sebesar 108%, dan Unit Usaha Syariah sebesar 106%;
3. Jumlah UMKMK yang dijamin sampai akhir tahun 2025 sebanyak 5.214.433 UMKMK atau sebesar 100% dari target tahun 2025, sementara jumlah serapan tenaga kerja sebanyak 7.842.713 orang atau sebesar 126 % dari target tahun 2025.

In the midst of quite challenging conditions, JAMKRIDA Jakarta's guarantee business performance throughout the year 2025 was noted positive. This is reflected in several of the main achievements as follows:

1. Realization of credit guarantee was Rp31,85 trillion or 93% from the 2025 credit guarantee target. Realization of the 2025 bank guarantee target was 95%, for non-bank was 93%, and Sharia Business Unit was 94%;
2. Cash receipt of IJP/IJK until 31 December 2025 was 420,21billion or 109% from 2025 target of Rp386.18 billion. Realization of 2025 target for bank guarantee was 112%, for nonbank was 108% and for Sharia Business Unit was 106%;
3. Total of guaranteed MSMECOs until the end of the year 2025 was 5,214,433 MSMEs or 100% of the 2025 target, while the total human resource absorption was 7,842,713 persons or 126% of the 2025 target.



Tinjauan Operasional

Operational Review

Tinjauan Operasional berikut menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja operasional Perseroan sepanjang tahun 2025 yang mencakup capaian realisasi penjaminan hingga 31 Desember 2025 terhadap target yang ditetapkan dalam RKA 2025.

PENJAMINAN

Performa penjaminan sampai dengan akhir tahun 2025 dibandingkan dengan target dalam RKA 2025 diuraikan sebagai berikut:

The following Operational Review presents the Company's comprehensive operational performance during the year 2025 which includes the achievement of guarantee realization until 31 December 2025 against the targets set in the 2025 Business Plan (BP).

GUARANTEE

Guarantee performance until the end of the year 2025 compared to the target set in 2025 Business Plan is presented as follows:

dalam Jutaan Rupiah | in Milliar Rupiah

No.	Sumber Penjaminan Source of Guarantee	RKA 2025 2025 BP	Realisasi Realization	%
1	Kredit Mikro dan Kecil Micro Credit	18.308.660	16.113.135	88%
2	Kafalah Mikro dan Kecil Kafalah for Micro and Small	5.533.002	5.950.798	108%
3	Kredit Multiguna Multipurpose Credit	2.502.524	4.462.400	178%
4	Kredit Usaha Business Credit	2.315.505	994.950	43%
5	Kredit Konstruksi Construction Credit	1.035.694	869.846	84%
6	Kredit Pemilikan Rumah Home Ownership Credit	542.679	67.022	12%
7	Kafalah Multiguna Multipurpose Kafalah	1.440.856	631.020	44%
8	Kontra Bank Garansi Contra Bank Guarantee	709.308	493.263	70%
9	Kafalah Konstruksi Kafalah for Construction	83.739	261.585	312%
10	Kafalah Usaha Kafalah for Business	18.734	400	2%
11	Anjak Piutang Factoring	6.993	65.339	934%
12	Surety Bond	10.499	80.955	771%
13	Surety Bond Syariah Sharia Surety Bond	0	0	0%
14	Custom Bond	980.035	1.666.860	170%
15	Kredit Usaha Rakyat People's Business Credit	190.902	40.370	21%
16	KUR Syariah Sharia People's Business Credit	0	12.415	0%
17	Kredit Pemilikan Rumah Syariah Sharia Home Ownership Credit	27.970	118.664	424%
18	Kontra Bank Garansi Syariah Sharia Contra Bank Guarantee	372.468	25.625	7%
Jumlah Total		34.079.267	31.854.645	93%

dalam Jutaan Rupiah | in Milliar Rupiah

Tinjauan Operasional

Operational Review

IMBALAN JASA PENJAMINAN/KAFALAH

Imbal Jasa Penjaminan (IJP/IJK Kas)

Capaian IJP/IJK Kas tahun 2025 dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKA 2025 diuraikan sebagai berikut:

GUARANTEE SERVICES/KAFALAH FEES

Guarantee Services (IJP/IJK Cash) Fee

2025 IJP/IJK Cash achievement compared to targets set in 2025 BP is described as follows:

dalam Jutaan Rupiah | in Milliar Rupiah

No.	Sumber Penjaminan Source of Guarantee	RKA 2025 2025 BP	Realisasi Realization	%
1	Kredit Mikro dan Kecil Micro Credit	199.713	209.674	105%
2	Kafalah Mikro dan Kecil Kafalah for Micro and Small	63.814	74.672	117%
3	Kredit Multiguna Multipurpose Credit	46.718	90.236	193%
4	Kredit Usaha Business Credit	25.510	9.377	37%
5	Kafalah Multiguna Multipurpose Kafalah	16.405	12.689	77%
6	Kredit Usaha Rakyat People's Business Credit	6.962	1.268	18%
7	Kredit Konstruksi Construction Credit	7.862	6.668	85%
8	Kontra Bank Garansi Contra Bank Guarantee	8.337	5.778	69%
9	KUR Syariah Sharia People's Business Credit	0	395	0%
10	Kredit Pemilikan Rumah Home Ownership Credit	2.351	270	11%
11	Custom Bond	1.439	3.047	212%
12	Surety Bond	109	1.098	1007%
13	Surety Bond Syariah Sharia Surety Bond	0	0	0%
14	Kafalah Usaha Kafalah for Business	1.408	1.815	129%
15	Kredit Pemilikan Rumah Syariah Sharia Home Ownership Credit	411	475	115%
16	Kontra Bank Garansi Syariah Sharia Contra Bank Guarantee	4.151	498	12%
17	Anjak Piutang Factoring	24	414	1725%
18	Surety Bond Syariah Sharia Surety Bond	0	0	0%
18	Kafalah Konstruksi Construction Guarantee	0	0	0%
Jumlah Total		386.186	420.211	109%

JUMLAH UMKMK DAN TENAGA KERJA

Per 31 Desember 2025, kontribusi penjaminan Perseroan terhadap jumlah UMKMK dan penyerapan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

TOTAL MSMECOs AND WORKFORCE

As of 31 December 2025, the Company's guarantee contribution to the number of MSMECO and workforce absorption is as follows:

No.	Jenis Terjamin Guaranteed Type	RKA 2025 2025 BP	Realisasi Realization	%
1	Jumlah UMKMK Number of MSMECOs			
	Produktif Productive	6.037.950	7.798.156	129%
	Non-Produktif Non-Productive	195.894	44.557	23%
	Jumlah Total	5.204.973	5.214.433	100%
2	Jumlah Tenaga Kerja Number of Workforce			
	Produktif Productive	6.037.950	7.798.156	129%
	Non-Produktif Non-Productive	195.894	44.557	23%
	Jumlah Total	6.233.844	7.842.713	126%

Tinjauan Operasional

Operational Review

INVESTASI

Realisasi nilai dan imbal hasil investasi Perseroan per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan RKA yang ditetapkan disajikan sebagai berikut:

dalam Jutaan Rupiah | in Milliar Rupiah

No.	Investasi dan Hasil Investasi Investment Value and Yield	RKA 2025 2025 BP	Realisasi Realization	%
1	Nilai Investasi Investment Value	1.007.749	1.119.006	111%
2	Hasil Investasi Investment Yield	50.924	54.342	107%

Jumlah investasi sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp1.119 miliar, terealisasi 111% dari jumlah target tahun 2025. Sementara itu, hasil investasi sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp54,3 miliar atau 107% dari target tahun 2025.

SUMBER DAYA MANUSIA

Penambahan Jumlah SDM

Capaian pemenuhan SDM Perseroan per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKA diuraikan sebagai berikut:

No.	Jabatan Position	RKA 2025 2025 BP	Realisasi Realization	%
1	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	2	2	100%
	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	2	2	100%
	Direksi Board of Directors	3	2	67%
	Jumlah Pengurus Number of Administrators	7	6	86%
2	Komite Committee			
	Komite Committee	3	3	100%
	Jumlah Komite Number of committees	3	3	100%
3	Karyawan Employee			
	Kepala Divisi Head of Division	9	8	89%
	Kepala Bagian Head of Section	12	10	83%
	Staf dan Pelaksana Staff and Executors	58	61	105%
	Jumlah Karyawan Number of Employees	79	79	100%
	Jumlah Pengurus, Komite, dan Karyawan Number of Administrators, in Committee, and Employees	89	88	99%

INVESTMENT

Realization of Company's value and yield from investment as of 31 December 2025 compared to the established BP is presented as follows:

The total amount of investment until the end of the year 2025 was logged at Rp1,119 billion, actualized 111% from the total 2025 target. Meanwhile, yield from investment until the end of the year 2025 was Rp54,3 billion or 107% of the 2025 target.

HUMAN RESOURCES

HR Recruitment

Achievement of the Company's HR fulfillment as of 31 December 2025 compared to the target set in the BP is presented in the table below:

Tinjauan Operasional

Operational Review

Pada tahun 2025, jumlah Sumber Daya Manusia Perseroan tercatat sebanyak 88 orang dari yang dianggarkan sebanyak 89 orang atau terealisasi 99% dari target 2025.

In the year 2025, the total number of Company employees is recorded at 88 persons from the budget of 89 persons or 99% realized of the 2025 target.

BEBAN SUMBER DAYA MANUSIA

Perbandingan antara rencana dan realisasi beban SDM Perseroan hingga 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

HUMAN RESOURCE EXPENSES

The comparison between target and realization of the Company's HR expenses as of 31 December 2025 is as follows:

dalam Jutaan Rupiah | in Milliar Rupiah

No.	Beban Expenses	RKA 2025 2025 BP	Realisasi Realization	%
1	Penghasilan Tetap Fixed Income	12.671	15.844	125%
2	Tunjangan-tunjangan Allowances	15.270	7.219	47%
3	Beban PPh 21 Income Tax Expenses	2.028	2.361	116%
Jumlah Total		29.970	25.424	85%

BEBAN OPERASIONAL, ADMINISTRASI, DAN UMUM

Perbandingan antara target dan realisasi Beban Operasional, Administrasi, dan Umum Perseroan hingga 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

OPERATIONAL, ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES

The comparison between target and realization of the Company's Operational, Administrative and General Expenses until 31 December 2025 is presented in the table below:

dalam Jutaan Rupiah | in Milliar Rupiah

No.	Beban Operasional Operational Expenses	RKA 2025 2025 BP	Realisasi Realization	%
1	Fee Base Bank	21.063	17.711	84%
2	Penjaminan Ulang & Penjaminan Bersama Re-Guarantee & Co-Guarantee	160.365	160.299	100%
3	Restitusi Restitution	1.619	271	17%
4	Klaim Claim	131.267	150.827	115%
5	Cadangan Klaim Claim Reserve	39.219	55.972	143%
6	Beban Perjalanan Dinas dan Penagihan Business Travel and Billing Expenses	876	1.763	201%
7	Beban Pemasaran dan Promosi Marketing and Promotion Expenses	2.540	3.250	128%
8	Biaya Sewa Kendaraan/Kantor Vehicle/Office Rental Fees	4.648	2.560	55%
Jumlah Total		361.597	393.961	109%



Tinjauan Operasional

Operational Review

dalam Jutaan Rupiah | in Milliar Rupiah

No.	Beban Administrasi dan Umum Administrative and General Expenses	RKA 2025 2025 BP	Realisasi Realization	%
1	Beban Rapat dan Sosialisasi Meeting and Socialization Expenses	1.296	864	67%
2	Beban Alat Tulis Kantor Office Stationery Expenses	240	328	137%
3	Beban Penyusutan Depreciation Expenses	1.085	891	82%
4	Beban Profesional Perizinan Professional License Expenses	3.320	1.149	35%
5	Beban Umum Lainnya Other General Expenses	3.482	2.651	76%
Jumlah Beban Admnistrasi dan Umum Total Administrative and General Expenses		8.338	5.884	71%
Jumlah Total		8.338	5.884	71%

BEBAN RISET, PENGEMBANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Realisasi Beban Riset, Pengembangan, dan Teknologi Informasi Perseroan sampai dengan akhir tahun 2025 terhadap RKA adalah sebagai berikut:

RESEARCH, DEVELOPMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY EXPENSES
The realization of Research, Development and Information Technology Expenses of the Company until the end of the year 2025 versus the Business Plan is as follows:

dalam Jutaan Rupiah | in Milliar Rupiah

No.	Beban Expense	RKA 2025 2025 BP	Realisasi Realization	%
1	Beban sistem, teknologi, dan pengembangan usaha Business system, technology and development expenses	1.260	881	70%

Realisasi beban riset, pengembangan, dan TI sampai dengan akhir tahun 2025 dibukukan sebesar Rp881 juta atau 70% dari target 2025 sebesar Rp1,26 miliar.

The realization of research, development and IT expenses until the end of the year 2025 is recorded at a total of Rp881 million or 70% of the Rp1,26 billion 2025 target.

Tinjauan Keuangan

Financial Review

TINJAUAN KEUANGAN

Tinjauan keuangan berikut disusun berdasarkan Laporan Keuangan PT JAMKRIDA Jakarta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebagaimana disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material. Laporan Keuangan Konsolidasian mencerminkan posisi keuangan Grup per 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Aset

Per 31 Desember 2025, Perseroan mencatat jumlah aset sebesar Rp 1.503 miliar (tercapai 131% dari RKA 2025), meningkat 31% dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp1.150 miliar. Peningkatan jumlah aset pada tahun ini dikontribusikan oleh Bertambahnya penerimaan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Kenaikan ini didorong oleh Penambahan Investasi Jangka Panjang.

FINANCIAL REVIEW

The following financial review was prepared based on the Financial Statements of PT JAMKRIDA Jakarta for the year which ended on 31 December 2025, as presented in this Annual Report. The Financial Statements were audited by the Heliantono and Partner Public Accounting Firm and obtained unqualified opinion in all material aspects. The consolidated Financial Statements reflect the Group's financial position as of 31 December 2025, as well as the financial performance and consolidated cash flow for the year which ended on the said date, as prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

FINANCIAL POSITION STATEMENT

Asset

As of 31 December 2025, the Company recorded its total asset at Rp1.503 billion (131% of the 2025 BP), an increment of 31% compared to Rp1,150 billion in the previous year. This increment in the total asset this year was contributed by the increase in Guarantee Fee (IJP) revenue and this rise is driven by the addition of long term investments.

dalam Jutaan Rupiah | in Milliar Rupiah

Keterangan	RKA 2025 2025 BP	Realisasi Realization		Perubahan (2025-2024) Change (2025-2024)		Description
		2025	2024	Nominal Nominal	Persentase Percentage	
Aset Lancar						Current Assets
Kas dan Setara Kas	98.322	85.553	102.618	17.065	83%	Cash and Cash Equivalent
Investasi Lancar	181.018	311.250	214.382	96.868	145%	Current Investments
Piutang Hasil Investasi	4.116	8.628	7.881	747	109%	Interest Receivables
Piutang Penjaminan Ulang	15.667	50.042	16.536	33.506	302%	Re-Guarantee Receivables
Piutang Penjaminan Bersama	20.045	38.857	8.853	30.004	439%	Co-Guarantee Receivables
Aset Penjaminan Ulang	100.565	96.617	81.650	14.967	118%	Re-Guarantee Assets
Pajak, Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	7.346	32.004	32.960	776	97%	Tax, Prepaid Expenses and Advances
Jumlah Aset Lancar	427.079	622.941	464.880	158.061	134%	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar						Non-Current Assets
Aset Pajak Tangguhan	1.832	3.835	3.611	174	104%	Deferred Tax Asset
Investasi Tidak Lancar	728.407	723.323	697.242	26.081	104%	Non-Current Investment
Aset Tidak Lancar						Non-Current Assets



Tinjauan Keuangan

Financial Review

dalam Jutaan Rupiah | in Milliar Rupiah

Keterangan	RKA 2025 2025 BP	Realisasi Realization		Perubahan (2025-2024) Change (2025-2024)		Description
		2025	2024	Nominal Nominal	Persentase Percentage	
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka Jangka Panjang	16.945	146.010	124.412	21.598	117%	Prepaid Expenses and Long-Term Advances
Aset Tetap-Bersih	21.958	3.121	669	2.452	467%	Current Assets – Net
Aset Hak Guna-Bersih	0	2.121	758	1.363	280%	Right of Use of Assets – Net
Aset Tak Berwujud-Bersih	0	0	51	51	0%	Intangible Assets – Net
Jumlah Aset Tidak Lancar	769.142	878.411	826.743	51.668	106%	Total Non-Current Assets
Jumlah Aset	1.196.221	1.501.352	1.291.624	209.729	116%	Total Assets

Aset Lancar

Dari jumlah aset sebesar Rp 1.501 miliar pada akhir 2025, Perseroan membukukan nilai aset lancar sebesar Rp623 miliar (tercapai 146% dari RKA 2025), mengalami kenaikan sekitar 34% dari posisi sebesar Rp464 miliar di tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena Bertambahnya penerimaan Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

Current Assets

Of the total assets of Rp1,501 billion at the end of the year 2025, the Company recorded its current assets value at Rp623 billion (34% of the 2025 BP), an increase of about 34% from the Rp464 trillion position in the previous year. This happens due to the increase in the receipt of Guarantee Fee Income (IJP).

Aset Tidak Lancar

Adapun porsi jumlah aset tidak lancar Perseroan pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp878 miliar (tercapai 116% dari RKA 2025), naik 6% dari tahun sebelumnya sebesar Rp826 miliar. Kenaikan ini didorong oleh Penambahan Investasi Jangka Panjang.

Non-Current Assets

The Company's non-current assets portion by the end of the year 2025 was logged at Rp878 billion (116% of the 2025 BP), an increment of 6% from the Rp826 billion in the previous year. This increase is driven by the Addition of Long-Term Investment.

Liabilitas

Per 31 Desember 2025, jumlah liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp854 miliar (tercapai 167% dari RKA 2025), meningkat 76% dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp653 miliar. Peningkatan jumlah liabilitas pada tahun ini dikarenakan peningkatan Utang Klaim dan Cadangan Klaim Penjaminan.

Liabilities

As of 31 December 2025, the Company's total liability was recorded at Rp854 billion (167% of the 2025 BP), a 76% increase compared to the Rp653 billion in the previous year. The increase in liabilities this year is due to an increase in Claim Payables and Guarantee Claim Reserves.

dalam Jutaan Rupiah | in Milliar Rupiah

Keterangan	RKA 2025 2025 BP	Realisasi Realization		Perubahan (2025-2024) Change (2025-2024)		Description
		2025	2024	Nominal	Persentase	
				Nominal	Percentage	
Liabilitas Jangka Pendek						Short-Term Liabilities
Utang Pajak	7.769	961	8.131	7.170	11,8%	Tax Payables
Utang Penjaminan Ulang	16.841	60.281	23.114	37.167	261%	Re-Guarantee Payables
Utang Penjaminan Bersama	19.579	51.811	15.835	35.976	327%	Co-Guarantee Payables
Utang Sewa Pembiayaan	18.466	561	568	7	99%	Lease Payables
Beban Akrual	0	24.408	22.997	1.411	106%	Accrued Expenses

Tinjauan Keuangan

Financial Review

dalam Jutaan Rupiah | in Milliar Rupiah

Keterangan	RKA 2025 2025 BP	Realisasi Realization		Perubahan (2025-2024) Change (2025-2024)		Description
		2025	2024	Nominal Nominal	Persentase Percentage	
Cadangan Klaim	213.867	259.985	189.085	70.900	137%	Claim Reserve
Pendapatan Ditangguhkan	63.818	62.668	61.497	1.171	102%	Deferred Income
Liabilitas Lain-Lain Dalam Penyelesaian	0	44.310	27.998	16.312	158%	Other Liabilities in Progress
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	340.340	505.006	349.225	155.781	145%	Total Short-Term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang						Long-Term Liabilities
Utang Sewa Pembiayaan	0	1.549	202	1.347	766%	Lease Payables
Pendapatan Ditangguhkan	184.424	345.609	302.515	43.094	114%	Deferred Income
Liabilitas Imbalan Kerja	1.319	1.999	1.588	411	126%	Employee Benefits Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	185.743	349.176	304.305	44.871	115%	Total Long-Term Liabilities

Liabilitas Jangka Pendek

Dari jumlah liabilitas sebesar Rp854 miliar pada akhir 2025, Perseroan mencatat liabilitas jangka pendek sebesar Rp505 miliar (tercapai 148% dari RKA 2025), meningkat 45% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp349 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh Peningkatan Utang Klaim Penjaminan.

Short-Term Liabilities

Of the total liabilities of Rp854 billion at the end of the year 2025, the Company logged its short-term liabilities a total of Rp505 billion (148% of the 2025 BP), an increment of 45% compared to Rp349 billion in the previous year. The increase was caused by the increase in Guaranteed Claim Debt.

Liabilitas Jangka Panjang

Adapun porsi Liabilitas jangka panjang pada akhir 2025 adalah sebesar Rp349 miliar. Jumlah tersebut meningkat dari sebesar Rp304 miliar (tercapai 188% dari RKA 2025), atau tumbuh 15%. Hal ini dipengaruhi oleh Peningkatan Cadangan Klaim Penjaminan.

Long-Term Liabilities

The long-term liabilities portion at the end of the year 2025 was recorded at Rp349 billion. This total increased from Rp304 billion (188% of the 2025 BP), or 15% growth. This is influenced by the Increase in Guarantee Claim Reserves.

dalam Jutaan Rupiah | in Milliar Rupiah

Keterangan	RKA 2025 2025 BP	Realisasi		Perubahan (2025-2024)		Description
		Realization		Change (2025-2024)		
		2025	2024	Nominal Nominal	Persentase Percentage	
Ekuitas						Equity
Modal Saham	600.000	600.000	600.000	0	100%	Capital Stock
Komponen Ekuitas Lainnya	1.898	5.425	1.201	4.224	452%	Other Equity Components
Saldo Laba						Retained Earnings
Ditentukan Penggunaannya	31.289	27.365	10.923	16.442	251%	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya	36.951	14.399	25.969	11.570	55%	Unappropriated
Jumlah Ekuitas	670.138	647.189	638.093	9.096	101%	Total Equity



Tinjauan Keuangan

Financial Review

Ekuitas

Per 31 Desember 2025, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp647 miliar (tercapai 97% dari RKA 2025), tumbuh 1% dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp638 miliar. Perubahan pada ekuitas dipengaruhi oleh laba bersih dari kegiatan penjaminan dan investasi.

Equity

As of 31 December 2025, the Company's total equity was noted at Rp647 billion (97% of the 2025 BP), 1% growth compared to Rp638 billion in the previous year. This change in equity was affected by the net profit from underwriting and investment activities.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statements of Profit-Loss and Other Comprehensive Income

dalam Jutaan Rupiah | in Milliard Rupiah

Keterangan	RKA 2025 2025 BP	Realisasi		Perubahan (2025-2024)		Description
		Realization		Change (2025-2024)		
		2025	2024	Nominal Nominal	Persentase Percentage	
Pendapatan Penjaminan						Guarantee Revenues
Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah	375.762	374.810	324.906	49.904	115%	Guarantee Fees/Kafalah
Pendapatan Penjaminan Lainnya	22.027	21.277	24.112	2.835	88%	Other Guarantee Revenues
Jumlah Pendapatan Penjaminan	397.788	396.088	349.017	47.071	113%	Total Guarantee Revenues
Beban Penjaminan						Guarantee Expenses
Beban Klaim	(131.267)	(150.827)	(124.012)	26.815	122%	Claim Expenses
Beban Penjaminan Ulang dan Bersama	(160.365)	(160.299)	(137.369)	22.930	117%	Re-Guarantee and Co-Guarantee Expenses
Beban Fee Based Income	(21.063)	(17.711)	(16.062)	1.649	110%	Fee-Based Income Expenses
Beban Restitusi	(1.619)	(271)	(1.276)	1.005	21%	Restitution Expenses
Kenaikan Estimasi Klaim	(39.219)	(55.972)	(32.624)	23.348	172%	Increase in Claim Estimation
Jumlah Beban Penjaminan	(353.533)	(385.080)	(311.343)	73.737	124%	Total Guarantee Expenses
Hasil Penjaminan Bersih	83.474	11.006	37.675	26.669	29%	Guarantee Profit – Net
Pendapatan Investasi	50.924	54.342	49.250	5.092	110%	Investment Income
Beban Usaha						Operating Expenses
Beban Sumber Daya Manusia	(29.970)	(25.424)	(24.539)	115	99%	Personnel Expenses
Beban Operasional	(8.064)	(7.572)	(4.840)	2.732	156%	Operating Expenses
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(46.633)	(543)	(14.243)	13.700	4%	Allowance for Impairment Losses
Beban Administrasi dan Umum	(8.338)	(6.446)	(7.972)	1.526	83%	Administrative and General Expenses
Beban Sistem, Teknologi, dan Pengembangan Usaha	(1.260)	(881)	(698)	183	126%	Business System, Technology and Development Expenses
Jumlah Beban Usaha	(94.265)	(40.867)	(52.294)	11.427	78%	Total Operating Expenses
Beban Lain-Lain – Bersih	(1.245)	(407)	(1.273)	866	38%	Other Expenses – Net
Laba Usaha Sebelum Pajak	38.889	24.074	33.358	9.284	72%	Operating Profit Before Tax
Beban Pajak Penghasilan						Income Tax Expenses
Pajak Kini	(7.600)	(8.250)	(8.034)	216	103%	Current Tax
Pajak tangguhan	0	177	2.079	1.902	9%	Deferred Tax
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak	(7600)	(8.073)	(5.955)	2.118	136%	Total Tax Benefits (Expenses)
Laba Tahun Berjalan	31.289	16.000	27.403	11.403	58%	Profit for the Year
Jumlah Laba Komprehensif	31.280	20.056	28.127	8.071	71%	Total Comprehensive Profit

Tinjauan Keuangan

Financial Review

Pendapatan Penjaminan

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan berhasil memperoleh pendapatan penjaminan sebesar Rp 396 miliar (tercapai 100% dari RKA 2025), meningkat 13% dari tahun sebelumnya senilai Rp349 miliar. Kenaikan tersebut ditopang oleh peningkatan rate dan peningkatan *Volume* Penjaminan Kredit.

Pendapatan Investasi

Sepanjang 2025, Perseroan mencatatkan pendapatan investasi sebesar Rp54 miliar (tercapai 107% dari RKA 2025), meningkat 10% dari tahun sebelumnya senilai Rp49 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh Peningkatan dana yang tersedia untuk diinvestasikan yang dihasilkan oleh kas positif dari aktivitas operasional.

Beban Penjaminan

Perseroan mencatatkan kenaikan beban penjaminan sebesar 24%, dari Rp385 miliar (tercapai 108% dari RKA 2025) pada 2025 dari sebesar Rp311 miliar pada tahun sebelumnya disebabkan oleh meningkatnya beban klaim penjaminan di akibatkan oleh ada nya pencabutan *restructure* kredit di mitra utama penjaminan pasca pandemi

Laba Tahun Berjalan

Laba bersih Perseroan tercatat sebesar Rp16 miliar (tercapai 51% dari RKA 2025) atau menurun 58% dari senilai Rp27 miliar pada tahun sebelumnya. Menurunnya laba Perseroan sepanjang tahun ini dikontribusikan oleh penurunan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan dan peningkatan beban klaim penjamin.

Laba Komprehensif

Laba komprehensif Perseroan untuk tahun 2025 juga mencatatkan penurunan sehingga dibukukan sebesar Rp20miliar (tercapai 64% dari RKA 2025), turun 29% dari senilai Rp28 miliar pada tahun sebelumnya.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangannya menjadi salah satu indikator utama kesehatan keuangan dan keberlanjutan usaha. Dalam konteks ini, kemampuan membayar utang jangka pendek tercermin melalui rasio likuiditas, sedangkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang tercermin melalui rasio solvabilitas. Kedua rasio tersebut digunakan untuk menilai kecukupan aset Perseroan dalam menutup liabilitas yang jatuh tempo, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Guarantee Revenues

Until 31 December 2025, the Company managed to record guarantee revenues of Rp396 billion (100% of the 2025 BP), a 13% increment from the Rp349 billion in the previous year. This increment was supported by was supported by increasing rate and increase in credit guarantee volume.

Investment Income

Throughout the year 2025, the Company recorded its investment revenues a total of Rp54 billion (107% of the 2025 BP), a 10% increase from the Rp49 billion in the previous year. This increase was caused by the rise in funds available to be invested, generated by positive cash from operating activities.

Guarantee Expenses

The Company recorded an increase in guarantee expense at 24%, a total of Rp385 billion in 2025 (108% of the 2024 BP) from Rp311 billion in the previous year it caused by the increase in guarantee claim burden due to the revocation of credit restructuring in the main guarantee partners post-pandemic

Profit of the Year

The Company's Net Profit was logged at Rp16 billion (51% of the 2025 BP) or a 58% decrease from the Rp27 billion in the previous year. The company's decrease in profit throughout this year was contributed by a decrease in Guarantee Fee income and an increase in guarantor claim expenses. Comprehensive Profit.

Comprehensive Profit

The Company's comprehensive profit for the year 2025 also noted an increase that Rp20 billion (64% of the 2025 BP) was logged, a 29% growth from the Rp28 billion in the previous year.

ABILITY TO PAY DEBT

The Company's ability to fulfill its financial obligation is one of the main indicators of a sound financial condition and business continuity. In this context, the ability to pay short-term debt is reflected through liquidity ratio, while the ability to fulfill long-term obligation is reflected through solvability ratio. These two ratios are used to assess the Company's asset adequacy in covering maturing liabilities, both in the short and long terms.



Tinjauan Keuangan

Financial Review

Berikut ini adalah hasil perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas Perseroan selama tahun 2025:

Following are results of the Company's liquidity ratio and solvability ratio calculation during the year 2025:

Likuiditas

Uraian	2025	2024	Description
Rasio Kas	17%	32%	Cash Ratio
Rasio Lancar	123%	136%	Current Ratio

Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam melunasi liabilitas lancarnya dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rasio likuiditas mengalami penurunan sebesar 17% dari 32% pada tahun 2024. Penurunan tersebut terutama karena adanya peningkatan liabilitas jangka pendek.

Liquidity ratio reflects the Company's ability to pay off its current liabilities by using its current assets. Liquidity ratio decrease of 17% from 32% in 2024. This decrease is mainly due to an increase in short-term liabilities.

Solvabilitas

Uraian	2025	2024	Description
Rasio Utang Terhadap Ekuitas	1,3	0,8	Debt to Equity Ratio
Rasio Utang Terhadap Aset	0,6	0,4	Debt to Asset Ratio

Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam melunasi seluruh liabilitasnya dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Pada tahun 2025, Rasio solvabilitas mengalami peningkatan sebesar 1,9% dari 1,2% pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan adanya Peningkatan Ekuitas.

Solvability ratio describes the Company's ability to pay off all of its liabilities using all of its assets. In the year 2025, solvability ratio experienced a 1.9% Increase from 1.2% in the year 2024. This reflects the existence of an Increase in Equity.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Per 31 Desember 2025, Perseroan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi dan langkah-langkah yang direncanakan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

MATERIAL COMMITMENT FOR INVESTMENT IN CAPITAL GOODS

As of 31 December 2025, the Company had no material commitments for the investment of capital goods. For this reason, there is no information on the names of the parties that entered into the agreements, objectives of the agreements, the sources of funds expected fulfil such agreements, the currencies in which they were denominated and the steps planned to protect the risks of the related foreign currency positions.

INVESTASI BARANG MODAL TAHUN 2025

Pada tahun 2025, Perseroan telah merealisasikan belanja modal untuk aset tetap berupa pembelian Inventaris Kantor dan Renovasi Kantor dengan nilai sebesar Rp3.291 juta, meningkat dari Rp322 juta pada tahun sebelumnya. Dalam merealisasikan belanja modal tahun 2025, Perseroan menggunakan sumber dana yang berasal dari kas internal dengan denominasi Rupiah.

CAPITAL GOODS INVESTMENT IN 2025

In the year 2025, the Company actualized its capital expenditure on fixed assets in the forms Office Inventory Purchase and Office Renovation with a value of Rp3,29 million, an increase from the Rp3.291 million in the previous year. In actualizing capital expenditure in 2025, the Company utilized funds from internal cash with the Rupiah denomination.

Tinjauan Keuangan

Financial Review

PROSPEK USAHA TAHUN 2026

Memasuki tahun 2026, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tetap tumbuh secara stabil meskipun menghadapi tantangan global dan dinamika ekonomi domestik. Berdasarkan laporan Bank Dunia, perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh sekitar 5,0% pada tahun 2026, sejalan dengan perkiraan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi nasional akan tetap kuat di tengah ketahanan konsumsi domestik dan permintaan eksternal yang moderat. Proyeksi dari Bank Indonesia juga mengindikasikan pola pertumbuhan yang positif, dengan estimasi pertumbuhan ekonomi antara 4,9-5,7% untuk tahun 2026, tergantung pada kondisi global dan efektivitas kebijakan domestik dalam menjaga kesinambungan investasi serta konsumsi masyarakat.

Di sisi lain perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan menandai era baru kebijakan ekonomi Indonesia. Optimisme datang dari inisiatif paket stimulus Rp200 triliun kepada lima bank milik negara sejak September 2025. Keputusan ini merupakan respons langsung terhadap sinyal penurunan ekonomi terkait melambatnya pertumbuhan kredit sepanjang 2025 yang menunjukkan penurunan aktivitas ekonomi. Secara sederhana, alokasi stimulus Rp200 triliun dapat memberikan tekanan kuat, dimana ketika likuiditas perbankan meningkat, kredit lebih mudah disalurkan ke sektor riil dan UMKM.

Selanjutnya, sektor UMKM di Indonesia juga diproyeksikan memiliki prospek yang menjanjikan, didukung oleh berbagai inisiatif pemerintah dan tren bisnis yang berkembang. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan penguatan skema kemitraan dan rantai pasok melalui program *Holding* UMKM akan dioptimalkan dan diperluas pada 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur usaha nasional yang berkelanjutan.

Melalui *Holding* UMKM, pelaku usaha menengah dapat menjadi poros penghubung bagi usaha mikro dan kecil dalam kluster yang sama, sehingga tercipta skala ekonomis, akses pembiayaan, pendampingan inkubasi, dan pemasaran yang lebih kuat. Usaha menengah juga diharapkan mampu membantu menyelesaikan berbagai tantangan yang kerap dihadapi usaha mikro dan kecil, seperti kendala produksi, keterbatasan akses pembiayaan, belum optimalnya standardisasi mutu, serta lemahnya integrasi rantai pasok. Pada 2026, Kementerian UMKM juga akan mengoptimalkan pembiayaan inovatif bagi usaha menengah melalui skema terstruktur dan terkurasi, berbasis pada kesiapan finansial dan potensi usaha.

BUSINESS PROSPECTS IN 2026

Entering the year 2026, Indonesia's economy is projected to keep growing stably amidst facing global challenges and domestic economic dynamics. Based on World Bank reports, Indonesia's economy is projected to grow around 5.0% in 2026, in line with the forecast that the momentum for the national economic growth will remain resilient in the midst of moderate domestic consumption and external demand. Projection by Bank Indonesia also indicate a positive growth pattern, with an estimation of economic growth between 4.9-5.7% for the year 2026, depending on the global condition and the effectiveness of domestic policies in maintaining the continuity of investment as well as public consumption.

On the other hand, change in the leadership in the Finance Ministry signifies a new era of Indonesia's economic policies. Optimism arises from the stimulus package initiative of Rp200 trillion to five state-owned banks since September 2025. This decision was a direct response to the signs of economic decline related to the slowing down in credit growth during the year 2025 which indicated a decline in economic activity. Simply said, the allocation of the Rp200 trillion stimulus could exert great pressure, where banking liquidity increases, credit is easier to channel to the real sector and MSMEs.

Subsequently, the MSME sector in Indonesia is also projected to have promising perspectives, supported by various government initiatives and developing business trends. The Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Ministry ensures the strengthening of the partnership scheme and supply chain through the MSME Holding will be optimized and expanded in 2026, as part of the effort to strengthen the national sustainable business structure.

Through MSME Holding, medium business players can serve as a connecting axis for micro and mall businesses in the same cluster, thereby creating economies of scale, access to financing, incubation assistance and stronger marketing. Medium businesses are also hoped to be able to help resolve various challenges often faced by micro and small businesses, such as in production constraints, limited access to financing, suboptimal quality standardization, and weak supply chain integration. In the year 2026, the MSME Ministry will also optimize innovative financing for medium businesses through a structured and curated scheme, based on financial readiness and business potential.

Tinjauan Keuangan

Financial Review

Selain itu, program Rise to IPO yang bertujuan memberikan kesempatan bagi usaha menengah untuk melantai di bursa, juga akan kembali digelar pada 2026 di Surabaya, Bandung, dan Makassar. Pada tahun sebelumnya, *Rise to IPO* telah dilaksanakan di Jakarta dan Semarang, dengan total 128 perusahaan yang lolos kurasi dan mengikuti rangkaian seminar. Program ini menjadi jembatan strategis bagi pengusaha menengah untuk naik kelas, dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka yang lebih tertata, transparan, dan kompetitif. Program ini sekaligus berperan sebagai jangkar penting bagi penguatan ekosistem jutaan usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia.

Dengan kondisi ekonomi makro yang relatif stabil dan peran UMKM yang signifikan, prospek usaha bagi pelaku penjaminan kredit seperti JAMKRIDA Jakarta dipandang positif untuk tahun 2026. Oleh karena itu, Perseroan optimis dapat membukukan pertumbuhan volume penjaminan sekitar 116% di tahun 2026. Dukungan terhadap akses pembiayaan sektor UMKM, baik melalui penguatan kerja sama dengan lembaga perbankan maupun melalui pengembangan produk penjaminan yang relevan dengan kebutuhan usaha kecil dan menengah, menjadi inisiatif strategis yang dapat memperluas portofolio penjaminan.

Perseroan memandang bahwa upaya sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham utama akan semakin penting dalam memperkuat ekosistem pembiayaan daerah. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemprov Jakarta untuk melakukan pendampingan program Pemprov Jakarta dan meningkatkan kapasitas bisnis bagi UMKMK serta pemberdayaan UMKMK di wilayah Jakarta diharapkan mampu memberi iklim usaha yang kondusif bagi usaha penjaminan kredit. Oleh karena itu JAMKRIDA Jakarta akan sangat dibutuhkan sebagai salah satu opsi jalan keluar untuk membantu mempermudah akses bagi UMKMK ke Mitra Bank atau lembaga keuangan bank dan bukan bank lainnya untuk memperoleh kredit untuk pengembangan usahanya.

Perseroan tetap optimis terhadap peluang pertumbuhan volume penjaminan di tahun 2026. Keyakinan ini didukung oleh fundamental ekonomi makro yang tetap kuat, peran UMKM yang dominan dalam struktur ekonomi nasional, serta komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan praktik manajemen risiko yang prudent dan pengembangan produk penjaminan yang sesuai kebutuhan pasar. Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Perseroan menargetkan pertumbuhan penjaminan yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan pada tahun 2026.

Apart from that, the Rise to IPO program that aims at providing opportunities to medium-scale businesses to go public on the stock exchange will also be conducted in Surabaya, Bandung and Makassar. In the previous year, Rise to IPO was carried out in Jakarta and Semarang, with a total of 128 companies that passed curation and followed a series of seminars. This program serves as a strategic bridge for medium-scale business players to move up the scale, from being closed companies to become more organized, transparent and competitive public companies. The program, at the same time, serves as an important anchor for strengthening the ecosystem of millions of micro and small businesses throughout Indonesia.

With a relatively stable macroeconomic condition and the significant role of MSMEs, business prospects for credit guarantee business such as JAMKRIDA Jakarta is regarded as positive for the year 2026. For this is why the Company is optimistic in achieving guarantee volume growth by around 116% in 2026. Support to financing access for MSME sector, both through strengthening cooperation with banking institutions and through developing guarantee products that are relevant to the needs of small and medium enterprises, is becoming a strategic initiative that can expand the guarantee portfolio.

The Company views that efforts to synergize with the Provincial Government of DKI Jakarta as the majority shareholder will be increasingly important in reinforcing the regional financing ecosystem. Policies of the Central Government and Jakarta Provincial Government to carry out the mentoring program of Jakarta Provincial Government and increasing the capacity of MSMECO businesses in Jakarta are expected to be able to provide a conducive business climate for credit guarantee business. For this reason, JAMKRIDA Jakarta will be greatly needed as one of the solution options to help facilitate access for MSMECOs to Bank Partners or other banking and non-banking financial institutions to obtain credit for developing their businesses.

The Company remains optimistic towards the opportunity for growth in guarantee volume in the year 2026. This belief is supported by macroeconomic fundamentals that remain strong, a dominant role of MSME in the national economic structure, as well as the Company's commitment to implementing prudent risk management practices and guarantee product development that is in line with market needs. Through such strategic steps, the Company targets guarantee growth that is more soundly, inclusively and continuously in the year 2026.

Tinjauan Keuangan

Financial Review

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI DAN TARGET TAHUN 2025 SERTA PROYEKSI TAHUN 2026

Perbandingan Antara Realisasi dan Target Tahun 2025

Sebagai dasar penilaian kinerja tahun 2025, capaian aktual Perseroan dianalisis dengan mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam RKA, sehingga tingkat efektivitas pelaksanaan strategi dan program kerja dapat dievaluasi secara terukur. Perbandingan antara realisasi dan rencana tersebut adalah sebagai berikut:

COMPARISON BETWEEN REALIZATION AND TARGET IN 2025 AND 2026 PROJECTION

Comparison Between Realization and Target in 2025

As basis of performance assessment in 2025, the Company's actual achievements were analysed by referring to the targets set in the Business Plan, so that the level of effectiveness in strategy and work program implementation can be assessed measurably. The comparison between realization and plan is as follows:

dalam Jutaan Rupiah | in Milliar Rupiah

Uraian	2025			Description
	Target (Rp) Target (Rp)	Realisasi (Rp) Realization (Rp)	Pencapaian (%) Achievement (%)	
Pendapatan Penjaminan	397.788	396.087	100%	Guarantee Revenues
Laba tahun berjalan	31.289	16.000	51%	Profit of the Year

Proyeksi tahun 2026

Untuk menyusun proyeksi kinerja tahun 2026, Perseroan telah merumuskan RKA dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi makro, perkembangan industri penjaminan, kondisi pasar, serta kapasitas dan strategi internal Perseroan. Proyeksi tersebut disusun berdasarkan sejumlah asumsi utama yang menjadi dasar perencanaan operasional dan keuangan sebagai berikut:

2026 Projections

To prepare for 2026 performance projections, the Company formulated the Business Plan (BP) with consideration of the macroeconomic dynamics, guarantee industry development, market condition, as well as the Company's internal capacity and strategy. Such projections are established based on a number of main assumptions as basis of operational and financial planning as follows:

Indikator Indicator	Rentang Prediksi Prediction Range	Sumber Utama Main Source
Inflasi (CPI, YoY) Inflation (CPI, YoY)	1,5%-3,5%	Bank Indonesia
Suku bunga kebijakan (BI-7DRRR) Interest rate policy (BI-7DRRR)	4,25%-5,50%	Bank Indonesia
Pertumbuhan ekonomi (GDP, real, nasional) Economic growth (GDP, real, national)	5,2%-6,3%	Kemenkeu (KEM-PPKF), Bank Indonesia Ministry of Finance (KEM-PPKF), Bank Indonesia
Pertumbuhan DKI Jakarta (GRDP) DKI Jakarta growth (GRDP)	4,5%-6,0%	BPS Prov. DKI Jakarta Central Bureau of Statistics of the Province of DKI Jakarta

Tinjauan Keuangan

Financial Review

Dengan mempertimbangkan asumsi tersebut dan hasil kinerja yang telah dicapai sepanjang tahun 2025, Perseroan optimis dapat merealisasikan berbagai target pertumbuhan bisnis yang lebih baik di tahun mendatang. Target utama Perseroan untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

By considering these assumptions and performance results achieved during the year 2025, the Company is optimistic in realizing higher business growth targets in the coming years. The Company's main targets for the year 2026 are as follows:

dalam Jutaan Rupiah | in Milliar Rupiah

Uraian	Target 2026 2026 Target		Description
	%	(Rp)	
Capaian Pertumbuhan Bisnis Penjaminan	10-33	39.430.015	Achievement in Guarantee Business Growth
Pertumbuhan Pendapatan Subrogasi	10-50	18.080	Subrogation Income Growth
Pertumbuhan Hasil Investasi	10-25	64.102	Investment Yield Growth
Pertumbuhan Laba Bersih	2x lipat dari Prognosa 2 times from Prognosis	60.872	Net Profit Growth

Untuk mencapainya, Perseroan telah menetapkan strategi untuk tahun 2026 sebagai berikut:

1. Mengedepankan kehati-hatian dalam proses analisa penjaminan kredit/pembiayaan.
2. Terus menumbuhkan portofolio yang:
 - a. berasal dari mitra non dominan dan mitra baru
 - b. memprioritaskan produk produk penjaminan dengan tenor lebih pendek
3. Meneliti permohonan klaim dengan lebih hati-hati, memastikan berkas yang disampaikan pihak perbankan/ non-bank sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketentuan secara syariah jika akad yang digunakan menggunakan syariah.
4. Menjaga Tingkat Kesehatan Perseroan agar tetap dapat melaksanakan kegiatan perusahaan secara normal dan stabil sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Menjaga *Gearing Ratio* Perseroan agar tetap dapat melaksanakan kegiatan secara normal dan stabil sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
6. Mengembangkan strategi pemasaran dan penetrasi pasar yang efektif untuk mendapatkan nasabah baru di berbagai wilayah nasional.
7. Meningkatkan produktivitas produk kontra bank garansi, *custom bond* dan *surety bond* yang merupakan produk dengan jangka waktu pendek dengan menggandeng mitra bank BUMN, pemerintah, kementerian dan bea cukai.

To achieve this, the Company established the strategies for the year 2026 as described below:

1. Prioritize prudence in the analysis process of credit/ financing guarantee.
2. Continuously develop portfolio:
 - a. From non-dominant partners and new partners
 - b. That prioritizes guarantee products with shorter tenor
3. Examine claim application more carefully, ensuring that the documents submitted by the banking/non-banking parties are in accordance with applicable provisions and sharia provisions if the contract used is sharia.
4. Maintain Company Sound Level so as to remain capable of implementing company activities normally and stably in accordance with provisions of the Financial Services Authority (OJK).
5. Maintain the Company's Gearing Ratio so as to remain capable of implementing activities normally and stably in accordance with provisions of the Financial Services Authority (OJK).
6. Develop effective marketing and market penetration strategies to obtain new customers in various regions across the country.
7. Increase productivity of counter bank guarantee, custom bond and surety bond which are short-term products by collaborating with state-owned bank partners, the government, ministries and customs.

Tinjauan Keuangan

Financial Review

ASPEK PEMASARAN

Sepanjang tahun 2025, Perseroan secara aktif memperkuat strategi pemasaran untuk meningkatkan pangsa pasar penjaminan serta memperluas basis kemitraan dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan. Pencapaian penting dalam pengembangan pasar adalah diperolehnya izin pemasaran Penjaminan dengan cakupan nasional berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/D.05/2025 pada bulan Mei 2025. Persetujuan tersebut membuka ruang ekspansi yang lebih luas bagi Perseroan untuk memasarkan produk penjaminan di luar wilayah DKI Jakarta dan memperkuat posisi sebagai lembaga penjaminan daerah yang berdaya saing di tingkat nasional.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pemasaran dan mengantisipasi dinamika persaingan industri, Perseroan mengarahkan fokus pada pengembangan strategi penetrasi pasar yang lebih terstruktur dan berbasis kebutuhan mitra. Langkah ini mencakup perluasan jaringan nasabah di berbagai wilayah, penguatan kerja sama dengan lembaga keuangan baru, serta percepatan digitalisasi produk dan proses bisnis guna meningkatkan kecepatan layanan, kemudahan akses, dan kualitas pengalaman mitra.

Dari sisi pengelolaan portofolio, Perseroan mendorong optimalisasi produk-produk dengan tenor jangka pendek, seperti Bank Garansi, *Surety Bond*, serta penjaminan kredit dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun. Strategi ini diarahkan untuk memperbaiki perputaran portofolio, memperkuat likuiditas, serta menjaga profil risiko agar tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam industri penjaminan.

Perseroan juga menyadari perlunya mengurangi ketergantungan pada portofolio yang terkonsentrasi pada mitra utama tertentu, khususnya PNM dan Bank Jakarta. Dengan telah diperolehnya persetujuan OJK untuk melakukan pemasaran secara nasional, Manajemen mendorong pengembangan produk dan perluasan segmen pasar sebagai bagian dari strategi diversifikasi, sehingga sumber pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada dua mitra tersebut, tetapi juga berasal dari perbankan lain, lembaga keuangan nonbank, serta sektor-sektor usaha produktif di berbagai daerah.

MARKETING ASPECT

Throughout the year 2025, the Company actively strengthened its marketing strategy to increase guarantee market segment as well as expand partnership basis with financial institutions, both banking and non-banking. An important achievement in market development is marked by obtaining the Guarantee marketing permit that covers nationally based on the Financial Services Authority Decision Letter No. KEP-44/D.05/2025 in May 2025. This approval expanded a wider space for the Company to market guarantee products outside of DKI Jakarta areas and strengthened the position as a regional guarantee institution that is competitive nationally.

In the context of improving marketing performance and anticipate the industry's competitive dynamics, the Company directs its focus on the development of market penetration strategy that is more structured and based on partners' needs. This step includes the expansion of customer network base in various regions, strengthening cooperation with new financial institutions, as well as accelerate product and business process digitalization in order to accelerate service, ease of access and quality of partners' experience.

From the portfolio management perspective, the Company encourages optimization of products with short-term tenor, such as Bank guarantee, *Surety Bond* and credit guarantee with terms up to one year. The strategy is directed towards improving portfolio circulation, strengthen liquidity, and maintain risk profile so that it remains in line with the principle of prudence in guarantee industry.

The Company also realizes the need to reduce dependency on portfolio that is concentrated on certain major partners, specifically PNM and Bank Jakarta. With the approval from OJK to conduct marketing nationally, the Management encourages product development and market segment expansion as part of diversification strategy, so that growth sources not only rely on two such partners, but also from other banks, non-banking financial institutions, as well as productive business sectors in various regions.

Tinjauan Keuangan

Financial Review

Sebagai bagian dari penguatan eksekusi strategi, Perseroan menyusun *Summary Strategic Plan* yang memuat rencana aksi pemasaran dan pengelolaan hubungan dengan mitra utama secara lebih terukur. Dokumen ini menjadi panduan pelaksanaan strategi, termasuk penetapan target, program kerja, serta evaluasi bulanan atas kinerja kerja sama dengan Bank Jakarta dan PNM sepanjang tahun 2025, sehingga setiap inisiatif pemasaran dapat dimonitor secara konsisten dan disesuaikan dengan dinamika pasar serta kebutuhan mitra.

Adapun untuk tahun mendatang, Perseroan telah menetapkan strategi pemasaran dan promosi sebagai berikut:

1. Divisi penjaminan Bank, Non-Bank dan Unit Usaha Syariah tetap terus melakukan pendekatan dan sosialisasi dengan upaya peningkatan layanan dan komunikasi ke seluruh Mitra Penjaminan.
2. Melakukan komunikasi dengan seluruh Mitra Penjaminan untuk segera merealisasikan pengembangan *host to host* dengan produk-produk pilihan yang disepakati sesuai dengan kerja sama.
3. Melakukan *business gathering* dengan Mitra Penjaminan secara berkala.
4. Melakukan promosi melalui kegiatan pameran baik melalui media massa, media cetak dan elektronika secara selektif dan fokus terhadap penciptaan *brand image* Perseroan.
5. Membuka lowongan agen untuk segera didaftarkan ke asosiasi dan OJK agar segera dapat berkontribusi untuk mencari pekerjaan/proyek untuk dapat dijamin dengan *surety bond* maupun produk *custom bond*.
6. Melakukan sosialisasi dan presentasi ke SKPD dan BUMD setelah mendapatkan arahan dari Pemprov (termasuk BPPBJ) agar menggunakan *surety bond* PT Jamkrida Jakarta (Perseroda).

Pengembangan pemasaran ke depan juga difokuskan pada penjalinan kemitraan dengan perbankan yang berkantor pusat di berbagai wilayah nasional, sejalan dengan telah diperolehnya izin pemasaran berskala nasional dari OJK. Untuk mendukung strategi ekspansi tersebut, pada tahun 2026 Perseroan merencanakan pembukaan kantor cabang pemasaran di Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai langkah awal memperluas kehadiran fisik di luar wilayah DKI Jakarta dan memperkuat akses terhadap pasar di kawasan Jawa Timur dan sekitarnya.

As part of strategy execution, the Company prepares the *Summary Strategic Plan* that contains marketing action plan and a more measurable relation management with major partners. This document serves as strategy implementation guidelines, including establishing targets, work programs and monthly assessment of cooperation performance with Bank Jakarta and PNM during the year 2025, so that each marketing initiative can be monitored consistently and adjusted to market dynamics as well as partners' needs.

Going forward, the Company established the marketing and promotion strategies as described below:

1. Bank, Non-Bank and Sharia Business Unit guarantee divisions continuously approach and socialize with the effort to improve services and communication to all Guarantee Partners.
2. Communicate with all Guarantee Partners to immediately actualize host to host development with selective products as agreed in accordance with the agreement.
3. Conduct business gathering with Guarantee Partners on periodic basis.
4. Conduct promotion through exhibition activities through the mass media, print and electronic media selectively and focused on creating the Company's brand image.
5. Open agent vacancies to be immediately registered with the association and OJK so they can immediately contribute to finding job/projects that can be guaranteed with surety bonds or custom bond products.
6. Conduct socialization and presentation to SKPD and BUMD upon receiving directives from the Provincial Government (including BPPBJ) so as to use surety bonds of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda).

Going forward, marketing development is focused on establishing partnership with banks whose head offices are in various regions in the country, in line with national-scale marketing permit received from OJK. To support this expansion strategy, in 2026, the Company plans to establish a marketing branch office in Surabaya, East Java, as the initial step to expand its physical presence outside of DKI Jakarta area and to strengthen access to the market in Eastern Java and surrounding areas.

Tinjauan Keuangan

Financial Review

KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan Pembagian Dividen

Dalam pembayaran dividen, Perseroan menerapkan kebijakan keputusan untuk membayar dividen tergantung pada laba, kondisi keuangan dan likuiditas serta faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Landasan kebijakan pembagian dividen tersebut selaras dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas yang diubah dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dividen hanya akan dibagikan kepada pemegang saham apabila Perusahaan memiliki saldo laba yang positif. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih, tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas, jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas) dan jumlah dividen per tahun yang dibayar.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Sampai dengan 31 Desember 2025, Perseroan belum menerapkan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (*Employee Stock Ownership Program/ESOP* dan *Management Stock Ownership Program/MSOP*).

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan belum melakukan penawaran umum saham maupun obligasi ke publik melalui pasar modal. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi tentang realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, yang meliputi total perolehan dana; rencana penggunaan dana; rincian penggunaan dana; saldo dana; dan tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana.

DIVIDEND POLICY

Dividend Distribution Policy

In paying off dividends, the Company applies the decision policy to pay dividends which depends on profits, financial conditions and liquidity as well as other factors deemed relevant. The basis of this dividend distribution policy is in alignment with Law No. 40 of year 2007 regarding Limited Liability Companies amended with Law No. 11 of year 2020 regarding Work Creation whereby dividends will only be distributed to the shareholders if the Company retains a positive profit balance. For this reason, the Company does not present information on the percentage amount of distributed dividends against net profit, date of cash dividend payment and/or date of non-cash dividend distribution, total dividend per share (cash and/or non-cash) and the total dividend paid per year.

SHARE OWNERSHIP PROGRAM BY EMPLOYEES AND/OR MANAGEMENT (ESOP/MSOP)

Until 31 December 2025, the Company did not implement a stock ownership program for employees and/or management (*Employee Shares Ownership Program/ESOP* and *Management Shares Ownership Program/MSOP*).

REALIZATION OF THE USE OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS

Until 31 December 2025, the Company did not conduct a public offering of shares or bonds to the public through the capital market. For this reason, the Company did not present information concerning the realization of the use of public offering proceeds, which include the total funds collected; plans on the use of the funds; details on the use of the funds; funds balance; and date of GMS approval on the change in the use of the funds.

Tinjauan Keuangan

Financial Review

INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Alasan Dilakukannya Transaksi

Dalam menjalankan kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi usaha dan transaksi lainnya dengan pihak-pihak berelasi, yang terafiliasi dengan Perusahaan baik karena kepemilikan langsung ataupun tidak langsung, dan/atau di bawah kendali pihak yang sama. Harga jual atau beli antara pihak-pihak berelasi ditentukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Seluruh transaksi yang dilakukan Perseroan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan pada laporan keuangan dan telah disajikan sesuai standar PSAK 224 tentang "Pengungkapan pihak-pihak Berelasi". Semua transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi merupakan transaksi yang bersifat rutin.

Daftar Pihak-Pihak Berelasi, Sifat Hubungan dengan Pihak-Pihak Berelasi, dan Saldo Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pada tahun 2025, Perseroan telah menyelesaikan sejumlah transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 224 mengenai "Pengungkapan pihak-pihak Berelasi". Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.

Berikut ini adalah daftar pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan sebagaimana sudah diungkapkan dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025:

- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan pemegang saham Perseroan;
- PT Bank DKI adalah perusahaan yang berada di bawah pengendalian yang sama dengan Perseroan.

Informasi lengkap mengenai rincian saldo transaksi sepanjang tahun 2025 dapat dilihat pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) No. 37.

INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Reasons for Transactions

In conducting normal business activities, the Company performs business transactions and other transactions with related parties that are affiliated with the Company due to both direct and indirect ownership, and/or under the control of the same party. The selling or buying prices between the related parties are determined based on requirements approved by both sides involved, which may not be the same as other transactions conducted with non-related parties.

Explanation on the Appropriateness of Transactions

All Company's transactions with related parties are disclosed in the financial reports and are presented in accordance with PSAK 224 standards regarding "Disclosure of Related Parties". All transactions conducted with related parties are transactions of routine in nature.

List of Related Parties, Nature of Relationship with Related Parties and Balance of Transactions with Related Parties

In the year 2025, the Company completed a number of transactions with related parties as defined in PSAK No. 224 regarding "Disclosure of Related Parties". A related party is a person or entity related to the entity of the reporting party.

Following is list of the parties related to the Company as disclosed in the Financial Statements for the financial year which ended on 31 December 2025:

- The Provincial Government of the Capitol Special Region of Jakarta as a shareholder of the Company;
- PT Bank DKI is a company under the same control as the Company.

The complete information on the details of the transaction balance throughout the year 2025 can be viewed in the Notes to Financial Statements (CALK) No. 37.

Tinjauan Keuangan

Financial Review

Pernyataan Direksi atas Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi tahun 2025

Direksi berpendapat bahwa seluruh transaksi keuangan yang dilakukan Perseroan dengan pihak-pihak berelasi sudah dilaksanakan pada nilai yang wajar (*arm's length*) sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan telah mematuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Dewan Komisaris melalui Komite Audit menjalankan fungsi pengawasan atas transaksi dengan batas nilai tertentu untuk memastikan kewajaran dari transaksi tersebut dan menjamin tidak adanya transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan demi keuntungan pihak-pihak tertentu. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk pengendalian internal untuk menjamin terlaksananya aktivitas keuangan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta untuk memastikan bahwa semua transaksi tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*).

Kebijakan Perseroan Terkait Mekanisme Review atas Transaksi

Mekanisme review terhadap seluruh transaksi yang dijalankan Perseroan dengan pihak-pihak berelasi diterapkan sejak tahap awal dengan melibatkan organ-organ pengawas, seperti Komite Audit dan Dewan Komisaris.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Pemenuhan peraturan dan ketentuan mengenai transaksi dengan pihak-pihak berelasi dipastikan telah memenuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Statement of the Board of Directors on the Transactions with Related Parties in 2025

The Board of Directors is of the opinion that all financial transactions conducted by the Company with related parties were carried out at arm's length value in accordance with GCG principles and have complied with accounting standards applicable in Indonesia.

Role of the Board of Commissioners and the Audit Committee in Transactions with Related Parties

The Board of Commissioners, through the Audit Committee, carries out its supervisory function on transactions with a certain value limit to ensure fairness of the transactions and to assure that there are no transactions with the potential to cause conflicts of interest for the benefit of certain parties. This policy is carried out as a form of internal control to ensure the implementation of financial activities that uphold the principles of transparency and accountability, as well as to ensure that all such transactions are conducted in accordance with generally accepted business practices and fulfilling the arm's length principle of transaction.

Company's Policy Related to Transaction Review Mechanism

The review mechanism on all transactions conducted by the Company with related parties is implemented at the initial stage by involving supervisory organs, such as the Audit Committee and the Board of Commissioners.

Compliance with Related Regulations and Provisions

Compliance with regulations and provisions on transactions with related parties is assured to have fulfilled the Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, namely PSAK 244 regarding "Disclosure of Related Parties".



Tata Kelola **Perusahaan**

Good Corporate Governance



Tentang Tata Kelola Perusahaan

About Good Corporate Governance



JAMKRIDA Jakarta memahami bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/"GCG") adalah kunci dalam menjalankan bisnis yang berintegritas. JAMKRIDA Jakarta menjalankan mandat penting dalam menunjang program pemerintah di bidang pengembangan UMKMK, khususnya di Jakarta, melalui kegiatan usaha penjaminan kredit



JAMKRIDA Jakarta carries out an important mandate to support the government's program in the development of MSMECO, specifically in Jakarta, through credit guarantee business activities

PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK SEBAGAI LANDASAN BISNIS BERINTEGRITAS

Telah menjalankan bisnis selama lebih dari satu dekade, JAMKRIDA Jakarta memahami bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/"GCG") adalah kunci dalam menjalankan bisnis yang berintegritas. JAMKRIDA Jakarta menjalankan mandat penting dalam menunjang program pemerintah di bidang pengembangan UMKMK, khususnya di Jakarta, melalui kegiatan usaha penjaminan kredit. Dalam implementasinya, Perseroan berpedoman pada ketentuan POJK No. 3/POJK.05/2017 ("POJK 3/2017") tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin, serta ketentuan perundang-undangan dan *best practice* lainnya yang relevan. Seluruh elemen Perseroan menerapkan nilai-nilai GCG secara konsisten sehingga JAMKRIDA Jakarta terus bertumbuh sebagai sebuah entitas yang solid untuk menuju satu visi, yaitu menciptakan keberlangsungan usaha jangka panjang.

IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE AS A FOUNDATION FOR BUSINESS WITH INTEGRITY

After running its business for more than a decade, JAMKRIDA Jakarta understands that Good Corporate Governance (GCG) is key to conducting business with integrity. JAMKRIDA Jakarta carries out an important mandate to support the government's program in the development of MSMECO, specifically in Jakarta, through credit guarantee business activities. In its implementation, the Company guided by the provision of POJK No. 3/POJK.05/2017 ("POJK 3/2017") regarding Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, as well as other relevant regulatory provisions and best practices. All elements of the Company apply GCG values consistently that JAMKRIDA Jakarta continues to grow as a solid entity moving towards one vision, namely to creating long-term business continuity.

Tentang Tata Kelola Perusahaan

About Good Corporate Governance

Penerapan GCG diarahkan untuk memastikan bahwa setiap keputusan penjaminan, pengelolaan portofolio, serta pengembangan bisnis dilakukan secara *prudent*, terukur, dan sejalan dengan mandat Perseroan sebagai lembaga penjamin daerah. Untuk itu, Perseroan memastikan kecukupan infrastruktur tata kelola dan mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen Perseroan. Langkah konkret yang telah diaktualisasikan oleh Perseroan adalah dengan menetapkan sebuah Pedoman GCG yang menjadi landasan pelaksanaan GCG di Perseroan sebagaimana disahkan melalui Peraturan Direksi No. 029/Perdir/XII/2022 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Setiap insan Perseroan memikul tanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan pemahaman yang memadai atas praktik bisnis korporasi yang sehat. Prinsip tersebut menjadi rujukan dalam setiap proses pengambilan keputusan operasional dan bisnis, terutama yang berkaitan dengan penilaian penjaminan, pengelolaan risiko, dan pengendalian eksposur Perseroan. Melalui penerapan GCG yang terintegrasi dalam aktivitas unit-unit bisnis, Perseroan membangun lingkungan kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan disiplin dalam menjalankan mandat usaha.

Kerangka tata kelola tersebut dijaga dan diperkuat secara berkelanjutan guna memastikan pertumbuhan usaha yang terkendali, kepatuhan terhadap koridor hukum yang berlaku, serta keberlanjutan model bisnis penjaminan Perseroan. Melalui penguatan GCG yang dilakukan secara sistematis, Perseroan berupaya menciptakan nilai tambah yang berkesinambungan bagi pemegang saham, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

PRINSIP-PRINSIP GCG

Kerangka kerja GCG di Perseroan disusun dengan mengacu pada lima prinsip dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness/TARIF*). Kelima prinsip TARIF menjadi acuan dalam perumusan kebijakan, pengaturan mekanisme kerja, serta pelaksanaan fungsi pengelolaan dan pengawasan di seluruh tingkatan organisasi. Penerapannya diarahkan untuk memastikan bahwa Perseroan mampu memenuhi aspirasi para pemangku kepentingan secara konsisten. Sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut, prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam penerapan GCG di Perseroan dan diintegrasikan ke dalam seluruh proses bisnis serta pengambilan keputusan operasional dan strategis.

GCG Implementation is directed to ensuring that each guarantee decision, portfolio management, and business development are carried out prudently, measured, and in line with the Company's mandate as a regional guarantee institution. For this purpose, the Company ensures the adequacy of governance infrastructure and enforces the active involvement of all elements of the Company. A concrete step actualized by the Company was by establishing a GCG Guidelines that serves as the foundation of GCG implementation in the Company as ratified based on the Board of Directors Regulation No. 029/Perdir/XII/2022 on Good Corporate Governance Guidelines.

Every Company personnel bears the responsibility to apply GCG principles consistently with adequate understanding of sound corporate business practices. This principle serves as reference in each operational and business decision-making process, especially which relates to the Company's guarantee assessment, risk management and exposure control. Through GCG implementation, integrated in business units' activities, the Company builds a work environment that holds high integrity, professionalism, and discipline in carrying out business mandate.

This governance framework is sustainably maintained and strengthened in order to ensure controlled business growth, compliance with applicable legal corridor, as well as sustainability of the Company's guarantee business model. Through reinforcing GCG systematically, the Company strives to create added values on continuous basis for the shareholders, community and all stakeholders.

GCG PRINCIPLES

The Company's GCG framework was prepared with reference to five basic principles as regulated in Article 2 of the Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.05/2017, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness (TARIF). The five TARIF principles serve as reference in formulating policies, work mechanism settings, as well as implementation of management and supervisory functions at all levels of the organization. Its implementation is aimed at ensuring that the Company is able to consistently meet the aspirations of stakeholders. As further described in the section, these principles serve as guidelines to GCG implementation in the Company and integrated into all business processes as well as in operational and strategic decision-making.

Tentang Tata Kelola Perusahaan

About Good Corporate Governance

Prinsip Tata Kelola Governance Principle	Penjelasan Berdasarkan POJK 3/2017 Pasal 2 Explanation Based on POJK 3/2017 Article 2	Penerapan di Perseroan Implementation in the Company
 Transparansi Transparency	Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Lembaga Penjamin, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. / Transparency in decision-making and transparency in disclosing and delivering relevant information on Guarantee Institution, that is easy to access by Stakeholders in accordance with the laws and regulations on guarantee as well as standards, principles, and healthy business practices.	Perseroan selalu menekankan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan transparansi yang konsisten dalam mengungkapkan informasi material yang relevan mengenai Perseroan, dengan mematuhi kebijakan pengungkapan informasi rahasia Perseroan. / The Company always emphasizes the principle of transparency in decision-making process and ensures that consistent transparency in disclosing Company's relevant material information, by complying to the policy on Company's confidential information disclosure.
 Akuntabilitas Accountability	Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Lembaga Penjamin sehingga kinerja penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. / Clarity of the function and implementation of accountability of the Guarantee Institution's organs that business performance of Guarantee Institution can run in transparent, proper, effective and efficient.	Perseroan telah menetapkan pembagian peran, fungsi, dan pelaksanaan pertanggungjawaban secara jelas untuk seluruh Organ Perseroan. Langkah ini bertujuan agar pengelolaan kegiatan usaha sehari-hari dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan Perseroan. / The Company determines clear division of roles, functions and implementation of accountability to all Company Organs. This step aims to ensure that the management of daily business activities can run effectively and efficiently in achieving the Company's goals.
 Tanggung Jawab Responsibility	Kesesuaian pengelolaan Lembaga Penjamin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. / Suitability of the management of Guarantee Institution with the laws and regulations on guarantee and ethical values as well as standards, principles and practices of sound business management.	Perseroan memastikan kepatuhan dan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan operasional dan bisnis sehari-hari dengan peraturan perundang-undangan, terutama yang berlaku bagi lembaga penjamin. / The Company ensures compliance and suitability between the implementation of daily operational and business activities with the laws and regulations, especially those applicable to guarantee institutions.
 Independensi Independency	Keadaan Lembaga Penjamin yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip. / Guarantee Institutions managed independently and professionally as well as free from Conflict of Interest and influence or pressure from any party that does not comply with the provisions of the laws and regulations in the field of guarantee and ethical values as well as standards and principles.	Perseroan menegaskan komitmennya dalam memastikan pengelolaan kegiatan usahanya dilaksanakan secara profesional dan independen. Selain itu, Perseroan juga berkomitmen untuk mengelola dan mencegah potensi benturan kepentingan, dengan menjaga independensinya dari pengaruh atau tekanan pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. / The Company emphasizes its commitment to ensuring that the management of business activities is carried out professionally and independently. In addition, the Company is also committed to managing and preventing potential conflict of interest, by maintaining independency from influence or pressure from any party that does not comply with provisions of the laws and regulations and sound corporate principles.
 Keadilan Fairness	Kesetaraan dan keseimbangan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. / Equality and balance in fulfilling the rights of Stakeholders that arise based on agreements, provisions of the laws and regulations on guarantee, and ethical values as well as standards, principles and sound business practices.	Perseroan memastikan pemenuhan hak-hak seluruh pemangku kepentingan dengan memberikan perlakuan yang adil dan setara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan. / The Company ensures the fulfilment of the rights of all stakeholders by providing fair and equal treatment, in accordance with applicable provisions of the laws and regulations. This is reflected in the Company's commitment to maintaining fairness and equality in meeting the rights of the stakeholders.

Mekanisme GCG

GCG Mechanism

Mekanisme GCG di JAMKRIDA Jakarta dijalankan melalui dukungan struktur dan infrastruktur tata kelola yang memadai, sehingga proses pengelolaan usaha, pengambilan keputusan, serta pengendalian risiko dapat berjalan secara terarah dan akuntabel. Mekanisme GCG Perseroan dibangun melalui keterpaduan antara struktur tata kelola dan perangkat pendukung tata kelola yang membentuk perilaku organisasi. Struktur tata kelola memberikan kerangka formal berupa pembagian peran, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas, sedangkan *governance soft structure* memperkuat penerapan prinsip GCG melalui kebijakan, prosedur, dan budaya kerja yang mendukung pelaksanaan tata kelola secara berkelanjutan.

Mekanisme GCG Perseroan didukung oleh:

1. **Struktur Tata Kelola**
Struktur tata kelola memberikan kerangka formal bagi pengelolaan Perseroan melalui penetapan peran, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas antar organ dan unit kerja. Struktur ini menjadi dasar bagi pelaksanaan fungsi pengawasan, pengelolaan, serta pengambilan keputusan strategis dan operasional secara terukur.
2. **Governance Soft Structure**
3. **Governance soft structure** mendukung penerapan GCG melalui kebijakan, pedoman, prosedur, dan nilai-nilai kerja yang membentuk perilaku organisasi. Perangkat ini memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG terintegrasi dalam proses kerja sehari-hari dan menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan operasional dan bisnis.

Penerapan struktur tata kelola dan *governance soft structure* yang efektif memungkinkan Perseroan menjalankan mekanisme GCG secara menyeluruh dan terintegrasi, guna mendukung pencapaian tujuan usaha serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

GCG mechanism in JAMKRIDA Jakarta is enforced through the support of adequate governance structure and infrastructure, so that business management process, decision-making and risk control can run in a directed and accountable manner. The Company's GCG mechanism is built through the integration between governance structure and governance support tools that shape organizational behaviour. Governance structure provides formal framework in the forms of clear division of roles, authority and responsibilities, while the governance soft structure strengthens the implementation of GCG principles through policies, procedures and work culture that support the implementation of sustainable governance.

The Company's GCG mechanism is supported by the following:

1. **Governance Structure**
Governance structure provides a formal framework for the management of the Company through establishing clear roles, authorities and responsibilities among organs and work units. This structure serves as basis for the implementation of supervision, management, as well as measurable strategic and operational decision-making.
2. **Governance Soft Structure**
3. **Governance soft structure** supports GCG implementation through policies, guidelines, procedures and work values that form organizational behaviour. This soft structure ensures that GCG principles are integrated in the daily work processes and serves as reference in operational and business decision-making.

Effective implementation of governance structure and governance soft structure allow the Company to act on GCG mechanism comprehensively and integrated, in order to reinforce the achievement of business goals as well as maintain the trust of the stakeholders.

Mekanisme GCG

GCG Mechanism

STRUKTUR GCG

Struktur GCG Perseroan mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang mengatur mekanisme GCG Perseroan agar terdiri dari 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Ketiga organ utama tersebut memiliki fungsi serta tugas dan tanggung jawab yang memastikan operasionalisasi bisnis Perseroan berjalan secara terarah, terawasi, dan dikelola dengan baik.

Selain organ utama tersebut, Perseroan juga memiliki organ-organ pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu:

1. Organ pendukung Dewan Komisaris, yang terdiri dari:
 - a. Komite Audit;
2. Organ pendukung Direksi, yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Perusahaan;
 - b. Unit Audit Internal ;
 - c. Manajemen Risiko & Kepatuhan;
 - d. Tim GCG.

GCG STRUCTURE

The Company's GCG structure refers to Law No. 40 of Year 2007 regarding Limited Liability Companies ("UU PT") that regulates Company GCG mechanism so as to consist of 3 (three) main organs, namely the General Meeting of Shareholders (GSM), the Board of Commissioners and the Board of Directors. These three main organs hold the functions as well as duties and responsibilities that ensure the Company's business operationalization runs as directed, supervised and managed appropriately.

Aside from these main organs, the Company also consists of supporting organs under the Board of Commissioners and the Board of Directors, namely as follows:

1. Supporting organs to the Board of Commissioners consisting of the following:
 - a. Audit Committee;
2. Supporting organs to the Board of Directors consisting of the following:
 - a. Corporate Secretary;
 - b. Internal Audit Unit;
 - c. Risk Management & Compliance;
 - d. GCG Team

Penilaian Penerapan GCG Tahun 2025

Assessment of GCG Implementation in 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan melakukan evaluasi internal atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik melalui mekanisme penilaian sendiri atau kertas kerja *self-assessment* sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin. Evaluasi ini difokuskan untuk menilai sejauh mana kebijakan, prosedur, dan praktik tata kelola telah dijalankan secara konsisten dan efektif dalam mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, penerapan GCG pada tahun 2025 memperoleh nilai 94,54 dengan predikat SANGAT BAIK. Hasil penilaian tersebut meningkat/menurun jika dibandingkan dengan hasil *self-assessment* tahun 2024 yang berhasil mencapai nilai sebesar 94,60 dengan predikat SANGAT BAIK.

Hasil *self-assessment* tersebut dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran organisasi untuk memperkuat kualitas tata kelola ke depan. Perseroan menindaklanjuti hasil penilaian dengan mengidentifikasi area-area yang memerlukan penyempurnaan (*area of improvement*) dan merumuskan langkah perbaikan yang terukur, agar penerapan GCG tetap relevan, adaptif, dan efektif dalam mendukung keberlanjutan usaha Perseroan.

Throughout the year 2025, the Company conducted internal assessments on the implementation of Good Corporate Governance through self-assessment mechanism or self-assessment work paper in accordance with the provisions set under the Financial Service Authority Circulation Letter No. 54/SEOJK.05/2017 regarding the Report on Good Corporate Governance Implementation for Guarantee Institutions. These assessments were focused on evaluating how far policies, procedures and governance practices are carried out consistently and effectively in support of the Company's business activities.

Based on assessment results, GCG implementation in 2025 received the score of 94,54 with the predicate VERY GOOD. This assessment result improved/worsened if compared to the self-assessments results in 2024 that reached the score of 94,60 with predicate VERY GOOD.

This self-assessment is used as organization's learning material to enforce governance quality in times ahead. The Company follows up on the assessment results by identifying areas of improvement and formulates measurable improvement steps, so that GCG implementation remains relevant, adaptive and effective in support of the Company's business sustainability.

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Atas Penerapan GCG

Self-Assessment Result on GCG Implementation

94,54 Predikat SANGAT BAIK	2025	94,54 with Predicate VERY GOOD
94,60 Predikat SANGAT BAIK	2024	94,60 with Predicate VERY GOOD
91,44 Predikat SANGAT BAIK	2023	91.44 with Predicate VERY GOOD

94,54 2025 Tahun
Year
Predikat | predicates
SANGAT BAIK
Very Good

94,60 2024 Tahun
Year
Predikat | predicates
SANGAT BAIK
Very Good

91,44 2023 Tahun
Year
Predikat | predicates
SANGAT BAIK
Very Good

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS)

Kebijakan RUPS

RUPS merupakan organ Perseroan yang memiliki kewenangan strategis tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang tidak dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi. Pada pelaksanaannya, RUPS berfungsi sebagai wadah bagi para pemegang saham untuk memutuskan berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan modal yang ditanam di perusahaan dan kepengurusan perusahaan.

Melalui RUPS, pemegang saham menetapkan arah kebijakan utama Perseroan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan struktur permodalan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus, serta persetujuan atas kebijakan strategis yang berdampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.

Dalam pelaksanaannya, RUPS diselenggarakan secara transparan dan akuntabel dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Proses pengambilan keputusan dalam RUPS diarahkan untuk memastikan keseimbangan kepentingan para pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham, pihak terjamin, dan penerima jaminan, sejalan dengan peran Perseroan sebagai lembaga penjamin daerah.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. Seluruh keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan terbuka, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kinerja dan keberlanjutan Perseroan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Setiap penyelenggaraan RUPS didokumentasikan dalam risalah rapat yang sekurang-kurangnya memuat waktu dan tempat pelaksanaan, agenda rapat, daftar kehadiran, dinamika pembahasan, serta keputusan yang diambil. Dokumentasi tersebut menjadi dasar pertanggungjawaban dan rujukan pelaksanaan keputusan RUPS oleh organ Perseroan.

Kebijakan dan pelaksanaan RUPS Perseroan telah disusun dan dijalankan selaras dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin. Melalui penerapan kebijakan tersebut, RUPS diharapkan mampu

GMS Policy

GMS is a Company organ with the highest strategic authority in accordance with provisions of the laws and regulations and the Company's Articles of Association which cannot be delegated to the Board of Commissioners nor to the Board of Directors. In its implementation, the GMS functions as the forum for shareholders to decide on various strategic policies related to the capital invested in the company and the company's management.

Through the GMS, shareholders determine the direction of the Company's main policies, including the decision related to capital structure, appointment and dismissal of the administrators, as well as approval on strategic policies that significantly impact the Company's business continuity.

In its implementation, the GMS is held in transparent and accountable manner with reference to applicable provisions. Decision-making process in the GMS is directed at ensuring a balance of interests of the stakeholders, particularly the shareholders, the guaranteed parties and the guarantee recipients, in line with the Company's role as a regional guarantee institution.

Decision-making mechanism in the GMS is conducted based on deliberation to reach consensus as regulated by the Limited Liability Company Law. Should consensus not reached, decision shall be taken through voting based on the majority vote. All GMS resolutions are conducted appropriately and openly, with consideration of the impact on the Company's performance and sustainability in the short, middle and long-term.

Every GMS held is documented in the minutes of meeting at least containing the time and place of event, meeting agenda, attendance list, discussion dynamics and resolutions taken. This documentation serves as basis of accountability and reference for implementation of GMS resolutions by Company organ.

The policy and implementation of Company GMS are prepared and carried out in line with the provisions of Article 5 of the Financial Service Authority No. 3/POJK.05/2017 regarding Good Corporate Governance of Guarantee Institutions. Through the implementation of such policy, the GMS is expected to be able to

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS)

menghasilkan keputusan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dalam pengelolaan Perseroan.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2025

Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun 2025 pada tanggal 27 Maret 2025, yang dihadiri oleh para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan. Dalam RUPS Tahunan 2025, terdapat 7 (tujuh) mata acara, yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024;
3. Penetapan penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2025 dan Tantiem anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Kinerja tahun Buku 2024;
4. Penetapan honorarium dan penghasilan lainnya Dewan Pengawas Syariah Perseroan Tahun 2025;
5. Persetujuan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025;
6. Perubahan Lingkup Wilayah Operasional Perseroan;
7. Perubahan Alamat Perseroan.

Seluruh agenda rapat dan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan tersebut didokumentasikan secara lengkap dalam Risalah Rapat sebagai bentuk akuntabilitas proses pengambilan keputusan. Risalah RUPS Tahunan 2025 telah dituangkan dan disahkan dalam Akta Keputusan RUPS yang dibuat oleh Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.KN. Penunjukan notaris dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan RUPS serta penetapan keputusannya dilaksanakan secara independen, sah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh keputusan RUPS Tahunan 2025 telah direalisasikan sepanjang tahun berjalan.

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 2025

Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Tahun 2025, yang dihadiri oleh para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan. Dalam RUPS Luar Biasa Tahun 2025 tersebut, rapat diselenggarakan pada:

1. Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham
Pada tanggal 24 November 2025, Perseroan telah menetapkan Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta

generate decisions that support the consistent implementation of GCG principles in the management of the Company.

Implementation of Gms in 2025

The Company held its Annual GMS of the year 2025 on 27 March 2025, attended by the Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company. In the 2025 Annual GMS, 7 (seven) agenda items were set as follows:

1. Approval of the Annual Report including the Report of the Supervisory Duty of the Board of Commissioners and the Ratification of the Financial Statements of Fiscal Year 2024;
2. Decision on the use of the Net Profit of Fiscal Year 2024;
3. Decision on the remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the year 2025 and the Tantiem for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Performance of Fiscal Year 2024;
4. Decision on the honorarium and other income of the Sharia Supervisory Board of the Company for Fiscal Year 2025;
5. Approval on the appointment of the Public Accounting Firm to conduct the Financial Statements Audit of the Company for Fiscal Year 2025;
6. Change in the Scope of the Company's Operational Areas;
7. Change in the Company's Address.

All meeting agenda and resolutions taken in this Annual GMS were documented in completion in the Minutes of Meeting as a form of accountability in decision-making process. The Minutes of the 2025 Annual GMS is stated and ratified in the Deed of the GMS Resolutions made before Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.KN. The Appointment of the notary was conducted to ensure that the GMS held and the determination of its decisions were carried out independently, legally and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. All decisions of the 2025 Annual GMS were actualized throughout the current year.

2025 Extraordinary GMS Implementation

The Company conducted the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of Year 2025, attended by the Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company. In this 2025 Extraordinary GMS, the meeting was documented as follows:

1. Deed of Statement of Decisions Outside of the General Meeting of Shareholders
On 24 November 2025, the Company established a Statement of Decisions Outside the General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS)

(Persero) mengenai Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris. Keputusan tersebut diambil secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Seluruh keputusan yang termuat dalam akta tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola Perseroan.

(Persero) regarding the Appointment of Members of the Board of Commissioners. The decision was legally taken in accordance with provisions of applicable laws and regulation and stated in the Notarial Deed of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. All decisions contained in the deed were effective as of the date determined and served as an integral part of the Company's governance.

2. Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025
Pada tanggal 19 Desember 2025, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Tahun 2025 yang dihadiri oleh para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan. RUPS Luar Biasa tersebut memiliki 1 (satu) mata acara, yaitu Pengesahan dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 PT Jamkrida Jakarta (Persero). Setelah dilakukan pembahasan secara menyeluruh, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026. Keputusan RUPS Luar Biasa tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., dan akan diimplementasikan sepenuhnya oleh Perseroan pada tahun 2026.

2. Deed of Decision of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders
On 19 December 2025, the Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of Year 2025, attended by the Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company. The Extraordinary GMS had 1 (one) agenda item, namely the Ratification and Decision of the Work Plan and Budget (RKAP) of Year 2026 of PT Jamkrida Jakarta (Persero). Following comprehensive discussions, the Shareholders approved and ratified the 2026 Work Plan and Budget. Resolutions of the Extraordinary GMS were stated in the Notarial Deed of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., and will be fully implemented by the Company in the year 2026.

Realisasi Keputusan RUPS 2024

Seluruh keputusan yang dihasilkan dalam RUPS Tahunan 2025 yang membahas kinerja Perseroan pada tahun buku 2024 telah sepenuhnya dijalankan pada tahun 2025.

Realization of the 2024 GMS Resolutions

All decisions made during the Annual GMS of Year 2025 which discussed the Company's performance for fiscal year 2024 were fully carried out during the year 2025.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang menjalankan fungsi pengawasan atas kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Direksi, baik secara umum maupun khusus, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Selain fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memberikan nasihat kepada Direksi dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan Perseroan dilaksanakan secara prudent, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris dituntut memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan melalui RUPS. Perseroan memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris telah melalui proses uji kompetensi dan integritas (*fit and proper test*) sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga fungsi pengawasan dapat dijalankan secara independen, objektif, dan bertanggung jawab.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang secara kolektif menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, serta memastikan penerapan GCG dalam pengelolaan Perseroan. Fungsi tersebut dilaksanakan secara aktif dan berkesinambungan untuk menjaga agar pengurusan Perseroan tetap berada dalam koridor strategi, ketentuan, dan prinsip kehati-hatian yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris mencakup tindakan yang bersifat preventif, korektif, hingga rekomendasi pemberlakuan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, termasuk pemberhentian sementara Direksi apabila diperlukan. Secara lebih rinci, implementasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan hukum serta prinsip-prinsip GCG;
2. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP, ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, dan melaksanakan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;

The Board of Commissioners is the Company organ that executes the supervisory function over the policy management and implementation of business activities carried out by the Board of Directors, both in general and in specific, in accordance with the Company's Articles of Association. Aside from the supervisory function, the Board of Commissioners provides advice to the Board of Directors in the context of ensuring that the management of the Company is carried out in prudence, accountable, and in line with GCG principles.

In performing such duties and responsibilities, the Board of Commissioners is expected to retain integrity, competency and adequate reputation. Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking advantage of their positions to obtain personal gain other than the remuneration and facilities determined through the GMS. The Company ensures that all members of the Board of Commissioners have passed through the fit and proper test in accordance with applicable provisions, that the supervisory function can be carried out independently, objectively and responsibly.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

In accordance with the provisions of the Articles of Association, the Board of Commissioners is the Company organ that collectively carries out its supervisory function and provides advice to the Board of Directors, as well as ensures GCG implementation in the management of the Company. This function is carried out actively and continuously to ensure that the management of the Company remains within the corridor of the applicable strategies, provisions and principle of prudence.

In its implementation, the supervisory function and providing advice by the Board of Commissioners include preventive and corrective actions to recommendations for the implementation of sanctions in accordance with its authority, including temporary dismissal of the Board of Directors if necessary. Further in details, the implementation of duties, authorities, and responsibilities of the Board of Commissioners includes the following:

1. Comply with Company Articles of Association and legal regulations as well as GCG principles;
2. Supervise the Company's management and business policies carried out by the Board of Directors, including supervision of the implementation of RJPP, RKAP, Articles of Association provisions and GMS decisions, as well as conduct other supervision as long as it does not conflict with applicable legal regulations, in the interests of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company;

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

3. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan;
4. Menyetujui dan mengesahkan RJPP dan RKAP;
5. Melakukan tindakan pengelolaan Perusahaan dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
6. Memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu, terukur dan lengkap;
7. Membentuk organ-organ di bawah Dewan Komisaris yang diperlukan/dipersyaratkan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya;
8. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan;
9. Secara aktif meminta keterangan secara lisan maupun tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan yang terjadi dan/atau berdasarkan hasil evaluasi komite audit/organ-organ Dewan Komisaris berkenaan dengan perkembangan kegiatan/pengelolaan Perusahaan yang dianggap penting dan strategis dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan;
10. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dan tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng;
11. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengelolaan Direksi yang mengakibatkan kerugian;
 - c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut;
 - d. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;
 - e. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan GCG;
 - f. Memantau efektifitas penerapan GCG;
 - g. Memberikan persetujuan dalam hal Dewan Pengawas Syariah (DPS) memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris;
3. Provides advice to the Board of Directors in managing the Company;
4. Approves and ratifies RJPP and RKAP;
5. Carries out Company management actions under certain circumstances in accordance with the provisions stipulated in the Company's Articles of Association.
6. Acquires access to Company information on on-time and measurable manner, and in completion;
7. Establishes organs under the Board of Commissioners as needed/required to assist the Board of Commissioners to carry out its duties;
8. Uses experts for particular matters and for certain period of time at the Company's expense;
9. Actively requests for verbal or written explanation to the Board of Directors on certain issues that occurred and/or based on evaluation results from the audit committee/ Board of Commissioners committees concerning developments of activities/management of Company considered important and strategic that may affect the Company's performance;
10. Each member of the Board of Commissioners takes responsibility personally of the Company's loss if the concerned member is at fault or negligence in performing the duties and that the responsibility concerned applies jointly to the Board;
11. Members of the Board of Commissioners cannot be accountable for Company losses if proven as follows:
 - a. Has performed supervision in good faith and with due care for the benefit of the Company and in accordance with the Company's purposes and objectives;
 - b. Has no personal interest, either directly or indirectly, in the management actions of the Board of Directors that result in losses;
 - c. Has provided advice to the Board of Directors to prevent the occurrence or continuation of such losses;
 - d. Has supervised the Board of Directors in maintaining a balance between the interests of all parties;
 - e. Has prepared a report on the activities of the Board of Commissioners, as part of the GCG implementation report;
 - f. Has monitored the effectiveness of GCG implementation;
 - g. Has provided approval when the Sharia Supervisory Board (SSB) required assistance from committee members whose organizational structure is under the Board of Commissioners;

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

- h. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kinerja audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

- h. Has ensured that the Board of Directors followed-up on audit findings and recommendations from the internal audit performance unit, external auditors, results of supervision by the Financial Services Authority, and/or results of supervision by other authorities.

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, khususnya Pasal 18, Perseroan wajib memiliki paling sedikit dua orang anggota Dewan Komisaris. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam penetapan komposisi Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan selama empat tahun dan dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya berdasarkan keputusan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan, meninggal dunia, atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Per 31 Desember 2025, komposisi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Composition and Term of Office of the Board of Commissioners

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.05/2017 on Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, specifically Article 18, the Company is obligated to have at least two members of the Board of Commissioners. This provision serves as basis for determining the composition of the Board of Commissioners to ensure effectiveness of the supervisory function over the management of the Company.

The term of office of members of the Company's Board of Commissioners is set for four years and may be extended for one following period based on the decision of the shareholders through the General Meeting of Shareholders. The term of office of members of the Board of Commissioners ends if the concerned members resign, no longer meets the set requirements, pass away or dismissed based on GMS decision.

As of 31 December 2025, the composition of the Board of Commissioners of the Company is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Andrianto Wahyu Adi	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioners concurrently as Independent Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) atau disingkat "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" Nomor 37 tanggal 15 Maret 2024 Deed of Decision Statement Outside of the General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Regional Company) or abbreviated as "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" No. 37 dated 15 March 2024	15 Desember 2023 - 15 Desember 2027 15 December 2023 - 15 December 2027
Iman Satria	Komisaris Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) atau disingkat "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" Nomor 29 tanggal 24 November 2025 Deed of Decision Statement Outside of the General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Regional Company) or abbreviated as "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" No. 29 dated 24 November 2025	7 November 2025 - 7 November 2029 7 November 2025 - 7 November 2029

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini telah memenuhi ketentuan *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemprov DKI Jakarta, serta memahami ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan prinsip-prinsip GCG.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagai bagian dari mekanisme tata kelola Perseroan, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Fungsi tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, pelaksanaan kegiatan usaha, dan pengelolaan risiko Perseroan senantiasa selaras dengan tujuan Perseroan, prinsip kehati-hatian, dan kepentingan para pemangku kepentingan.

Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pihak independen serta tidak memiliki hubungan afiliasi dan benturan kepentingan dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun Direksi. Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk memperkuat objektivitas dan independensi fungsi pengawasan dalam pengelolaan Perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris Independen berperan melakukan pengawasan secara independen dengan memperhatikan kepentingan pihak Terjamin, Penerima Jaminan, serta pemangku kepentingan lainnya. Fungsi tersebut dijalankan untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan Perseroan dilaksanakan secara wajar, transparan, dan sejalan dengan prinsip GCG.

Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi persyaratan, yang sesuai dengan pasal 25 Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2017, sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Perseroan;
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan satu tingkat di bawah Direksi pada Perseroan atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dalam kurun waktu enam bulan terakhir;
3. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang,

All members of the Board of Commissioners of the Company currently in office have met the requirements of the fit and proper test from the Financial Services Authority (OJK) and the Regional Government of DKI Jakarta, and have fully understand the provisions of the Law of Limited Liabilities Companies and GCG principles.

Work Guidelines of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners carries out its supervisory function and provide advice to the Board of Directors as part of the Company's governance mechanism, guided by the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations, and the principles of good corporate governance. These functions are performed to ensure that the direction of the Company's policies, implementation of business activities, and risk control are always in alignment with the Company's goals, principle of prudence, and the interests of the stakeholders.

Independent Commissioner

Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners from the independent party and does not have affiliated relationship nor conflict of interest with the shareholders, with other members of the Board of Commissioners as well as the Board of Directors. The presence of an Independent Commissioner is intended to strengthen objectivity and independency of the supervisory function in managing the Company. In performing its duties, the Independent Commissioner plays the role in supervising independently by paying attention to the interests of the Guaranteed party, Guarantee Recipient, as well as other stakeholders. This function is carried out to ensure that policies and decisions of the Company are executed appropriately, transparently and in line with GCG principles.

The Company's Independent Commissioners have fulfilled all requirements in accordance with OJK Regulation No. 3/POJK.05/2017, as follows:

1. No affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of DPS, or shareholders of the Company;
2. Never been members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of DPS or take on the position at one level below the Board of Directors in the Company or other business entities that have affiliation with the Company within the period of the last six months;
3. Understand the laws and regulations in the fields of Guarantee, Sharia Guarantee, Re-Guarantee, and/or

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

- dan/atau Penjaminan Ulang Syariah, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
4. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perseroan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam hal mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap keputusan yang dihasilkan dalam rapat wajib dituangkan secara tertulis dalam risalah rapat Dewan Komisaris sebagai bentuk akuntabilitas dan keterlacakan proses pengambilan keputusan.

Risalah rapat Dewan Komisaris didokumentasikan dengan baik dan memuat seluruh pokok pembahasan serta keputusan rapat. Apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di antara anggota Dewan Komisaris, perbedaan tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan yang mendasarinya. Seluruh anggota Dewan Komisaris, baik yang hadir maupun tidak hadir dalam rapat, berhak memperoleh salinan risalah rapat sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS BERSAMA DIREKSI

Kebijakan Rapat

Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk mengundang Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat. Rapat gabungan ini menjadi forum koordinasi strategis antara organ pengawas dan pengelola Perseroan.

Agenda yang dibahas dalam Rapat Gabungan meliputi antara lain perkembangan dan capaian kinerja Perseroan, permasalahan strategis dan operasional yang dihadapi, kondisi ekonomi dan politik yang berpotensi berdampak terhadap kegiatan usaha, serta perkembangan industri tempat Perseroan beroperasi. Melalui rapat ini, Dewan Komisaris memberikan arahan, pandangan, dan persetujuan yang diperlukan untuk

Sharia Re-Guarantee as well as other relevant laws and regulations;

4. Have good knowledge on the Company's financial conditions.

MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Meeting Policy

The mechanism in decision-making during the Board of Commissioners' Meeting is executed based on the principle of deliberation to reach consensus. In the case a consensus is not reached, a decision is taken based on the majority vote in accordance with applicable provisions. Each decision made in a meeting must be stated in writing contained in the minutes of the meeting of the Board of Commissioners as a form of accountability and traceability of the decision-making process.

The minutes of the Board of Commissioners' meeting is properly documented and contains all points of discussions as well as meeting decisions. Should there occur difference of opinion (*dissenting opinion*) among members of the Board of Commissioners, such difference must be stated clearly in the minutes of meeting together with the underlying reasons. All members of the Board of Commissioners, both who attended the meeting and those who did not, have the rights to obtain copies of the minutes of meeting as information material and accountability.

JOINT MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS WITH THE BOARD OF DIRECTORS

Meeting Policy

The Board of Commissioners has the authority to invite the Board of Directors to a Joint Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors as part of implementing the supervisory function and providing advice. This joint meeting serves as strategic coordination forum between supervisory organ and management executing organ of the Company.

The agenda discussed in the Joint Meetings include, among others, the Company's development and performance achievement, strategic and operational issues faced, economic and political conditions that potentially impact business activities, as well as the industry development where the Company operates. Through these meetings, the Board of Commissioners provide directives, views and approvals needed

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

mendukung pengambilan keputusan Direksi secara prudent dan selaras dengan kepentingan jangka panjang Perseroan.

Frekuensi Rapat, Tingkat Kehadiran, dan Agenda Rapat Gabungan Tahun 2024 2025

Hingga 31 Desember 2025, telah diselenggarakan sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi. Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat tersebut masing-masing mencapai 100%. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut membahas berbagai agenda strategis, antara lain:

to support decision-making by the Board of Directors in prudent manner and aligned with the Company's long-term interests.

Meeting Frequency, Level of Attendance and Agenda of Joint Meetings in 2025

Until 31 December 2025, 31 (thirty one) Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors were held. The level of attendance of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the each meeting reached 100%. These joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors discussed various strategic agenda, among others are as follows:

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	09 Januari 2025 9 January 2025	Pembahasan <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> Tahun 2025 Discussion on Key Performance Indicator (KPI) of 2025
2	14 Januari 2025 14 January 2025	Rapat Lanjutan Pembahasan <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> Tahun 2025 Follow-Up Meeting for Discussion on Key Performing Indicator (KPI) of 2025
3	21 Januari 2025 21 January 2026	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Desember 2024 Meeting on Performance Assessment of December 2024
4	11 Februari 2025 11 February 2025	Rapat Strategi Bisnis Tahun 2025 Meeting on 2025 Business Strategy
5	17 Februari 2025 17 February 2025	Rapat Strategi Manajemen Risiko dan Keuangan Tahun 2025 Meeting on Risk Management and Financial Strategy of 2025
6	21 Februari 2025 21 February 2025	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Januari Tahun 2025 Meeting on Performance Assessment of January 2025
7	20 Maret 2025 20 March 2025	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Februari Tahun 2025 Meeting on Performance Assessment of February 2025
8	24 Maret 2025 24 March 2025	Rapat Lanjutan Strategi Pencapaian Target Tahun 2025 Follow-Up Meeting on 2025 Target Achievement Strategy
9	22 April 2025 22 April 2025	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Maret Tahun 2025 Meeting on Performance Assessment of March 2025
10	20 Mei 2025 20 May 2025	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan April Tahun 2025 Meeting on Performance Assessment of April 2025
11	11 Juni 2025 11 June 2025	Penajaman <i>Business Plan</i> Tahun 2025 Sharpening of 2025 Business Plan
12	18 Juni 2025 18 June 2025	Penajaman <i>Business Plan</i> Tahun 2025 Sharpening of 2025 Business Plan
13	19 Juni 2025 19 June 2025	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Mei Tahun 2025 Meeting on Performance Assessment in May 2025
14	16 Juli 2025 16 July 2025	<i>Workshop</i> Forecast Business Tahun 2025 Workshop on 2025 Business Forecast
15	17 Juli 2025 17 July 2025	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Juni Tahun 2025 Meeting on Performance Assessment of June 2025
16	30 Juli 2025 30 July 2025	Rapat Lanjutan <i>Workshop</i> Business Forecast Tahun 2025 Follow-Up Meeting on 2025 Business Forecast Workshop

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
17	13 Agustus 2025 13 August 2025	Rapat Lanjutan <i>Workshop</i> Business Forecast Tahun 2025 Follow-Up Meeting on 2025 Business Forecast Workshop
18	19 Agustus 2025 19 August 2025	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Juli Tahun 2025 Meeting on Performance Assessment of July 2025
19	09 September 2025	Rapat <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Unit Kerja Bisnis, Klaim dan Risiko Meeting on Monitoring and Evaluation of Business Work Unit, Claim and Risk
20	17 September 2025	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Agustus Tahun 2025 Meeting on Performance Assessment of August 2025
21	23 September 2025	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Rencana Unit Kerja Divisi Unit Usaha: Syariah, dan Divisi Keuangan dan IT Monitoring and Evaluation on Business Unit Division Work Unit Plan: Sharia, and Finance and IT Division
22	17 Oktober 2025 17 October 2025	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan September Tahun 2025 Meeting on Performance Assessment of September 2025
23	27 Oktober 2025 27 October 2025	Rapat Pembahasan Draft RKA Tahun 2026 Meeting for Discussion on 2025 RKA Draft
24	29 Oktober 2025 29 October 2025	Rapat Lanjutan Pembahasan Draft RKA Tahun 2026 Follow-Up Discussion on 2026 RKA Draft
25	30 Oktober 2025 30 October 2025	Rapat Lanjutan Pembahasan Draft RKA Tahun 2026 Follow-Up Discussion on 2026 RKA Draft
26	04 November 2025	Rapat Lanjutan Pembahasan Draft RKA Tahun 2026 Follow-Up Discussion on 2026 RKA Draft
27	11 November 2025	Rapat Pemaparan Penanganan Klaim dan Progress Pengadaan <i>Core System</i> Meeting on Presentation of Claims Handling and Core System Procurement Progress
28	14 November 2025	Rapat Pemaparan Penanganan Klaim dan Progress Pengadaan <i>Core System</i> Meeting on Presentation of Claims Handling and Core System Procurement Progress
29	17 November 2025	Rapat Evaluasi Kinerja Perusahaan Bulan Oktober Tahun 2025 Meeting on Company Performance Assessment of October 2025
30	27 November 2025	Rapat Pembahasan Progres Audit Meeting for Discussion on Audit Progress
31	19 Desember 2025 19 December 2025	Rapat Evaluasi Kinerja Perusahaan Bulan November Tahun 2025 Meeting on Company Performance Assessment of November 2025

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Tahun 2025

Guna memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berjalan secara efektif dan relevan dengan dinamika usaha Perseroan, pengembangan kompetensi dilakukan secara berkelanjutan. Perseroan memiliki kebijakan peningkatan kapabilitas Dewan Komisaris yang dirancang untuk memperkuat kualitas fungsi pengawasan serta pemahaman terhadap perkembangan bisnis, regulasi, dan profil risiko Perseroan.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan melalui keikutsertaan anggota Dewan Komisaris dalam berbagai program pengembangan, termasuk forum, pelatihan, dan

2025 Competency Development Program of the Board of Commissioners

To ensure the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners runs effectively and relevant with the dynamics of the Company's business, competency development is carried out sustainably. The Company retains the policy to improve the capabilities of the Board of Commissioners which is designed to strengthen the quality of the supervisory function and understanding on the Company's business developments, regulations, and risk profile.

Implementation of competency development through the participation of members of the Board of Commissioners in various development programs, including forums, training

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

pembaruan informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan kebijakan strategis Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris juga mendorong mekanisme berbagi pengetahuan sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota, guna mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara kolektif dan berimbang.

Sepanjang tahun 2025, anggota Dewan Komisaris telah mengikuti program pelatihan (termasuk melalui webinar) antara lain sebagai berikut:

and information update related to the Company's business activities and strategic policies. In addition, the Board of Commissioners also encourages the mechanism of sharing knowledge in accordance to the expertise and experience of each member, in order to support the implementation of the supervisory function collectively and balanced.

Throughout the year 2025, members of the Board of Commissioners have joined training programs (including through webinars), among others are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program	Tanggal Penyelenggaraan Date of Program	Penyelenggara Organizer
Andrianto Wahyu Adi	Komisaris Utama President Commissioner	<i>Pelatihan "Training New Special Directorship Program"</i> "Training New Special Directorship Program"	26 – 27 Agustus 2025 26 – 27 August 2025	IICD
Iman Satria	Komisaris Commissioner	Sertifikasi Skema Komisaris Commissioner Scheme Certification	29 September 2025	LSP Penjaminan Guarantee LSP

Program Orientasi/Pengenalan Bagi Dewan Komisaris Baru Tahun 2025

Perseroan memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan program orientasi atau pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sejak awal masa jabatan. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan usaha, budaya kerja, struktur organisasi, serta kebijakan dan proses utama Perseroan yang relevan dengan fungsi pengawasan.

Orientation/Introduction Program for New Members of the Board of Commissioners 2025

The Company has the policy to hold an orientation or introduction program for new members of the Board of Commissioners as part of the effort to ensure readiness to take on the duties and responsibilities at the start of the new post. This program aims at introducing the business environment, work culture, organizational structure, as well as the Company's policies and main processes relevant to the supervisory function.

Pada tahun 2025, Perseroan telah menunjuk Bapak Iman Satria sebagai anggota Dewan Komisaris baru dan telah menyelenggarakan program orientasi pada tanggal 19 Desember 2025. Program tersebut menjadi sarana awal bagi anggota Dewan Komisaris baru untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai karakteristik usaha Perseroan serta peran strategis Dewan Komisaris dalam mendukung pencapaian tujuan Perseroan.

In the year 2025, the Company appointed Iman Satria as a member of the Board of Commissioners and has conducted an orientation program on 19 December 2025. The program served as an initial means to gain adequate understanding of the characteristics of the Company's business and the strategic role of the Board of Commissioners in supporting the achievement of the Company's objectives.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Penilaian Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Komite Pendukung

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris didukung oleh komite-komite pendukung yang dibentuk untuk memperkuat efektivitas pengawasan pada area tertentu. Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian terhadap kinerja komite-komite tersebut sebagai bagian dari evaluasi atas efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan. Hingga 31 Desember, Dewan Komisaris memiliki 1 (satu) Komite pendukung, yaitu Komite Audit.

Penilaian Kinerja Komite Audit Tahun 2025

Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja, tingkat kompetensi, serta kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Komite Audit dinilai menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan standar etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, Dewan Komisaris memberikan penilaian positif atas kinerja Komite Audit sepanjang tahun 2025.

Komite Audit dinilai efektif dalam memantau perencanaan dan pelaksanaan audit, menilai kecukupan pengendalian internal, serta memastikan kelengkapan dan kualitas proses pelaporan keuangan. Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal juga berjalan secara konsisten. Rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Audit dipandang memberikan kontribusi substantif dalam mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan serta dalam perumusan kebijakan yang relevan dengan tata kelola Perseroan.

Assessment of the Board of Commissioners on the Performance of Supporting Committees

In performing its supervisory function, the Board of Commissioners, with the supporting committees established to strengthen the effectiveness of supervision of certain areas. The Board of Commissioners periodically assesses the performance of these committees as part of the evaluation of the effectiveness of implementation of supervisory duties. Until 31 December, the Board of Commissioners has 1 (one) supporting committee, namely the Audit Committee.

Performance Assessment of the Audit Committee in 2025

Assessment was conducted with consideration of the performance achievement, level of competency, as well as attendance of members of the Audit Committee in meetings. Based on this assessment results, the Audit Committee was assessed of having shown a strong commitment to implementing ethical standards and professionalism in carrying out its duties. Thus, the Board of Commissioners gave positive assessment for the Audit Committee's performance throughout the year 2025.

The Audit Committee was assessed as effective in monitoring the audit planning and implementation, adequacy in internal control, as well as in ensuring the completeness and quality of the financial reporting process. Monitoring the follow-up on internal and external audit findings was also consistently carried out. Recommendations were presented by the Audit Committee and regarded as a substantial contribution in supporting the Board of Commissioners' supervisory function as well as in formulating policies that are relevant with the company's governance.

Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan Perseroan guna mencapai tujuan usaha dan kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dalam kedudukannya tersebut, Direksi juga bertindak sebagai wakil Perseroan untuk dan atas nama Perseroan dalam melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi melaksanakan fungsi pengurusan secara kolektif maupun individual dengan mengedepankan integritas, kehati-hatian, dan profesionalisme. Seluruh anggota Direksi wajib mencurahkan perhatian dan kapasitasnya secara penuh dalam pengelolaan Perseroan serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil senantiasa selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sebagai organ pengelola Perseroan, Direksi secara kolektif bertanggung jawab atas seluruh tindakan pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta untuk kepentingan Perseroan. Direksi menjalankan fungsi pengelolaan dengan memastikan bahwa kegiatan usaha dilaksanakan secara efektif, prudent, dan sejalan dengan strategi serta ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direksi berwenang mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam segala perbuatan hukum, dengan tetap memperhatikan pembatasan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, Direksi Perseroan memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;

The Board of Directors is the Company organ fully responsible for the management and administration of the Company in order to achieve business goals and Company's interests in accordance with provisions of the laws and regulations and the Articles of Association. In this position, the Board of Directors also acts as the Company's representative for and on behalf of the Company in carrying out legal actions, both inside and outside of the court.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors performs its management function collectively and individually by putting forward integrity, prudence and professionalism. All members of the Board of Directors are required to put their full attention and capacity in managing the Company as well as in ensuring that each policy and decision taken are always in line with provisions of applicable laws and regulations and Good Corporate Governance principles.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

As the Company's management organ, the Board of Directors is collectively responsible for the overall management actions in accordance with the Company's purpose and objectives and interests. The Board of Directors carries out its management function by ensuring that business activities are conducted effectively, with prudence, and in line with the strategy as well as applicable provisions.

In carrying out these duties, the Board of Directors is authorized to represent the Company, both inside and outside of the court, in all legal actions, by always taking into account of the limitation of authority as stipulated in the laws and regulations, the Articles of Association, and resolutions of the General Meeting of Shareholders. Implementation of such authority is conducted by putting forward the principle of prudence, accountability, and compliance with Good Corporate Governance principle.

In accordance with provisions of Article 12 of the Financial Services Authority No. 3/POJK.05/2017 regarding Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, the Company's Board of Directors retains the following obligations:

1. Ensures effective, accurate and quick decision-making as well as act independently, not having interests that can disrupt its capability to carry out duties independently and critically;

Direksi

Board of Directors

2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Lembaga Penjamin dalam melaksanakan tugasnya; 3. Mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya; 4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS; 5. Memastikan agar Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Terjamin dan/atau Penerima Jaminan; 6. Memastikan agar informasi mengenai Lembaga Penjamin diberikan kepada Dewan Komisaris dan DPS secara tepat waktu dan lengkap; 7. Membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite, karyawan Lembaga Penjamin, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada di bawah Direksi.	2. Complies with provisions of the laws and regulations, Articles of Association, and other internal regulations from Guarantee Institutions in conducting their duties; 3. Manages Guarantee Institution in accordance with its authority and responsibility; 4. Accounts for the implementation of its duties to the GMS; 5. Ensures that Guarantee Institution pay attention to the interests of all parties, specifically the interest of the Guaranteed and/or Recipients of Guarantee; 6. Ensures that information on Guarantee Institution is provided to the Board of Commissioners and DPS on timely manner and complete; 7. Assists in fulfilling the needs of DPS in using committee members, employees of Guarantee Institution, and professional experts available of which its organizational structure is under the Board of Directors.

Pembagian Tugas masing-masing Direksi

Selain menjalankan tanggung jawab secara kolektif, setiap anggota Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing. Pembagian tugas tersebut ditetapkan untuk memastikan efektivitas pengelolaan Perseroan serta kejelasan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi operasional dan strategis. Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi disajikan dalam tabel berikut:

Division of Duties of Each Member of the Board of Directors

Aside from performing its responsibility collectively, each member of the Board of Directors has duties and responsibilities in accordance with each of their own field and authority. The division of these duties is determined to ensure the effectiveness of managing the Company and the clarity of accountability in the implementation of operational and strategic functions. Details of the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors are described in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Agus Supriadi	Direktur Utama President Director	Mengkoordinasikan perumusan dan penetapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perusahaan, mengambil keputusan strategis dalam rangka pencapaian target RKA; mengkoordinasikan pelaksanaan Program Kemitraan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/Corporate Social Responsibility (CSR); serta memastikan penerapan Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI). Direktur Utama mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Direksi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai tujuan Perseroan jangka pendek dan jangka Panjang. Coordinate the formulation and establishment of the Company Long-Term Plans (RJPP) and the Company's Work Plan & Budget (RKA), strategic decision-making in the context of achieving RKA targets; coordinate the implementation of the Partnership and the Corporate Social Responsibility Program; as well as ensure the implementation of Risk Management, Compliance and the effectiveness of the Internal Control System through the Internal Audit Unit (SPI). The President Director directs, coordinate, supervise and control the implementation of duties of the Board of Directors in accordance with applicable provisions to accomplish the Company's short-term and long-term goals .

Direksi

Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Jimmi Setya Budi	Direktur Operasional Director of Operations	Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan di dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun Berjalan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan, melakukan tindakan-tindakan yang perlu diputuskan secara langsung dalam rangka pencapaian target RKA tahun berjalan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Keuangan, IT, SDM, Umum, Klaim dan Subrogasi Formulate, determine and implement the policy set-forth in the Company Long-Term Plan (RJPP) of the Current Year, the Annual Work Plan and Budget (RKA), take actions that need to be decided directly in order to achieve the RKA target for the current year, directing, coordinating, supervising, controlling the implementation of tasks in the fields of Finance, IT, HR, General Affairs, Claims and Subrogation.
Agus Supriadi	Plt Direktur Bisnis Acting Director of Business	Direktur Bisnis PT Jamkrida Jakarta (Persero) bertanggung jawab dalam merumuskan, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi bisnis Perseroan guna meningkatkan kinerja usaha, memperluas portofolio penjaminan, serta memperkuat daya saing Perseroan secara berkelanjutan. Direktur Bisnis memimpin perencanaan dan pengembangan produk penjaminan, pengelolaan kemitraan strategis, serta optimalisasi jaringan kerja sama dengan lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. The Business Director of PT Jamkrida Jakarta (Persero) is responsible for formulating, developing and implementing the Company's business strategy to improve business performance, expand the guarantee portfolio, and strengthen the Company's competitiveness in a sustainable manner. The Business Director leads the planning and development of guarantee products, manages strategic partnerships, and optimizes cooperation networks with financial institutions, local governments, and other stakeholders.

Komposisi dan Masa Jabatan Direksi

Mengacu pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, Perseroan wajib memiliki paling sedikit dua orang anggota Direksi. Selain itu, paling sedikit setengah dari jumlah anggota Direksi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan, guna memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan usaha penjaminan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Direksi ditetapkan selama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya berdasarkan keputusan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan, meninggal dunia, atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Composition and Term of Office of the Board of Directors

Referring to the provisions of Article 8 of the Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.05/2017 on Good Corporate Governance of Guarantee Institutions, the Company is obligated to have two members of the Board of Directors. In addition, at least half of the number of members of the Board of Directors must have the knowledge and experience in the field of risk management relevant with the Company's business activities, in order to ensure the implementation of prudence principle in managing guarantee business management.

In line with the Company's Articles of Association, the term of office of members of the Board of Directors is set at five years and may be extended for one following period based on the decisions of the shareholders through the General Meeting of Shareholders. The term of office of members of the Board of Directors ends if the concern member resigns, no longer fulfils the set requirements, pass away, or dismissed based on GMS decision.

Direksi

Board of Directors

Per 31 Desember 2025, komposisi Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2025, the composition of the Board of Directors is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Agus Supriadi	Direktur Utama President Director	Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) No. 18 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam SH., M.kn. Deed of Decision Statement of the Shareholders in the Extraordinary General Meeting of Shareholders (Circular) No. 18 dated 21 March 2023, made before Notary Ashoya Ratam SH., M.Kn.	2023 -2026
Jimmi Setya Budi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta Nomor 18 tanggal 21 Maret 2023 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam SH., M.kn. Deed of Decision Statement Outside of the General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta No. 18 dated 21 March 2023 made before Notary Ashoya Ratam SH., M.Kn.	2023 -2028

Seluruh anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini telah memenuhi ketentuan *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemprov DKI Jakarta, serta memahami ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan prinsip-prinsip GCG.

All members of the Board of Directors of the Company currently in office have complied with provisions of the fit and proper test of the Financial Services Authority (OJK) and the Provisional Government of DKI Jakarta, as well as understand the provisions of the Limited Liability Company Law and GCG principles.

Pedoman Kerja Direksi

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan dan pengelolaan kegiatan usaha sehari-hari sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut, Direksi memastikan bahwa perumusan dan implementasi kebijakan strategis, pengelolaan risiko, serta kegiatan operasional Perseroan dijalankan secara prudent, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha serta pencapaian tujuan jangka panjang Perseroan.

Work Guidelines of the Board of Directors

The Board of Directors is responsible for the administration of the Company and the management of daily business activities in accordance with the Company's Articles of Association, provisions of applicable laws and regulations, as well as the good corporate governance principles. In the implementation of such responsibility, the Board of Directors ensures that formulation and implementation of strategic policies, risk management, and operational activities of the Company are carried out with prudence, accountability and oriented towards business sustainability as well as achieving long-term goal achievement for the Company.

Direksi

Board of Directors

RAPAT DIREKSI

Kebijakan Rapat

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain diwujudkan melalui penyelenggaraan rapat internal yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental sesuai kebutuhan Perseroan. Rapat Direksi menjadi forum formal bagi Direksi untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan strategi dan kebijakan Perseroan, termasuk evaluasi kinerja dan tindak lanjut atas isu-isu operasional dan strategis.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, Direksi Perseroan wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu bulan. Selain rapat berkala tersebut, Direksi dapat menyelenggarakan rapat setiap waktu apabila dipandang perlu untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perseroan.

Frekuensi Rapat, Tingkat Kehadiran, dan Agenda Rapat Direksi Tahun 2025

Hingga 31 Desember 2025, Direksi telah menyelenggarakan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali Rapat. Tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi dalam rapat tersebut mencapai 100%, yang mencerminkan komitmen Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan secara aktif. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap anggota Direksi wajib menghadiri paling sedikit 50 persen dari jumlah Rapat Direksi dalam satu tahun buku.

Setiap Rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara tertib sebagai bentuk akuntabilitas dan keterlacakan pengambilan keputusan. Apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam rapat Direksi, perbedaan tersebut dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan yang mendasarinya. Seluruh anggota Direksi, baik yang hadir maupun tidak hadir dalam rapat, berhak memperoleh salinan risalah rapat Direksi. Ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Pasal 17 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017.

MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Meeting Policy

Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, among others, are manifested through internal meetings held regularly and incidentally in accordance with the needs of the Company. Meetings of the Board of Directors serve as formal forums for the board of Directors to discuss planning, implementation as well as monitoring strategies and policies of the Company, including performance assessment and follow-ups on operational and strategic issues.

In accordance with provisions of Article 17 of the Financial Services Authority No. 3/POJK.05/2017 regarding Good Corporate Governance of Guarantee Institutions, the Company's Board of Directors is obligated to hold Board meetings regularly at least once in a month. Aside from such regular meetings, the Board of Directors may hold meetings at any time deemed necessary to support the smooth run of the Company's management.

Meeting Frequency, Level of Attendance and Agenda of the Board of Directors in 2025

Up to 31 December 2025, the Board of Directors held 29 (twenty-nine) meetings. The level of attendance of each member of the Board of Directors in these meetings reached 100% which reflects the commitment of the Board of Directors in actively carrying out its management function in the Company. In line with applicable provisions, each member of the Board of Directors is required to attend in at least 50% of the total Board of Directors Meeting within one fiscal year.

Each Meeting of the Board of Directors is properly documented in the minutes of meeting as a form of accountability and traceability of the decision making. If there is a difference in opinion (dissenting opinion) in the meeting of the Board of Directors, the difference must be clearly noted in the minutes of meeting including the underlying reasons. All members of the Board of Directors, both who attended and those who did not, have the right to obtain copies of the minutes of meeting of the Board of Directors. This provision is carried out in accordance with Article 17 paragraph (3), paragraph (4), and paragraph (5) of the Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.05/2017.

Direksi

Board of Directors

Rapat Direksi tersebut membahas berbagai agenda strategis, antara lain:

The Meetings of the Board of Directors discussed various strategic agenda, including the following:

No.	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	09 Januari 2025 09 January 2025	Pembahasan <i>Key Performace Indicator (KPI)</i> Tahun 2025 Discussion on Key Performance Indicator (KPI) of the Year 2025
2	14 Januari 2025 14 January 2025	Rapat Lanjutan Pembahasan <i>Key Performace Indicator (KPI)</i> Tahun 2025 Follow-Up Meeting for Discussion on Key Performance Indicator (KPI) of 2025
3	15 Januari 2025 15 January 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads
4	31 Januari 2025 31 January 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads
5	17 Februari 2025 17 February 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads
6	28 Februari 2025 28 February 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads
7	18 Maret 2025 18 March 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads
8	09 April 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads
9	17 April 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads
10	30 April 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads
11	16 Mei 2025 16 May 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads
12	28 Mei 2025 28 May 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads
13	18 Juni 2025 18 June 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads
14	30 Juni 2025 30 June 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads
15	16 Juli 2025 16 July 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads
16	31 Juli 2025 31 July 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi <i>Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads</i>
17	14 Agustus 2025 14 August 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads
18	28 Agustus 2025 28 August 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads
19	15 September 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads
20	30 September 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads
21	15 Oktober 2025 15 October 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads
22	29 Oktober 2025 29 October 2025	Rapat Lanjutan Pembahasan <i>Draft RKA</i> Tahun 2026 Follow-Up Meeting for Discussion on 2026 RKA Draft

Direksi

Board of Directors

No.	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda
23	30 Oktober 2025 30 October 2025	Rapat Lanjutan Pembahasan <i>Draft</i> RKA Tahun 2026 Follow-Up Meeting for Discussion on 2026 RKA Draft
24	31 Oktober 2025 31 October 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads
25	04 November 2025	Rapat Lanjutan Pembahasan <i>Draft</i> RKA Tahun 2026 Follow-Up Meeting for Discussion on 2026 RKA Draft
26	14 November 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads
27	28 November 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads
28	04 November 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads
29	31 Desember 2025 31 December 2025	Rapat Mingguan Direksi dan Kepala Divisi Weekly Meeting of the Board of Directors and Division Heads

Pelatihan dan/atau Pengembangan Direksi Tahun 2025

Guna memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi berjalan secara efektif dan relevan dengan dinamika usaha Perseroan, pengembangan kompetensi dilakukan secara berkelanjutan. Perseroan memiliki kebijakan peningkatan kapabilitas Direksi yang dirancang untuk memperkuat kualitas fungsi pengelolaan Perseroan, terutama mengenai kondisi terkini mengenai bisnis secara lokal dan global dalam rangka mengantisipasi tantangan masa depan yang menentukan keberlangsungan Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, anggota Direksi telah mengikuti program pelatihan (termasuk melalui webinar) antara lain sebagai berikut:

Training and/or Development of the Board of Directors in 2025

In order to ensure that the implementation duties and responsibilities of the Board of Directors run effectively and relevant with the dynamics of the Company's business, competency development is conducted sustainably. The Company has the policy for the improvement of the Board of Directors capabilities designed to strengthen the quality of the Company's management, especially on the latest condition of both local and global business in the context of anticipating future challenges that determine the Company's continuity.

Throughout the year 2025, members of the Board of Directors have participated in training programs (including through webinars), among others are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program	Tanggal Penyelenggaraan Date of Program	Penyelenggara Organizer
Agus Supriadi	Direktur Utama President Director	Masterclass Program Series XXIV "Mitigasi Risiko Dalam Transformasi Digital" Masterclass Program Series XXIV "Risk Mitigation in Digital Transformation"	03 – 04 Juli 2025 03-04 July 2025	PT RAP
Agus Supriadi	Direktur Utama President Director	Corporate Culture Transformation	23 Agustus 2025 23 August 2025	BUMD DKI Jakarta
Agus Supriadi	Direktur Utama President Director	Pelatihan "Training New Special Directorship Program" "Training New Special Directorship Program"	26 – 27 Agustus 2025 26-27 August 2025	IICD
Agus Supriadi	Direktur Utama President Director	Sertifikasi Kompetensi Skema Direktur Competency Certification for Business Director Scheme	13 November 2025	LSP Penjaminan

Direksi

Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program	Tanggal Penyelenggaraan Date of Program	Penyelenggara Organizer
Jimmi Setya Budi	Direktur Operasional Director of Operations	<i>Training of Trainrs (TOT) Industri</i> Penjaminan: Strategi Pelatihan, Asesmen dan Pembelajaran Berbasis Kompetensi Training of Trainers (TOT) of Guarantee Industry: Competency-Based Training Strategy, Assessment and Learning	22 Agustus 2025 22August 2025	Universitas Indonesia
		Coporate Culture Transformation	23 Agustus 2025 23 August 2025	BUMD DKI Jakarta

Penilaian Direksi Terhadap Kinerja Komite Pendukung

Sampai dengan 31 Desember 2025, Direksi Perseroan telah membentuk komite pendukung di bawah Direksi, yang terdiri dari Komite Investasi, Komite Penjaminan, Komite Klaim, dan Komite Sumber Daya Manusia (SDM).

Pembentukan komite-komite tersebut dimaksudkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengurusan Perseroan, khususnya dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direksi menilai bahwa keberadaan dan kinerja komite pendukung tersebut telah memberikan kontribusi positif dalam memperkuat proses pengelolaan, pengendalian, dan tata kelola Perseroan, serta membantu Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif

The Board of Directors' Assessment on the Performance of the Supporting Committees

Until 31 December 2025, the Board of Directors of the Company has established supporting committees under the Board of Directors, consisting of Investment Committee, Guarantee Committee, Claim Committee, and Human Resource Committee.

Establishing these committees was intended to support the effective implementation of the Company's management duties, specifically in strategic and operational decision-making in accordance with applicable provisions.

The Board of Directors assessed that the presence and performance of the supporting committees have provided positive contribution in strengthening the Company's management, control and governance processes, as well as assisted the Board of Directors in performing its duties and responsibilities effectively.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Prosedur Penilaian dan Pihak Penilai

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara berkala setiap tahun sebagai bagian dari mekanisme evaluasi tata kelola Perseroan. Penilaian ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta kontribusi masing-masing organ dalam mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan. Seluruh proses penilaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang berlaku.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh pemegang saham melalui evaluasi atas Laporan Pencapaian Kinerja yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham.

Sementara itu, penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh pemegang saham berdasarkan evaluasi atas Laporan Pencapaian Kinerja yang disampaikan oleh masing-masing anggota Direksi kepada para pemegang saham melalui Dewan Komisaris.

Indikator Penilaian

Indikator penilaian kinerja Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS setiap tahun berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris. Penetapan indikator tersebut mempertimbangkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat.

Adapun indikator penilaian kinerja masing-masing anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris setiap tahun berdasarkan usulan dari Direksi yang bersangkutan. Indikator tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja Direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan dan pengelolaan Perseroan secara efektif dan akuntabel.

Assessment Procedure and The Assessor

Performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors is performed periodically every year as part of the evaluation mechanism of the Company's governance. This assessment is intended to evaluate the effectiveness of the implementation of duties, responsibilities and contributions each organ in supporting the achievement of the Company's goals and performance.

Performance assessment of the Board of Commissioners is conducted by the shareholders through assessment of the Performance Achievement Report submitted by the Board of Commissioners in the General Meeting of Shareholders.

Meanwhile, performance assessment of the Board of Directors is carried out by the shareholders based on the evaluation of Performance Achievement Report submitted by each of the member of the Board of Directors to the shareholders through the Board of Commissioners.

Assessment Indicators

Assessment indicators for the performance of the Board of Commissioners are set by the GMS every year based on recommendations from the Board of Commissioners. Determining these indicators takes into account the roles and responsibilities of the Board of Commissioners in performing its supervisory function and in providing advice.

Performance assessment indicators of each member of the Board of Directors are determined by the Board of Commissioners every year based on the recommendations from the concerned Board of Directors. The indicators are used as basis of evaluation of the performance of the Board of Directors in carrying out the administration and management functions of the Company effectively and accountably.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama

Affiliate Relations of The Board of Commissioners, the Board of Directors and Majority Shareholders

Pengungkapan mengenai hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali sebagai salah satu kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali;
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya;
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Disclosure on affiliate relationships among members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Controlling Shareholders is one of the criteria used to measure the independency of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as visible in the table below which includes the following:

1. Affiliate relation between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors
2. Affiliate relation between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
3. Affiliate relation between members of the Board of Directors and the Majority and/or Controlling Shareholders;
4. Affiliate relation between members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Commissioners;
5. Affiliate relation between members of the Board of Commissioners and the Majority and/or Controlling Shareholders.

Pada tahun 2025, hubungan afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi diungkapkan sebagai berikut:

In the year 2025, affiliate relationships of the Board of Commissioners and the Board of Directors is presented as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris dan Direksi Financial and Family Relationship of the Board of Commissioners and the Board of Directors											
		Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Keluarga dengan Family relationship with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Andrianto Wahyu Adi	Komisaris Utama Independen President Commissioner Independent		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Iman Satria	Komisaris Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Agus Supriadi	Direktur Utama President Director		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Jimmi Setya Budi	Direktur Operasional Director of Operations		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination and Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Kebijakan dan Prosedur Nominasi

Nominasi merupakan proses pengusulan calon untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa pengisian jabatan strategis dilakukan secara terencana, objektif, dan selaras dengan kebutuhan Perseroan.

Kebijakan Nominasi menjadi pedoman strategis yang mengatur tahapan pelaksanaan nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Ketentuan dalam kebijakan tersebut mencakup kriteria calon, penelaahan kualifikasi dan integritas, proses evaluasi, penyusunan dan pengusulan daftar kandidat, pemberian rekomendasi, hingga mekanisme pengangkatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Prosedur nominasi dilaksanakan melalui tahapan seleksi kandidat dengan mempertimbangkan kualifikasi, pengalaman, kompetensi, dan integritas calon. Selanjutnya, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada pemegang saham sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan pengangkatan calon terpilih dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan dan Prosedur Remunerasi

Remunerasi merupakan imbalan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai penghargaan atas peran, tanggung jawab, dan kontribusinya dalam pengelolaan dan pengawasan Perseroan. Pemberian remunerasi disesuaikan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada masing-masing jabatan.

Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas, dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung kinerja organ Perseroan secara berkelanjutan serta menjaga keselarasan dengan praktik yang berlaku di industri sejenis.

Penetapan remunerasi mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain skala dan kompleksitas usaha, kondisi keuangan Perseroan, tingkat inflasi, serta faktor relevan lainnya sesuai

Nomination Policy and Procedure

Nomination is the process of proposing the candidates to be appointed as members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors. This process is designed to ensure that fulfilling strategic positions is conducted in planned and objective manner, and in line with the Company's needs.

Nomination policy serves as a strategic guideline that regulates the stages of nominating members of the Board of Commissioners and Board of Directors. Provisions in this policy include candidate criteria, qualification and integrity review, evaluation process, preparation and proposal of candidate list, provision of recommendations, and appointment mechanism in accordance with applicable provisions.

Nomination procedure is carried out through the candidate selection process by taking into account of the qualification, experience, competency and integrity of the candidate. Next, the Nomination and Remuneration Committee evaluates the candidate members of the Board of Commissioners and Board of Directors. Results of the evaluation is presented to the shareholders as material for consideration in making decision, and the appointment of the selected candidate is done through the General Meeting of Shareholders in accordance of the provision of the Articles of Association and applicable laws and regulations.

Remuneration Policy and Procedure

Remuneration is reward provided to members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as acknowledgement for the role, responsibility and contribution in the management and supervision of the Company. Remuneration is provided according to the duty, authority and obligation that come with each position.

Remuneration policy of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company refers to the Regulation of the Governor of the Province of DKI Jakarta No. 79 of Year 2019 regarding the Guidelines for Determining the Income of Directors, Supervisory Boards, and Board of Commissioners of Regional-Owned Enterprises. This policy is designed to support the sustainable performance of Company organs as well as maintain the alignment between practices applicable in similar industries.

Determining the remuneration takes into account various factors, including the scale and complexity of the business, the Company's financial condition, the inflation rate, and other relevant factors in

Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination and Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur remunerasi dilaksanakan melalui penyusunan struktur remunerasi, penetapan kebijakan remunerasi, serta penetapan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ditetapkan.

Struktur Remunerasi dan Besaran Remunerasi Tahun 2025

Mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 79 tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah, struktur remunerasi Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari:

1. *Honorarium*;
2. Tunjangan:
 - a. Tunjangan hari raya;
 - b. Tunjangan jabatan; dan/atau
 - c. Tunjangan asuransi purna jabatan.
3. Fasilitas:
 - a. Kesehatan;
 - b. Bantuan hukum; dan/atau
 - c. Keanggotaan perkumpulan profesi.
4. *Tantiem/Insentif Kerja*.

Sedangkan struktur remunerasi Direksi terdiri dari:

1. Gaji;
2. Tunjangan
 - a. Tunjangan hari raya;
 - b. Tunjangan jabatan;
 - c. Tunjangan asuransi purna jabatan;
 - d. Tunjangan cuti tahunan; dan/atau
 - e. Tunjangan cuti besar.
3. Fasilitas:
 - a. Kesehatan;
 - b. Bantuan hukum;
 - c. Keanggotaan perkumpulan profesi;
 - d. Kendaraan; dan/atau
 - e. Club membership (corporate member).
4. *Tantiem/Insentif Kerja*.

Pada tahun 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menerima remunerasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2024, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menerima seluruh komponen remunerasi, dengan total nilai sebesar Rp 6.353.754.031,00.

accordance with statutory provisions. The remuneration procedure is carried out through the preparation of a remuneration structure, determination of the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with the established authority and mechanism.

Remuneration Structure and Amount of Remuneration in 2025

Referring to the Governor of DKI Jakarta Province Regulation No. 79 of Year 2019 regarding the Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Supervisory Board and the Board of Commissioners of Regionally-Owned Enterprises of the Company consisting of the following:

1. Honorarium;
2. Allowances:
 - a. Religious Holiday Allowance;
 - b. Job Position Allowance; and/or
 - c. Post-Employment Insurance Allowance
3. Facilities:
 - a. Health;
 - b. Legal Assistance; and/or
 - c. Membership of Professional Associations
4. Tantiem/Work Incentives

While the remuneration structure of the Board of Directors consists of the following:

1. Salary;
2. Allowances:
 - a. Religious Holiday Allowance;
 - b. Job Position Allowance
 - c. Post-Employment Insurance Allowance
 - d. Annual Leave Allowance; and/or
 - e. Long-Leave Allowance.
3. Facilities:
 - a. Health;
 - b. Legal Assistance;
 - c. Membership of Professional Association;
 - d. Vehicles; and/or
 - e. Club Membership (Corporate Member)
4. Tantiem/Work Incentives

In the year 2025, all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company received remuneration in accordance with applicable provisions. In accordance with the resolutions of the Annual GMS of fiscal year 2024, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company have received all components of remuneration, with a total value of Rp.6.353.754.031,00.

Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ tata kelola Perseroan yang memiliki fungsi pengawasan khusus atas pelaksanaan kegiatan Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah. Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha syariah Perseroan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan Prinsip Syariah.

Sebagai perusahaan penjaminan yang menjalankan Unit Usaha Syariah (UUS), Perseroan wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah. DPS terdiri dari paling sedikit satu orang ahli di bidang syariah, atau lebih, yang diangkat oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pengangkatan anggota DPS dituangkan dalam akta notaris dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait pemenuhan Prinsip Syariah dalam seluruh aktivitas usaha syariah Perseroan. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPS memastikan bahwa kebijakan, produk, dan praktik operasional Unit Usaha Syariah telah selaras dengan ketentuan dan fatwa syariah yang berlaku. DPS juga berperan sebagai representasi Perseroan dalam hubungan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ruang lingkup pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Pengawas Syariah mencakup antara lain:

- Kegiatan Penjaminan Syariah;
- Akad Penjaminan Syariah yang dipasarkan oleh Unit Usaha Syariah (UUS);
- Praktik pemasaran Penjaminan Syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah (UUS).

The Sharia Supervisory Board (DPS) is the Company governance organ with a special supervisory function for the implementation of Sharia Guarantee and Sharia Re-Guarantee activities. This supervision is directed for ensuring that all of the Company's sharia business activities are carried out consistently in accordance with the Sharia Principle.

As a guarantee company that manages the Sharia Business Unit (UUS), the Company is required to establish the Sharia Supervisory Board (DPS), consisting of at least one expert in the field of sharia, or more, appointed by the shareholders through the General Meeting of Shareholders based on the recommendation of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council. The appointment of members of DPS is stated in the notarial deed and implemented in accordance with the provisions of Law No. 1 of Year 2016 regarding Guarantees as well as the Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.05/2017 on Good Corporate Governance of Guarantee Institutions.

Duties and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board

The Sharia Supervisory Board performs the supervision and provide advice functions to the Board of Directors related to the fulfilment of the Sharia Principle in all of the Company sharia business activities. In implementing its duties, DPS ensures that policies, products and operational practices of the Sharia Business Unit are in alignment with applicable provisions and sharia fatwa. DPS also plays the role as representative of the Company in relation to the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council.

According to applicable provisions, the scope of supervision and in providing advice, the Sharia Supervisory Board, among others, covers the following:

- Activities of Sharia Guarantee;
- Sharia Guarantee Contract marketed by the Sharia Business Unit (UUS);
- Marketing practice of Sharia Guarantee conducted by the Sharia Business Unit (UUS).

Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Masa jabatan anggota DPS ditetapkan selama empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya, dengan tetap memperhatikan kewenangan RUPS untuk memberhentikan anggota DPS sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Per 31 Desember 2025, komposisi Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Masykuri Abdillah	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) atau disingkat "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" Nomor 61 tanggal 22 Maret 2024 Deed of Decision Statement of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) or abbreviated as "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" No. 61 dated 22 March 2024	2024-2028
Euis Amalia	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of the Sharia Supervisory Board	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) atau disingkat "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" Nomor 61 tanggal 22 Maret 2024 Deed of Decision Statement of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) or abbreviated as "PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)" No. 61 dated 22 March 2024	2024-2028

Profil Dewan Pengawas Syariah

Informasi terkait komposisi dan profil Dewan Pengawas Syariah, yang antara lain membahas tentang nama, identitas diri, gelar pendidikan, riwayat karier, dasar hukum pengangkatan, dan masa jabatan telah diuraikan dengan rinci pada Bab Profil Perusahaan, Subbab Profil Dewan Pengawas Syariah.

Kriteria Anggota Dewan Pengawas Syariah

Mengacu pada Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin, anggota DPS wajib memenuhi persyaratan integritas dan independensi sebagai berikut:

- Mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
- Mampu bertindak untuk kepentingan Perseroan dan/ atau Pemangku Kepentingan lainnya;
- Mendahulukan kepentingan Perseroan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi;

Composition and Term of Office of the Sharia Supervisory Board

Members of the Sharia Supervisory Board are appointed by the shareholders through the GMS based on the recommendation of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council. The term of office of members of DPS is set for four years and may be reappointed for one following period, while still paying attention to the authority of the GMS to dismiss DPS members at any time in accordance with applicable provisions.

As of 31 December 2025, the composition of the Sharia Supervisory Board of the Company is as follows:

Profile of the Sharia Supervisory Board

Information related to the composition and profile of the Sharia Supervisory Board, which includes, among others, the name, personal identity, education degree, career history, legal basis of appointment, and term of office are presented in detail in the Chapter on the Company Profile, Sub-Chapter on the Profile of the Sharia Supervisory Board.

Criteria of Members of the Sharia Supervisory Board

Referring to Article 36 of the Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.05/2017 on Good Corporate Governance of Guarantee Institutions, members of DPS are required to fulfil the following integrity and independency requirements:

- Able to act in good faith, honest and professional;
- Able to act in the interest of the Company and/or other Stakeholders;
- Prioritize the interests of the Company and/or other Stakeholders over personal interests;

Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board

- d. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perseroan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;
- e. Mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perseroan.

Pemenuhan kriteria tersebut menjadi dasar bagi anggota DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah secara kredibel dan bertanggung jawab. Sejalan dengan ketentuan tersebut, anggota Dewan Pengawas Syariah juga wajib memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggota DPS memiliki integritas, kompetensi, dan kapabilitas yang memadai dalam menjalankan tugas pengawasan syariah secara independen dan objektif sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme Pengawasan dan Pemberian Nasihat

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, DPS melaksanakan serangkaian mekanisme yang ditujukan untuk memastikan kesesuaian seluruh kegiatan usaha Unit Usaha Syariah dengan Prinsip Syariah. Mekanisme tersebut meliputi:

1. Memastikan Kesesuaian Kegiatan Operasional DPS memastikan dan mengawasi setiap aspek kegiatan operasional UUS Perseroan, menilai kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh proses operasional sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.
2. Menilai Aspek Syariah Pada Pedoman Operasional dan Produk DPS melakukan penilaian terhadap aspek Syariah yang terkait dengan pedoman operasional dan produk yang dimiliki oleh Perseroan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh pedoman dan produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

- d. Able to make decisions based on independent and objective assessments for the interests of the Company and/or other Stakeholders;
- e. Able to avoid misuse of authority to obtain inappropriate personal benefits or cause losses to the Company.

Fulfilment of the above criteria serves as basis for DPS members to carry out sharia supervisory function with credibility and responsibility. In line with this provision, members of DPS are also required to comply with the requirements of the fit and proper test conducted by the Financial Services Authority. This process is conducted to ensure that DPS members have adequate integrity, competency and capability to perform sharia supervisory tasks independently and objectively according to applicable provisions.

Supervisory and Advisory Mechanism

In performing the supervisory and advisory functions to the Board of Directors, DPS carries out a series of mechanism directed to ensuring alignment with all business activities of the Sharia Business Unit with Sharia Principle. The mechanism covers the following:

1. Ensure Conformity of Operational Activities
DPS ensures and supervises every aspect of the Company's UUS operational activity, evaluates conformity with the principles set-forth by the National Sharia Board of the Indonesia Ulema Council. This is needed to ensure that all operational processes are in accordance with applicable sharia provisions.
2. Assess the Sharia Aspect in Operational and Product Guidelines
DPS assesses the Sharia aspects related to operational and product guidelines retained by the Company. The purpose of this step is to ensure that all guidelines and products offered are in accordance with Sharia principles.

Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board

3. Mengkaji Produk dan Jasa Baru DPS terlibat dalam pengkajian terhadap produk dan jasa baru yang belum memiliki fatwa. Jika diperlukan, DPS dapat mengajukan permintaan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap produk dan jasa baru yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Pelaksanaan mekanisme tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan. Melalui peran aktif DPS, Perseroan memastikan bahwa seluruh kegiatan Unit Usaha Syariah dijalankan secara patuh terhadap Prinsip Syariah, sehingga menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

Rapat Dewan Pengawas Syariah

DPS wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit empat kali dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengawasan.

Apabila dalam rapat terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), perbedaan tersebut dicatat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan yang mendasarinya. Seluruh anggota DPS, baik yang hadir maupun tidak hadir dalam rapat, berhak memperoleh salinan risalah rapat sebagai bahan pertanggungjawaban dan tindak lanjut.

Hingga 31 Desember 2025, DPS telah menyelenggarakan sebanyak 11 (sebelas) kali Rapat, dengan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut masing-masing mencapai 100% untuk Prof. Dr. Masykuri Abdillah dan 91% untuk Prof. Dr. Euis Amalia M.Ag.

3. Review New Products and Services

DPS is involved in reviewing new products and services that do not have fatwa. If needed, DPS may submit a request for a fatwa to the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council. This step carried out to ensure that each new product and service offered is in accordance with sharia principles.

Implementation of this mechanism is in line with the provisions in Article 15 of the Financial Services Authority Regulation No. 5/POJK.05/2014 on Business Licensing and Establishment of Guarantee Institutions. Through the active role of DPS, the Company ensures that all activities of the Sharia Business Unit are carried out in compliance with Sharia Principle so as to maintain the trust of the stakeholders.

Meetings of the Sharia Supervisory Board

DPS is required to hold meetings regularly at least four times in one year in accordance with applicable provisions. Every DPS meeting is appropriately documented in the minutes of meeting as a form of accountability in the implementation of the supervisory function.

If dissenting opinion occurs in the meetings, this difference in opinion must be clearly recorded in the minutes of meeting with the underlying reasons. All members of DPS, both who attended and those who did not, have the right to obtain copies of the minutes of meeting as material of accountability and follow up.

Until 31 December 2025, DPS held 11 (eleven) meetings, with members' level of attendance in the meetings each reaching 100% respectively for Prof. Dr. Masykuri Abdillah and 91% for Prof. Dr. Euis Amalia M.Ag.

Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit berperan dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas sistem pengendalian internal, kualitas proses pelaporan keuangan, serta pelaksanaan audit internal dan audit eksternal. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit memberikan pandangan, nasihat, dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kecukupan dan efektivitas proses bisnis Perseroan, dengan fokus pada pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta integritas proses pengawasan yang mendukung penerapan GCG.

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan Sistem Pengendalian Manajemen serta pelaksanaannya;
4. Melakukan monitoring proses perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur dan praktik pada semua tingkatan di Perseroan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian Perseroan dengan baik;
5. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan;
6. Memberikan pendapat profesional yang independent kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris;
7. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang Saham;
8. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

The Audit Committee is the committee formed by the Board of Commissioners and responsible directly to the Board of Commissioners. The Audit Committee plays the role in assisting the Board of Commissioners to carry out supervisory function, specifically related to the effectiveness of the internal control system, quality of the financial reporting process, as well as the implementation of internal and external audit. In implementing its duties, the Audit Committee provides its views, advices and recommendations to the Board of Commissioners related to the adequacy and effectivity of the company's business process, with the focus on risk management, compliance with applicable provision, as well as the integrity of the supervision process that supports GCG implementation.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The duties and responsibilities of the Audit Committee of the Company are as follows:

1. Assists the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the internal control system and the implementation of duties of internal auditors and external auditors by monitoring and assessing the planning and implementation of audits in order to assess the adequacy of internal controls including the financial reporting process;
2. Assess the implementation of activities and the results of audits carried out by the Internal Audit Unit and External Auditors;
3. Provide recommendations regarding improvements to the Management Control System and its implementation;
4. Monitor the continuous improvement process of the policies, procedures and practices in all levels of the Company in order to ensure that the management and control of the Company are carried out appropriately;
5. Ensure the presence of satisfactory assessment procedures on all information disclosed by the Company;
6. Provide professional independent opinion to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners;
7. Provide recommendations on the appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm to the Board of Commissioners to be presented to the Shareholders;
8. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners.

Komite Audit

Audit Committee

Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite Audit dilaksanakan secara akuntabel dan wajib dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris. Seluruh hasil pelaksanaan tugas, termasuk temuan, evaluasi, dan rekomendasi Komite Audit, disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pengawasan dan pengambilan keputusan.

Komposisi dan Masa Jabatan Komite Audit

Komite Audit Perseroan terdiri dari satu orang Ketua Komite Audit yang merangkap sebagai anggota dan juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, satu orang anggota Komite Audit yang juga menjabat sebagai Komisaris Perseroan, serta satu orang anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen di luar Perseroan. Komposisi tersebut ditetapkan untuk memastikan keseimbangan antara pemahaman internal Perseroan dan independensi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Ketua dan anggota Komite Audit diangkat untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Bagi Ketua dan anggota Komite Audit yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Perseroan, masa jabatan Komite Audit berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan sebagai Komisaris.

Per 31 Desember 2025, komposisi Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama Name	Posisi di Komite Position in Committee	Jabatan Lain di Perseroan Other Position in the Company
Andrianto Wahyu Adi	Ketua Chairman	Komisaris Utama/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner
Iman Satria	Anggota Member	Anggota Komisaris Member Commissioner
Henry Hendaryadi	Anggota Member	Komite Audit Audit Committee

Implementation of duties assigned by the Board of Commissioners to the Audit Committee is carried out accountably and must be accounted for and reported to the Board of Commissioners. All results of the duty implementation, including findings, evaluation and Audit Committee recommendations, are submitted to the Board of Commissioners as materials for supervision and decision-making.

Composition and Term of Office of the Audit Committee

The Audit Committee of the Company consists of one Chairman of the Audit Committee concurrently as member and also serving as the Company Independent Commissioner, one member of the Audit Committee concurrently as the Company's Commissioner, and one member of the Audit Committee from an independent party outside of the Company. The composition is established to ensure balance between internal understanding of the Company and independency in carrying out supervisory functions

The Chairman and member of the Audit Committee are appointed for their term of office in accordance with the provision of applicable laws and regulations and may be reappointed only for one following period. For the Chairman and member of the Audit Committee concurrently as the Company's Commissioner, the term of office of the Audit Committee ends at the same with the end of the term of office of the concerned member as Commissioner.

As of 31 December 2025, the composition of the Audit Committee is as follows:

Komite Audit

Audit Committee

Profil Komite Audit

Profil Ketua dan Anggota Komite Audit yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, telah diuraikan dengan rinci pada Bab Profil Perusahaan, Subbab Profil Dewan Komisaris.

Profile of the Audit Committee

Profile of the Chairman and Members of the Audit Committee concurrently as member of the Board of Commissioners of the Company, are presented in details in the Chapter on Company Profile, Sub-Chapter on Profile of the Board of Commissioners.

Henry Hendaryadi Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	
Data Pribadi Personal Data	Warga Negara : Indonesia Usia : 58 tahun Domisili : Apartemen Maple Park Tower A Lantai 8A H, Jl. HBR Motik No. 2, Sunter Agung, Jakarta Utara Nationality : Indonesia Age : 58 years Domicile : Maple Park Tower A Apartment, 8A H Floor, Jl. HBR Motik No. 2, Sunter Agung, North Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Perjanjian Kerjasama Pelaksana Tugas Komite Audit tanggal 7 Oktober 2025 Cooperation Agreement for the Implementation of the Audit Committee Task Force dated 7 October 2025
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Sarjana Hukum dari Universitas Negeri Jember (1990) - Magister SDM dari STIE Yapan Surabaya (2013) - Bachelor's degree (Sarjana) in Law from Universitas Negeri Jember (1990) - Master's degree (Magister) in HR from STIE Yapan Surabaya (2013)
Sertifikasi Kompetensi Competency Certification	LSP BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko) LSP BSMR (Risk Management Certification Agency)
Riwayat Karier Professional Background	- Credit Operation di PT BAPINDO (1990-1998) - Senior Legal Officer di PT Bank Mandiri (1998-2012) - Division Head Hukum & Pemulihan Aset di Asuransi Kredit Indonesia (2012-2016) - Komisaris di PT Askrindo Mitra Utama (2016=2019) - Kepala Divisi Hukum dan Subrogasi di PT Asuransi Kredit Indonesia (2016-2019) - Kepala Divisi Klaim di PT Asuransi Kredit Indonesia (2019=2022) - Asesor di LSP BSMR (2024-sekarang) - Senior Excecutive Vice President di PT Askrindo Syariah (2022-2024) - Credit Operation at PT BAPINDO (1990-1998) - Senior Legal Officer at PT Bank Mandiri (1998-2012) - Division Head of Legal & Asset Recovery at Asuransi Kredit Indonesia (2012-2016) - Division Head of Legal and Subrogation at PT Asuransi Kredit Indonesia (2016-2019) - Division Head of Claim at PT Asuransi Kredit Indonesia (2019-2022) - Senior Excecutive Vice President at PT Askrindo Syariah (2022-2024) - Commissioner at PT Askrindo Mitra Utama (2016-2019) - Assessor at LSP BSMR (2024-now)
Hubungan Afiliasi / Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali. No affiliation with other members of the Board of Commissioners nor the Board of Directors, and no affiliation with the Majority/Controlling Shareholder.

Independensi Audit

Seluruh anggota Komite Audit merupakan profesional yang menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme tinggi serta bebas dari pengaruh atau intervensi apa pun yang dapat mengganggu independensi dan objektivitasnya. Independensi ini dijaga untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh manajemen dan Direksi dapat dilaksanakan secara objektif, kritis, dan bertanggung jawab.

Audit Independency

All members of the Audit Committee are professionals, carrying out the duties with high integrity and professionalism and free from any form of influence or intervention that may disrupt independency and objectivity. This independency is maintained to ensure that the supervisory function on the management of the Company by the management team and the Board of Directors can be conducted objectively, critically, and responsibly.

Komite Audit

Audit Committee

Pedoman Kerja (Piagam) Kerja Komite Audit

Perseroan telah menetapkan Pedoman Kerja (Piagam) Komite Audit sebagaimana disahkan melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 931.7/JJ/KRW.00.04/KEPBER/2024 tanggal 27 Desember 2024. Piagam ini menjadi pedoman bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rapat Komite Audit

Komite Audit menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Rapat Komite Audit dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah seluruh anggota Komite Audit.

Pengambilan keputusan dalam rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam hal mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), perbedaan tersebut dicatat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan yang mendasarinya.

Seluruh hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara lengkap. Risalah rapat tersebut disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Komite Audit.

Hingga 31 Desember 2025, Komite Audit telah menyelenggarakan 12 (dua belas) rapat dengan tingkat kehadiran anggota mencapai 100%.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Kerja (Piagam) Komite Audit. Dalam pelaksanaannya, Komite Audit secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit, kecukupan sistem pengendalian internal, serta kualitas dan kelengkapan proses pelaporan keuangan Perseroan.

Selain itu, Komite Audit melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas hasil audit internal dan audit eksternal. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Komite Audit menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait area-area yang memerlukan perhatian dan perbaikan guna mendukung penguatan tata kelola dan pengendalian internal Perseroan.

Work Guidelines (Charter) of the Audit Committee

The Company established the Work Guidelines (Charter) of the Audit Committee as ratified through the Decision of the Board of Commissioners No. 931.7/JJ/KRW.00.04/KEPBER/2024 dated 27 December 2024. This charter serves as guidelines for the Audit Committee to conduct its tasks and responsibilities.

Meetings of the Audit Committee

The Audit Committee holds its meetings regularly at least once in three months. Meetings of the Audit Committee are said to be legitimate if attended by more than half of the total number of members of the Audit Committee.

Decision-making in the Audit Committee meetings is carried out based on the principle of deliberation to reach consensus. If consensus is not reached, decisions are taken based on the majority of vote. If dissenting opinion occurs, the difference of opinions and the reasons behind them must be recorded clearly in the minutes of meeting.

All results of the Audit Committee meetings are stated in the minutes of meetings and documented in completion. The minutes of the meeting is submitted in writing to the Board of Commissioners as a form of accountability of the implementation of duties of the Audit Committee.

Until 31 December 2025, the Audit Committee held 12 (twelve) meetings with the level of attendance of the members reaching 100%.

Implementation of Duties of the Audit Committee in 2025

Throughout the year 2025, the Audit Committee performed its duties and responsibilities in accordance with the provisions regulated in the Work Guidelines (Charter) of the Audit Committee. In its implementation, the Audit Committee actively conducted monitoring and evaluation of the audit planning and implementation, adequacy of the internal control system, as well as the quality and completeness of the Company's financial reporting process.

In addition, the Audit Committee carries out monitoring on the follow-up of the findings of the internal and external audits. Based on the results of this monitoring, the Audit Committee submitted its recommendations to the Board of Commissioners related to areas that require attention and improvement in order to support the strengthening of the Company's governance and internal control.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan merupakan organ pendukung Perseroan yang dijalankan oleh satuan fungsi struktural di bawah Direksi dan dipimpin oleh Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan. Fungsi ini memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta pengelolaan komunikasi korporasi Perseroan secara terintegrasi.

Dalam pelaksanaannya, Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung antar organ Perseroan serta sebagai pengelola hubungan Perseroan dengan pihak eksternal, termasuk pemegang saham, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Peran tersebut dijalankan untuk memastikan keterbukaan informasi, kelancaran proses tata kelola, dan konsistensi komunikasi Perseroan.

Fungsi Sekretaris Perusahaan dilaksanakan oleh satuan kerja struktural yang dipimpin oleh Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan. Berdasarkan mekanisme internal Perseroan, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama, serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kriteria Sekretaris Perusahaan yang telah ditetapkan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan;
2. Sekretaris Perusahaan diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
3. Sekretaris Perusahaan harus memiliki kualifikasi akademis dan profesional yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik;
4. Sekretaris Perusahaan setidaknya memiliki pengetahuan di bidang komunikasi, hukum, keuangan, dan/atau tata kelola perusahaan;
5. Sekretaris Perusahaan harus memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku;
6. Sekretaris Perusahaan wajib memberi informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisaris bila diminta oleh Dewan Komisaris.

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Divisi Sekretaris Perusahaan terbagi ke dalam tiga unit kerja utama sebagai berikut:

1. Sekretaris Direksi
Mempersiapkan dan membantu kebutuhan serta agenda/kegiatan Direksi setiap hari.

The Corporate Secretary is the Company's supporting organ managed by a structural functional unit under the Board of Directors and led by the Division Head of the Corporate Secretary. This function has a strategic role in supporting the implementation of Good Corporate Governance and the Company's integrated management of corporate communication.

In its implementation, the Corporate Secretary takes on the role as a liaison among company organs as well as the liaison in the Company's relations with external parties, including with the shareholders, regulator, and other stakeholders. This role is performed to ensure information transparency, smooth governance processes, and consistency in the Company's communication.

The function of the Corporate Secretary is carried out by the structural work unit led by the Head of the Corporate Secretary Division. Based on the Company's internal mechanism, Head of the Corporate Secretary Division is appointed and dismissed by the President Director, and directly reports to the President Director. The criteria set by the Company for the Corporate Secretary position is as follows:

1. Head of the Corporate Secretary Division is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanism;
2. The Corporate Secretary is appointed by and directly reports to the President Director;
3. The Corporate Secretary must have adequate academic and professional qualifications in order to appropriately perform its duties and responsibilities;
4. The Corporate Secretary must at least have the knowledge in the field of communication, law, finance, and/or corporate governance;
5. The Corporate Secretary must ensure that the Company complies with regulations on applicable transparency requirements;
6. The Corporate Secretary is obligated to provide information concerning with the duties to the Board of Directors on regular basis and to the Board of Commissioners if requested by the Board of Commissioners.

To support the implementation of its duties, the Corporate Secretary Division is divided into three main work units as follows:

1. Secretary to the Board of Directors
Prepares and assists with the daily needs and agenda/activities of the Board of Directors.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

2. Sekretaris Perusahaan
Membidangi hubungan kelembagaan dan eksternal, komunikasi internal, *corporate events*, CSR, GCG, dan sosial media.
3. Administrasi Umum
Membidangi kearsipan, administrasi persuratan, dokumen, dan berkas Perseroan lainnya.

Profil Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan

Jabatan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan saat ini dijalankan oleh Regina Kristiningsih, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 001/Kepdir/II/2022 tentang Mutasi Pejabat PT Jamkrida Jakarta.

Profil lengkap beliau telah diuraikan dengan rinci pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Profil Kepala Divisi.

Kewajiban Tugas Sekretaris Perusahaan

Dalam mendukung Direksi, Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsi-fungsi utama yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

1. Menyiapkan kebijakan dan pelaksanaan program kerja bidang hubungan masyarakat;
2. Menyelenggarakan hubungan antar lembaga;
3. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan rapat lainnya yang menjadi forum bagi Manajemen Perseroan dengan pemegang saham dan instansi terkait lainnya;
4. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan keprotokolan Direksi, termasuk kegiatan/acara Perseroan;
5. Mempersiapkan dokumen Perikatan dan Kerja Sama Perseroan;
6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direksi termasuk tugas dan tanggung jawab yang telah diatur secara rinci dalam tata laksana kerja Sekretaris Perusahaan.

Selain itu, Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsi pendukung tata kelola yang mencakup:

1. Penegakan terhadap kepatuhan;
2. Implementasi GCG di Perseroan;
3. Tanggung jawab sosial Perseroan terhadap stakeholder;
4. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau pihak regulator terkait lainnya;
5. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

2. Corporate Secretary
In charge of institutional and external relations, internal communication, corporate events, CSR, GCG and social media.
3. General Administration
In charge of archiving, administration of correspondence, documents and other Company files

Profile of the Head of the Corporate Secretary Division

The position of the Head of the Corporate Secretary Division is held by Regina Kristiningsih, as appointed based on the Decision of the Board of Directors No. 001/Kepdir/II/2022 regarding the Official Transfers in PT Jamkrida Jakarta.

The complete profile of the Corporate Secretary is presented in detail in the Chapter on Company Profile, Sub-Chapter on Profile of Heads of Divisions.

Responsibilities of the Corporate Secretary

In supporting the Board of Directors, the Corporate Secretary carries out its main functions that include, but not limited to, the following:

1. Prepare policies and implementation of work programs in the field of public relations;
2. Organize inter-institutional relations;
3. Organize the General Meeting of Shareholders and other meetings that serve as forum for the Management of the Company with the shareholders and other related agencies;
4. Carry out the duties of the secretariate and protocol duties of the Board of Directors, including activities/events of the Company;
5. Prepare Company Agreements and Cooperation documents
6. Carry out other duties assigned by the Board of Directors including the tasks and responsibilities as regulated in details in the Corporate Secretary work procedures.

In addition, the Corporate Secretary performs its governance supporting function which includes the following:

1. Enforcement of compliance;
2. Implementation of GCG in the Company;
3. Corporate social responsibility to stakeholders;
4. Submission of reports to the Financial Services Authority (OJK) and/or to other related regulators;
5. Organize and document the meetings of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, anggota Divisi Sekretaris Perusahaan secara aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengembangan kapasitas untuk memperkuat pemahaman terhadap regulasi, praktik tata kelola, dan dinamika komunikasi korporasi, melalui partisipasi dalam pelatihan, seminar, dan kegiatan peningkatan kompetensi lainnya. Program pelatihan (termasuk melalui webinar) anggota Divisi Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

Competency Development Program of the Corporate Secretary in 2025

Throughout the year 2025, members of the Corporate Secretary Division actively participated in various capacity development activities to strengthen their understanding of regulations, governance practices, and dynamics of corporate communication, through participation in trainings, seminars and other competency development activities. Training programs (including webinars) of members of the Corporate Secretary Division, among others, include the following:

Nama Name	Jabatan Position	Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program	Tanggal Penyelenggara Date of Program	Penyelenggara Organizer
Mila Arlinawati	Plt. Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan Acting Section Head of the Corporate Secretary	Menjawab Tantangan Asuransi Unit Link: Kepastian Industri dan Pelindungan Konsumen Answering to Challenges of Insurance Unit Link: Industrial Certainty and Consumer Protection	16 September 2025	LAPS SJK
		Resilience to Sustainability: Leading Through GRC	2 September 2025	Topbusiness
Felani Galih Prabawa	Staf Sekretaris Perusahaan Staff of Corporate Secretary	Job Connector Bootcamp Digital Marketing	29 Januari - 09 Juni 2025 29 January – 9 June 2025	Purwadhika Digital Technology School
Muhammad Ghifari	Staf Sekretaris Perusahaan Staff of Corporate Secretary	Menjawab Tantangan Asuransi Unit Link: Kepastian Industri dan Pelindungan Konsumen Answering to the Challenges of Insurance Unit Link: Industrial Certainty and Consumer Protection	16 September 2025	LAPS SJK
		Pelatihan Sertifikasi Desain Grafis an. M. Ghifari Graphic Design Certification Training for M. Ghifari	12 September – 31 Oktober 2025 12 September – 31 October 2025	My Skill
		Focus Group Discussion dan Workshop Pelaksana Fungsi Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Focus Group Discussion and Workshop on Implementor of Sharia Financial Literacy and Inclusion Function	16 Desember – 19 Desember 2025 16 December – 19 December 2025	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
Insyira Muthia Khansa	Staf Sekretaris Perusahaan Staff of Corporate Secretary	Meningkatkan Profesionalisme Pengelolaan Arsip melalui Transformasi Digital Menuju 5 Abad Kota Jakarta pada kegiatan Semarak Gerakan Sadar Tertib Arsip (GSTA) Tahun 2025 Improving Professionalism in Archive Management through Digital Transformation Towards 5 Centuries of the City of Jakarta at the 2025 Archives Awareness Movement (GSTA) celebrations	5 November 2025	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Library and Archive Services of DKI Jakarta Province

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pengelola keterbukaan informasi dan penghubung utama antara Perseroan dengan pemangku kepentingan eksternal. Pelaksanaan tugas difokuskan pada pemenuhan kewajiban tata kelola, kelancaran proses komunikasi korporasi, serta dukungan terhadap pengambilan keputusan Direksi melalui penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu.

Dalam konteks hubungan eksternal, Sekretaris Perusahaan berperan aktif dalam memastikan komunikasi Perseroan dengan pemegang saham, investor, regulator, dan pihak terkait lainnya berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun juga diarahkan untuk memperkuat praktik keterbukaan informasi serta menjaga konsistensi penyampaian informasi korporasi.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

Internal

1. Mengoordinasikan pelaksanaan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris sebagai bagian dari tata kelola Perusahaan.
2. Menyelenggarakan forum komunikasi antara manajemen dan karyawan untuk menyampaikan kinerja, arah kebijakan, dan strategi perusahaan melalui pelaksanaan Town Hall Meeting.
3. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (Tahunan dan Luar Biasa) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengoordinasikan pelaksanaan *employee gathering*, Halal Bihalal, peringatan Hari Kemerdekaan, dll guna memperkuat kebersamaan dan budaya Perusahaan.
5. Mengelola keterbukaan informasi, dokumentasi korporasi, serta penyusunan laporan manajemen dan laporan tahunan.
6. Mengelola sistem kearsipan perusahaan guna menjamin ketertiban, keamanan, dan kemudahan akses dokumen.
7. Mengelola pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/Corporate Social Responsibility (CSR), termasuk perencanaan, koordinasi pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kegiatan.

Implementation of Duties of the Corporate Secretary in 2025

During the year 2025, the Corporate Secretary carried out its function and responsibilities in the management of information transparency and as the main liaison between the Company and external stakeholders. Implementation of duties was focused on fulfilment of governance obligations, smooth corporate communication process, and support to decision-making of the Board of Directors through providing accurate and on-time information.

In the context of external relations, the Corporate Secretary played an active role in ensuring the company's communication with the shareholders, investors, regulators and other related parties is conducted in structured manner and in accordance with applicable provisions. Activities carried out during the year were also directed towards strengthening information transparency practices as well as maintaining consistency in delivering corporate information.

Activities carried out by the Corporate Secretary during the year 2025, among others, are as follows:

Internal

1. Coordinated the implementation of Board of Directors Meetings and Board of Commissioners Meetings as part of Company's governance.
2. Organized the communication forum between the management and employees to present performance, direction of policies and company's strategies through the implementation of Town Hall Meetings.
3. Organized the General Meeting of Shareholders (Annual and Extraordinary) in accordance with provisions of the laws and regulations.
4. Coordinated the implementation of employee gatherings, Halal Bihalal, commemoration of the Independence Day, etc in strengthening togetherness and culture of the Company.
5. Managed information transparency, corporate documentation, and prepared management reports and annual report.
6. Managed the company's archive system in order to guarantee order, security and easy access to documents.
7. Managed the implementation of the Social and Environmental Responsibility (TJSL)/ Corporate Social Responsibility (CSR) program, including the planning, implementation coordination, monitoring and reporting activities.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

8. Melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroda) dan PT Solusi Penjaminan Aman tentang Platform Portal *E-Guarantee* Serta Launching Sistem Penjaminan Digital.
9. Melaksanakan penguatan budaya Perusahaan melalui internalisasi nilai-nilai inti, keteladanan pimpinan, serta kegiatan komunikasi dan pembinaan berkelanjutan guna membentuk perilaku kerja yang profesional, berintegritas, kolaboratif, dan berorientasi pada kinerja.

Eksternal

1. Menjalin dan memelihara hubungan komunikasi yang efektif antara Perseroan dengan Pemegang Saham, regulator, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
2. Mengkoordinasikan dan memastikan pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengelola dan mengoordinasikan penyampaian laporan berkala dan insidental kepada regulator dan instansi terkait.
4. Mengelola kegiatan komunikasi korporasi dan kehumasan, termasuk publikasi perusahaan, hubungan media, serta penyampaian informasi resmi Perseroan kepada publik.
5. Pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi perusahaan dilakukan melalui program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman karyawan serta pemangku kepentingan terhadap produk, layanan, dan peran Perseroan, guna memperluas akses dan pemanfaatan layanan Perusahaan.

8. Conducted the Signing of the Cooperation Agreement between PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroda) and PT Solusi Penjaminan Aman regarding the E-Guarantee Portal Platform as well as the Launching of the Digital Guarantee System.
9. Conducted the strengthening of the Corporate Culture through internalization of core values, exemplary leadership, as well as communication and fostering sustainability activities in order to form professional, integrity-based, collaborative and performance-driven work behaviours,

External

1. Established and maintained effective communication relationships between the Company and Shareholders, regulator, regional government and other stakeholders.
2. Coordinated and ensured the fulfilment of obligation concerning information transparency to the public in accordance with applicable laws and regulations.
3. Managed and coordinated the submission of periodic and incidental reports to regulator and related agencies.
4. Managed corporate communication and public relation activities, including company publication, media relation, and delivery of Company official information to the public.
5. Implemented the company's literacy and inclusion activities through the educational and socialization programs to improve the employees' and stakeholders' understanding the products, services and roles of the Company, in order to expand the access and utilization of the Company's services.

Satuan Pengawas Internal (SPI)

Internal Supervisory Unit (SPI)

Satuan Pengawas Internal (SPI) merupakan fungsi pengawasan internal yang dibentuk oleh Direksi untuk memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian internal, serta penerapan tata kelola Perseroan. Dalam menjalankan perannya, SPI ditempatkan secara independen dari kegiatan operasional agar dapat menjalankan fungsi penilaian dan evaluasi secara objektif.

Melalui pelaksanaan audit internal dan penugasan pengawasan lainnya, SPI mendukung peningkatan kualitas proses bisnis dan pengambilan keputusan manajemen. Pendekatan yang digunakan bersifat sistematis dan berbasis risiko, dengan fokus pada identifikasi area yang memerlukan perbaikan serta pemberian rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan efektivitas operasional dan tata kelola Perseroan secara berkelanjutan.

Komposisi Divisi SPI

Divisi SPI Perseroan terdiri atas satu orang auditor internal yang menjabat sebagai Kepala Divisi serta satu orang staf SPI. Susunan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan internal secara proporsional dengan skala dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan. Seluruh personel SPI memiliki integritas dan profesionalisme yang memadai serta didukung oleh pengetahuan dan pengalaman di bidang audit internal. Selain kompetensi teknis audit, personel SPI juga memiliki pemahaman yang memadai terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan bertanggung jawab.

Per 31 Desember 2025, komposisi Divisi SPI Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Name	Posisi di Divisi Position in Division	Jabatan Lain di Perseroan Other Position in Company
Wirendra Satwika B.	Plt. Kepala SPI Acting Head of SPI	Tidak merangkap jabatan No concurrent position
M. Aqsa Gunapraja	Staf SPI SPI Staff	Tidak merangkap jabatan No concurrent position

Profil Divisi SPI

Divisi SPI saat ini dipimpin oleh Wirendra Satwika B., yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Divisi, berdasarkan Keputusan Direksi PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta Nomor 033/Kepdir-SDM/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024.

The Internal Supervisory Unit (SPI) is the internal supervisory function formed by the Board of Directors to give adequate assurance of the effectiveness of risk management, adequacy in internal control, as well as in implementing the Company's governance. In carrying out its role, SPI is placed independently from operational activities so that it can perform its function to assess and evaluates objectively.

Through the implementation of internal audit and the assignment of other supervision, SPI supports the improvement of business process quality and management decision making. The approach used is systematic and based on risk, with the focus on identifying areas that require improvements as well as provide constructive recommendations to sustainably increase the effectiveness of the Company's operations and governance.

Composition of SPI Division

The SPI Division of the Company consists of one internal auditor that acts as Head of the Division and one SPI staff. This structure is established to support internal supervisory function proportionally with the scale and complexity of the Company's business activities. All SPI personnel have adequate integrity and professionalism and supported by knowledge and experience in internal audit. Aside from audit technical competency, SPI personnel also have adequate understanding on provisions of the laws and regulations relevant to the Company's business activities, so that the implementation of the supervisory function can be carried out effectively and responsibly.

As of 31 December 2025, the composition of the Company's SPI division is as follows:

Profile of SPI Division

SPI Division is currently led by Wirendra Satwika B., appointed as the Acting Tasks Executor Head of Division, based on the Decision of the Board of Directors of PT Penjamin Kredit Daerah Jakarta No. 033/Kepdir-SDM/VIII/2024 dated 01 August 2024,

Satuan Pengawas Internal (SPI)

Internal Supervisory Unit (SPI)

Profil lengkap beliau telah diuraikan dengan rinci pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Profil Kepala Divisi.

The complete profile is presented in detail in the Chapter on Company Profile, Sub-Chapter on Profile of Heads of Divisions.

Adapun profil staf Divisi SPI adalah sebagai berikut:

Profile of SPI Division staff is as follows:

M. Aqsa Gunapraja Staf SPI SPI Staff	
Data Pribadi Personal Data	Warga Negara : Indonesia Usia : 35 tahun Domisili : Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, Indonesia Nationality : Indonesia Age : 35 years Domicile : Srengseng, Kembangan, West Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Perjanjian Ikatan Kerja No. 023/PIK/JAMKRIDA/VIII/2025 Employment Agreement No. 023/PIK/JAMKRIDA/VIII/2025
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Universitas Mercu Buana (Sarjana) - Politeknik LP3I Jakarta (Diploma) - Bachelor's degree (Sarjana) from Universitas Mercu Buana - Diploma in Polytechnic LP31 Jakarta
Sertifikasi Kompetensi Competency Certification	- Pelatihan Antikorupsi Tematik Investigatif bagi Bank Daerah Seluruh Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Teknik Pengendalian Kecurangan & Membangun Whistleblower System (WBS) yang Efektif – Accounting Academy - Pelatihan Analisis Kredit, Proses dan Kelayakan Pemberian Kredit Perbankan – PT Bintang Sinergy Mulia - Strategies Against Fraud – PT MRT Jakarta - Training on Anti-Corruption Investigative hematic for Regional Banks Throughout Indonesia – Corruption Eradication Commission - Fraud Control Techniques & Building an Effective Whistleblower System (WBS) – Accounting Academy - Training on Credit Analysis, Process and Eligibility for Bank Credit Granting – PT Bintang Sinergy Mulia - Strategies Against Fraud – PT MRT Jakarta
Riwayat Karier Professional Background	- PT MRG Mega Berjangka (2013 – 2016) - PT Bursa Berjangka Jakarta (2016 – 2016) - Otoritas Jasa Keuangan (2022 – 2023) - PT MRG Mega Berjangka (2013-2016) - PT Bursa Berjangka Jakarta (2016-2016) - Financial Services Authority (2022-2023)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya, serta tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali. No affiliation with other members of the Board of Commissioners nor the the Board of Directors, and no affiliation with the Majority/Controlling Shareholders.

Kualifikasi Atau Sertifikasi Profesi Audit Internal

Kualifikasi dan sertifikasi profesi menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Internal di Perseroan. Kepemilikan sertifikasi profesi mencerminkan pemenuhan standar kompetensi dan profesionalisme auditor internal dalam menjalankan tugas pengawasan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi secara objektif dan berbasis praktik terbaik.

Qualification or Certification of Internal Audit Profession

Qualification and certification of profession is an important element in supporting the effectiveness of the implementation of Internal Audit function in the Company. Possession of professional certification reflects the fulfilment of competency standards and professionalism of internal auditors in performing supervisory, evaluation and recommendation tasks objectively and based on best practices.

Satuan Pengawas Internal (SPI)

Internal Supervisory Unit (SPI)

Melalui kompetensi yang terjaga, fungsi Audit Internal diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang nyata serta meningkatkan tingkat keyakinan pemangku kepentingan terhadap kualitas sistem pengendalian internal dan tata kelola Perseroan. Informasi lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kualifikasi sumber daya manusia Perseroan disajikan pada Bab Profil Perusahaan, Subbab Sumber Daya Manusia.

Through maintained competency, Internal Audit function is expected to be able to provide real added value and increase the level of faith of the stakeholders on the quality of the Company's internal control system and governance. Further information on certification and qualification of the Company's human resources are presented in the Chapter on Company Profile, Sub-Chapter on Human Resource.

Kedudukan SPI Dalam Struktur Organisasi

Kedudukan Divisi SPI dalam struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. SPI bertugas membantu Direktur Utama dan berkoordinasi dengan Komite Audit dalam menjalankan fungsi assurance dan *advisory* bagi Perseroan;
2. SPI dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawas Internal;
3. SPI berkedudukan dan bertanggung jawab langsung di bawah Direktur Utama;
4. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris;
5. Kepala SPI bekerja secara independent dan objektif, serta ditempatkan sedemikian rupa sehingga mampu melakukan tugas pengawasan internal sesuai amanat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Position of SPI in the Organizational Structure

The position of the SPI Division within the organizational structure of the Company is as follows:

1. SPI is assigned to assist the President Director and coordinate with the Audit Committee in carrying out the assurance and advisory function for the Company;
2. SPI is led by the Head of the Internal Supervisory Unit;
3. SPI is positioned and responsible directly under the President Director;
4. Head of SPI is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners;
5. Head of SPI works independently and objectively, and placed in such a way that he/she is able to carry out internal supervision duties in accordance with the mandate in applicable laws and regulations.

Pihak yang Mengangkat/Memberhentikan Kepala SPI

Kepala Divisi SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Party that Appoints/Dismisses the Head of SPI

Head of the SPI Division is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi SPI

Divisi SPI mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan (audit) dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya, baik yang tertuang dalam rencana tahunan, maupun yang menjadi perhatian Direksi dan Komite Audit;
4. Memberi saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

Duties and Responsibilities of the SPI Division

SPI Division bears the duties and responsibilities as follows:

1. Prepare and carry out the Annual Supervisory Work Program (PKPT);
2. Test and evaluate internal control and risk management system implementation according to Company's policies;
3. Conduct audits and assessments on the efficiency and effectiveness in the fields of finance, accounting, operations, human resource, marketing information technology and other activities, both that are stated in the annual plan as well as those noted for the attention of the Board of Directors and the Audit Committee;
4. Provide recommendations for improvements and objective information on the activities audited at all levels of the management;

Satuan Pengawas Internal (SPI)

Internal Supervisory Unit (SPI)

5. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
8. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan berdasarkan penugasan khusus dari Direktur Utama atau sebagai pengembangan pemeriksaan sebelumnya;
9. Dalam melaksanakan audit internal yang efektif, Divisi SPI wajib memastikan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian internal serta kualitas kinerja Perseroan demi menjaga dan mengamankan kegiatan usaha Perseroan.
5. Prepare Audit Result Report and submit to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee;
6. Monitor, analyse and report implementation of follow-up improvement as recommended;
7. Work together with the Audit Committee in preparing the program to evaluate the quality of internal audit activities carried out;
8. Conduct special examination if necessary based on special assignments from the President Director or as a development from previous examinations;
9. In carrying out effective internal audit, the SPI Division must ensure that examination and assessment of the adequacy and effectiveness of the internal control structure and the quality of the Company's performance in order to maintain and secure the Company's business activities.

Program Pengembangan Kompetensi SPI Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, anggota Divisi SPI secara aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas dan relevansi fungsi audit internal. Kegiatan pengembangan diarahkan untuk memperkuat pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, metodologi audit, pengelolaan risiko, serta penerapan tata kelola yang efektif dalam konteks kegiatan usaha Perseroan. Program pelatihan (termasuk melalui webinar) anggota Divisi SPI antara lain sebagai berikut:

SPI Competency Development Program in 2025

Throughout the year 2025, SPI Division actively participated in various sustainable competency development activities as part of the effort to maintain the quality and relevance of the internal audit function. Development activities were directed toward strengthening the understanding of applicable regulations, audit methodology, risk management, and implementation of effective governance in the context of the Company's business activities. Training programs (including webinars) of members of SPI Division, among others, are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program	Tanggal Penyelenggara Date of Program	Penyelenggara Organizer
Wirendra Satwika B.	Plt. Kepala SPI Acting Head of SPI	Pelatihan Manajemen Risiko Bagi Pegawai BUMD Training on Risk Management for BUMD Employees	29 September – 01 Oktober 2025 29 September – 1 October 2025	BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Financial Audit Agency of the Republic of Indonesia
Wirendra Satwika B.	Plt. Kepala SPI Acting Head of SPI	MRPN (Manajemen Risiko Pembangunan Nasional) dan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Risk Management in National Development and Fiscal Independency in Regional Government	30 September 2025	BPKP (Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan) RI Financial and Development Supervisory Board
Wirendra Satwika B.	Plt. Kepala SPI Acting Head of SPI	Risk Management Workshop	12 Agustus 2025 12 August 2025	OJK – Jamkrida Jakarta Financial Services Authority – Jamkrida Jakarta

Satuan Pengawas Internal (SPI)

Internal Supervisory Unit (SPI)

Nama Name	Jabatan Position	Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program	Tanggal Penyelenggara Date of Program	Penyelenggara Organizer
Wirendra Satwika B.	Plt. Kepala SPI Acting Head of SPI	Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Pejabat Eksekutif Bidang Audit Internal Training on Professional Certification in Guarantee Business for Internal Audit Executive Officer Scheme	16-17 Mei 2025 16-17 May 2025	BCG (Bintang Cahaya Gempita) – Assipindo
Wirendra Satwika B.	Plt. Kepala SPI Acting Head of SPI	Peran GRC dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor & Stabilitas Sektor Keuangan Role of GRC in Improving the Trust of Investors & Stability in Financial Sector	25 Februari 2025 25 February 2025	OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Institute Financial Services Authority Institute
M. Aqsa Gunapraja	Staf Staff	Pelatihan Antikorupsi bagi BUMD Klaster Bank Daerah Tahun 2025 Training on Anti-Corruption for Regional Bank Cluster BUMDs in 2025	23 – 26 September 2025	KPK RI Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia

Pelaksanaan Tugas Divisi SPI Tahun 2025

Divisi SPI menjalankan peran pengawasan dan kepatuhan sesuai dengan mandat dan ruang lingkup tugas yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan fungsi tersebut difokuskan pada penguatan pengendalian internal, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta dukungan terhadap efektivitas proses bisnis Perseroan, yaitu antara lain:

1. Pemeriksaan Internal Tahun 2025 dan monitoring tindak lanjut atas temuan pada Divisi:
 - a. Divisi Klaim & Subrogasi;
 - b. Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan;
 - c. Divisi Keuangan & IT;
 - d. Divisi Penjaminan Bank;
 - e. Divisi Penjaminan Non-Bank ;
 - f. Divisi Penjaminan Syariah (UUS);
 - g. Divisi SDM & Umum;
 - h. Divisi Sekretaris Perusahaan.
2. Pendampingan audit eksternal dan monitoring tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono.
3. Sosialisasi/Bimtek Anti Korupsi kepada seluruh Divisi di Perusahaan.

Implementation of Duties of SPI Division in 2025

SPI Division carries out its supervisory and compliance role in accordance with the mandate and scope of duty set by the Company. Throughout the year 2025, implementation of that function was focused on strengthening internal control, compliance with applicable provisions as well as supporting the effectiveness of the Company's business process, among others, include the following:

1. 2025 Internal Audit and monitoring of follow-ups on findings in following Divisions:
 - a. Claim & Subrogation Division;
 - b. Risk Management & Compliance Division;
 - c. Finance & IT Division;
 - d. Bank Guarantee Division;
 - e. Non-Bank Guarantee Division;
 - f. Sharia Guarantee Division (UUS);
 - g. HR & General Affairs Division;
 - h. Corporate Secretary Division.
2. Assistance for external audit and follow-up monitoring of the Direct Audit Report of the Financial Services Authority (OJK), the Financial and Development supervisory Agency (BPKP), KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono.
3. Socialization/Technical Assistance on Anti-Corruption to all Divisions in the Company.

Satuan Pengawas Internal (SPI)

Internal Supervisory Unit (SPI)

Sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan keuangan, Perseroan melibatkan auditor eksternal yang independen untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan. Pelaksanaan audit eksternal dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Keterlibatan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dilakukan untuk memastikan bahwa proses pelaporan keuangan Perseroan dinilai secara objektif oleh pihak yang memiliki kompetensi profesional serta independensi yang memadai. Dalam pelaksanaannya, auditor eksternal wajib memenuhi ketentuan independensi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Mekanisme Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penunjukan KAP dilakukan melalui mekanisme yang mempertimbangkan aspek legalitas, kompetensi, dan independensi akuntan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses tersebut, Komite Audit terlebih dahulu melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Kantor Akuntan Publik yang dinilai memenuhi persyaratan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Dewan Komisaris selanjutnya mengajukan usulan penunjukan KAP kepada pemegang saham untuk memperoleh persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

RUPS Tahunan Tahun 2025 memutuskan untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam rangka menunjuk KAP yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.

Sebagai tindak lanjut atas keputusan RUPS tersebut, Dewan Komisaris menetapkan penunjukan KAP KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagai KAP yang melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Dewan Komisaris Nomor 2862/JJ/PNG.00.03/KE/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Persetujuan Hasil Seleksi KAP Tahun Buku 2025, berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

As part of the strengthening of financial audit system, the Company engages an independent external auditor to conduct the audit on the Company's Financial Statements. Implementation of this external audit is intended to provide reasonable assurance regarding the fairness of the presentation of the Company's financial statements in accordance with the Financial Accounting Standards applicable in Indonesia.

The engagement of a Public Accountant (AP) and Public Accounting Firm (KAP) is carried out to ensure that the Company's financial reporting process is assessed objectively by a party with adequate professional competency as well as independency. In its implementation, the external auditor is obligated to fulfil the provision of independency as regulated in Article 68 paragraph (1) letter c of the Limited Liability Law as well as the Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017 regarding the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm in Financial Services Activities.

Appointment Mechanism of the Public Accounting Firm (KAP)

The appointment of a KAP is conducted through the mechanism that takes into account the legality, competency and independency aspects of a public accountant, in line with applicable provisions. In this process, the Audit Committee must first review and provide recommendation to the Board of Commissioners on the Public Accounting Firm candidate deemed to meet the requirements. Based on this recommendation, the Board of Commissioners then propose the appointment of KAP to the shareholders for approval through the General Meeting of Shareholders.

The 2025 Annual GMS decided to delegate the authority to the Board of Commissioners in the context of appointing the KAP that will be assigned to audit the Company's Financial Statements for fiscal year 2025.

As a follow-up on this GMS decision, the Board of Commissioners determined the appointment of KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono as the KAP that will audit the Company's Financial Statements ending on 31 December 2025. This appointment is stated in the Letter of Board of Commissioners No. 2862/JJ/PNG.00.03/KE/2025 dated 29 September 2025 regarding the Approval of the Public Accounting Firm Selection Result for Fiscal Year 2025, based on the recommendation of the Audit Committee.

Nama KAP Name of KAP	Alamat Address	Nama AP Name of AP	Jasa Lain yang Diberikan Other Services Provided
KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Wisma Bumiputera 12nd floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Setiabudi - Jakarta	Florus Daeli SE., Ak., MM., CPA., CA., CRA., CLI., CFI., CACP., ASEAN CPA	- Audit Laporan Keuangan - Audit Kepatuhan - Financial Statements Audit - Compliance Audit

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Perseroan menerapkan sistem pengendalian internal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses bisnis dan pengambilan keputusan. Sistem ini dirancang sebagai mekanisme yang melekat pada aktivitas operasional dan keuangan, dijalankan secara berkesinambungan oleh seluruh fungsi organisasi, dan diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Perseroan.

Penerapan sistem pengendalian internal diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan Perseroan dapat dicapai melalui kegiatan yang terkendali dan terukur, dengan ruang lingkup utama meliputi:

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan;
2. Keandalan pelaporan keuangan dan kinerja;
3. Pengamanan aset perusahaan; dan
4. Ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, kerangka pengendalian internal yang diterapkan Perseroan dimaksudkan untuk menjaga kualitas pengelolaan usaha, mendukung penciptaan nilai bagi pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa kegiatan operasional dan keuangan dijalankan secara terkendali, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam implementasinya, sistem pengendalian internal mencakup seluruh aspek operasional dan keuangan Perseroan. Upaya penguatan pengendalian juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi proses, termasuk dalam mendukung koordinasi dan ketepatan waktu penyelesaian audit laporan keuangan. Pendekatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perseroan untuk memperkuat penerapan GCG dalam seluruh aktivitas bisnis.

Pengendalian Keuangan dan Operasional

Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada lingkup Perseroan mencakup 2 (dua) aspek, yaitu pengendalian keuangan dan pengendalian operasional. Implementasi pengendalian di bidang akuntansi dan keuangan diwujudkan dengan merancang sistem keuangan yang terintegrasi menggunakan *software* keuangan khusus yang terakreditasi untuk meminimalisir terjadinya *human error* sehingga pencatatan pembukuan menjadi lebih akurat *dan real time*.

The Company applies the internal control system as an integral part of the entire business process and decision-making. This system is designed as a mechanism inherent in operational and financial activities, carried out continuously by all organizational functions, and directed at providing adequate assurance regarding the achievement of the Company's objectives.

Implementation of the internal control system is directed to providing adequate assurance that Company's goals may be achieved through controlled and measurable activities, with the main scope consisting of the following:

1. Effectiveness and efficiency of achieving the objectives of implementing the programs and activities;
2. Reliability of financial and performance reporting;
3. Securing company assets; and
4. Compliance with applicable laws and regulations.

Overall, the internal control framework is applied by the Company with the intention to maintain the quality of business management, supporting value creation for stakeholders, as well as insuring that operational and financial activities are carried out in controlled manner, measurable and in accordance with applicable provisions.

In its implementation, the internal control system covers all operational and financial aspects of the Company. Efforts to strengthen control are also performed through the use of technology and process digitalization, including in supporting coordination and on-time completion of the financial statements audit. This approach is part of the Company's sustainability efforts to enforce GCG implementation in all business activities.

Financial and Operational Control

Implementation of the Internal Control system within the scope of the Company consists of 2 (two) aspects, namely financial control and operational control. Implementation control in the fields of accounting and finance is manifested by designing a financial system that is integrated by use of a special accredited financial software to minimize the occurrence of human error that bookkeeping can be more accurate and real time.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Selain itu, Perseroan juga telah menerapkan kebijakan dan prosedur pemeriksaan data keuangan secara berjenjang yang dilakukan oleh masing-masing petugas dengan kewenangan berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak penyalahgunaan wewenang yang berujung pada fraud keuangan.

Perseroan juga secara berkala menyesuaikan kebijakan akuntansi dengan standar yang berlaku, khususnya bagi sektor jasa keuangan, untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara andal dan relevan.

Pada aspek operasional, efektivitas pengendalian dijaga melalui pemantauan kinerja unit kerja secara berkala. Evaluasi atas laporan operasional digunakan sebagai dasar bagi Direksi dan manajemen untuk mengidentifikasi potensi kelemahan pengendalian, kesalahan pelaporan, maupun penyimpangan lainnya, sehingga langkah mitigasi risiko dapat dilakukan secara tepat waktu tanpa mengganggu pencapaian target Perseroan.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Perseroan menempatkan kepatuhan sebagai bagian integral dari sistem pengendalian internal. Seluruh karyawan diwajibkan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengacu pada prinsip GCG serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga relevansi dan akurasi pemahaman terhadap regulasi, Perseroan secara aktif mengikuti perkembangan kebijakan melalui keikutsertaan dalam asosiasi industri serta partisipasi dalam kegiatan sosialisasi regulasi yang diselenggarakan oleh regulator dan otoritas terkait. Pendekatan ini dilakukan untuk meminimalkan risiko ketidakpatuhan serta memastikan kesiapan Perseroan dalam merespons perubahan regulasi.

Melalui penerapan pengendalian internal yang menyeluruh, Perseroan menjaga aset perusahaan dari potensi penyalahgunaan serta memastikan bahwa informasi keuangan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan disajikan secara tepat waktu, akurat, dan dapat diandalkan.

In addition, the Company also applies the policies and procedures of auditing financial data in hierarchical manner carried out by each officer with different authorities. This is intended to prevent the misuse of authority that ends up in financial fraud.

The Company also periodically adjusts accounting policies with applicable standards, specifically for the financial service sector, to ensure that financial statements are reliable and relevant.

In the operational aspect, the effectiveness of control is maintained through regular monitoring of the work units' performance. Evaluation of operational reports is used as basis for the Board of Directors and the management to identify potential control weaknesses, reporting errors, and other deviations, so that risk mitigation can be done on-time without disrupting the Company's target achievement.

Compliance with the Laws and Regulations

The Company places compliance as an integral part of the internal control system. All employees are required to carry out their duties and responsibilities by referring to GCG principles as well as applicable provisions of the laws and regulations.

To maintain relevance and accuracy of the understanding of regulations, the Company actively follows development of the policies through participation in regulation socialization activities held by related regulator and authorities. This approach is implemented to minimize risk of non-compliance as well as ensuring the Company's preparedness in responding to regulation change.

Through the implementation of comprehensive internal control, the Company maintains company assets from potential misuse and ensure that financial information presented to stakeholders on time, accurate and reliable.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Tahun 2025

Evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan oleh unit kerja terkait, fungsi manajemen risiko, dan Satuan Pengawas Internal. Selain itu, evaluasi juga dapat dilakukan oleh pihak independen, termasuk KAP, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2025, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal Perseroan berada pada tingkat yang memadai. Aktivitas pengendalian dan pemantauan risiko berjalan secara konsisten, dan tidak ditemukan pelanggaran atau penyimpangan material yang mengarah pada tindakan kecurangan, baik dalam aspek keuangan maupun operasional.

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Atas Kecukupan Pengendalian Internal Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris dan Direksi memandang bahwa Perseroan telah memiliki lingkungan pengendalian yang memadai sebagai dasar penerapan sistem pengendalian internal. Sistem tersebut dinilai mampu mendukung pengelolaan keuangan dan operasional Perseroan secara efektif serta sejalan dengan tujuan bisnis yang ditetapkan.

Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal Perseroan telah dijalankan secara efektif dan proporsional, dengan mempertimbangkan dinamika strategi bisnis, faktor eksternal, serta ketentuan regulator. Perseroan terus melakukan penyempurnaan atas perangkat dan mekanisme pengendalian untuk memastikan sistem tersebut tetap relevan dalam mendukung kinerja, kepatuhan, dan reputasi Perseroan.

Review of the Effectiveness of Internal Control System in 2025

Evaluation of the adequacy and effectiveness of the internal control is conducted through sustainable monitoring by related work units, risk management function, and Internal Supervisory Unit. In addition, evaluation can also be conducted by an independent party, including KAP, in accordance with applicable provisions.

Throughout the year 2025, results of the evaluation showed that the company's internal control system was at adequate level. Risk control and monitoring activities were running consistently, and no violations or material deviations were found that could lead to fraudulent acts, both in financial as well as operational aspects.

Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Adequacy of Internal Control in 2025

Based on results of the assessment conducted during the year 2025, the Board of Commissioners and the Board of Directors view that the Company has had adequate control environment as a basis for implementing an internal control system. The system was assessed as capable of effectively supporting financial and operational management of the Company and was in line with the set business goals.

The Board of Commissioners, the Board of Directors and the Audit Committee also stated that the Company's internal control has run effectively and proportionally, with consideration of the business strategy dynamics, external factors as well as regulatory provisions. The Company continued to improve control devices and mechanism to ensure that the system remains relevant in supporting the Company's performance, compliance and reputation.

Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

Manajemen risiko merupakan bagian integral dari pengelolaan usaha Perseroan untuk menjaga ketahanan keuangan, keberlangsungan operasional, dan pencapaian tujuan strategis. Dalam konteks kegiatan penjaminan, manajemen risiko berfungsi sebagai mekanisme utama untuk mengantisipasi potensi tekanan keuangan, membatasi eksposur kerugian, serta memastikan bahwa setiap keputusan bisnis diambil dengan tingkat risiko yang terukur.

Setiap unit kerja bertanggung jawab melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan Perseroan. Pendekatan ini menegaskan bahwa manajemen risiko bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, melainkan melekat dalam seluruh proses bisnis dan pengambilan keputusan di Perseroan. Keberhasilan penerapan manajemen risiko menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung pencapaian visi dan misi Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi berbagai jenis risiko yang melekat pada aktivitas penjaminan. Risiko-risiko tersebut dikelola melalui kombinasi langkah pencegahan, mitigasi, dan pengalihan risiko sesuai dengan karakteristik dan tingkat eksposurnya.

Pokok-Pokok Kebijakan Manajemen Risiko di Perseroan

Penerapan Sistem Manajemen Risiko di Perseroan didasarkan pada prinsip-prinsip utama sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan Perseroan berkaitan dengan risiko yang dihadapi;
2. Manajemen Risiko berkontribusi terhadap pencapaian tujuan secara nyata dan peningkatan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, kepercayaan pemangku kepentingan, perlindungan lingkungan, kinerja keuangan, kualitas produk, efisiensi operasi, tata kelola, dan reputasi Perseroan;
3. Manajemen Risiko merupakan bagian integral dalam proses penyelenggaraan Perseroan yang artinya melekat dalam semua praktik dan proses bisnis Perseroan sehingga Manajemen Risiko merupakan aktivitas yang tidak berdiri sendiri dari aktivitas-aktivitas utama dan proses dalam Perseroan;

Risk management is an integral part of the Company's business management to maintain financial resilience, operational continuity, and achievement of strategic goals. In the context of guarantee activities, risk management functions as the main mechanism to anticipate potential financial pressures, limit loss exposure, as well as ensure that each business decision is taken with a measurable risk level.

Each work unit is responsible for identifying, measuring, monitoring and reporting risks that can potentially hinder the achievement of Company goals. This approach emphasizes that risk management is not a function that stands alone, but rather inherent in all business processes and decision-making in the Company. The success of risk management implementation becomes one of the key factors in supporting the achievement of the Company's vision and mission.

In carrying out its business activities, the Company faces various types of risks that are inherent in guarantee activities. These risks are managed through combinations of steps of prevention, mitigation, and risk diversion according to their characteristics and level of exposure.

The Fundamentals of Risk Management Policy in the Company

The implementation of the Risk Management System of the Company is based on the main principles as follows:

1. Risk Management is a coordinated activity to direct and control the Company in connection with risks it faces;
2. Risk Management contributes to the achievement of real objectives and the improvement of compliance with the laws and regulations, the trust of the stakeholders, the protection of the environment, financial performance, quality of products, operational efficiency, governance and reputation of the Company;
3. Risk Management is an integral part of the Company's implementation process meaning that it is inherent in all of the Company's business practices and processes that Risk Management is an activity that does not stand alone from the main activities and process in the Company;

Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

4. Manajemen Risiko membantu dalam mengambil keputusan dengan informasi yang cukup. Manajemen risiko juga membantu memprioritaskan aksi dan membedakan berbagai pilihan alternatif aksi. Pada akhirnya manajemen risiko dapat membantu dalam pengambilan keputusan apakah suatu risiko dapat diterima atau apakah suatu penanganan risiko telah memadai dan efektif;
5. Manajemen Risiko menangani aspek-aspek ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan bagaimana cara menanganinya;
6. Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan suatu pendekatan sistematis, terstruktur, dan tepat waktu sehingga memiliki kontribusi terhadap efisiensi dan hasil yang konsisten, dapat dibandingkan serta andal;
7. Manajemen Risiko berdasarkan informasi yang tersedia secara selektif, artinya masukan untuk proses pengelolaan risiko didasarkan pada sumber informasi seperti pengalaman, umpan balik, pengamatan, prakiraan dan pertimbangan pakar. Meskipun demikian, pengambilan keputusan harus berdasarkan informasi yang memadai dan mempertimbangkan segala keterbatasan data atau model yang digunakan atau kemungkinan perbedaan pendapat antar pakar;
8. Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta diselaraskan dengan konteks internal dan eksternal Perseroan;
9. Manajemen Risiko memperhitungkan faktor manusia dan budaya, artinya manajemen risiko mengakui kapabilitas, persepsi, dan tujuan pihak-pihak eksternal dan internal yang dapat mendukung ataupun justru menghambat pencapaian tujuan Perseroan;
10. Manajemen Risiko bersifat transparan, artinya pelibatan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan secara tepat dan cepat dalam Perseroan di semua tingkatan diperlukan untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko tetap relevan dan mengikuti perkembangan. Pelibatan ini juga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk cukup terwakili dan diperhitungkan sudut pandangnya dalam menentukan kriteria risiko;
4. Risk Management assists in decision-making with adequate information. Risk Management also helps prioritize actions and differentiate various selection of action alternatives. In the end risk management can help in making decision whether a risk is acceptable or if managing a particular risk is adequate and effective;
5. Risk Management handles the aspects of uncertainty in decision-making and how to handle them;
6. Implementation of risk management is carried out with an approach that is systematic, structured and on-time that it contributes to the efficiency and consistent result, comparative and reliable;
7. Risk Management based on information selectively available, meaning that feedback for risk management process is based on the source of information such as experience, feedback, observation, forecast and expert consideration. Nevertheless, decision-making must be based on adequate information and takes into account all limited data or model used or the possibility of difference in opinion among experts;
8. Risk Management is adjusted to the objectives, business policies, size and complexity of the business, as well as aligned with internal and external context of the Company;
9. Risk Management calculates the human and cultural factors, which means that risk management recognizes the capabilities, perceptions and objectives of external and internal parties that may support or hinder the achievement of the Company's objectives;
10. Risk Management is transparent, meaning that stakeholders are involved in making decisions quickly and accurately at all levels of the Company as needed to ensure that Risk Management remains relevant and keeps up with development. Such involvement also allows stakeholders to be sufficiently represented and their views are taken into account in determining the risk criteria;

Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

11. Manajemen Risiko bersifat dinamis, interaktif, dan responsive terhadap perubahan karena dengan adanya perubahan ilmu pengetahuan, serta diterapkannya pemantauan dan peninjauan, risiko-risiko baru dapat bermunculan sedangkan risiko-risiko yang ada bisa berubah atau hilang. Oleh karena itu Perseroan harus memastikan bahwa manajemen risiko terus menerus merasakan dan menanggapi perubahan;
12. Manajemen Risiko memfasilitasi perbaikan dan pengembangan berkelanjutan Perseroan artinya Perseroan mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk memperbaiki tingkat kematangan Manajemen Risiko bersama aspek-aspek lain dalam Perseroan.

11. Risk Management is dynamic, interactive and responsive to change as with changes in science, and the implementation of monitoring and review, new risks can emerge while existing risks can change or disappear. Thus, the Company must ensure that risk management continuously feels and respond to change;
12. Risk Management facilitates improvement and sustainable development of the Company, meaning that the Company develops and implements strategy to improve the level of maturity of the Risk Management together with other aspects within the Company.

Identifikasi Jenis Risiko dan Upaya Mitigasi

Pada tahun 2025, Perseroan telah mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang relevan dengan kegiatan usaha serta menetapkan langkah-langkah mitigasi yang sesuai dengan profil risiko Perseroan. Identifikasi dan mitigasi risiko dilakukan secara berkala sebagai bagian dari penguatan pengendalian dan pengambilan keputusan yang *prudent*.

Identification of the Types of Risks and Efforts of Mitigation

In the year 2025, the Company identified various types of risk that are relevant with business activities as well as established the mitigation steps appropriate with the Company's risk profile. Identification and mitigation of the risks are carried out periodically as part of strengthening control and cautious decision making.

Batas Toleransi

Risk Tolerance

Sangat Tinggi Very High	Tinggi High	Sedang Medium	Rendah Low
1 Risiko 1Risk	6 Risiko 6 Risk	7 Risiko 7 Risk	7 Risiko 7 Risk
7 Top Risiko 7 Top Risk		14 Risiko 14 Risk	
Total 21 Risiko Total 21 Risk			

Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan secara berkelanjutan melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Upaya penguatan dilakukan melalui pengawasan yang melekat pada aktivitas operasional, penyempurnaan proses mitigasi, serta peningkatan koordinasi antar unit kerja dalam pengelolaan risiko.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sistem manajemen risiko Perseroan dinilai berjalan secara memadai dan mampu mendukung pencapaian kinerja Perseroan serta menjaga kesinambungan operasional di tengah dinamika bisnis dan perubahan lingkungan eksternal. Tinjauan atas efektivitas manajemen risiko menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan Perseroan dalam merespons risiko yang ada maupun potensi risiko baru secara tepat.

Pernyataan Dewan Komisaris Dan Direksi Atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko Tahun 2025

Dewan Komisaris dan Direksi berpendapat bahwa sistem manajemen risiko yang diterapkan Perseroan selama tahun 2025 telah berjalan secara efektif dan proporsional dengan karakteristik serta kompleksitas kegiatan usaha. Sistem tersebut dinilai mampu mereduksi risiko usaha, operasional, dan keuangan yang telah teridentifikasi, serta memberikan kerangka pengelolaan yang memadai dalam mengantisipasi potensi risiko baru yang dapat berdampak signifikan di masa mendatang.

Review on the Effectiveness of Risk Management System in 2025

Throughout the year 2025, the Company sustainably monitored and evaluated the effectiveness of the risk management system. Efforts to strengthen were carried out through supervision inherent in operational activities, improvement of mitigation processes, and increased coordination between work units in risk management.

Based on the evaluation results, the Company's risk management system was assessed as running adequately and capable of supporting the Company's performance achievement as well as maintaining operational continuity in the midst of business dynamics and changes in external environment. Review on the effectiveness of risk management is an important part in ensuring the Company's readiness to accurately respond to existing risks and potential new risks.

Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Adequacy of the Risk Management System in 2025

The Board of Commissioners and the Board of Directors view that the risk management system implemented by the Company during the year 2025 was running effectively and proportionally to the characteristics and complexity of business activities. The system was assessed as capable of reducing identified business, operational and financial risks, as well as provided adequate management framework in anticipating potential new risks that can impact significantly in the future.

Kepatuhan

Compliance

Perseroan menempatkan kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai kewajiban mendasar yang mengikat Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai. Kepatuhan dipahami sebagai bagian dari pengelolaan risiko yang apabila tidak dijalankan secara memadai dapat menimbulkan risiko kepatuhan, risiko reputasi, serta risiko lain yang berdampak pada keberlangsungan usaha Perseroan.

Untuk mengelola risiko tersebut, Perseroan menerapkan fungsi kepatuhan dengan pendekatan *ex-ante*, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan sebelum risiko kepatuhan terealisasi. Pendekatan ini diarahkan untuk mengurangi potensi pelanggaran ketentuan sejak tahap perencanaan kebijakan, penyusunan prosedur, hingga pelaksanaan kegiatan usaha.

Dalam rangka memastikan efektivitas fungsi kepatuhan, Perseroan membentuk Divisi Kepatuhan yang terpisah dari satuan kerja operasional. Divisi Kepatuhan menjalankan perannya melalui serangkaian strategi dan mekanisme yang bertujuan memastikan bahwa kebijakan, sistem, prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah selaras dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Profil Kepala Divisi Kepatuhan

Kepala Divisi Kepatuhan saat ini dijabat oleh Muhammad Irwan Ramdhan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 014/Kepdir-SDM/VI/2024.

Profil lengkap beliau telah diuraikan dengan rinci pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Profil Kepala Divisi.

Independensi Divisi Kepatuhan

Divisi Kepatuhan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Pengendali. Dengan demikian, Divisi Kepatuhan dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara objektif, bebas dari benturan kepentingan, serta menjaga independensi dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan di Perseroan.

The Company places compliance with provisions of the Financial Services Authority and other laws and regulations as fundamental obligations binding the Board of Commissioners, the Board of Directors and all employees. Compliance is understood as part of risk management that if not implemented adequately it may generate compliance risk, reputation risk, as well as other risks that impact the continuity of the Company's business.

To manage these risks, the Company implements compliance function with *ex-ante* approach, namely an effort of prevention before compliance risks materialized. This approach is directed to reducing potential violations of provisions from the policy planning stage, preparation of procedures, to implementation of business activities.

In the effort to ensuring the effectiveness of compliance function, the Company forms the Compliance Division separate from the operation work unit. The Compliance Division carries out its role through a series of strategies and mechanisms with the purpose to ensuring that policies, systems, procedures as well as business activities of the Company are in line with OJK provisions and applicable laws and regulations.

Profile of the Compliance Division

The position of the Head of the Compliance Division is currently held by Muhammad Irwan Ramdhan, appointed based on Decision Letter No. 014/Kepdir-SDM/VI/2024.

His complete profile is presented in detail in the Chapter on Company Profile, Sub-Chapter on Profile of Division Heads.

Independency of Compliance Division

The Compliance Division has no affiliation financially nor administratively, in share ownership, as well as in family ties with members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisor Board, members of the Board of Directors and the Controlling Shareholder. Thus, the Compliance Division implements its function and responsibilities objectively, free from conflict of interest, and maintain independency in implementing compliance supervision in the Company.

Kepatuhan

Compliance

Kewajiban Tugas Kepatuhan

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perseroan pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Perseroan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Perseroan;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Tahun 2025

Sepanjang tahun buku 2025, Divisi Kepatuhan melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan mandat yang ditetapkan oleh Perseroan. Adapun pelaksanaan tugas Divisi Kepatuhan selama tahun 2025 meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
3. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang didalamnya termasuk pengelolaan WBS dan UPG.
4. Ikut serta dalam Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) yang diselenggarakan oleh KPK.

Obligations of Compliance Duty

1. Make steps of action to support the creation of compliance culture in all of the Company's business activities at every level of the organization;
2. Identify, measure, monitor and control compliance risks by referring to the provisions of the Financial Services Authority that regulate risk management implementation for the Company;
3. Assess and evaluate the effectiveness, adequacy and compliance with policies, provisions, systems and procedures of the Company with the provisions of the laws and regulations;
4. Review and/or recommend updates and improvements of the policies, provisions, systems and procedures of the Company so as to be in line with the provisions of the Financial Services Authority and provisions of the laws and regulations;
5. Conduct efforts to ensure that policies, provisions, systems and procedures as well as the company's business activities are in alignment with provisions of the Financial Services Authority and provisions of the laws and regulations;
6. Carry out other duties related to compliance function.

Implementation of Compliance Duties in 2025

Throughout the year 2025, the Compliance Division carried out its functions and responsibilities in accordance with the mandate established by the Company. Implementation of the duties of the Compliance Division during the year 2025 included the following:

1. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) based on applicable provisions.
2. Implementation of the obligation to report the wealth of state officials (LHKPN).
3. Implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) which contains the management of WBS and UPG.
4. Participation in the World Anti-Corruption Day (HAKORDIA) organized by the Corruption Eradication Commission (KPK)

Perkara Hukum

Legal Cases

Litigasi dan Perkara Hukum Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menghadapi perkara hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi, dalam ranah perdata maupun pidana, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perseroan.

Selain itu, tidak terdapat perkara hukum, baik perdata maupun pidana, yang melibatkan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan.

Litigation and Legal Cases in 2025

During the year 2025, the Company did not face any legal cases, either litigation or non-litigation, in the civil or criminal realm, which had the potential to cause losses to the Company.

In addition, there were no legal cases, either civil or criminal, that involve members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.

Sanksi Administratif

Administrative Sanction

Sepanjang tahun 2025, Perseroan maupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak dikenakan sanksi administratif dalam aspek apa pun. Kondisi tersebut mencerminkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dijalankan secara konsisten dalam pengelolaan dan operasional Perseroan.

Throughout the year 2025, neither the Company nor members of the Board of Commissioners and the Board of Directors were the subject to administrative sanctions in any aspect. This condition reflects the implementation of Good Corporate Governance principles carried out consistently in the management and operation of the Company.

Kode Etik

Code of Conduct

Komitmen Pelaksanaan Kode Etik

Komitmen Perseroan dalam membangun lingkungan kerja yang berintegritas diwujudkan melalui penerapan Pedoman Perilaku atau Kode Etik (*Code of Conduct*) sebagai instrumen pengendalian perilaku organisasi. Kode Etik tersebut ditetapkan melalui Peraturan Direksi Nomor 007/Perdir/IX/2018 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Jamkrida Jakarta.

Commitment to the Implementation of the Code of Conduct

The Company's commitment to building a work environment with integrity is manifested through the implementation of the Code of Conduct as an instrument for organizational behaviour control. This Code of Conduct was established through the Regulation of the Board of Directors No. 007/Perdir/IX/2018 regarding Operating Standards and Code of Conduct Guidelines at PT Jamkrida Jakarta.

Kode Etik

Code of Conduct

Penyusunan dan penerapan Kode Etik ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017 Pasal 56, yang mewajibkan Lembaga Penjamin memiliki pedoman perilaku etis sebagai bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Kode Etik berfungsi sebagai rujukan perilaku yang mengatur standar etika, nilai, dan norma yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh insan Perseroan. Pedoman ini menjadi dasar pembentukan budaya kerja yang saling menghormati, profesional, dan bertanggung jawab, guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif.

Pokok-Pokok Kode Etik

Pedoman Perilaku Perseroan mencakup dua ruang lingkup utama, yaitu:

1. Etika Bisnis Perseroan.
2. Etika Kerja Karyawan.

Tujuan Kode Etik

Penyusunan dan penerapan Kode Etik bertujuan untuk:

1. Sebagai panduan yang harus dipatuhi bagi seluruh elemen Perusahaan dalam berperilaku, melakukan interaksi sehari-hari, dan menjadi landasan berpikir dalam proses pengambilan keputusan;
2. Turut aktif dalam menjalankan standar etika bisnis yang sejalan dengan prinsip GCG, khususnya di bidang penjaminan guna menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang positif, sehingga mendorong terciptanya budaya perusahaan dan meningkatkan nilai Perseroan;
3. Menjalin hubungan yang harmonis, sinergi, dan saling menguntungkan antara konsumen, mitra kerja, karyawan, dan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan PT Jamkrida Jakarta, berlandaskan prinsip korporasi yang sehat dan beretika.

Kode Etik Berlaku Untuk Seluruh Level Organisasi

Kode Etik berlaku secara mengikat bagi seluruh insan JAMKRIDA Jakarta tanpa pengecualian, mencakup Dewan Komisaris, Direksi, karyawan di seluruh jenjang, serta pemegang saham dan pihak lain yang memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan. Seluruh pihak tersebut diharapkan mematuhi Etika Bisnis dan Etika Kerja sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku secara konsisten.

Preparation and implementation of this Code of Conduct are in line with provisions of the Financial Services Authority No. 3/POJK.05/2017 Article 56, that requires Guarantee Institutions to retain a code of conduct guidelines as part of implementing Good Corporate Governance.

The Code of Conduct functions as behaviour reference that set ethical standards, values and norms that must be held high by all personnel of the Company. This guideline serves as basis for forming a work culture of mutual respect, professionalism and responsibility, in order to create a safe and conducive work environment.

Principles of the Code of Conduct

The Company's Code of Conduct covers two main scopes, namely as follows:

1. Company Business Ethics.
2. Employee Work Ethics.

Purpose of the Code of Conduct

Preparation and implementation of the Code of Conduct aim at the following purposes:

1. As guidelines that must be adhere to by all elements of the Company in behaving, conduct daily interactions, and serve as the basis of the mindset in the decision-making process;
2. Actively take part in applying business ethic standards that are in line with GCG principles, specifically in the field of guarantee in order to create and maintain positive work environment so as to encourage the forming of corporate culture and increase in value of the Company;
3. Establish harmonious relationships, synergy and mutually-beneficial with consumers, work partners, employees and other parties of interest (*stakeholders*) with PT Jamkrida Jakarta, based on sound and ethical corporate principles.

Applicable Code of Conduct for All Levels of the Organization

The Code of Conduct is bindingly applicable to all personnel of JAMKRIDA Jakarta with no exception to the Board of Commissioners, Board of Directors employees at all levels, as well as the shareholders and other parties with business relationship with the Company. All the above parties are expected to consistently comply with Business Ethics and Work Ethics as regulated in the Code of Conduct.

Kode Etik

Code of Conduct

Sosialisasi Kode Etik dan Upaya Penegakan

Perseroan melaksanakan sosialisasi Kode Etik secara berkelanjutan kepada seluruh karyawan melalui berbagai forum dan kesempatan, baik secara formal maupun informal. Pedoman Perilaku juga diperkenalkan sejak awal kepada karyawan baru dan dinyatakan secara tertulis dalam kontrak kerja. Setiap karyawan diwajibkan memahami, menyetujui, dan menerapkan Kode Etik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai bagian dari komitmen Perseroan terhadap penerapan tata kelola dan integritas organisasi. Pada tahun 2025, sosialisasi dilakukan melalui produk hukum PT Jamkrida Jakarta Persoda.

Socialization of the Code of Conduct and Enforcement Efforts

The Company sustainably conducts socialization of the Code of Conduct to all employees through various forums and opportunities, both formally and informally. The Code of Conduct was also introduced since the beginning to new employees and stated in writing in the work contract. Each employee is obligated to understand, agree and apply the Code of Conduct in performing daily duties as part of the commitment of the company to implementing governance and integrity of the organization. In 2025, socialization was carried out through the legal products of PT Jamkrida Jakarta.

Pemberian Kompensasi Jangka Panjang

Providing Long-Term Compensation

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan belum memiliki maupun menerapkan kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan atau karyawan. Perseroan juga belum menyelenggarakan program kepemilikan saham oleh karyawan maupun manajemen, termasuk *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) dan *Management Stock Ownership Program* (MSOP).

Until 31 December 2025, the Company has yet to retain and implement the policy on providing long-term compensation based on performance to the management and/or employees. The Company also has yet to organize stock ownership program for employees and management, including the *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) and *Management Stock Ownership Program* (MSOP).

Kebijakan Transparansi Kepemilikan Saham

Policy On Transparency Of Share Ownership

Perseroan menerapkan kebijakan transparansi kepemilikan saham yang mewajibkan seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk mengungkapkan kepemilikan saham pada Perseroan dan atau pada badan usaha lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, apabila kepemilikan tersebut mencapai 5 persen atau lebih. Kebijakan ini mengacu pada ketentuan Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Dewan Pengawas Syariah yang memiliki saham pada Perseroan maupun pada badan usaha lainnya. Informasi mengenai kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi juga telah diungkapkan pada Bab Profil Perusahaan, Subbab Informasi tentang Struktur Modal dan Pemegang Saham.

The Company implements the policy on the transparency of share ownership that requires all members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board to disclose share ownership in the Company and/or in other business entities, domiciled domestically or abroad, if such ownership reaches 5 percent or more. This policy refers to the provisions of Article 43 of the Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.05/2017 regarding Good Corporate Governance of Guarantee Institutions.

Throughout the year 2025, there were no members of the Board of Directors, the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board who own shares in the Company or any other business entity. Information on share ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors is also disclosed in the Chapter on Company Profile, Sub-Chapter on Information regarding Capital Structure and Shareholders.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Violation Reporting System

Dalam menghadapi dinamika usaha yang semakin kompleks, Perseroan memandang integritas dan kepatuhan sebagai prasyarat utama keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, pengelolaan Perseroan tidak hanya diarahkan pada pencapaian kinerja keuangan, tetapi juga pada perlindungan reputasi dan kepercayaan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya melalui praktik tata kelola yang bertanggung jawab.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Perseroan membangun dan mengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) dan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) sebagai mekanisme pengendalian internal untuk mendeteksi dan menangani potensi pelanggaran secara dini. WBS dan UPG dirancang untuk mendorong partisipasi aktif seluruh insan Perseroan dalam menjaga integritas organisasi dengan melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

Melalui penerapan WBS dan UPG, Perseroan menyediakan saluran pelaporan yang aman dan terjaga kerahasiaannya, sehingga pelapor dapat menyampaikan informasi secara bertanggung jawab tanpa rasa takut terhadap tindakan balasan. Keberadaan sistem ini menjadi bagian penting dalam penguatan budaya integritas dan pencegahan praktik yang bertentangan dengan prinsip GCG.

Ruang Lingkup Pengaduan

Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat digunakan untuk melaporkan berbagai dugaan pelanggaran, antara lain:

- tindakan kecurangan, penipuan, atau penggelapan;
- kelalaian yang berdampak pada kerugian Perseroan;
- kekerasan atau intimidasi di lingkungan kerja;
- pemerasan dan penyalahgunaan wewenang;
- penyalahgunaan narkoba dan zat terlarang;
- pelecehan dalam bentuk apa pun;
- perbuatan kriminal;
- pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan Kode Etik;
- tindakan yang membahayakan keselamatan kerja, keamanan, atau kepentingan Perseroan.

Pihak Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran

Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perseroan dilaksanakan oleh Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuaian (FKAP), yang bertanggung jawab untuk menerima, menelaah, dan menindaklanjuti laporan pengaduan sesuai dengan

In facing the increasingly complex business dynamics, the Company views integrity and compliance as a primary prerequisite for business continuity. For this reason, the management of the Company is not only directed towards financial performance achievement, but also on the protection of reputation and trust of the shareholders as well as other stakeholders through responsible governance practices.

As part of this effort, the Company develops and manages the Violation Reporting System (Whistleblowing System (WBS) and the Gratuity Management Unit (UPG) as the mechanisms of internal control to detect and handle potential violation early on. WBS and UPG are designed to encourage the active participation of all Company personnel in maintaining the organization's integrity by reporting alleged violations that occur within the Company environment, both by an individual as well as a group.

Through the implementation of the WBS and UPG, the Company provides a secured and confidentiality-maintained reporting channel, so that whistleblowers can responsibly submit information without feeling any fear of possible countermeasures. The presence of this system serves as an important part in strengthening the culture of integrity and in preventing practices that conflict with GCG principles.

Scope of Reporting

The Violation Reporting System may be used to report various alleged violations, among others are as follows:

- acts of fraud, deception or embezzlement;
- negligence that results in losses for the Company;
- violence or intimidation in the workplace;
- extortion and abuse of authority;
- abuse of narcotics and illegal substance;
- harassment in any form;
- criminal act;
- violations of laws and regulations and the Code of Conduct;
- actions that endanger occupational safety, security, or the interests of the Company

Management Party of the Whistleblowing System

The management of the Violation Reporting System in the Company is carried out by the Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP) responsible for receiving, analyzing and following-up on complaint reports in accordance with applicable

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Violation Reporting System

ketentuan dan prosedur yang berlaku. Komposisi Tim FKAP Perseroan adalah sebagai berikut:

provisions and procedures. The Company's FKAP Team composition is as follows:

Jabatan Position	Anggota Member
Dewan Pengarah Steering Committee	Komisaris Utama PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) President Commissioner of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)
Manajemen Puncak Top Management	Direktur Utama PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) President Director of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)
	Direktur PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) Director of PT Jamkrida Jakarta
Koordinator FKAP FKAP Coordinator	Kepala Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan (Perseroda) Head of the Risk Management & Compliance Division of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)
Sekretaris FKAP FKAP Secretary	Kepala Bagian Kepatuhan & Legal PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) Head of Compliance & Legal Section of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)
Anggota FKAP FKAP Member	Staf SPI PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) / SPI Staff of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)
	Staf SDM dan Umum PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) / HR Staff of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)
	Staf Kepatuhan dan Legal PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) / Staff of Compliance and Legal of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)
	Staf Keuangan & IT PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) / Staff of Finance & IT of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)
	Staf Sekretaris Perusahaan PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) / Staff of Corporate Secretary of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda)

Perlindungan Bagi Pelapor

Perseroan memberikan perlindungan kepada setiap pihak yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui WBS dan UPG. Perlindungan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan pelapor serta mendorong keberanian menyampaikan laporan secara bertanggung jawab.

Protection of the Whistleblower

The Company provides protection to each party that submits alleged violation report through the WBS and UPG. This protection is meant to guarantee the protection of the whistleblower as well as encourage the courage to responsibly submit reports.

Bentuk perlindungan yang diberikan Perseroan meliputi:

The forms of protection provided by the Company include the following:

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor;
 2. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan;
 3. Jaminan atas perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman, ataupun tindakan tidak menyenangkan lainnya dari pihak terlapor; serta
 4. Bagi pelapor internal, Perseroan memberikan jaminan perlindungan terkait tidak dikenai:
 - a. Pemecatan;
 - b. Penurunan jabatan atau pangkat;
 - c. Pelecehan atau diskriminasi dalam bentuk apapun; dan
 - d. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).
1. Guarantee of confidentiality of the whistleblower's identity;
 2. Guarantee of confidentiality of the content of the submitted report;
 3. Guarantee of protection against possible threat, intimidation, punishment, or other unpleasant actions from the reported party; and
 4. For internal whistleblowers, the Company provides protection guarantees regarding:
 - a. Dismissal;
 - b. Demotion;
 - c. Harassment or discrimination in any form; and
 - d. Adverse notes in their personal file record.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Violation Reporting System

Media Penyampaian Laporan Pelanggaran

Seluruh pihak yang memiliki informasi terkait dugaan pelanggaran dapat menyampaikan laporan melalui media berikut:

1. Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran dengan mengisi formulir elektronik (*e-Form*) yang tersedia di situs web resmi Perseroan. Formulir tersebut dapat diakses langsung melalui tautan (link) berikut:

Formulir Elektronik | Electronic Form
www.jamkrida-jakarta.co.id/whistleblowing-system/

2. Pelapor juga dapat menyampaikan laporan pelanggaran melalui surat elektronik (e-mail) dengan menuliskan subjek "WBS" yang ditujukan kepada Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dengan *e-mail address* sebagai berikut:

Penulisan Surat Elektronik | Written Electronic Letter
wbs@jamkrida-jakarta.co.id
upg@jamkrida-jakarta.co.id

3. Jika laporan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk surat, maka pelapor dapat menyampaikan surat tersebut dalam amplop tertutup dengan memberi kode WBS pada bagian kanan atas amplop. Surat dapat ditujukan kepada Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dengan alamat sebagai berikut:

Surat Tertulis | Written Letter
PT Jamkrida Jakarta (Persero)
Gedung Jaya Lantai 3,
Jl. M.H. Thamrin No.12, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng
Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta - 10340

Media for Submission of Violation Reports

All parties with information related to alleged violation may submit the report through the following media:

1. A whistleblower may submit a report on alleged violation by filling out an e-Form available in the Company's official website. The form may be accessed directly through the following link:

2. The Whistleblower may also submit report of violation through e-mail by writing the subject "WBS" addressed to the Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP) with the e-mail address as follows:

3. If report of violation is submitted in a letter form, then the whistleblower can submit the report in an closed envelop by stating the code WBS on the right top of the envelope. The letter may be addressed to the Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP) with the following address:

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Violation Reporting System

Prosedur Penanganan Laporan Pelanggaran

Setiap laporan pelanggaran yang diterima melalui media pelaporan akan dikelola oleh Tim FKAP. Laporan tersebut diverifikasi dan dikategorikan berdasarkan substansi pelanggaran dan pihak terlapor, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terlapor merupakan anggota Direksi, pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya akan dilakukan oleh Dewan Komisaris;
2. Jika terlapor merupakan anggota Dewan Komisaris maupun anggota Komite pendukung Dewan Komisaris, pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya akan dilakukan oleh Direksi, dengan mempertimbangkan keterlibatan Pemegang Saham jika diperlukan;
3. Setiap pelapor berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaporannya. Oleh karena itu, dalam laporannya, pelapor diharapkan memberikan informasi mengenai identitas dirinya dan media komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan perkembangan pelaporannya;
4. Komunikasi antara Perseroan dengan Pelapor akan dilakukan melalui Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang bertanggung jawab terhadap mekanisme dan prosedur WBS. Dalam komunikasi ini, Pelapor juga akan memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, termasuk apakah kasus tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak.

Mekanisme Pencatatan Laporan Pelanggaran

Pencatatan laporan pelanggaran dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Direksi melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Laporan pelanggaran yang diterima oleh Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dalam bentuk *e-Form*, e-mail, surat, atau media komunikasi lainnya dicatat sesuai dengan sistem administrasi yang berlaku;
2. Laporan pelanggaran yang disampaikan secara lisan/verbal oleh Pelapor harus diterima dan dicatat oleh Tim WBS beserta lampiran bukti-bukti terjadinya pelanggaran;
3. Laporan pelanggaran yang telah dicatat kemudian ditelaah untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan langkah-langkah tindak lanjut penanganan selanjutnya. Seluruh penelaahan laporan pelanggaran ini dilakukan oleh Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).

Procedure in Handling Violation Report

Every report of violation received through the reporting media will be managed by the FKAP Team. This report must be verified and categorized based on the violation substance and the whistleblower, with provisions as follows:

1. If the reported party is a member of the Board of Directors, managing the report and its follow-up is handled by the Board of Commissioners;
2. If the reported party is a member of the Board of Commissioners or member of the Committee supporting the Board of Commissioners, handling the report and its follow-up is to be carried out by the Board of Directors, with consideration of the Shareholders involvement if necessary;
3. Each report has the right to receive information on the progress of the reporting. For this reason, in its reporting, the whistleblower is expected to provide information on its identity and the communication media that can be used to deliver the progress of the reporting;
4. Communication between the Company and the Whistleblower can be carried out through the Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP) responsible for the mechanism and procedure of the WBS. In this communication, the Whistleblower may also receive information on the handling of the case being reported, including if the case is being followed-up or not.

Mechanism of Documenting Violation Report

Documentation of the violation report is conducted by the official appointed by the Board of Directors through the following mechanism:

1. Report of violation received by the Anti-Bribery Compliance Team (FKAP) in the form of e-Form, e-mail, letter, or other communication media recorded in accordance with applicable administration system;
2. Report violation submitted verbally by the Whistleblower must be received and recorded by the WBS Team together with attached evidence of how the violation occurred;
3. Documented report of violation is then analysed for identification of the issue and formulation of the follow-up steps of handling the case. All analysis of this violation report is carried out by the Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP).

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Violation Reporting System

Tahapan penelaahan laporan yang dilakukan oleh Tim FKAP adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan inti permasalahan;
2. Meneliti kelengkapan bukti-bukti pendukung;
3. Melengkapi data/informasi yang diperlukan;
4. Melakukan analisis berdasarkan peraturan perundangundangan yang terkait;
5. Menetapkan hasil penelaahan dan penanganan selanjutnya.

Kategori Pelaporan

Setelah Tim FKAP melakukan pencatatan dan penelaahan awal atas laporan pelanggaran yang diterima, langkah berikutnya adalah melakukan pengelompokan laporan berdasarkan kejelasan identitas pelapor dan kecukupan substansi laporan. Kategorisasi ini digunakan sebagai dasar penentuan mekanisme dan prioritas tindak lanjut. Adapun kategori pelaporan yang diterapkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan pelanggaran dari Karyawan dan Pemangku Kepentingan dengan identitas Pelapor jelas dan substansi/materi laporan logis dan memadai harus segera dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran informasinya;
2. Pelaporan pelanggaran dari Karyawan dan Pemangku Kepentingan dengan identitas Pelapor tidak jelas, namun substansi/materi laporan logis dan memadai harus segera dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran informasinya;
3. Pelaporan pelanggaran dari Karyawan dan Pemangku Kepentingan dengan identitas Pelapor jelas, namun substansi/materi laporan tidak memadai perlu dilakukan klarifikasi dan konfirmasi sebelum dilakukan pemeriksaan;
4. Pelaporan pelanggaran dari Karyawan dan Pemangku Kepentingan tetapi permasalahannya yang sama, sedang, atau telah dilakukan pemeriksaan, dijadikan tambahan informasi bagi proses pembuktian.

Jumlah Laporan Pelanggaran Tahun 2025

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan melalui Tim FKAP tidak menerima laporan pelanggaran yang disampaikan melalui seluruh media pelaporan yang tersedia.

Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menerima laporan pelanggaran. Dengan demikian, tidak terdapat laporan yang memerlukan proses tindak lanjut pada periode pelaporan tersebut.

The stages of report analysis conducted by the FKAP Team are as follows:

1. Formulate the core issue;
2. Examine the completeness of the supporting evidence;
3. Complete data/information required;
4. Conduct analysis based on related laws and regulations;
5. Establish the analysis results and the subsequent handling.

Reporting Category

Following the FKAP Team's documentation and initial analysis of the report of violation received, the following step is to categorized the report based on the clarity of the whistleblower's identity and the adequacy of the report's substance. This categorization is used as basis of determining the mechanism and follow-up priority. The report category applied by the Company is as follows:

1. Reporting of violations by Employees and Stakeholders with clear identity of the whistleblower and the logical and adequate substance/material of the report must be immediately investigated to prove the truth of the information.
2. Reporting of violation by Employee and Stakeholder with unclear identity of the Whistleblower, however the substance/material of the report is logical and adequate must be immediately followed up with investigation to prove the truth of the information;
3. Reporting of violation from Employee and Stakeholder with clear identity of the Whistleblower, yet the substance/material of the report is not adequate, must be clarified and confirmed before investigation is conducted;
4. Reporting of violation from Employee and Stakeholder yet of the same issue/problem, in the process of or has been examined, is used as additional information for proof process.

Number of Violation Report in 2025

Until 31 December 2025, through FKAP Team, the company did not receive any report of violation submitted through all reporting media available.

Follow-Up on Violation Report

Throughout the year 2025, the Company did not receive any violation report. Thus, there were no report which required follow-up process during the reporting period.

Kebijakan Anti-Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Policy On Anti-Corruption And Gratuity Control

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas organisasi, kepercayaan publik, serta keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, Perseroan menegaskan komitmennya untuk mendukung secara penuh upaya Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjunjung tinggi nilai integritas dan akuntabilitas, Perseroan memandang kebijakan anti-korupsi dan pengendalian gratifikasi sebagai elemen fundamental dalam penerapan prinsip GCG.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan secara sah, etis, jujur, dan bertanggung jawab, serta selaras dengan etika bisnis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, Pedoman Perilaku atau Kode Etik (*Code of Conduct*) berperan sebagai landasan utama bagi Perseroan dalam membentuk dan memelihara budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kepatuhan.

Penerapan kebijakan anti-korupsi juga mencerminkan keseriusan Perseroan dalam menjaga reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Perseroan menghargai setiap bentuk partisipasi dan kontribusi dari pihak internal maupun eksternal yang turut mendukung upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengungkapan tindakan korupsi, sesuai dengan kebijakan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Melalui kebijakan ini, Perseroan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bermoral, transparan, dan terbebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola yang sehat.

Penerapan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan anti-korupsi, Perseroan menerapkan kebijakan pengendalian gratifikasi dengan mematuhi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi. Dalam peraturan tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yang meliputi uang, barang, rabat atau potongan harga (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, serta fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik.

Corruption is an extraordinary crime with systemic impact on the organization's stability, public's trust, and development sustainability. For this reason, the Company affirms its commitment to fully support the Government of Indonesia efforts in preventing and eradicating the practices of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN). As a Regionally-Owned Enterprise (BUMD) that holds high integrity and accountability, the Company views that anti-corruption and gratuity control policies as fundamental elements in implementing GCG principles.

This commitment is manifested through the implementation of business activities carried out legally, ethically, honestly, and responsibly, as well as in line with business ethics and provisions of applicable laws and regulations. In this context, the Code of Conduct serves as the main fundamental for the Company in forming and maintaining work culture of integrity, professional, and oriented towards compliance.

Implementation of anti-corruption policies also reflect the Company's seriousness in maintaining the reputation and trust of stakeholders. The Company appreciates every form of participation and contribution from both internal and external parties that support efforts to prevent, eradicate and disclose acts of corruption, in accordance with established policies and mechanisms. Through this policy, the Company takes active role in creating a moral, and transparent business environment free from practices that conflict with sound governance principles.

Implementation of Gratuity Control Policy

As an integral part of the anti-corruption policies, the Company implements gratuity control policies by complying with the Regulation of the Governor of DKI Jakarta Province No. 1 of Year 2020 regarding Gratuity Control System. In this regulation, gratuity is defined as providing, in its broadest term, that includes money, goods discounts, commission, interest free loan, travel ticket, accommodation facilities, travel, free medical treatment, and other facilities, whether received domestically or abroad, which are carried out with or without the use of electronic means.

Kebijakan Anti-Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Policy On Anti-Corruption And Gratuity Control

Penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi merupakan wujud komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam mendukung kebijakan anti-korupsi sekaligus memperkuat implementasi GCG. Kebijakan ini dirancang untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan serta memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha dan hubungan kerja dijalankan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen Perseroan dalam penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi diwujudkan melalui implementasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) yang terintegrasi dalam sistem manajemen operasional Perseroan. Penerapan SMAP merupakan kewajiban yang mengikat seluruh pemangku kepentingan Perseroan dan menjadi langkah konkret dalam menjamin integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam seluruh aspek kegiatan bisnis, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bagian dari upaya pembentukan budaya kerja yang berintegritas di lingkungan BUMD, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong implementasi SMAP pada BUMD di Provinsi DKI Jakarta. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui kerja sama antara KPK dan Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan evaluasi dan pemantauan atas penerapan SMAP pada BUMD, termasuk PT JAMKRIDA Jakarta.

Melalui penerapan SMAP secara konsisten dalam seluruh kegiatan usaha, Perseroan berupaya membangun reputasi dan kredibilitas sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berintegritas, adil, dan memiliki daya saing yang berkelanjutan. Secara lebih luas, penerapan SMAP pada BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat praktik korupsi di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Implementation of gratuity control policy is a manifestation of the Company's commitment and strategic step in supporting anti-corruption policy and at the same strengthen GCG implementation. This policy is designed to prevent the occurrence of conflict of interest and ensure that all business activities and work relationships are carried out professionally, objectively, and transparently in accordance with applicable provisions.

The Company's commitment to implementing gratuity control policy is manifested through the implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) integrated in the Company's operational management system. SMAP implementation is an obligation binding all Company stakeholders and serves as a concrete step to assuring integrity, transparency, as well as accountability in all aspects of business activities, in line with applicable laws and regulations.

As part of the effort to form a work culture with integrity in the BUMD environment, the Corruption Eradication Commission (KPK) encourages the implementation of SMAP in BUMD in the Province of DKI Jakarta. One of the forms of such support is manifested through a cooperation between KPK and BUMD Development Agency of DKI Jakarta Province in conducting evaluation and monitoring of SMAP implementation in BUMD, including at PT JAMKRIDA Jakarta.

Through consistent implementation of SMAP in all business activities, the Company strives to build a reputation and credibility as a Regionally-Owned Enterprise with integrity, fair, and sustainably competitive.

In a broader term, implementation of SMAP in BUMD within the DKI Jakarta Province Government is expected to contribute in reducing the level of corruption practice in Indonesia, specifically in DKI Jakarta area.

Kebijakan Anti-Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Policy On Anti-Corruption And Gratuity Control

Implementasi SMAP

Pada tahun 2023, Perseroan telah memperoleh Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP). ISO 37001:2016 merupakan standar internasional yang dikembangkan untuk memberikan kerangka kerja dalam menetapkan, menerapkan, memelihara, serta meningkatkan sistem manajemen anti-penyuapan secara terstruktur dan terintegrasi. Standar ini dirancang untuk membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, serta menangani risiko penyuapan yang berpotensi timbul dalam seluruh aktivitas operasional Perseroan.

ISO 37001:2016 menekankan penerapan sistem manajemen anti-penyuapan berbasis risiko, sehingga memungkinkan Perseroan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko penyuapan secara proporsional sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan skala kegiatan usaha. Melalui standar ini, Perseroan memperoleh pedoman yang komprehensif dalam mengendalikan praktik penyuapan, termasuk melalui penetapan kebijakan anti-penyuapan, penguatan mekanisme pengendalian, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan seluruh insan Perseroan.

Penerapan SMAP ISO 37001:2016 memberikan sejumlah manfaat strategis bagi Perseroan, antara lain:

1. Memperkuat sistem manajemen operasional;
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
3. Meningkatkan reputasi Perseroan;
4. Meningkatkan kredibilitas organisasi;
5. Menciptakan organisasi yang bertanggung jawab.

Melalui implementasi SMAP, Perseroan menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang terhadap segala bentuk praktik penyuapan yang dapat merugikan Perseroan dan pihak-pihak terkait lainnya. Praktik bisnis yang beretika dan bersih di Perseroan dilaksanakan atas dasar kebijakan anti-penyuapan dengan cara:

1. Menerapkan Prinsip *Zero Tolerance* terhadap segala bentuk penyuapan di dalam segala aspek kegiatan bisnis Perseroan, termasuk juga dalam hubungan bisnis dengan rekan bisnis;
2. Selalu mematuhi ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku, serta melakukan evaluasi kepatuhan terhadap pelaksanaannya;

SMAP Implementation

In the year 2023, the Company acquired the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP). ISO 37001:2016 is an international standard developed to provide the framework for determining, implementing, maintaining and improving anti-bribery management system that is structured and integrated. This standard is designed to help organizations to prevent, detect and handle risks of bribery that potentially arise in all operational activities of the Company.

ISO 37001:2016 emphasizes that anti-bribery management system is risk-based, allowing the Company to identify, evaluate and manage bribery risks proportionally in accordance with the characteristics, complexity and scale of business activities. Through such standard, the Company obtains a comprehensive guideline for bribery practice control, including through the establishment of anti-bribery policies, strengthening control mechanisms, and increasing awareness and compliance of all Company personnel.

Implementation of SMAP ISO 37001:2016 provides a number of strategic benefits for the Company, among others are as follows:

1. Strengthen operational management system;
2. Increase compliance with regulations;
3. Improve Company reputation;
4. Increase credibility of the organization;
5. Create a responsible organization.

Through SMAP implementation, the Company affirms its commitment to not provide space for any form of bribery practices that could harm the company and other related parties. Ethical and clean business practices in the Company are carried out on the basis of anti-bribery policy by way of the following:

1. Apply the principle of Zero Tolerance towards all forms of bribery in all aspects of the Company's business activities, including business relations with business partners;
2. Always comply with applicable anti-bribery provisions and/or laws and regulations as well as conduct evaluation of compliance towards their implementation;

Kebijakan Anti-Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Policy On Anti-Corruption And Gratuity Control

3. Menyusun, menerapkan dan memenuhi persyaratan SMAP yang dapat mencapai Sasaran Anti Penyuapan;
4. Mendorong setiap insan Perseroan berpartisipasi dalam menyampaikan dengan itikad baik dan berlandaskan keyakinan yang wajar terhadap penyuapan dan/atau potensi penyuapan serta menjamin tidak ada pembalasan terhadap insan Perseroan melakukan hal tersebut;
5. Melakukan perbaikan dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap SMAP untuk menjamin bahwa kebijakan masih relevan dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Perseroan;
6. Membentuk FKAP yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan penerapan SMAP berjalan efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan;
7. Memastikan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran atas kebijakan SMAP sesuai ketentuan Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Prepare, implement and comply with SMAP requirements that can reach the Targets of Anti-Bribery;
4. Encourage every Company personnel to participate in conveying in good faith and based on reasonable belief regarding bribery and/or potential bribery and guarantee that there will be no retaliation against Company personnel who do so.
5. Conduct sustainable improvement and evaluation on SMAP to assure that the policy remains relevant and in line with the goals set-forth by the Company;
6. Establish FKAP with the responsibility and authority to ensure the implementation of SMAP is effective to achieving the set targets;
7. Ensure that sanctions are imposed for any violation of SMAP policies in accordance with Company provisions and/or applicable laws and regulations.

Sosialisasi Anti-Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan secara aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi Anti-Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh insan Perseroan melalui website Internal Perseroan, dan melalui sosialisasi secara langsung kepada Karyawan dan Manajemen. Kegiatan ini ditujukan untuk membangun lingkungan kerja yang bersih dari praktik korupsi dan gratifikasi, sekaligus memperkuat pemahaman seluruh karyawan terhadap kebijakan anti-korupsi yang berlaku di Perseroan.

Melalui sosialisasi tersebut, seluruh insan JAMKRIDA Jakarta memperoleh pembekalan mengenai kebijakan anti-korupsi, upaya pencegahan dan pemberantasannya, serta pemahaman yang lebih mendalam terkait pengendalian gratifikasi dan mekanisme penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Sosialisasi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan individu, tetapi juga diarahkan untuk menumbuhkan budaya organisasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas, dan akuntabilitas.

Dengan melibatkan seluruh lapisan organisasi, Perseroan berharap kegiatan sosialisasi ini dapat membangun kesadaran kolektif yang kuat akan pentingnya menjaga integritas, menghindari praktik korupsi, serta menerapkan pengendalian gratifikasi secara konsisten dalam setiap aspek kegiatan bisnis Perseroan.

Socialization on Anti-Corruption and Gratuity Control in 2025

Throughout the year 2025, the Company actively carries out socialization activities on Anti-Corruption and Gratuity Control to all personnel of the Company through the Company's internal website, and through direct socialization to Employees and the Management. This activity is intended to build a work environment that is free from corrupt practices and gratification, while strengthening the understanding of all employees regarding the anti-corruption policies in force in the Company.

Through this socialization, all JAMKRIDA Jakarta personnel receive training on anti-corruption policies, prevention and eradication efforts, as well as in-depth understanding of controlling gratuity and the mechanisms for implementing in daily activities. Such socialization not only focus on enhancing individual knowledge, but also directed to building organizational culture that holds high transparency, integrity and accountability.

By involving all levels of the organization, the company hopes that such socialization activities can form a strong collective awareness on the importance of maintain integrity, prevent corruption practices and apply gratuity control consistently in each aspect of the Company's business activities.

Keterbukaan Informasi dan Akses Informasi

Information Disclosure And Access To Company Information

Perseroan menjalankan komitmen keterbukaan informasi dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut diwujudkan melalui penyampaian informasi secara berkala dan terstruktur mengenai aktivitas usaha, kinerja operasional, serta kondisi keuangan Perseroan kepada publik dan pemangku kepentingan.

Penyampaian informasi ini diarahkan untuk memastikan bahwa masyarakat dan para pemangku kepentingan memperoleh akses yang memadai terhadap informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipahami, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melalui penerapan keterbukaan informasi yang konsisten, Perseroan berupaya membangun kepercayaan publik serta menjaga integritas pengelolaan perusahaan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Media Penyampaian Informasi

Untuk mendukung keterbukaan informasi yang menyeluruh, komunikasi yang efektif, serta hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan, Perseroan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi resmi. Media yang digunakan mencakup situs web perusahaan, surat elektronik korporat, jaringan intranet, media sosial, serta media cetak, yang masing-masing berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Situs Web

Perseroan menyediakan akses informasi yang mudah bagi pemangku kepentingan, masyarakat, dan investor melalui situs web resmi Perseroan. Melalui platform ini, tersedia berbagai informasi penting, antara lain kinerja keuangan Perseroan dalam lima tahun terakhir, siaran pers, informasi tanggung jawab sosial perusahaan, laporan tahunan, laporan keuangan, serta informasi produk dan jasa yang disediakan oleh Perseroan.

Pengelolaan situs web Perseroan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Situs Web yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan keterbukaan informasi kepada pihak eksternal. Tim ini secara berkala melakukan pembaruan konten agar informasi yang disajikan tetap relevan, mutakhir, dan akurat. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pengelola Situs Web berada di bawah pengawasan langsung Sekretaris Perusahaan sebagai bagian dari fungsi tata kelola dan keterbukaan informasi.

Situs web resmi Perseroan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan melalui tautan resmi Perseroan.

The Company carries out its commitment to information disclosure with the guidance of Law No. 14 of Year 2008 regarding Public Information Disclosure. Compliance with these provisions is manifested through regular and structured disclosure of information on company activities, operational performance and Company financial conditions to the public and stakeholders.

Delivering information is directed to ensuring that the public and stakeholders receive adequate access to information that is relevant, accurate and understandable, in line with the principles of transparency and accountability. Through consistent implementation of information disclosure, the Company strives to build public's trust and maintain integrity in managing the company in accordance with the mandate stated in applicable laws and regulations.

Information Disclosure

To support the overall disclosure of information, effective communication and sustainable relationship with stakeholders, the Company takes advantage of various official communication channels. The media used include the Company's website, corporate electronic mail, intranet network, social media as well as print media, where each function as means of delivering information according to the characteristics and needs of stakeholders.

Website

The Company provides easy access to information for stakeholders, the public and investors through the Company official website. Through this platform, various material information is available, among others, the Company's financial performance for the last five years, press release, corporate social responsibility, annual reports, financial statements as well as information on products and services provided by the Company.

Management of Company website is carried out by the Website Management Team responsible for ensuring compliance with provisions on information disclosure to external parties. This Team regularly updates the content so that information presented remains relevant, up-to-date, and accurate. In carrying out its duties, the Website Management Team work under the direct supervision of the Corporate Secretary as part of governance and information disclosure functions.

The Company's official website may be accessed by all stakeholders through the Company official link.

Keterbukaan Informasi dan Akses Informasi

Information Disclosure And Access To Company Information

Informasi yang tersedia pada situs web Perseroan disusun dalam beberapa bagian utama sebagai berikut:

1. Beranda
2. Profil:
 - a. Tentang Kami;
 - b. Sejarah Perusahaan;
 - c. Filosofi Logo;
 - d. Nilai Perusahaan;
 - e. Struktur Organisasi;
 - f. Tata Kelola Perusahaan;
 - g. Manajemen;
 - h. Produk Hukum;
 - i. Skema Pengajuan Penjaminan;
 - j. Unit Usaha Syariah.
3. Produk:
 - a. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
 - b. Penjaminan Multiguna;
 - c. Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Penjaminan Kredit Usaha;
 - e. Penjaminan Kredit Mikro dan Kecil;
 - f. Penjaminan Kredit Pemilikan Rumah;
 - g. *Surety Bond*;
 - h. *Custom Bond*;
 - i. Kontra Bank Garansi;
 - j. Anjak Piutang.
4. Informasi:
 - a. Berita
 - b. Laporan Keuangan
 - c. Legalitas Perusahaan
 - d. Pemegang Saham
 - e. Karir
 - f. PPID
 - g. Kontak Kami
5. Pengaduan:
 - a. WBS System
 - b. Unit Pelaporan Gratifikasi
6. Sosial Media:
 - a. LinkedIn
 - b. Instagram
 - c. X/Twitter
 - d. Facebook
7. Hubungi Kami:

Alamat: Gedung Jaya Lantai 3, Jl. M.H. Thamrin No.12, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta – 10340
Phone: (021) 31927872
Email: mail@jamkrida-jakarta.co.id

Information available on the Company's website is structured in several main sections as follows:

1. Home
2. Profile:
 - a. About Us;
 - b. Company History;
 - c. Logo Philosophy;
 - d. Corporate Values;
 - e. Organizational Structure;
 - f. Corporate Governance;
 - g. Management;
 - h. Legal Products;
 - i. Guarantee Proposal Scheme;
 - j. Sharia Business Unit.
3. Product:
 - a. People's Business Credit Guarantee;
 - b. Multipurpose Guarantee;
 - c. Construction Credit Guarantee and Procurement of Goods/Services;
 - d. Business Credit Guarantee;
 - e. Micro and Small Credit Guarantee;
 - f. Home Ownership Credit Guarantee
 - g. Surety Bond;
 - h. Custom Bond;
 - i. Counter Bank Guarantee;
 - j. Factoring
4. Information:
 - a. News;
 - b. Financial Report;
 - c. Company Legality;
 - d. Shareholders;
 - e. Career;
 - f. PPID;
 - g. Contact Us
5. Complaint:
 - a. WBS System
 - b. Gratuity Reporting Unit
6. Social Media:
 - a. LinkedIn
 - b. Instagram
 - c. X/Twitter
 - d. Facebook
7. Contact Us:

Address: Gedung Jaya, 3rd Floor, Jl. M.H. Thamrin No.12, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta – 10340
Phone: (021) 31927872
Email: mail@jamkrida-jakarta.co.id

Keterbukaan Informasi dan Akses Informasi

Information Disclosure And Access To Company Information

Surat Elektronik

Untuk mendukung efektivitas komunikasi internal, Perseroan memanfaatkan surat elektronik korporat yang terintegrasi dalam jaringan intranet perusahaan. Penggunaan surat elektronik ini memungkinkan antar-unit kerja melakukan korespondensi secara lebih efisien dan terdokumentasi dengan baik, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kertas. Inisiatif tersebut merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung penerapan konsep *paperless* melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

Media Sosial

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, media sosial dimanfaatkan sebagai salah satu sarana strategis dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan akses publik terhadap aktivitas Perseroan. Melalui media sosial, Perseroan dapat menyampaikan informasi terkini secara cepat, berinteraksi dengan pemangku kepentingan, memperluas jangkauan komunikasi dengan investor dan masyarakat, serta mempublikasikan berbagai capaian dan aktivitas perusahaan.

Di sisi lain, media sosial juga menjadi sarana bagi Perseroan untuk memantau isu-isu yang berkembang di masyarakat serta memperoleh gambaran mengenai persepsi dan reputasi Perseroan di ruang publik. Dengan demikian, media sosial berfungsi sebagai kanal komunikasi dua arah yang mendukung keterbukaan informasi dan pengelolaan reputasi perusahaan. Hingga 31 Desember 2025, Perseroan mengelola beberapa akun media sosial resmi, antara lain:

Electronic Letter

To support the effectiveness of internal communication, the Company takes advantage of the corporate electronic letter integrated within the company intranet network. The use of this electronic letter enables inter-work units to carry out correspondence more efficiently and well documented, while reducing dependence on paper use. This initiative is part of the Company's efforts in increasing operational efficiency and enforce the implementation of the paperless concept through the optimal use of information technology.

Social Media

In line with information technology development, the social media is utilized as one of the strategic means to improve information disclosure and public's access to Company activities. Through the social media, the Company can deliver up-to-date information accurately, interact with stakeholders, expand communication reach with investors and the public, as well as publicize various achievements and activities of the company.

On the other hand, social media also serve as means for the Company to monitor issues that arise in public and obtain the big picture how the perception and reputation of the Company are in the public space. Thus social media functions as a two-way communication channel that encourages information disclosure and management of the company reputation. Until 31 December 2025, the Company managed several social media accounts, including the following:



Facebook
Jamkrida Jakarta



X (Twitter)
@JamkridaJakarta



Instagram
@jamkridajakarta



LinkedIn
Jamkrida Jakarta

Berangkat dari pemahaman akan pentingnya transparansi serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, Perseroan senantiasa menjaga ketersediaan informasi yang terbuka, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan. Upaya ini menjadi bagian integral dari pemenuhan kewajiban kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, sekaligus memperkuat implementasi GCG secara konsisten di Perseroan.

Starting with the understanding of the importance of transparency and the easy access to information for the public and stakeholders, the Company always maintain the availability of information that is transparent, relevant, on-time and reliable. This effort serves as an integral part of fulfilling compliance obligations with applicable provisions, at the same time strengthen consistent GCG implementation .



Tanggung Jawab **Sosial Perusahaan**

Corporate Social Responsibility



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility



Pasar Tebet Barat
Jakarta Selatan



Perseroan mempraktikkan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan pengembangan yang bertanggung jawab sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan dan dibuat berlandaskan pada keseimbangan antara aspek-aspek **triple bottom line (People, Planet, profit)**.

The Company practices sustainable development through a responsible development approach in line with the Company's vision, mission, and values, established based on a balance among the triple bottom line aspects (People, Planet, Profit).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi strategis dalam mendukung akses pembiayaan dan penguatan UMKM, Perseroan memandang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari mandat pembangunan daerah. Program TJSL dirancang untuk memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kapasitas pelaku usaha, serta penciptaan dampak sosial yang berkelanjutan.

Perseroan mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan pengembangan yang bertanggung jawab dan selaras dengan visi, misi, serta nilai-nilai Perseroan. Pendekatan tersebut berlandaskan pada keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana tercermin dalam konsep *triple bottom line* (People, Planet, dan Profit).

Sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan, Perseroan juga berupaya menumbuhkan kesadaran terhadap perlindungan lingkungan hidup, baik di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Upaya peningkatan kesadaran lingkungan bagi pemangku kepentingan eksternal diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sepanjang tahun 2025. Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemangku kepentingan, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di Indonesia.

Pelaksanaan TJSL Perseroan sejalan dengan amanat Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang menegaskan kewajiban perusahaan sebagai subjek hukum untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

KOMITMEN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM CSR

Perseroan memandang keberlanjutan usaha sebagai hasil dari keseimbangan antara pencapaian kinerja ekonomi dan kontribusi sosial yang diberikan kepada masyarakat serta lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan Perseroan tidak semata ditentukan oleh indikator finansial, melainkan juga oleh kemampuan Perseroan dalam menciptakan manfaat jangka panjang yang dirasakan secara nyata oleh pemangku kepentingan.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY

As a Regional-Owned Enterprise that carries out a strategic function to support financing access and reinforces MSME, the Company views implementation of Social and Environmental Responsibility (SER) as an integral part of the mandate for regional development. The SER program is designed to provide real contribution for the improvement of community welfare, strengthening the capacity of business actors, as well as generating sustainable social impact.

The Company implements sustainable development principle through a responsible development approach, in line with corporate vision, mission as well as values. This approach is based on the balance between economic, social and environmental aspects as reflected in the triple bottom line concept of People, Planet and Profit.

As part of sustainability commitment, the Company also strives to raise the awareness on the protection of the environment, both within and outside of the organization's environment. Effort to improve environmental awareness for external stakeholders is manifested through the implementation of various CSR activities throughout the year 2025. This initiative is part of the Company's commitment to creating added values that are sustainable for the stakeholders, and at the same time supports the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia.

Implementation of the company's SER program is in line with the mandate of the Government of the Republic of Indonesia as stipulated in Law No. 40 of Year 2007 regarding Limited Liability Companies and Government Regulation No. 47 of Year 2012 on Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies, which emphasize the responsibility of companies as legal-binding subjects to carry out social and environmental responsibility sustainably.

COMMITMENT TO CSR PROGRAM IMPLEMENTATION

The Company views business sustainability as a result from the balance between economic performance achievement and social contribution provided to the community and the environment. For this reason, the Company's success is not merely determined by financial indicators, but also from the Company's capability in generating long-term benefits that are truly felt by stakeholders.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Dalam menjalankan program CSR, Perseroan menempatkan integritas dan tanggung jawab sebagai landasan utama. Setiap inisiatif CSR dirancang dan dilaksanakan secara terencana, dengan memperhatikan prinsip transparansi serta pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perseroan memastikan bahwa pelaksanaan program diarahkan untuk menjawab kebutuhan sosial dan lingkungan yang relevan dengan konteks kegiatan usaha serta wilayah operasional Perseroan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan sumber daya yang memadai dan berkelanjutan, sehingga program CSR dapat berjalan secara konsisten dari waktu ke waktu.

Pelaksanaan CSR bagi Perseroan merupakan bagian dari peran aktif dalam mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Program-program yang dijalankan tidak semata sebagai kewajiban normatif, tetapi sebagai bentuk inisiatif yang lahir dari kesadaran akan tanggung jawab Perseroan sebagai entitas usaha milik daerah. Melalui pendekatan tersebut, Perseroan berupaya memberikan kontribusi yang bermakna bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Seiring dengan implementasi prinsip keberlanjutan dalam kegiatan bisnis, Perseroan meyakini bahwa program CSR turut memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan dan membangun kepercayaan publik. Peran Perseroan dalam pelaksanaan CSR diharapkan dapat menegaskan posisinya sebagai bagian dari ekosistem pembangunan daerah yang berorientasi pada penciptaan nilai bersama dan keberlanjutan sosial serta lingkungan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan memandang kelestarian lingkungan hidup sebagai prasyarat penting bagi keberlangsungan kegiatan usaha dalam jangka panjang. Aktivitas operasional yang berjalan secara berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila Perseroan mampu menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan bisnis dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Meskipun bisnisnya tidak memberikan dampak langsung terhadap lingkungan, Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha dijalankan dengan memperhatikan potensi dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

In conducting its CSR program, the Company places integrity and responsibility as the main foundation. Each CSR initiative is designed and implemented in a planned manner, taking into account the principles of transparency and accountable management. The Company ensures that program implementation is directed to answering social and environmental needs that are relevant with the context of the Company's business activities as well as areas of operations. This commitment is manifested through the support of adequate and sustainable resources so that the CSR program can run consistently from time to time.

For the Company, CSR implementation is part of the active role in supporting sustainable development process. Programs carried out are not merely as normative responsibility, but as a form of initiative born from the awareness of the Company's responsibility as a regionally-owned business entity. Through such an approach, the Company strives to provide contributions that are beneficial for the improvement of the community's quality of life of the community and the preservation of the environment.

In line with the implementation of sustainability principle in business activities, the Company believes that CSR program helps strengthen relationships with stakeholders and builds public's trust. The role of the Company in CSR implementation is expected to emphasize its position as part of the regional development ecosystem that is oriented on the creation of mutual values as well as social and environmental sustainability.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TOWARDS THE ENVIRONMENT

The Company views environmental preservation as an important prerequisite for the continuity of business activities in the long run. Operational activities carried out sustainably can only be achieved if the Company is capable of maintaining balance between business goal achievement and responsibility towards the environment. Although its business does not provide direct impact on the environment, the Company is committed to ensure that each business activity is conducted with consideration of the potential impact on the surrounding environment.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Dalam mengelola aspek lingkungan hidup, Perseroan menyusun kebijakan dan tata kelola yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip praktik terbaik yang relevan. Pendekatan ini diterapkan sebagai bentuk upaya sistematis untuk mengendalikan risiko lingkungan sekaligus memastikan kepatuhan Perseroan terhadap standar yang ditetapkan.

Melalui pengelolaan yang terstruktur, Perseroan berupaya mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan meminimalkan potensi gangguan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Pengelolaan dampak lingkungan dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, mencakup upaya pencegahan, penanganan, pengendalian, pemenuhan ketentuan, hingga pelestarian lingkungan hidup. Perseroan meyakini bahwa penerapan proses bisnis yang seimbang dan berorientasi pada prinsip keberlanjutan akan mendukung tercapainya pertumbuhan usaha yang selaras dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup di masa mendatang.

Selain pengelolaan pada aspek operasional, Perseroan juga secara aktif mendorong peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan karyawan, mitra usaha, serta masyarakat. Melalui keterlibatan dalam kegiatan edukasi dan kampanye lingkungan, Perseroan berupaya menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari budaya bersama. Upaya tersebut mencerminkan kontribusi Perseroan dalam membangun kesadaran kolektif dan mendorong terciptanya perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Kegiatan CSR Lingkungan Hidup tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan secara berkelanjutan melaksanakan berbagai inisiatif yang ditujukan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup. Inisiatif tersebut dirancang sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam mengelola aktivitas operasional secara lebih bertanggung jawab, sekaligus menumbuhkan budaya kerja yang memperhatikan efisiensi sumber daya dan pengurangan dampak lingkungan.

In managing the environmental aspect, the Company prepares policies and governance that refer to the provisions of applicable laws and regulations as well as relevant best practice principles. This approach is applied as a form of systematic effort to control environmental risks and at the same time ensures the Company's compliance with the set standards.

Through a structured management, the Company strives to prevent the occurrence of environmental pollution and to minimize potential disruption to the surrounding communities in the operational areas.

Management of the environmental impact is carried out comprehensively and continuously, consisting of efforts to prevent, handle, control, compliant with provisions, up to environmental preservation. The Company believes that the implementation of a balanced business process oriented to the principles of sustainability will support the achievement of business growth that is in line with improving environmental quality in the future.

In addition to the management of the operational aspect, the Company also actively encourages the improvement of environmental awareness among the employees, business partners as well as the communities. By way of involvement in educational activities and environmental campaign, the Company strives to instill the value of caring for the environment as part of a shared culture. Such an effort reflects the Company's contribution in enhancing collective awareness and encouraging the creation of more environmentally responsible behavior in a sustainable manner.

Environmental CSR Activities in 2025

Throughout the year 2025, the Company sustainably carried out various initiatives intended to support environmental preservation efforts. Such an initiative is designed as part of the Company's commitment to managing operational activities more responsibly, and at the same time foster work culture that takes into account efficiency in resources and reduce environmental impact.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

1. Penggunaan Material Ramah Lingkungan

Perseroan secara konsisten mendorong penerapan penggunaan material yang lebih ramah lingkungan dalam aktivitas operasional sehari-hari. Upaya ini diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan sistem digital guna mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, serta penggunaan kembali kertas bekas untuk keperluan pencetakan dokumen internal. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengurangan konsumsi bahan baku dan limbah kertas, sekaligus mendukung efisiensi proses kerja.

2. Efisiensi Energi dan Pengelolaan Sumber Daya

Dalam rangka menekan konsumsi energi dan sumber daya, Perseroan menerapkan berbagai kebijakan efisiensi energi secara bertahap dan berkesinambungan. Kebijakan tersebut meliputi pengurangan penggunaan air dan plastik, pemanfaatan lampu hemat energi berbasis LED, penggunaan perangkat elektronik dengan teknologi inverter, serta penerapan disiplin operasional berupa pemadaman lampu dan peralatan listrik yang tidak digunakan. Melalui langkah-langkah ini, Perseroan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, sekaligus berkontribusi dalam pengurangan jejak lingkungan dari aktivitas perkantoran.

1. Use of Environmentally Friendly Materials

The Company consistently encourages the use of more eco-friendly materials in the daily operational activities. This effort is manifested through optimizing the use of digital system in order to reduce dependency on physical documents, and the re-use of used paper for internal document printing needs. This step was conducted as part of the effort to reduce raw material consumption and paper waste, as well as to encourage work process efficiency.

2. Energy Efficiency and Resource Management

In the effort to press energy and resource consumption, the Company applied various energy saving policies gradually and continuously. The policy covers the reduction in the use of water and plastic, utilization of LED-based energy-saving lamps, use of electronic device with inverter technology, and implementation of operational discipline such as in turning off the lights and electrical equipment when not in use. Through such steps, the Company strived to create a more efficient working environment, and at the same time took part in reducing environmental footprint from office activities.



Patung Jendral Sudirman
Jakarta Selatan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (OHS)

Praktik Ketenagakerjaan

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di bidang ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja (K3) merupakan wujud komitmen Perseroan dalam membangun lingkungan kerja yang aman, sehat, dan inklusif. Perseroan memandang karyawan sebagai aset strategis yang berperan penting dalam mendukung keberlangsungan dan kinerja usaha. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja karyawan menjadi bagian integral dari pengelolaan sumber daya manusia Perseroan.

Dalam praktiknya, Perseroan senantiasa mengedepankan penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup karyawan. Perseroan berupaya menciptakan kondisi kerja yang kondusif melalui penyediaan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, sekaligus mendorong terciptanya rasa aman bagi karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pendekatan ini diterapkan untuk memastikan bahwa setiap karyawan dapat bekerja secara optimal tanpa mengabaikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja.

Selain itu, Perseroan memberikan perhatian terhadap keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi karyawan. Berbagai kebijakan dan program dirancang untuk mendukung produktivitas kerja yang berkelanjutan sekaligus menjaga tingkat kepuasan kerja karyawan. Perseroan meyakini bahwa keseimbangan tersebut merupakan faktor penting dalam membangun keterlibatan karyawan dan menciptakan suasana kerja yang positif.

Perseroan juga berkomitmen untuk membangun hubungan industrial yang harmonis dengan seluruh karyawan. Hubungan kerja tersebut dilandaskan pada prinsip etika, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban karyawan. Melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghormati, Perseroan berupaya menciptakan iklim kerja yang adil dan saling mendukung.

Perseroan menilai bahwa kelancaran kegiatan operasional dan pencapaian kinerja usaha yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila didukung oleh lingkungan kerja yang sehat

Employment Practices

Implementation of Corporate Social Responsibility in the fields of employment, and occupational safety and health (OHS) is the manifestation of the Company's commitment to building a safe, healthy and inclusive working environment. The Company views employees as strategic assets that play an important role in supporting business continuity and performance. For this reason, attention to the welfare, and occupational health and safety of employees is an integral part of the Company's human resource management.

In practice, the Company always prioritizes the implementation of employment policies that are oriented towards improving the quality of life of employees. The Company strives to create working conditions that are conducive by providing a safe and comfortable working environment, while encouraging the creation of a sense of security for employees in carrying out their duties and responsibilities. This approach is applied to ensure that each employee can work optimally without ignoring the aspects of occupational health and safety.

In addition, the Company pays attention to the balance between the working life and personal life of employees. Various policies and programs are designed to endorse sustainable work productivity and simultaneously maintain the working satisfaction level of employees. The Company believes that such balance is an important factor in building employee engagement and create positive working condition.

The Company is also committed to building harmonious industrial relations with all employees. Such a working relationship is based on the principles of ethics, compliance with provisions of applicable laws and regulations in the field of employment, as well as respect for the rights and obligations of employees. Through open communication and mutual respect, the Company strives to create a fair and mutually-supporting working climate.

The Company assesses that smooth operational activities and achieving sustainable business performance can only be accomplished if supported by a healthy and synergistic work

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (Ohs)

dan sinergis. Oleh karena itu, praktik ketenagakerjaan yang diterapkan Perseroan tidak hanya memperhatikan aspek fisik karyawan, tetapi juga aspek psikologis dan kesejahteraan mental. Dengan pendekatan yang menyeluruh tersebut, Perseroan berharap dapat membangun lingkungan kerja yang mendorong peningkatan kinerja, loyalitas, serta kesejahteraan seluruh tenaga kerja secara berkelanjutan.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perseroan menempatkan aspek K3 sebagai salah satu pilar penting dalam pengelolaan sumber daya manusia dan operasional perusahaan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip K3 diintegrasikan ke dalam berbagai aktivitas operasional sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas dan ketahanan organisasi.

Penerapan K3 secara konsisten diyakini berperan dalam membentuk lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif. Lingkungan kerja yang memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan memberikan ruang bagi karyawan untuk bekerja secara optimal, meminimalkan potensi risiko kerja, serta meningkatkan rasa aman dan kenyamanan dalam menjalankan tugas. Dampak dari penerapan K3 yang efektif tercermin pada peningkatan keterlibatan karyawan, kepuasan kerja, serta pencapaian kinerja Perseroan yang lebih berkelanjutan.

Pada tahun 2025, Perseroan memperkuat implementasi K3 melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi karyawan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Perseroan memfasilitasi partisipasi karyawan dalam berbagai program pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi K3, termasuk pelatihan untuk memperoleh sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan kompetensi memadai dalam menerapkan prinsip-prinsip K3 di lingkungan kerja Perseroan.

Melalui penguatan kompetensi tersebut, Perseroan berupaya membangun sistem K3 yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, sekaligus menumbuhkan budaya kerja yang menempatkan keselamatan dan kesehatan sebagai tanggung jawab bersama. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman serta memberikan kontribusi positif terhadap kinerja dan keberlanjutan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

environment. For this reason, employment practices applied by the Company not only take into account the physical aspect of the employees, but also the psychological and mental welfare. With such comprehensive approach, the Company hopes to be able to build a work environment that encourages sustainable improvement in performance, loyalty, as well as welfare for all employees.

Occupational Health and Safety

The Company places the OHS aspect as one important pillar in managing human resources and company operations. For this purpose, the OHS principles are integrated into various operational activities as part of the effort to maintain productivity and organizational resilience.

Consistent OHS implementation is believed to play a role in developing a safe, healthy and conducive work environment. A work environment that takes into account health and safety aspects provide space for employees to work optimally, minimize work risk potential, as well as increase sense of security and comfort while carrying out their duties. The impact of effective OHS implementation is reflected in the increase in employee engagement, work satisfaction, as well as the Company's more sustainable performance achievement.

In the year 2025, the Company reinforces the implementation of OHS through capacity development and employee competency in occupational health and safety fields. The Company facilitates employee participation in various programs of OHS mentoring, training, and certification, including training to acquire Occupational Health and Safety Expert certification. This step is conducted to ensure the availability of human resources equipped with adequate knowledge and competency in applying OHS principles within the Company's work environment.

By strengthening these competencies, the Company strives to develop a more structured and sustainable OHS system, at the same time generate a work culture that places safety and health as a shared responsibility. This approach is hoped to be able to support the emergence of a safe working environment and that provides positive contribution to the Company's performance and business continuity in the long run.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (Ohs)

Kegiatan CSR Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tahun 2025

Sebagai bagian dari implementasi tanggung jawab sosial di bidang ketenagakerjaan serta kesehatan dan keselamatan kerja, Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan CSR yang diarahkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan dan komitmen Perseroan dalam menempatkan karyawan sebagai aset strategis yang mendukung keberlangsungan dan kinerja usaha.

1. Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Perseroan menegaskan komitmennya dalam mewujudkan kesetaraan *gender* dan penyediaan kesempatan kerja yang adil bagi seluruh karyawan. Dalam proses rekrutmen, pengembangan, maupun pengelolaan sumber daya manusia, Perseroan menerapkan prinsip non-diskriminasi dengan membuka peluang kerja tanpa membedakan gender, agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, maupun kondisi fisik lainnya. Prinsip ini juga diterapkan dalam interaksi kerja sehari-hari sebagai dasar pembentukan hubungan industrial yang sehat dan saling menghormati. Melalui penerapan kesetaraan dan keadilan tersebut, Perseroan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kondusif bagi seluruh karyawan.

2. Sarana dan Keselamatan Kerja

Dalam rangka menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, Perseroan secara konsisten menyediakan sarana keselamatan kerja yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. Fasilitas keselamatan tersebut meliputi ruang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) beserta perlengkapannya, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), *hydrant*, *smoke detector*, *sprinkler*, alarm darurat, serta diagram jalur evakuasi. Penyediaan sarana ini merupakan langkah konkret Perseroan untuk memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan memberikan rasa perlindungan bagi seluruh karyawan dalam menjalankan aktivitas kerja sehari-hari.

3. Tingkat Perputaran (Turnover) Karyawan

Perseroan menyadari bahwa tingkat perputaran karyawan merupakan salah satu indikator penting dalam pengelolaan sumber daya manusia dan stabilitas organisasi. Oleh karena itu, Perseroan secara berkelanjutan melakukan upaya pengendalian *turnover* agar tetap berada pada tingkat yang sehat dan tidak menimbulkan risiko terhadap kelangsungan aktivitas bisnis. Sebagai bagian dari pengungkapan kinerja

CSR Activities for Employment, Occupational Health and Safety (OHS) in 2025

As part of social responsibility implementation in the fields of employment as well as occupational health and safety, the Company carried out its CSR activities directed towards the creation of a fair, safe and sustainable work environment. These activities were follow-ups of the Company's policy and commitment to placing employees as strategic assets that support business continuity and performance.

1. Equality in Gender and Work Opportunity

The Company confirms its commitment to manifesting gender equality and provision of fair work opportunity for all employees. In the process of recruitment, development and management of human resources, the Company applies the principle of non-discrimination by opening work opportunity without prejudice to gender, religion, ethnicity, race, social status, skin color, nor other physical conditions. This principle also applies in daily work interactions as basis of forming industrial relation that is sound and of mutual respect. Through the implementation of equality and justice, the Company strives to create an inclusive and conducive work environment for all employees.

2. Work Facilities and Safety

In the effort to maintain occupational health and safety, the Company consistently provides work safety facilities in adequacy and in accordance with applicable standards. These safety facilities include First Aid room and its equipment, Light Fire Extinguishers (APAR), hydrants, smoke detectors, sprinklers, emergency alarm, and evacuation route diagram. Providing such facilities is the Company's concrete step to ensuring readiness in handling emergency situation, at the same time creating a safe work environment and provide a sense of protection for all employees carrying out their daily duties.

3. Employee Turnover Rate

The Company realizes that the rate of employee turnover is one of the important indicators in managing human resources and organization stability. For this purpose, the Company sustainably strived to control turnover so that it remains within a sound level and would not create risks directly to the continuity of business activities. As part of employment performance disclosure, it was recorded in 2025 that 5 employees resigned,

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (Ohs)

ketenagakerjaan, pada tahun 2025 tercatat terdapat 5 karyawan yang berhenti bekerja, baik karena memasuki masa pensiun dini maupun mengundurkan diri. Tingkat *turnover* tersebut tergolong relatif rendah dan mencerminkan stabilitas tenaga kerja, sekaligus menunjukkan konsistensi dan loyalitas karyawan dalam mendukung keberlanjutan operasional Perseroan.

due to early retirement and resignation. The level of turnover was relatively categorized as low and reflects employment stability, at the same time indicating the consistency and loyalty of employees in supporting the Company's operational sustainability.

Tingkat *Turnover* Karyawan tahun 2024 dan 2025

Employee Turnover Rate in 2024 and 2025

Deskripsi Description	Jumlah Karyawan (Orang) Number of Employees (Person)	
	2025	2024
Pensiun dini dan mengundurkan diri Early Retirement and resignation	5	3
Pensiun Retirement	-	-
Meninggal dunia Passed away	-	-

4. Program Pendidikan dan Pelatihan

Perseroan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan di bidang K3 sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi karyawan secara berkelanjutan. Program ini dirancang untuk memperkuat pemahaman karyawan terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku di Perseroan, sekaligus membekali karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam penerapan praktik kerja yang aman dan sehat. Melalui program pendidikan dan pelatihan tersebut, karyawan memperoleh pemahaman mengenai prinsip-prinsip K3, langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja, serta upaya menjaga kesehatan selama menjalankan aktivitas kerja. Selain itu, pelatihan juga mencakup pembekalan terkait penanganan situasi darurat, penggunaan peralatan keselamatan kerja secara tepat, serta penerapan perilaku kerja yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Perseroan meyakini bahwa peningkatan kompetensi di bidang K3 akan berkontribusi terhadap penguatan budaya keselamatan kerja dan mendukung produktivitas karyawan secara berkelanjutan.

4. Education and Training Program

The Company held educational and training programs in the field of OHS as part of the effort to sustainably improve the capacity and competency of employees. This program was designed to enhance the employees' understanding of applicable employment policies in the Company, at the same time, provided employees with the knowledge and skills needed for the implementation of work practices that is safe and healthy. Through these educational and training programs, employees received the understanding of OHS principles, prevention steps to minimize occupational accident risks, as well as efforts to maintain health during their work activities. In addition, the training also included provisions related to handling emergency situations, the proper use of work safety equipment, and the implementation of work behaviors that support the creation of a safe and conducive work environment. The Company believes that improvement in OHS competency can contribute to the strengthening of work safety culture and supports sustainable employee productivity.

5. Remunerasi Karyawan

Remunerasi karyawan disusun sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi, kinerja, dan peran karyawan dalam mendukung pencapaian tujuan Perseroan. Proses perencanaan dan pengelolaan remunerasi diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan Perseroan dan kesejahteraan karyawan, sekaligus menjaga daya saing

5. Employee Remuneration

Employee Remuneration was prepared as a form of reward for the contribution, performance, and role of the employees in supporting the Company's goal achievement. The remuneration planning and management processes were directed towards creating balance between the Company's interests and the employees' welfare, while maintain the Company's

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (Ohs)

Perseroan dalam menarik dan mempertahankan talenta yang berkualitas. Sistem remunerasi karyawan di Perseroan mencakup berbagai komponen, antara lain gaji pokok, tunjangan kesejahteraan, bonus berbasis kinerja, serta manfaat tambahan seperti fasilitas kesehatan dan program pensiun.

Perseroan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi agar tetap relevan dan kompetitif, dengan mempertimbangkan kebijakan internal, kondisi industri, serta dinamika pasar tenaga kerja. Penetapan paket remunerasi dilakukan dengan memperhatikan kinerja dan kontribusi masing-masing karyawan, serta disesuaikan dengan kemampuan finansial Perseroan. Seluruh proses penetapan remunerasi dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Perseroan berkomitmen untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sosial. Program CSR difokuskan pada berbagai inisiatif, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta aspek lain yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas hidup dan perkembangan sosial di lingkungan sekitar Perseroan. Dengan pendekatan ini, CSR tidak hanya menjadi tanggung jawab etis, tetapi juga menjadi sarana bagi Perseroan untuk membangun hubungan yang positif dengan komunitas sekitarnya.

Perseroan menyadari bahwa keterlibatan dan peran aktif masyarakat merupakan elemen penting dalam mendukung keberlanjutan bisnis di masa depan. Oleh karena itu, program-program yang dijalankan bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Perseroan dan masyarakat. Seluruh inisiatif ini dirancang untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan dan mendukung perkembangan bersama secara holistik.

Kegiatan Sosial Kemasyarakatan tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Inisiatif tersebut dirancang dan dijalankan dengan tujuan memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat peran Perseroan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan daerah.

competitiveness in attracting and retaining quality talents. Employee remuneration system in the Company included various components, among others, basic salary, welfare allowances, performance-based bonus, as well as additional benefits such as health facilities and pension program.

The Company periodically evaluates remuneration policies so that they remain relevant and competitive, with consideration on internal policies, industrial conditions, and the dynamics of the workforce market. Establishing remuneration packages was conducted considering the performance and contribution of each individual employee, and in accordance with the Company's financial capability. All processes related to setting remuneration were carried out with reference to provisions of applicable laws and regulations.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TOWARDS SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

The Company is committed to take an active role in improving the welfare of the community and provide positive contribution towards social development. The CSR Program is focused on various initiative, such as poverty alleviation, community economic empowerment, improvement in educational and health access, as well as other aspects that directly support improvement of life quality and social development in the Company's surrounding environment. With this approach, CSR not only serve as an ethical responsibility, but also as a means for the Company to develop positive relationship with the surrounding communities.

The Company realizes that the involvement and active role of the community is an important element in supporting business sustainability in the future. For this reason, implemented programs are intended to create harmonious relationship with a win-win solution for both the Company and the community. All initiatives are designed to develop sustainable collaborations that support holistic shared development.

Community Social Activities in 2025

Throughout the year 2025, the Company carried out various community social activities as the actualization of implementing its corporate social responsibility. This initiative was designed and conducted with the objective to provide actual contribution for the community, at the same time strengthen the Company's role as part of the regional development ecosystem.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (Ohs)

Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan mencerminkan komitmen Perseroan untuk hadir dan berkontribusi secara aktif di tengah masyarakat, tidak hanya melalui kegiatan usaha, tetapi juga melalui program-program yang memberikan manfaat langsung. Kegiatan yang diselenggarakan diarahkan untuk menjawab kebutuhan sosial di lingkungan sekitar serta mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara Perseroan dan masyarakat.

Melalui rangkaian kegiatan sosial kemasyarakatan ini, Perseroan berupaya memberikan dampak positif yang berkelanjutan dan relevan dengan konteks sosial setempat. Pendekatan yang diterapkan menekankan pada nilai kepedulian, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam mendukung pembangunan yang inklusif.

Kegiatan sosial kemasyarakatan yang telah diselenggarakan oleh Perseroan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Implementation of community social activities reflects the Company's commitment to exist and actively contribute in the center of the community, not only through business activities, but also through programs that generate direct benefits. Activities were directed to answer to the social needs in the surrounding community as well as to encourage the emergence of harmonious relations between the Company and the community.

Through these various community social activities, the Company strived to provide sustainable positive impact relevant to the local social context. The applied approach emphasized on the value of care, togetherness, and social responsibility as part of the Company's commitment to supporting inclusive development.

Community social activities carried out by the Company during the year 2025 included the following:

No	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Nominal Nominal Value
	17 Januari 2025 17 January 2025	Aktualisasi Nilai-nilai Natal Perseroan berpartisipasi dalam kegiatan yang mengusung tema "Marilah Sekarang kita Pergi ke Betlehem (Lukas 2:15)". Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi, harmoni dan kerukunan antar umat beragama, baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Actualization of Christmas Values The Company took part in "Let Us Now Go to Bethlehem (Lucas 2:150)"-themed activity. The activity was intended to enhance synergy, harmony and kinship among religious communities, including the State Civil Apparatus, the Regional People's Representative Council (DPRD), and Regionally-Owned Enterprises (BUMD) within the DKI Jakarta Provincial Government.	Rp 25.000.000
	31 Januari 2025 31 January 2025	Bantuan Sosial Santunan Guru Ngaji Bekerja sama dengan Rumah Zakat Indonesia, Perseroan menyalurkan Bantuan Sosial Santunan Guru Ngaji sebagai bentuk kepedulian terhadap peran pendidik keagamaan dalam membina nilai moral dan spiritual di tengah masyarakat. Program ini ditujukan untuk memberikan dukungan kepada para guru ngaji yang secara konsisten menjalankan perannya dalam pendidikan keagamaan, khususnya di lingkungan masyarakat sekitar. Social Assistance in the form of Compensation for Quran Teachers In cooperation with Indonesia House of Zakat, the Company distributed Social Assistance (Donation) for Quran Teachers as a form of care towards the role of religious teachers in fostering moral and spiritual values in society. The program aimed at providing support to quran teachers who consistently take the role in religious teachings, specifically in the surrounding communities.	Rp 5.000.000

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (Ohs)

No	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Nominal Nominal Value
	22 Februari 2025 22 February 2025	Dukungan Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Bersih Indonesia Tahun 2025 (HPSN-HBI 2025) Dalam Rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, Perseroan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Indah Foundation (IIF) dalam penyelenggaraan serangkaian acara Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Bersih Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyongsong 5 Abad Jakarta, sebagai langkah untuk mendukung upaya mewujudkan Jakarta Hijau yang berkelanjutan. Support for the 2025 National Waste Awareness Day and Clean Indonesia Day (2025 HPSN-HBI) In commemoration of the National Waste Awareness Day, the Company collaborated with DKI Jakarta Provincial Environmental Agency and the Indonesia Indah Foundation (IIF) in organizing a series of events for the 2025 National Waste Awareness Day and Clean Indonesia Day. This activity was part of a series of events to welcome Jakarta's 5th Century, as a step to support efforts to realize a sustainable Green Jakarta.	Rp 3.000.000
	12 Maret 2025 12 March 2025	Sumbangan ke Panti Asuhan Pondok Pesantren Nurul Firdaus Perseroan menyalurkan sumbangan sosial kepada Panti Asuhan Pondok Pesantren Nurul Firdaus sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan anak-anak asuh serta dukungan terhadap lembaga pendidikan dan pengasuhan berbasis keagamaan. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk berkontribusi dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar serta keberlangsungan kegiatan pendidikan dan pembinaan di lingkungan panti asuhan. Donation to Nurul Firdaus Islamic Boarding School Orphanage The Company distributed social donations to the Nurul Firdaus Islamic Boarding School Orphanage as a form of concern for the welfare of foster children and support for religious-based educational and care institutions. This activity was part of the Company's commitment to supporting the fulfilment of basic needs and the continuity of educational and development activities in the orphanage environment.	Rp 5.000.000
	19 Maret 2025 19 March 2025	Dukungan Donasi Yayasan Subulus Salaam Perseroan memberikan dukungan donasi kepada Yayasan Subulus Salaam dalam rangka menyemarakkan dan menyiarkan kegiatan Ramadan 1446 Hijriah di wilayah Ciracas dan sekitarnya. Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial dan keagamaan yang memiliki nilai kebersamaan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Support with Donation to Subulus Salaam Foundation The Company provided donation in support of the Subulus Salaam Foundation in order to enliven and broadcast Ramadan 1446 Hijriah activities in the Ciracas surrounding areas.	Rp 3.000.000
	22 Maret 2025 22 Maret 2025	Santunan 1500 Yatim-Dhuafa-Gerindra Perseroan berpartisipasi dalam kegiatan Santunan 1.500 Yatim dan Dhuafa Gerindra II sebagai bagian dari kepedulian sosial terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini ditujukan untuk memuliakan anak yatim, menumbuhkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, serta memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial. Compensation for 1500 Orphans-Dhuafa-Gerindra The Company participated in the Gerindra II Donation to 1500 Orphans and Dhuafa program as part of its social concern for community groups in need. This activity was intended to honor orphans, fostering social values, and strengthening a sense of togetherness and social concern.	Rp 3.000.000

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (Ohs)

No	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Nominal Nominal Value
	22 Maret 2025 22 March 2025	Bantuan Kegiatan Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim (SAHABAT MAS PRAM) Perseroan memberikan dukungan dalam kegiatan Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim yang diselenggarakan oleh SAHABAT MAS PRAM bersama Gubernur DKI Jakarta dengan mengusung tema “Cahaya Ramadhan, Tebar Kebajikan, Raih Keberkahan”. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan manfaat nyata bagi anak-anak yatim sekaligus menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Assistance for Breaking Fast Together Event and Donation to Orphans (SAHABAT MAR PRAM) The Company provided support for the Breaking Fast Together and Orphanage Assistance activities organized by SAHABAT MAS PRAM jointly with the Governor of DKI Jakarta with the theme “Light of Ramadan, Spread Kindness, Achieve Blessings”.	Rp 50.000.000
	26 Maret 2025 26 March 2025	Kegiatan Kolaborasi Bersama Peduli Sosial Ramadhan 1446 H/2025 M Perseroan berpartisipasi dalam kegiatan Kolaborasi Bersama Peduli Sosial Ramadhan 1446 H/2025 M yang dilaksanakan bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini ditujukan untuk membantu masyarakat dhuafa, marbot masjid dan musala, serta anak yatim di wilayah DKI Jakarta melalui penyaluran bantuan bahan pangan dan santunan. Collaborative Activities with Social Care for Ramadhan 1446 H/2025 M The Company took part in Collaborative Activities of Social Care for Ramadhan 1446 H/2025 M organized jointly with the National Integration Forum (FPK) of DKI Jakarta Province, the DKI Jakarta Provincial Government, and the Regional House of Representatives of DKI Jakarta Province.	Rp 3.000.000
	20 Maret 2025 / 20 March 2025	Kolaborasi Penunaian Zakat Infaq Sedekah Pejabat dan Perusahaan Berkolaborasi dengan Baznas Perseroan berpartisipasi dalam kegiatan Kolaborasi Penunaian Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Pejabat yang diselenggarakan oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Program ZIS Pejabat merupakan inisiatif yang mendorong partisipasi pejabat, aparatur pemerintah, BUMD, perusahaan, serta lembaga lainnya dalam menunaikan zakat secara terorganisir dan mudah diakses. Partisipasi Perseroan dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen untuk mendukung penguatan tata kelola zakat yang transparan dan akuntabel, sekaligus berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Collaboration with Baznas for the Paying of Zakat Infaq Alms of Officials and Companies The Company participated in collaborative activities for the Payment of Zakat, Infaq and Alms (ZIS) of Officials organized by BAZNAS (BAZIS) of DKI Jakarta Province. The Officials ZIS Program is an initiative that encourages officials, government apparatus, BUMD, companies, as well as other institutions to paying zakat in an organized manner and easy to access. The Company's participation in this activity reflects its commitment to support the strengthening of zakat governance that is transparent and accountable, and contributing to efforts to improve social welfare.	Rp 10.000.000
	18 Maret 2025 18 March 2025	Kontribusi Acara Literasi Penjaminan Syariah ASSIPINDO Perseroan memberikan kontribusi dalam kegiatan Literasi Penjaminan Syariah yang diselenggarakan oleh ASSIPINDO sebagai bagian dari dukungan terhadap peningkatan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai penjaminan berbasis prinsip syariah. Kegiatan ini ditujukan untuk memperluas literasi keuangan syariah serta memperkuat peran penjaminan syariah dalam mendukung pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Contribution to the ASSIPINDO Sharia Guarantee Literacy Event The Company contributed to the Sharia Guarantee Literacy event organized by ASSIPINDO as part of its support for increasing public and stakeholders' understanding of guarantees based on sharia principles. This activity aimed at expanding Islamic financial literacy and strengthening the role of Islamic guarantees in endorsing inclusive and sustainable economic development.	Rp 15.000.000

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (Ohs)

No	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Nominal Nominal Value
	12 Maret 12 March	Bantuan Sumbangan Korban Banjir JABODETABEK Tahun 2025 Perseroan hadir dan berkontribusi menyalurkan bantuan sosial bagi korban banjir di wilayah JABODETABEK sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana. Bantuan ini ditujukan untuk membantu meringankan beban para korban serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar pada masa tanggap darurat. Aid Donation for JABODETABEK Flood Victims in 2025 The Company was present and took part in the social aid distribution for the flood victims in the JABODETABEK areas as a form of concern for disaster-affected communities. This assistance was intended to ease the burden of victims and support the fulfilment of basic needs during the emergency response period.	Rp 10.000.000
	15 April 2025	Bantuan Pembangunan Masjid Ar Raudhoh melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Perseroan menyalurkan bantuan untuk pembangunan Masjid Ar Raudhoh melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan sarana ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proses pembangunan masjid sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sekitar. Assistance for the Development of Ar Raudhoh Mosque through the National Zakat Collection Agency (Baznas) The Company distributed aid for the construction of the Ar Raudhoh Mosque through the National Zakat Collection Agency (BAZNAS) as part of its support for strengthening worship facilities and community religious activities. This assistance was expected to support the smooth running of the mosque construction process so that it can be optimally utilized by the surrounding community.	Rp 25.000.000
	26 April 2025	Penyediaan Makanan Kegiatan Lebaran Betawi Perseroan berpartisipasi dalam kegiatan Lebaran Betawi melalui penyediaan makanan sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya dan tradisi masyarakat Betawi. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan serta memperkuat hubungan sosial antara Perseroan dan masyarakat dalam momentum perayaan budaya daerah. Providing Food for Betawi Eid Festivities The Company participated in Betawi Eid activities by providing food as a form of support for the preservation of Betawi culture and traditions.	Rp 25.530.000
	6 Juni 2025 6 June 2025	Bantuan Hewan Kurban Idul Adha 1446 H-Rukun Tetangga 006 Perseroan menyalurkan bantuan hewan kurban kepada Rukun Tetangga 006 sebagai bentuk kepedulian sosial dalam mendukung pelaksanaan ibadah Idul Adha serta memperkuat semangat berbagi di lingkungan masyarakat. Assistance for Eid al-Adha 1446 H Sacrificial Animal - 006 Neighborhood Association The Company provided assistance for the distribution of sacrificial animal to 006 Neighborhood Association as a form of social concern in support for the implementation of Eid al-Adha commemoration and the strengthening of the spirit of sharing in the community.	Rp 32.373.000
	6 Juni 2025 6 June 2025	Bantuan Hewan Kurban Idul Adha 1446 H-Rukun Tetangga 012 Perseroan memberikan bantuan hewan kurban kepada Rukun Tetangga 012 guna mendukung pelaksanaan ibadah kurban dan mempererat kebersamaan masyarakat pada momentum Idul Adha. Assistance for Eid al-Adha 1446 H Sacrificial Animal at 012 Neighborhood The Company provided assistance for the distribution of sacrificial animal to 012 Neighborhood in support for the implementation of the qurban worship and for the strengthening of community ties during the Eid al-Adha momentum.	Rp 30.669.000

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (Ohs)

No	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Nominal Nominal Value
	5 Juni 2025 5 June 2025	Bantuan Hewan Qurban-Perkumpulan Solidaritas Sahabat Jakarta Perseroan menyalurkan bantuan hewan kurban kepada Perkumpulan Solidaritas Sahabat Jakarta sebagai bagian dari kontribusi sosial dalam memperluas manfaat ibadah kurban bagi masyarakat yang membutuhkan. Assistance for the Sacrificial Animal to Jakarta Friendship Solidarity Association The Company provided assistance for the distribution of sacrificial animal to Jakarta Friendship Solidarity Association as part of the social contribution program in expanding the benefits of sacrificial worship for community members in need.	Rp 30.030.000
	5 Juni 2025 5 June 2025	Bantuan Hewan Qurban Yayasan Hikmah Kerja Bersama Perseroan memberikan bantuan hewan kurban kepada Yayasan Hikmah Kerja Bersama untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan serta penyaluran manfaat kurban kepada penerima manfaat. Assistance to provide Sacrificial Animal to Hikmah Kerja Bersama Foundation The Company provided assistance for sacrificial animal Hikmah Kerja Bersama Foundation in support of social and religious activities as well as to distribute sacrificial animal.	Rp 31.100.000
	5 Juni 2025 5 June 2025	Bantuan Hewan Qurban-Rumah Quran Dinul Qoyyimah Perseroan menyalurkan bantuan hewan kurban kepada Rumah Quran Dinul Qoyyimah sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. Assistance for Sacrificial Animal to The House of Quran of Dinul Qoyyimah The Company provided assistance for the distribution of sacrificial animal to the House of Quran of Dinul Qoyyimah as a form of support to religious and social care activities in surrounding communities.	Rp 32.000.000
	5 Juni 2025 5 June 2025	Bantuan Hewan Qurban-Rukun Warga 03 Perseroan memberikan bantuan hewan kurban kepada Rukun Warga 03 guna mendukung pelaksanaan ibadah Idul Adha dan memperkuat nilai kebersamaan serta solidaritas sosial warga. Assistance for Sacrificial Animal for 03 Neighborhood The Company provided assistance for the distribution of sacrificial animal to 03 Neighborhood to support the implementation of Eid al-Adha rituals and strengthen the values of close ties and social solidarity of citizens.	Rp 32.000.000
	5 Juni 2025 5 June 2025	Kolaborasi Program Kurban Berkah Jakarta-Baznas Perseroan berpartisipasi dalam Program Kurban Berkah Jakarta yang diselenggarakan bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai bentuk kepedulian sosial dan dukungan terhadap pemerataan manfaat ibadah kurban bagi masyarakat. Collaborative Program of Jakarta Sacrificial Animal Blessing (Kurban Berkah Jakarta) – Baznas The Company took part in Jakarta Sacrificial Animal Blessing Program organized by the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) as a form of social concern and support towards equal distribution of the benefits of sacrificial ritual for the community.	Rp 216.000.000
	11 Juli 2025 11 July 2025	Bantuan Korban Bencana Kebakaran Penjaringan Perseroan menyalurkan bantuan sosial kepada korban bencana kebakaran di wilayah Penjaringan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak. Kebakaran tersebut menghanguskan lebih dari 500 rumah dengan luas area terdampak sekitar 30.000 meter persegi, mengakibatkan sekitar 800 kepala keluarga atau kurang lebih 3.200 warga kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Aid for the Victims of Fire Disaster at Penjaringan The Company distributed social aid to victims of the fire disaster that occurred in Penjaringan area as a form of concern for some residents impacted by the incident. An area of about 30,000 sqm, causing some 800 families or more than 3,200 residents to have lost their homes and personal belongings.	Rp 30.000.000

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (Ohs)

No	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Nominal Nominal Value
	26 Juli 2025 26 July 2025	Bantuan Dalam Menyambut Tahun Baru Islam di bulan Muharam 1447 H PHBI DKM Masjid Jami' Nurul Akbar Perseroan memberikan bantuan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam Muharam 1447 H yang diselenggarakan oleh PHBI DKM Masjid Jami' Nurul Akbar. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan syiar nilai-nilai kebaikan serta mendorong peningkatan ketakwaan dan kebersamaan masyarakat. Assistance provided to Jami' Nurul Akbar Mosque of PHBI DKM in Welcoming the Islamic New Year in the month of Muharram 1447 H The Company provided assistance in commemorating the Islamic New Year 1447 H festivities organized by PHBI DKM of Jami' Nurul Akbar Mosque. The assistance was intended to support the implementation of dissemination of good values and encouraging increased piety and community togetherness.	Rp 5.000.000
	29 September 2025	Urban Farming Perseroan mendukung program <i>Urban Farming</i> yang dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dan dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan di Jakarta. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pengembangan pertanian perkotaan berbasis akuaponik, sekaligus mendorong pemanfaatan lahan terbatas secara produktif dan ramah lingkungan. Urban Farming The Company supported the Urban Farming program held by PT Jakarta Propertindo (Perseroda) as part of the effort to empower the community and support sustainable development in Jakarta. This program was intended to improve the social and economic welfare of the community through the aquaphonic-based urban agricultural development, and encourage the utilization of limited land space more productively and environmentally friendly.	Rp 20.350.000
	9 Januari 2026 9 January 2026	Tebus Ijazah Perseroan mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membantu lulusan SD, SMP, dan SMA/SMK swasta yang belum dapat menerima ijazah akibat tunggakan biaya administrasi. Program ini ditujukan untuk membuka kembali akses pendidikan dan kesempatan kerja bagi peserta didik agar dapat melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja secara layak. Redeem A degree The Company supported DKI Jakarta Provincial Government's program to assist private elementary, middle and high school/vocational school graduates who have not been able to receive their diplomas due to outstanding administrative fees. This program aimed at reopening access to education and employment opportunities for students so they can continue their education or enter the workforce properly.	Rp 3.000.000
	30 Agustus 2025 30 August 2025	Bantuan Kegiatan Gebyar Muharam Dalam acara yang mengusung tema "<i>Caring, Sharing, Giving</i>", Perseroan bersama Forum Komunikasi Masyarakat Betawi (FKMB) menyelenggarakan kegiatan santunan yatim piatu dan dhuafa untuk meningkatkan kebersamaan dan solidaritas dalam momentum Tahun Baru Islam. Assistance for Muharam Commemoration Activities For the "<i>Caring, Sharing, Giving</i>"- themed event, the Company joined the Betawi Community Communication Forum (FKMB) to hold charity activities for orphans and the underprivileged that endorsed togetherness and solidarity in this momentum of Islamic New Year commemoration.	Rp 3.000.000

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (Ohs)

No	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Nominal Nominal Value
	4 September 2025	Bantuan Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW Perseroan memberikan bantuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kepedulian terhadap kegiatan keagamaan serta upaya memperkuat nilai spiritual dan kebersamaan masyarakat. Assistance to Support the Anniversary Commemoration of Prophet Muhammad SAW The Company provided assistance to support the anniversary commemoration activities of Prophet Muhammad SAW as a form of care for religious activities and efforts to strengthen spiritual values and close ties among members of the community.	Rp 10.000.000
	03 Oktober 2025 3 October 2025	Santunan Paket Sembako dalam rangka HUT PT JAMKRIDA Jabar Perseroan bersinergi dengan JAMKRIDA Jawa Barat dalam menyalurkan santunan berupa paket sembako dalam rangka HUT PT JAMKRIDA Jabar. Santunan didistribusikan langsung kepada yayasan dan panti asuhan di wilayah Bandung, Jawa Barat sebagai bentuk kepedulian sosial serta dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan. Basic Food Package Assistance in Commemoration of PT JAMKRIDA West Java Anniversary The Company collaborated with JAMKRIDA West Java in distributing assistance in the form of basic food packages in the context of the PT JAMKRIDA West Java anniversary.	Rp 650.000
	15 Oktober 2025 15 October 2025	Santunan Paket Sembako dalam rangka HUT Ke-13 PT JAMKRIDA NTB Syariah Perseroan bersinergi dengan JAMKRIDA NTB Syariah dalam menyalurkan santunan berupa paket sembako dalam rangka HUT PT JAMKRIDA NTB Syariah. Santunan didistribusikan langsung kepada beberapa panti asuhan sebagai wujud solidaritas dan kepedulian sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar anak-anak asuh dan masyarakat yang memerlukan dukungan. Basic Food Package Assistance in Commemoration of the 13th Anniversary of PT JAMKRIDA NTB Sharia The Company, jointly with JAMKRIDA NTB Sharia, distributed basic food packages to commemorate PT JAMKRIDA NTB Sharia's anniversary. The assistance was distributed directly to several orphanages as a form of solidarity and social care to help supply basic needs for the foster children and community members in need.	Rp 750.000
	01 September s/d 30 November 2025 1 September to 30 November 2025	Kegiatan Bulan Dana PMI Tahun 2025 Perseroan berpartisipasi dalam Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Tahun 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap upaya kemanusiaan bagi masyarakat rentan yang membutuhkan pelayanan PMI. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan penggalangan dana yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun untuk mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan, termasuk bantuan tunai, pangan, dan kebutuhan darurat lainnya. Activities during the Red Cross Indonesia (PMI) Fund Month of 2025 The Company participated in the Red Cross Indonesia (PMI) Fund Month activities as a form of support for the humanitarian efforts for vulnerable members of the community who are in need of PMI services. This activity was part of the fundraising movement carried out routinely every year to support the distribution of humanitarian aid, including cash assistance, food, and other emergency needs.	Rp 5.000.000
	29 November 2025	Bantuan Dana untuk Yayasan Silaturahmi Bahagia Bersama Perseroan menyalurkan bantuan dana kepada Yayasan Silaturahmi Bahagia Bersama untuk mendukung pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di SMK Pembangun Generasi Emas yang berada di bawah naungan yayasan tersebut. Bantuan ini ditujukan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar serta meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan bagi peserta didik. Financial Assistance Silaturahmi Bahagia Bersama Foundation The Company provided financial assistance to the Silaturahmi Bahagia Bersama Foundation to support the procurement of educational facilities and infrastructure at the Golden Generation Development Vocational School under the auspices of the foundation. The assistance was intended to support teaching and learning activities and improve the quality of educational facilities for students.	Rp 5.000.000

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (Ohs)

No	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Nominal Nominal Value
		Bantuan Dana Masjid Aisyah Pemalang Perseroan menyalurkan bantuan dana untuk mendukung pembangunan Masjid Aisyah Pemalang sebagai bentuk kepedulian terhadap penguatan sarana ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat.	Rp 5.000.000
		Financial Aid to Aisyah Pemalang Mosque The Company provided financial aid to support the development of Aisyah Pemalang Mosque as a form of social care for the strengthening of worship facilities and religious activities of the community.	
		Bantuan Dana Musholla Ar-Rahmah Sebagai bagian dari dukungan terhadap kegiatan keagamaan masyarakat, Perseroan memberikan bantuan dana hibah untuk renovasi Musholla Ar-Rahmah. Bantuan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan sarana ibadah bagi jamaah dan masyarakat sekitar.	Rp 3.000.000
		Financial Aid to Ar-Rahmah Mushola (Prayer Room) As part of the support for community's religious activities, the Company provided financial grant for the renovation of the Ar-Rahmah Mushola. This assistance was intended to improve the quality and comfort of the place of worship for attendants and the surrounding community.	
	9 Januari 2026 9 January 2026	Dukungan Dana Dalam Rangka Aktualisasi Nilai-Nilai Natal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Masyarakat Tahun 2025 Dalam rangka mendukung kegiatan aktualisasi nilai-nilai Natal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama masyarakat, Perseroan memberikan dukungan dana sebagai bentuk kepedulian terhadap penguatan nilai toleransi, kebersamaan, dan keharmonisan sosial.	Rp 27.750.000
		Financial Support for the Actualization of Christmas Values by the DKI Jakarta Provincial Government and the Community In the effort to support activities to actualize Christmas values, held by DKI Jakarta Provincial Government together with the community, the Company provided financial assistance as a form of care towards the strengthening of value tolerance, togetherness and social harmony.	
	30 November 2025	Pemberian Bantuan Bencana Alam di Sumatra Menindaklanjuti arahan dari BPBUMD Provinsi DKI Jakarta, Perseroan berpartisipasi dalam penyaluran bantuan bagi korban bencana alam di wilayah Sumatra sebagai wujud kepedulian dan solidaritas kemanusiaan. Bantuan disalurkan dalam bentuk paket sembako melalui sinergi antar BUMD dengan melibatkan Perumda Pasar Jaya.	Rp 25.430.000
		Natural Disaster Relief in Sumatra Following up the directives of BPBUMD of DKI Jakarta Province, the Company participated in distributing assistance to the victims of natural disaster in the region of Sumatra as a form of social care and humanitarian solidarity. The assistance was provided in the form of basic food packages through synergy effort with other BUMD by engaging the local government of Perumda Pasar Jaya.	
	13 Desember 2025 13 December 2025	Malam Penggalangan Donasi Untuk Sumatra Badan Kehormatan Award 2025 Perseroan berpartisipasi dalam Malam Penggalangan Donasi untuk Sumatra yang diselenggarakan dalam rangkaian acara Badan Kehormatan Award 2025. Partisipasi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial dan pelaksanaan CSR Perseroan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Sumatra.	Rp 5.000.000
		Fundraising Night for Sumatra at the 2025 Honorary Board Award The Company took part in the Fundraising Night for Sumatra held as part of the 2025 Honorary Board Award. This participation reflected the Company's social care and part of the CSR program to help the community impacted by natural disaster in the Sumatra region.	

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (Ohs)

No	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Deskripsi Kegiatan Description of Activity	Nominal Nominal Value
	18 Desember 2025 18 December 2025	Donasi Bencana Alam di Sumatra DPP PDI Dalam acara yang mengusung tema “Merawat Pertiwi”, Perseroan turut menyalurkan donasi bencana alam di wilayah Sumatra melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan. Partisipasi ini merupakan wujud kepedulian kemanusiaan Perseroan dalam membantu masyarakat terdampak bencana alam. Aid for Natural Disaster in Sumatra – DPP PDI At the event that carried the theme “Caring for Mother Earth”, the Company also distributed donations for natural disaster relief in the Sumatra region through activities organized by the DPP PDI Perjuangan. This participation was a manifestation of the Company's humanitarian concern in helping communities affected by natural disasters.	Rp 5.000.000
	7 Januari 2026 7 January 2026	Santunan HUT Ke-11 PT JAMKRIDA Kaltim Perseroan menyalurkan santunan dalam rangka HUT ke-11 PT JAMKRIDA Kaltim sebagai bentuk sinergi antar Jamkrida dalam berbagi kebahagiaan dan kepedulian sosial kepada masyarakat. Donation Provided at the 11th Anniversary of PT JAMKRIDA Kaltim The Company distributed donation at the commemoration of the 11th Anniversary of PT JAMKRIDA Kaltim as a synergy between Jamkrida units in sharing happiness and social care with the community.	Rp 1.000.000
	31 Desember 2025 31 December 2025	Bantuan untuk Disabilitas YPAC Jakarta Perseroan menyalurkan bantuan kepada YPAC Jakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap penyandang disabilitas. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung keberlangsungan program pelayanan, pendidikan, dan rehabilitasi, serta peningkatan kualitas hidup dan kemandirian penerima manfaat. Aid for the Disabled at YPAC Jakarta The Company distributed assistance to JPAC Jakarta as a form of care towards those with disabilities. This assistance was intended to support the continuity of the service, education and rehabilitation programs, as well as the improvement of life quality and independency of the beneficiaries.	Rp 3.000.000
	31 Desember 31 December 2025	Donasi Bencana Alam Sumatra dalam Acara Malam Tahun Baru 2026-Jakarta Global City Dalam momentum penyelenggaraan Acara Malam Tahun Baru 2026 Jakarta Global City, Perseroan turut menyalurkan donasi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Sumatra. Kegiatan ini mencerminkan kepedulian sosial Perseroan serta komitmen dalam mendukung upaya pemulihan bagi korban bencana. Relief for the Sumatra Natural Disaster at the New Years Eve Night of 2026 – Jakarta Global City With the momentum of the 2026 New Years Eve Celebration of Jakarta Global City, the Company took the opportunity to distribute humanitarian assistance for the communities impacted by the natural disaster in Sumatra region. The event reflected the Company's social concern and commitment to supporting recovery efforts for disaster victims.	Rp 28.094.851
Jumlah Nominal TJSL TJSL Nominal Amount			Rp772.726.851,-

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (Ohs)



17 Januari | January

Aktualisasi Nilai-nilai Natal

Perseroan berpartisipasi dalam kegiatan yang mengusung tema "Marilah Sekarang kita Pergi ke Betlehem (Lukas 2:15)". Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi, harmoni dan kerukunan antar umat beragama, baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Actualization of Christmas Values

The Company took part in "Let Us Now Go to Bethlehem (Lucas 2:150)"-themed activity. The activity was intended to enhance synergy, harmony and kinship among religious communities, including the State Civil Apparatus, the Regional People's Representative Council (DPRD), and Regionally-Owned Enterprises (BUMD) within the DKI Jakarta Provincial Government.



12 Maret | March

Dukungan Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Bersih Indonesia Tahun 2025 (HPSN-HBI 2025)

Dalam Rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, Perseroan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Indah Foundation (IIF) dalam penyelenggaraan serangkaian acara Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Bersih Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyongsong 5 Abad Jakarta, sebagai langkah untuk mendukung upaya mewujudkan Jakarta Hijau yang berkelanjutan.

Support for the 2025 National Waste Awareness Day and Clean Indonesia Day (2025 HPSN-HBI)

In commemoration of the National Waste Awareness Day, the Company collaborated with DKI Jakarta Provincial Environmental Agency and the Indonesia Indah Foundation (IIF) in organizing a series of events for the 2025 National Waste Awareness Day and Clean Indonesia Day. This activity was part of a series of events to welcome Jakarta's 5th Century, as a step to support efforts to realize a sustainable Green Jakarta.



12 Maret | March

Sumbangan ke Panti Asuhan Pondok Pesantren Nurul Firdaus

Perseroan menyalurkan sumbangan sosial kepada Panti Asuhan Pondok Pesantren Nurul Firdaus sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan anak-anak asuh serta dukungan terhadap lembaga pendidikan dan pengasuhan berbasis keagamaan. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk berkontribusi dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar serta keberlangsungan kegiatan pendidikan dan pembinaan di lingkungan panti asuhan.

Donation to Nurul Firdaus Islamic Boarding School Orphanage

The Company distributed social donations to the Nurul Firdaus Islamic Boarding School Orphanage as a form of concern for the welfare of foster children and support for religious-based educational and care institutions. This activity was part of the Company's commitment to supporting the fulfilment of basic needs and the continuity of educational and development activities in the orphanage environment.



12 Maret | March

Bantuan Sumbangan Korban Banjir JABODETABEK Tahun 2025

Perseroan hadir dan berkontribusi menyalurkan bantuan sosial bagi korban banjir di wilayah JABODETABEK sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana. Bantuan ini ditujukan untuk membantu meringankan beban para korban serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar pada masa tanggap darurat.

Aid Donation for JABODETABEK Flood Victims in 2025

The Company was present and took part in the social aid distribution for the flood victims in the JABODETABEK areas as a form of concern for disaster-affected communities. This assistance was intended to ease the burden of victims and support the fulfilment of basic needs during the emergency response period.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (Ohs)



18 Maret | March

Kontribusi Acara Literasi Penjaminan Syariah ASSIPINDO

Perseroan memberikan kontribusi dalam kegiatan Literasi Penjaminan Syariah yang diselenggarakan oleh ASSIPINDO sebagai bagian dari dukungan terhadap peningkatan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai penjaminan berbasis prinsip syariah. Kegiatan ini ditujukan untuk memperluas literasi keuangan syariah serta memperkuat peran penjaminan syariah dalam mendukung pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Contribution to the ASSIPINDO Sharia Guarantee Literacy Event

The Company contributed to the Sharia Guarantee Literacy event organized by ASSIPINDO as part of its support for increasing public and stakeholders' understanding of guarantees based on sharia principles. This activity aimed at expanding Islamic financial literacy and strengthening the role of Islamic guarantees in endorsing inclusive and sustainable economic development.



26 April | April

Penyediaan Makanan Kegiatan Lebaran Betawi

Perseroan berpartisipasi dalam kegiatan Lebaran Betawi melalui penyediaan makanan sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya dan tradisi masyarakat Betawi. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan serta memperkuat hubungan sosial antara Perseroan dan masyarakat dalam momentum perayaan budaya daerah.

Providing Food for Betawi Eid Festivities

The Company participated in Betawi Eid activities by providing food as a form of support for the preservation of Betawi culture and traditions.



11 Juli | July

Bantuan Korban Bencana Kebakaran Penjaringan

Perseroan menyalurkan bantuan sosial kepada korban bencana kebakaran di wilayah Penjaringan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak. Kebakaran tersebut menghancurkan lebih dari 500 rumah dengan luas area terdampak sekitar 30.000 meter persegi, mengakibatkan sekitar 800 kepala keluarga atau kurang lebih 3.200 warga kehilangan tempat tinggal dan harta benda.

Aid for the Victims of Fire Disaster at Penjaringan

The Company distributed social aid to victims of the fire disaster that occurred in Penjaringan area as a form of concern for some residents impacted by the incident. An area of about 30,000 sqm, causing some 800 families or more than 3,200 residents to have lost their homes and personal belongings.



29 September | September

Urban Farming

Perseroan mendukung program *Urban Farming* yang dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo (Persero) sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dan dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan di Jakarta. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pengembangan pertanian perkotaan berbasis akuaponik, sekaligus mendorong pemanfaatan lahan terbatas secara produktif dan ramah lingkungan.

Urban Farming

The Company supported the Urban Farming program held by PT Jakarta Propertindo (Persero) as part of the effort to empower the community and support sustainable development in Jakarta. This program was intended to improve the social and economic welfare of the community through the aquaponic-based urban agricultural development, and encourage the utilization of limited land space more productively and environmentally friendly.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (Ohs)



03 Oktober | 3 October 2025

Santunan Paket Sembako dalam rangka HUT PT JAMKRIDA Jabar

Perseroan bersinergi dengan JAMKRIDA Jawa Barat dalam menyalurkan santunan berupa paket sembako dalam rangka HUT PT JAMKRIDA Jabar. Santunan didistribusikan langsung kepada yayasan dan panti asuhan di wilayah Bandung, Jawa Barat sebagai bentuk kepedulian sosial serta dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan.

Basic Food Package Assistance in Commemoration of PT JAMKRIDA West Java Anniversary

The Company collaborated with JAMKRIDA West Java in distributing assistance in the form of basic food packages in the context of the PT JAMKRIDA West Java anniversary.



15 Oktober | 3 October 2025

Santunan Paket Sembako dalam rangka HUT Ke-13 PT JAMKRIDA NTB Syariah

Perseroan bersinergi dengan JAMKRIDA NTB Syariah dalam menyalurkan santunan berupa paket sembako dalam rangka HUT PT JAMKRIDA NTB Syariah. Santunan didistribusikan langsung kepada beberapa panti asuhan sebagai wujud solidaritas dan kepedulian sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar anak-anak asuh dan masyarakat yang memerlukan dukungan.

Basic Food Package Assistance in Commemoration of the 13th Anniversary of PT JAMKRIDA NTB Sharia

The Company, jointly with JAMKRIDA NTB Sharia, distributed basic food packages to commemorate PT JAMKRIDA NTB Sharia's anniversary. The assistance was distributed directly to several orphanages as a form of solidarity and social care to help supply basic needs for the foster children and community members in need.



30 November | November

Pemberian Bantuan Bencana Alam di Sumatra

Menindaklanjuti arahan dari BPBUMD Provinsi DKI Jakarta, Perseroan berpartisipasi dalam penyaluran bantuan bagi korban bencana alam di wilayah Sumatra sebagai wujud kepedulian dan solidaritas kemanusiaan. Bantuan disalurkan dalam bentuk paket sembako melalui sinergi antar BUMD dengan melibatkan Perumda Pasar Jaya.

Natural Disaster Relief in Sumatra

Following up the directives of BPBUMD of DKI Jakarta Province, the Company participated in distributing assistance to the victims of natural disaster in the region of Sumatra as a form of social care and humanitarian solidarity. The assistance was provided in the form of basic food packages through synergy effort with other BUMD by engaging the local government of Perumda Pasar Jaya.



13 Desember | December

Malam Penggalangan Donasi Untuk Sumatra Badan Kehormatan Award 2025

Perseroan berpartisipasi dalam Malam Penggalangan Donasi untuk Sumatra yang diselenggarakan dalam rangkaian acara Badan Kehormatan Award 2025. Partisipasi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial dan pelaksanaan CSR Perseroan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Sumatra.

Fundraising Night for Sumatra at the 2025 Honorary Board Award

The Company took part in the Fundraising Night for Sumatra held as part of the 2025 Honorary Board Award. This participation reflected the Company's social care and part of the CSR program to help the community impacted by natural disaster in the Sumatra region.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (Ohs)



18 Desember | December

Donasi Bencana Alam di Sumatra DPP PDI

Dalam acara yang mengusung tema “Merawat Pertiwi”, Perseroan turut menyalurkan donasi bencana alam di wilayah Sumatra melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan. Partisipasi ini merupakan wujud kepedulian kemanusiaan Perseroan dalam membantu masyarakat terdampak bencana alam.

Aid for Natural Disaster in Sumatra – DPP PDI

At the event that carried the theme “Caring for Mother Earth”, the Company also distributed donations for natural disaster relief in the Sumatra region through activities organized by the DPP PDI Perjuangan. This participation was a manifestation of the Company's humanitarian concern in helping communities affected by natural disasters.



31 Desember | December

Bantuan untuk Disabilitas YPAC Jakarta

Perseroan menyalurkan bantuan kepada YPAC Jakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap penyandang disabilitas. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung keberlangsungan program pelayanan, pendidikan, dan rehabilitasi, serta peningkatan kualitas hidup dan kemandirian penerima manfaat.

Aid for the Disabled at YPAC Jakarta

The Company distributed assistance to JPAC Jakarta as a form of care towards those with disabilities. This assistance was intended to support the continuity of the service, education and rehabilitation programs, as well as the improvement of life quality and independency of the beneficiaries.



31 Desember | December

Donasi Bencana Alam Sumatra dalam Acara Malam Tahun Baru 2026-Jakarta Global City

Dalam momentum penyelenggaraan Acara Malam Tahun Baru 2026 Jakarta Global City, Perseroan turut menyalurkan donasi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Sumatra. Kegiatan ini mencerminkan kepedulian sosial Perseroan serta komitmen dalam mendukung upaya pemulihan bagi korban bencana.

Relief for the Sumatra Natural Disaster at the New Years Eve Night of 2026 – Jakarta Global City

With the momentum of the 2026 New Years Eve Celebration of Jakarta Global City, the Company took the opportunity to distribute humanitarian assistance for the communities impacted by the natural disaster in Sumatra region. The event reflected the Company's social concern and commitment to supporting recovery efforts for disaster victims.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (Ohs)

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP MITRA KERJA

CSR Perseroan mencakup serangkaian komitmen dan praktik yang bertujuan menciptakan hubungan yang adil, berkelanjutan, dan saling menguntungkan dengan mitra kerja. Dalam menjalankan CSR di bidang kemitraan, Perseroan senantiasa mengutamakan prinsip keadilan, etika, dan keberlanjutan, sekaligus memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

Aspek CSR ini meliputi pemenuhan hak-hak pekerja, pembinaan dan pengembangan kapasitas mitra kerja, serta kontribusi terhadap kesejahteraan komunitas lokal di sekitar mitra kerja. Dengan menerapkan CSR yang terintegrasi di bidang kemitraan, Perseroan memastikan prinsip keberlanjutan dan penciptaan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dapat diwujudkan secara optimal.

Perseroan meyakini bahwa peran serta para mitra kerja juga memiliki peran krusial dalam mencapai kinerja dan hasil usaha yang optimal. Sebagai bentuk komitmen, Perseroan berdedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada mitra kerja, berupaya selalu memberikan dukungan, dengan harapan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan loyalitas yang berkelanjutan.

Kegiatan CSR terhadap Produk dan Pelanggan tahun 2025

Sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang produk dan pelayanan kepada pelanggan, Perseroan secara konsisten mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, peningkatan kualitas layanan, serta penyediaan mekanisme komunikasi yang responsif. Seluruh inisiatif ini diarahkan untuk memperkuat kepercayaan publik dan membangun hubungan jangka panjang yang berkelanjutan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan.

1. Informasi Produk dan Kegiatan Perseroan

Perseroan menyediakan akses informasi yang memadai dan mudah dijangkau oleh publik terkait produk penjaminan, layanan, serta berbagai kegiatan yang dijalankan. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui akun media sosial resmi Perseroan pada berbagai platform digital. Pemanfaatan media sosial ini menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi secara aktual, akurat, dan transparan kepada masyarakat, sekaligus memperluas jangkauan interaksi antara Perseroan dan publik. Pemangku kepentingan

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TOWARDS WORK PARTNERS

The Company's CSR encompasses a series of commitment and practices that aim at creating fair, sustainable and mutually beneficial relationship with work partners. In carrying out CSR in the field of partnership, the Company always prioritizes the principle of fairness, ethics, and sustainability, and at the same time provide positive impact for all parties involved.

This aspect of CSR consists of the fulfilment of workers' rights, mentoring and development of partners' capacity, as well as contribution to the welfare of the local communities in surrounding areas of the work partners. By implementing an integrated CSR in the field of partnership, the Company assured that the principle of sustainability and the creation of added values for all stakeholders are optimally realized.

The Company believes that the role of work partners also plays a crucial part in achieving optimal business performance and results. As a form of commitment, the Company is dedicated to providing the best service to partners, striving to always give support, with the hope that it will enhance the level of sustainable trust and loyalty.

CSR Activities towards Products and Customers in 2025

As part of the implementation of corporate social responsibility in the field of products and services to customers, the Company consistently puts forward the principle of transparency in disclosure of information, improvement in service quality, as well as providing responsive communication mechanism. This entire initiative is directed towards the strengthening of public's trust and building long-term sustainable relationships with customers and stakeholders.

1. Information on Products and Activities of the Company

The Company provided the public with adequate and easily reachable access to information related to guarantee products, services and various activities carried out. Such information may be obtained through the Company's official social media accounts in various digital platforms. Utilization of this social media as an effective communication tool to distribute information on actual, accurate, and transparent manner to the community, and at the same time to expand the interaction reach between the Company and the public. Stakeholders was able to

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (Ohs)

dapat mengakses akun media sosial resmi Perseroan di berbagai *platform*, yaitu:

access the Company's official social media in various platforms as follows:



Facebook
Jamkrida Jakarta



X (Twitter)
@JamkridaJakarta



Instagram
@jamkridajakarta



LinkedIn
Jamkrida Jakarta

2. Survei Kepuasan Pelanggan

Perseroan secara rutin memperkuat pendekatan yang berorientasi pada pelanggan. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas produk dan jasa layanan, Perseroan melaksanakan survei kepuasan pelanggan untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai tingkat kepuasan, persepsi, serta harapan pelanggan. Skor survei kepuasan pelanggan tahun 2025 tercatat sebesar 4,4 dari target 2025 sebesar 4.

Survei kepuasan pelanggan tidak hanya dimanfaatkan sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendengarkan secara langsung masukan dari pelanggan. Hasil survei tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan layanan secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, Perseroan menegaskan komitmennya dalam membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan, sekaligus memastikan bahwa pengembangan produk dan layanan sejalan dengan kebutuhan dan ekspektasi mereka.

2. Sarana atau Media Pengaduan

Perseroan menyediakan sarana atau media pengaduan sebagai bagian dari komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbuka, transparan, dan responsif kepada konsumen serta masyarakat. Penyediaan kanal pengaduan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan, permintaan informasi, maupun keluhan yang berkaitan dengan produk dan jasa layanan Perseroan dapat disampaikan secara jelas dan ditangani secara tepat. Melalui mekanisme pengaduan yang terstruktur, Perseroan membuka ruang komunikasi dua arah yang memungkinkan konsumen dan masyarakat menyampaikan pandangan, pengalaman, serta kebutuhan mereka. Setiap pengaduan yang diterima menjadi masukan penting bagi Perseroan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan.

2. Customer Satisfaction Survey

The Company regularly enhanced its customer-based approach. As part of the effort to improve product and service quality, the Company conducted customer satisfaction surveys in order to obtain an objective picture regarding the level of customer satisfaction, perception, as well as hope. For the year 2025, the customer satisfaction survey score was recorded at 4,4 from the 2025 target of 4.

Customer satisfaction survey was not only useful as an evaluation tool, but also as a mean to listen directly to customers' feedback. Survey results are used as basis to conduct sustainable improvement and refinement of services. Through this approach, the Company emphasized its commitment to building closer ties with customers, and ensured that product and service development was in line with their needs and expectations.

2. Facilities or Media for Complaints

The Company made available the facility or media for complaints as part of the commitment to provide services that are open, transparent, and responsive to consumers as well as the community. Providing this complaint channel was intended to ensure that each question, request for information, or complaints related to the Company's products and services may be clearly delivered and accurately handled. Through this structured complaint mechanism, the Company opened the space for two-way communication that allowed consumers and the public to give their views, experience, as well as their needs. Each complaint received was important feedback for the Company in evaluating and improving services sustainably.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (Ohs)

Keberadaan sarana pengaduan formal ini mencerminkan upaya Perseroan dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih baik dengan konsumen dan masyarakat. Dengan memastikan bahwa setiap masukan memiliki jalur penyampaian yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, Perseroan menegaskan bahwa perspektif dan kepentingan konsumen dihargai serta menjadi bagian dari perhatian Perseroan dalam pengembangan kualitas produk dan layanan.

The presence of this formal complaint facility reflects the Company's effort in building trust and better relationship with consumers and the public. By ensuring that each feedback has its own clear delivery path and may be followed-up, the Company emphasizes that consumers' perspective and interest are respected and are part of the Company's attention in developing product and service quality.

KEMITRAAN

Dalam kerangka pelaksanaan CSR, Perseroan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai mitra kerja dari beragam bidang. Kemitraan tersebut tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan bisnis, tetapi juga diarahkan untuk mendukung upaya keberlanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PARTNERSHIP

In the framework of CSR implementation, the Company establishes strategic partnerships with various partners from various fields. Such partnership is not only aimed at achieving business goals, but also directed to support sustainability efforts and improvement of community welfare.

Mitra kerja Perseroan terlibat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan CSR, termasuk program pengembangan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai CSR ke dalam hubungan kemitraan, Perseroan berupaya membangun kerja sama yang saling menguatkan sekaligus menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan komunitas di sekitar wilayah operasional.

The Company's work partners are involved in the implementation of various CSR activities, including social, educational and welfare development programs. By integrating CSR values into partnership relations, the Company strives to build mutually reinforcing cooperation while creating a positive impact on the environment and communities around the operational areas.

Adapun daftar mitra kerja JAMKRIDA Jakarta yang mendukung berbagai bidang kegiatan Perseroan adalah sebagai berikut:

The list of partners of JAMKRIDA Jakarta that supported various fields of activities of the Company is as follows:

Mitra Kerja Jamkrida Jakarta

Partner of Jamkrida Jakarta

Kegiatan activities	Mitra Kerja Jamkrida Jakarta Partner of Jamkrida Jakarta
Bank Umum Commercial Bank	Bank DKI Jakarta Bank Rakyat Indonesia Bank Mandiri Bank Raya Indonesia Bank Syariah Indonesia Bank CIMB Niaga
Lembaga Keuangan Lain Other Financial Institution	LPDB KUMKM PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) PT Pegadaian (Persero)
Multifinance	PT Mandiri Tunas Finance PT Radana Bhaskara Finance PT MNC Finance PT Bahana Ventura

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (Ohs)

Kegiatan activities	Mitra Kerja Jamkrida Jakarta Partner of Jamkrida Jakarta
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta Regionally-Owned Enterprises (BUMD) of DKI Jakarta Province	Bank Jakarta PD PAL Jaya PD PAM Jaya Perumda Pembangunan Sarana Jaya PT Taman Impian Jaya Ancol PT Jakarta Tourisindo PT Jakarta Propertindo PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta Regional Work Unit (SKPD) of DKI Jakarta Province	Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif Dinas Kebudayaan Badan Pengelola Aset Daerah Dinas Koperasi dan KUMKM Badan Pajak dan Restribusi Daerah DKI Jakarta Badan Pengembangan SDM Dinas Penanaman Modal dan PTSP Dinas Sosial Dinas Perhubungan Panti Sosial seluruh DKI Jakarta Dinas Pertamanan dan Kehutanan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional Unit Pengelola Kawasan Margasatwa Ragunan Pusat Pelatihan Kerja Pemerintah DKI Jakarta Dinas Bina Marga Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pendidikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Walikota Jakarta Utara Walikota Jakarta Barat Walikota Jakarta Pusat Walikota Jakarta Selatan Walikota Jakarta Timur Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Dinas Pemadam Kebakaran
Penjaminan Bersama Joint Guarantee	Jamkrida Jawa Barat PT Sinarmas Penjaminan Kredit PT Jamkrindo PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (JPAS) PT Jamkrindo Syariah PT Jamkrida NTB Bersaing

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility Towards Employment, Occupational Safety And Health (Ohs)

Kegiatan activities	Mitra Kerja Jamkrida Jakarta Partner of Jamkrida Jakarta
Penjaminan Ulang Re-Guarantee	PT Jakarta Raya Reinsurance Broker Best One Asia Reinsurance Brokers PT Esa Bina Sejati (FLRe)
Broker	PT Mitra Proteksi Madani PT Bringin Sejahtera Makmur Pialang Asuransi
Investasi dan Keuangan Investment and Finance	Sinarmas Asset Management Sucorinvest Asset Management Mandiri Sekuritas BNI Sekuritas PNM Investment Management BNI Asset Management PT BRI Management PT Insight Investments PT Mandiri Taspen
Kesehatan dan Lainnya Health and Others	Asuransi Mandiri Inhealth BRI Life BNI Multifinance PT Surya Sudeco (Tunas Rent)
Instansi Pemerintah Government Office	Bea & Cukai Tanjung Priok Bea & Cukai Bekasi Bea & Cukai Cikarang Bea & Cukai Purwakarta Bea & Cukai Bogor Bea & Cukai Bandung Bea & Cukai Tasikmalaya Bea & Cukai Garut Bea & Cukai Cirebon Bea & Cukai Tegal Bea & Cukai Surakarta Bea & Cukai Yogyakarta Bea & Cukai Semarang

Lembar Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2025

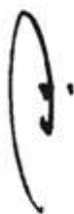
Liability Statement of the 2025 Annual Report

Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi dalam laporan tahunan PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta tahun 2025 ini telah dimuat secara lengkap dan kami akan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perseroan ini.

The Board of Directors declare that all information in the 2025 annual report of PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta is presented in its entirety and we are taking responsibility for the accuracy of the contents of this Company's annual report.

Jakarta, 13 April 2026
Jakarta, April 13, 2026

DIREKSI
Board of Directors



Agus Supriadi

Direktur Utama
President Director



Jimmi Setya Budi

Direktur Operasional
Operational Director



Laporan Keuangan

Financial Report





PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)

**LAPORAN KEUANGAN /
*FINANCIAL STATEMENTS***

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2025/ *FOR THE
YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025***

DAN/*AND*

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
*INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING THE RESPONSIBILITY ON THE
FINANCIAL STATEMENTS OF
PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We the undersigned:

1. Nama / Name Alamat kantor / Office address	: Agus Supriadi : Gedung Jaya, Lantai 3, Jl. M.H. Thamrin No.12, Kelurahan Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
Nomor Telepon / Phone Number Jabatan / Position	: 021-31927872 : Direktur Utama / President Director
2. Nama / Name Alamat kantor / Office address	: Jimmi Setya Budi : Gedung Jaya, Lantai 3, Jl. M.H. Thamrin No.12, Kelurahan Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
Nomor Telepon / Phone Number Jabatan / Position	: 021-31927872 : Direktur / Director

Menyatakan bahwa:

Stated that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Jamkrida Jakarta (Perseroda);	1. <i>We are responsibility for the preparation and presentation of the Financial Statements of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda);</i>
2. Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2. <i>The Company's Financial Statements have been prepared and presented in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia;</i>
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;	3. a. <i>All information has been fully and correctly disclosed in the Company's Financial Statements.</i>
b. Laporan Keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	b. <i>The Company's Financial Statements do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact;</i>
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.	4. <i>We are responsible for the Company's internal control system.</i>

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 27 Februari 2026 / February 27, 2026

 Agus Supriadi Direktur Utama / President Director	 Jimmi Setya Budi Direktur / Director

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)

DAFTAR ISI

Halaman/Page

TABLE OF CONTENTS

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

**LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

***FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR
ENDED DECEMBER 31, 2025***

LAPORAN POSISI KEUANGAN	1-2	<i>STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION</i>
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	3-4	<i>STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME</i>
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	5	<i>STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY</i>
LAPORAN ARUS KAS	6	<i>STATEMENTS OF CASH FLOWS</i>
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7-70	<i>NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS</i>

Laporan Auditor Independen***Independent Auditor's Report***

00023/3.0409/AU.1/09/0126-1/1/II/2026

**Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi
PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)*****The Shareholders, Commissioners and Directors of
PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)*****Opini*****Opinion***

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

We have audited the financial statements of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) ("the Company"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Company as December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini***Basis for Opinion***

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with Code of Ethics for Public Accountants established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Penekanan suatu hal***Emphasis of matter***

Kami membawa perhatian ke Catatan 41 atas laporan keuangan terlampir, yang mengungkapkan bahwa Perusahaan telah melakukan penyajian kembali laporan keuangan tahun 2024 atas perubahan penyajian biaya dibayar dimuka dan pendapatan ditangguhkan, yang sebelumnya disajikan secara neto menjadi disajikan secara bruto pada tahun 2024. Dampak atas penyajian kembali tersebut telah diungkapkan dalam laporan keuangan terlampir. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

We draw attention to Note 41 of the accompanying financial statements, which discloses that the Company has restated its 2024 financial statements for the change in presentation of prepaid expenses and deferred revenue, which were previously presented on a net basis to be presented on a gross basis in 2024. The impact of this restatement has been disclosed in the accompanying financial statements. Our opinion is not modified in this regard.

Hal lain

Laporan keuangan PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya No. 00037/2.0459/AU.1/09/1493-1/1/I/2025 tanggal 30 Januari 2025.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung inkonsistensi material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata Kelola dan mengambil Tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

KANAKA PURADIREDDA, SUHARTONO

Other matter

The financial statements of PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) as of December 31, 2024 and for the year then ended, audited by other independent auditor with an unqualified opinion No. 00037/2.0459/AU.1/09/1493-1/1/I/2025 dated January 30, 2025.

Other information

Management is responsible for other information. Other information consists of information contained in the annual report, but does not include our financial statements and auditor's report thereon. The annual report is expected to be available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information, and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report the fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate this to those charged with governance and take appropriate action based on the Auditing Standards established by the Institute of Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material atas laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company's or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting processes.

Auditor's Responsibilities for the Audit of Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit based on the Auditing Standards, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risk of material misstatement of the financial statements, whether caused by fraud or error, design and implement audit procedures that are responsive to these risks. And obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement due to fraud is higher than that caused by error, because fraud may involve collusion, forgery, omission, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company internal control.*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengamanan yang diterapkan.

- *Evaluate the appropriateness of the accounting policies used and the accounting estimation obligations and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

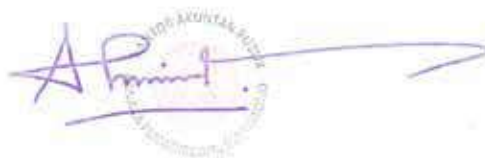
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KANAKA PURADIREDDA, SUHARTONO



Florus Daeli, SE., Ak., MM., CA., CPA., CRA., CLI., CFI., CACP., ASEAN CPA
Nomor Izin Akuntan Publik No. AP. 0126
License of Public Accountant No. AP. 0126

Jakarta, 27 Februari 2026/February 27, 2026
Ref: 00023/3.0409/AU.1/09/0126-1/1/II/2026



PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024*	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				Current Assets
Kas dan setara kas	3f, 5, 40	85.552.853.964	102.617.678.526	Cash and cash equivalents
Investasi	3g, 6, 40			Invesments
Obligasi		10.480.000.000	-	Bonds
Reksadana		200.770.429.444	84.772.474.689	Mutual funds
Deposito		100.000.000.000	129.610.000.000	Time deposits
Piutang hasil investasi	3g, 8, 40	8.628.227.780	7.881.299.768	Interest receivables
Piutang penjaminan ulang	9	50.041.747.598	16.535.585.509	Re-guarantee receivables
Piutang penjaminan bersama	10	38.856.544.641	8.852.506.112	Co-guarantee receivables
Aset penjaminan ulang	3n, 11	96.617.165.556	81.650.075.422	Re-guaranteed assets
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	3g, 12, 41	31.433.022.438	32.832.988.609	Prepaid expense and advances
Pajak dibayar dimuka	3n, 36a	560.748.661	127.468.660	Prepaid taxes
Jumlah Aset Lancar		622.940.740.082	464.880.077.295	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				Non Current Assets
Investasi-Obligasi	3h	619.323.604.970	614.241.634.349	Invesments-Bonds
Deposito yang dibatasi penggunaannya	3f, 7, 41	104.000.000.000	83.000.000.000	Restricted deposit
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	3g, 12, 41	146.010.736.006	124.412.222.969	Prepaid expense and advances
Aset tetap - bersih	3i, 13	3.120.796.779	668.800.529	Fixed assets - net
Aset hak guna	3j, 14	2.120.514.001	758.346.447	Property Investments
Aset tak berwujud	15	-	51.799.997	Intangible Asset
Aset pajak tangguhan	3n, 36d	3.835.678.575	3.610.790.089	Right of use assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		878.411.330.331	826.743.594.380	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		1.501.352.070.413	1.291.623.671.675	TOTAL ASSETS

*Disajikan kembali Catatan 41

*As restated Note 41

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Per 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024*	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				Current Liabilities
Utang pajak	3n, 36b	961.162.905	8.130.855.394	Trade payables
Utang penjaminan ulang	16, 40	60.281.464.689	23.114.494.279	Re-guarantee payables
Utang penjaminan bersama	17, 40	51.811.434.124	15.834.669.668	Co - guarantee payables
Beban akrual	18, 40	24.408.015.427	22.997.382.492	Accrued expenses
Cadangan klaim	3q, 19	259.985.367.196	189.084.673.472	Claim reserve
Pendapatan ditangguhkan	20, 41	62.688.124.020	61.497.404.666	Deferred income
Liabilitas lain-lain dalam penyelesaian	21	44.310.445.849	27.998.204.965	Other liabilities in progress
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang :				Current maturities of long term liabilities :
Utang sewa pembiayaan	22, 40	560.611.322	567.487.213	Lease payable
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		505.006.625.532	349.225.172.149	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				Non Current Liabilities
Pendapatan ditangguhkan	20, 41	345.608.521.931	302.514.867.265	Deferred income
Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	3k, 23	1.999.184.198	1.588.139.000	Liabilities for post employee benefit
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu 1 tahun mendatang :				Long term liabilities - net of current maturities within 1 year :
Utang sewa pembiayaan	22, 40	1.548.587.315	201.804.528	Lease payable
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		349.156.293.444	304.304.810.793	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		854.162.918.976	653.529.982.942	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Modal saham-modal dasar 1.600.000 lembar, ditempatkan dan disetor penuh pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing 600.000 lembar dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham	24	600.000.000.000	600.000.000.000	Capital stock-authorized 1,600,000 shares, issued and fully paid up on December 31, 2025 and 2024 amounting to 600,000 shares, respectively, with a nominal value of Rp1,000,000 per share
Komponen ekuitas lainnya		5.425.322.730	1.201.441.481	Other equity component
Saldo laba				Retained Earnings
Ditentukan penggunaannya		27.364.585.222	10.923.031.275	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		15.223.706.210	26.625.394.654	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain		(824.462.725)	(656.178.677)	Other comprehensive income
Jumlah Ekuitas		647.189.151.437	638.093.688.733	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1.501.352.070.413	1.291.623.671.675	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

***Disajikan kembali Catatan 41**

***As restated Note 41**

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of the financial statements as a whole.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF PROFIT LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
PENDAPATAN PENJAMINAN				GUARANTEE REVENUES
Imbal jasa penjaminan/kafalah	3l, 26	374.810.197.018	324.906.147.011	Guarantee fees
Pendapatan penjaminan lainnya	27	21.276.586.542	24.111.759.453	Other guarantee revenues
Jumlah Pendapatan Penjaminan		396.086.783.560	349.017.906.464	Total Guarantee Revenues
BEBAN PENJAMINAN				GUARANTEE EXPENSES
Beban klaim	3m, 28	150.827.390.070	124.012.468.535	Claim expense
Beban penjaminan ulang & bersama	29	160.298.820.423	137.368.622.553	Re-guarantee and co-guarantee expense
Beban fee based income	30	17.711.353.713	16.062.227.887	Fee based income expense
Beban restitusi		271.369.628	1.275.848.615	Restitution expense
Kenaikan estimasi klaim		55.971.804.597	32.623.952.459	Increase in estimated claims
Jumlah beban penjaminan		385.080.738.431	311.343.120.049	Total Guarantee Expenses
LABA BERSIH PENJAMINAN		11.006.045.129	37.674.786.415	NET GUARANTEE PROFIT
Pendapatan Investasi	3g, 3l	54.342.297.808	49.250.566.295	Investment Income
Beban sumber daya manusia	32	(25.424.356.802)	(24.539.463.325)	Personnel expense
Beban operasional	33	(7.572.396.262)	(4.840.852.469)	Operating expense
Beban cadangan kerugian penurunan nilai		(542.699.522)	(14.243.217.593)	Allowance for impairment losses
Beban administrasi dan umum	34	(6.446.272.398)	(7.972.447.774)	Administrative and general expenses
Beban sistem, teknologi, dan pengembangan usaha		(881.389.301)	(698.324.059)	System, technology and operating development expense
		(40.867.114.285)	(52.294.305.220)	
LABA USAHA		24.481.228.652	34.631.047.490	OPERATING INCOME
Beban lain-lain, bersih	35	(1.589.915.574)	(1.296.426.150)	Others expenses, net
Pendapatan lain-lain	35	1.182.767.433	22.997.570	Other income
		(407.148.141)	(1.273.428.580)	
LABA SEBELUM PAJAK		24.074.080.511	33.357.618.910	INCOME BEFORE TAX
Manfaat (beban) pajak :				Tax benefit (expenses)
Kini	3n, 36c	(8.250.602.800)	(8.033.809.740)	Current
Tangguhan	3n, 36c	177.423.754	2.078.780.736	Deferred
Jumlah Manfaat (Beban) pajak - bersih		(8.073.179.046)	(5.955.029.004)	Total Tax Benefit (Expense) - net
LABA TAHUN BERJALAN		16.000.901.465	27.402.589.906	NET INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of the financial statements as a whole.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF PROFIT LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ <i>Notes</i>	2025	2024	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		(215.748.780)	(480.247.000)	Remeasurement of defined benefit liability
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi		47.464.732	105.654.340	Tax relating to item that will not be reclassified
Sub Jumlah		(168.284.048)	(374.592.660)	Sub Total
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss:
Keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual		4.223.881.249	1.098.628.898	Unrealized gain on increase in fair value of investment available for sale
Sub Jumlah		4.223.881.249	1.098.628.898	Sub Total
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain, bersih		4.055.597.201	724.036.238	Other Comprehensive Income (Expense), net
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		20.056.498.666	28.126.626.144	TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of the financial statements as a whole.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Subscribed and Paid in Capital</i>		Saldo laba/Retained earnings		Komponen ekuitas lainnya/ <i>Other equity component</i>		Jumlah Ekuitas/ <i>Total Equity</i>
			Telah Ditetapkan <i>Appropriated</i>	Belum Ditetapkan <i>Unappropriated</i>			
Saldo pada 1 Januari 2024	400.000.000.000		18.110.779.814	(462.474.792)	721.156.676		418.369.461.698
Laba tahun berjalan	-	-	-	27.402.589.906	-	-	27.402.589.906
Tambahan modal saham	200.000.000.000	-	-	-	-	-	200.000.000.000
Pembagian dividen	-	-	-	(7.784.055.016)	-	-	(7.784.055.016)
Penutupan kerugian tahun 2022	-	(18.110.779.814)	-	18.110.779.814	-	-	-
Pembentukan cadangan umum	-	4.865.034.386	-	(4.865.034.386)	-	-	-
Pembentukan cadangan tujuan	-	6.057.996.889	-	(6.057.996.889)	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	-	-	-	(374.592.660)	-	-	(374.592.660)
Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	-	-	-	-	480.284.805	-	480.284.805
Saldo pada 31 Desember 2024	600.000.000.000	10.923.031.275	25.969.215.977	1.201.441.481	638.093.688.733		Balance as of December 31, 2024
Laba tahun berjalan	-	-	-	16.000.901.465	-	-	16.000.901.465
Pembagian dividen	-	-	-	(10.961.035.962)	-	-	(10.961.035.962)
Pembentukan cadangan umum	-	6.850.647.480	-	(6.850.647.480)	-	-	-
Pembentukan cadangan tujuan	-	9.590.906.467	-	(9.590.906.467)	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	-	-	-	(168.284.048)	-	-	(168.284.048)
Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	-	-	-	-	4.223.881.249	-	4.223.881.249
Saldo pada 31 Desember 2025	600.000.000.000	27.364.585.222	14.399.243.485	5.425.322.730	647.189.151.437		Balance as of December 31, 2025

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of the financial statements as a whole.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF CASH FLOW
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Des 2025	31 Des 2024	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Penerimaan kas dari pelanggan		395.697.952.897	348.112.529.220	Cash receipt from customers
Pembayaran kas kepada karyawan		(19.010.248.231)	(16.361.300.580)	Payment to employees
Pembayaran beban operasional lainnya		(87.554.062.876)	(59.748.143.613)	Payment of other operating expense
Pembayaran beban klaim		(266.293.264.981)	(212.697.181.819)	Payment of claim expense
Pembayaran atas pajak penghasilan		(8.972.526.760)	(9.566.309.900)	Payment for income tax
Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi		13.867.850.049	49.739.593.308	Net cash flows provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities
Pencairan deposito berjangka		96.216.338.129	73.580.888.002	Termination of time deposits
Penempatan deposito berjangka		(70.555.000.000)	(167.123.180.680)	Placement in time deposits
Penempatan obligasi		(15.636.150.000)	(177.136.771.788)	Placement in bonds
Pencairan obligasi		-	29.500.000.000	Termination of bonds
Pencairan reksadana		76.390.265.612	178.771.828.744	Termination of mutual funds
Penempatan reksa dana		(153.584.822.912)	(222.076.106.333)	Placement in mutual funds
Penerimaan dari hasil investasi		48.364.538.502	49.225.198.973	Receipt from return of investment
Perolehan aset tetap		(499.714.980)	(322.034.424)	Acquisition of fixed assets
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(19.304.545.650)	(235.580.177.506)	Net cash flows used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash Flows from Financing Activities
Penerimaan tambahan modal saham		-	200.000.000.000	Proceeds from additional share capital
Pembayaran dividen		(10.961.035.962)	(7.784.055.016)	Dividend payment
Pembayaran sewa pembiayaan		(667.093.000)	(927.402.000)	Payments for finance lease
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		(11.628.128.962)	191.288.542.984	Net cash flows provided by (used in) financing activities
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas		(17.064.824.563)	5.447.958.786	Net increase (decrease) cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun		102.617.678.526	97.169.719.740	Cash and equivalents at the beginning of year
Kas dan setara kas akhir tahun		85.552.853.964	102.617.678.526	Cash and equivalents at the end of year

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of the financial statements as a whole.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Jamkrida Jakarta atau Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroda) ("Perusahaan") didirikan dengan nama PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta yang disingkat dengan PT Jamkrida Jakarta berdasarkan Akta No. 9 dari Notaris Yualita Widyadhari S.H., MKn., pada tanggal 10 November 2014 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya No. AHU- 34446.40.10.2014 tanggal 13 November 2014.

Pada tanggal 22 Maret 2024, berdasarkan Akta No. 62 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, M.Kn, telah terjadi perubahan modal disetor yang semula sebesar Rp400.000.000.000 menjadi Rp600.000.000.000. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0073131.AH.01.11 tahun 2024, yang diterbitkan pada tanggal 6 April 2024.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP- 58/NB.223/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 yang menetapkan Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan kepada PT Jamkrida Jakarta.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha meliputi usaha dalam bidang jasa penjaminan kredit. Setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan dapat melaksanakan usaha pemberian jasa penjaminan dalam bentuk perseroan, melakukan kegiatan usaha lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundangan-undangan untuk menjaga likuiditas Perusahaan sesuai dengan rasio yang ditetapkan.

Pada tanggal 27 Maret 2025, berdasarkan akta No. 04 yang dibuat oleh Notaris Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn telah terjadi perubahan Alamat kantor Perusahaan yang sebelumnya di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lantai 14, Jl. Abdul Muis No. 66, Petojo Selatan, Jakarta Pusat, berubah menjadi Gedung Jaya, Lantai 3, Jl. M.H. Thamrin No.12, Desa/Kelurahan Kebon Sirih, Kec.Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

1. GENERAL

a. The Entity's Establishment

PT Jamkrida Jakarta or Jakarta Regional Credit Guarantee (Perseroda) (the "Company") was established under the name PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta abbreviated as PT Jamkrida Jakarta based on Deed No. 9 from Notary Yualita Widyadhari S.H., MKn., on November 10, 2014 and has received approval from the Minister of Justice and Human Rights with its decree No. AHU- 34446.40.10.2014 dated November 13, 2014.

On March 22, 2024, based on Deed No. 62 drawn up by Notary Ashoya Ratam, SH, M.Kn, there was a change in paid-up capital from Rp400,000,000,000 to Rp600,000,000,000. The amendment deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0073131.AH.01.11 of 2024, issued on April 6, 2024.

Based on the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP58/NB.223/2019 dated August 30, 2019, the Granting of License for the Establishment of Syariah Business Unit Guarantee Company to PT Jamkrida Jakarta.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of business activities covers business in the field of credit guarantee services. After obtaining permission from the Minister of Finance and/or the Financial Services Authority, the Company can carry out the business of providing guarantee services in the form of a company, carrying out other business activities permitted by laws and regulations to maintain the Company's liquidity in accordance with the established ratio.

On March 27, 2025, based on deed No. 04 made by Notary Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn, there was a change in the Company's office address which was previously at the Abdul Muis Technical Service Building, 14th Floor, Jl. Abdul Muis No. 66, Petojo Selatan, Central Jakarta, changed to Jaya Building, 3rd Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 12, Kebon Sirih Village/Sub-district, Menteng District, Central Jakarta Administrative City, DKI Jakarta Province.

1. UMUM (lanjutan)

b. Susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Karyawan

Berdasarkan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Akta No. 29 tanggal 24 November 2025 mengenai Pengangkatan Komisaris Perusahaan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025
<u>Komisaris</u>	
Komisaris Utama	Andrianto Wahyu Adi
Komisaris	Iman Satria
<u>Dewan Direksi</u>	
Direktur Utama	Agus Supriadi
Direktur	Jimmi Setya Budi

Berdasarkan Akta No. 60 tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Perusahaan melakukan perubahan Anggaran Dasar terkait masa jabatan Dewan Pengawas Syariah yang kini menjadi 4 tahun.

Selain itu, berdasarkan Akta No. 61 tanggal 22 Maret 2024 dari Notaris yang sama, Ashoya Ratam, SH, M.Kn, yang dibuat di Jakarta, dilakukan Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Syariah Perusahaan. Susunan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua	:	Masykuri Abdillah	:
Anggota	:	Euis Amalia	:

Perusahaan memiliki susunan Komite investasi sebagai berikut:

Penanggung Jawab	Agus Supriadi
Penanggung Jawab	Jimmi Setya Budi
Penyusun Materi	Subhan Sahlan
Komite Investasi	
Anggota	M Irwan Ramdhan

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebanyak 79 dan 72 karyawan (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Board of Directors, Board of Sharia Supervisory and Employees

Based on the Decision Outside the General Meeting of Shareholders Deed No. 29 dated November 24, 2025 regarding the Appointment of Commissioners of the Company, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as at December 31, 2025 and 2024 is as follows:

	2024	
<u>Commissioner</u>		
President Commissioner	Andrianto Wahyu Adi	
Commissioner	-	
<u>Board of Directors:</u>		
President Director	Agus Supriadi	
Director	Jimmi Setya Budi	

Based on Deed No. 60 dated March 22, 2024 made by Notary Ashoya Ratam, SH, M.Kn, the Company amended its Articles of Association regarding the term of office of the Sharia Supervisory Board which is now 4 years.

In addition, based on Deed No. 61 dated March 22, 2024 of the same Notary, Ashoya Ratam, SH, M.Kn, made in Jakarta, the Company's Sharia Supervisory Board was reappointed. The composition of the Sharia Supervisory Board as of December 31, 2025 and 2024 is as follows:

Sharia Supervisory Board:

Chairman	
Member	

The Company has the following investment Committee composition:

Person responsible	
Person responsible	
Preparer of Investment	
Committee Materials	
Member	

The Company's number of employees as of December 31, 2025 and 2024 was 79 and 72 employees (unaudited).

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) BARU DAN REVISI

a. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2025)

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan standar akuntansi keuangan ("SAK") dan intepretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi termasuk pengesahan amedemen dan penyesuaian tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan mempengaruhi laporan keuangan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025.

SAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amedemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing. Amendemen tentang kekurangan ketertukaran. Amendemen ini memperjelas pengaturan terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak bertukarkan serta pengungkapannya, berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025.
- PSAK 117 memperkenalkan Pendekatan Block Building, yang dimodifikasi untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung, yang digambarkan sebagai Pendekatan Biaya Variabel. Terdapat penyederhanaan jika kriteria tertentu terpenuhi dengan menggunakan Pendekatan Alokasi Premi. PSAK 117 ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 dengan penerapan dini diperkenankan.
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi – Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif, berlaku efektif ketika entitas pertama kali menerapkan PSAK 117.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (IFAS)

a. Standards (SAKs) and Interpretation to Financial Accounting Standards (ISAKs) Issued and Effective in the Current Year (on or after January 1, 2025)

In the current year, the Company has adopted all of the new and revised financial accounting standards (SAK) and interpretation to financial accounting standards (ISAK) including amendments and annual improvements issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to its operations and affected to the financial statements effective for accounting period beginning on or after January 1, 2025.

The New and revised SAKs and ISAKs including amendments and annual improvements effective in the current year are as follows:

- *Amendment to PSAK 221: Effect of Changes in Foreign Exchange Rates. Amendment on lack of convertibility. This amendment clarifies the provisions related to conditions when a currency is not convertible and its disclosure, effective on or after January 1, 2025.*
- *PSAK 117 introduces the Block Building Approach, which is modified for insurance contracts with direct participation features, described as a Variable Fee Approach. There is simplification if certain criteria are met by using the Premium Allocation Approach. This PSAK 117 is effective for the annual reporting period beginning on or after January 1, 2025 with early application permitted.*
- *Amendment to PSAK 117 – Insurance Contracts – Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 – Comparative Information, effective when the entity first applies PSAK 117.*

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) BARU DAN REVISI (lanjutan)

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (IFAS) (continued)

b. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan

b. Standards (SAKs) and Interpretation to Financial Accounting Standards (ISAKs) Issued but not Effective in the Current Year

- PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan terkait Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan. Amandemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 mengenai penghentian pengakuan liabilitas keuangan dan mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST), aset keuangan dengan fitur non-recourse, dan instrumen terkait kontraktual seperti tranche. Amandemen ini juga memodifikasi ketentuan dalam PSAK 107 terkait persyaratan pengungkapan untuk investasi dalam instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain dan menambahkan ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Tanggal efektif 1 Januari 2026 dan penerapan dini diperkenankan.
- PSAK 118 Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan. PSAK 118 menggantikan PSAK 201, mempertahankan banyak prinsip yang ada tetapi secara signifikan mengubah cara entitas melaporkan "laba rugi operasi". PSAK 118 menetapkan struktur yang jelas untuk laporan laba rugi, mengkategorikan pos-pos menjadi operasi, investasi, pendanaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan. Standar ini mengamanatkan pengungkapan spesifik, termasuk ukuran kinerja yang ditentukan manajemen (MPM), yang harus direkonsiliasi dengan subtotal yang paling mirip dalam laba rugi PSAK. Tanggal efektif 1 Januari 2027 dan penerapan dini diperkenankan.

- PSAK 109: Financial Instrument and PSAK 107 Financial Instrument: Disclosure related to Classification and Measurement of Financial Instruments. The amendment adds and clarifies provisions in PSAK 109 regarding the derecognition of financial liabilities and clarifies the assessment of cash flow characteristics for financial assets with environmental, social and governance (ESG)-linked features, financial assets with non-recourse features and contractually linked instruments such as tranches. The amendment also modifies provisions in PSAK 107 related to disclosure requirements for investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income and adds provisions related to financial instruments with contractual terms that alter the timing or amount of contractual cash flows. Effective date January 1, 2026 and early adoption is allowed.
- PSAK 118 Presentation and Disclosure in Financial Statements. PSAK 118 supersedes PSAK 201, retaining many existing principles but significantly changing how entities report "operating profit or loss." It establishes a defined structure for the statement of profit or loss, categorizing items into operating, investing, financing, income taxes and discontinued operations. The standard mandates specific disclosures, including management-defined performance measures (MPMs), which must be reconciled to the most similar specified subtotal in PSAK's profit or loss. Effective date January 1, 2027 and early adoption is allowed.

Beberapa dari SAK dan ISAK termasuk amendemen dan peyesuaian tahunan yang berlaku dalam tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Entitas telah diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam "Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material."

Several SAKs and ISAKs including amendments and annual improvements that became effective in the current year and are relevant to the Entity's operation have been adopted as disclosed in the "Summary of Material Accounting Policies".

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Perusahaan atau mungkin akan mempengaruhi kebijakan akuntansinya dimasa depan sedang dievaluasi oleh manajemen potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan.

Other SAKs and ISAKs that are not relevant to the Company's operation or might affect the accounting policies in the future are being evaluated by the management the potential impact that might arise from the adoption of these standards to the financial statements.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 yaitu sebagai berikut :

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya Peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan.

b. Dasar pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait. Biaya historis merupakan prinsip penilaian aset yang didasarkan pada biaya yang telah dikeluarkan pada masa lalu untuk memperoleh aset. Nilai wajar adalah harga yang diterima untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas yang didasarkan pada nilai pasar saat terjadinya transaksi antar kedua pelaku pasar.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah yang juga sekaligus merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Ketika Perusahaan menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika Perusahaan mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya maka Perusahaan menyajikan kembali laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan.

c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan di dalam PSAK 224 (Penyesuaian 2015): "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The accounting policies have been applied consistently in the preparation of financial statements except for the adoption of several new and revised SAKs and IFASs that effective on or after January 1, 2025, as follows :

a. Compliance Statement

These financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which comprises the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI) and the Regulation and Guidelines on Financial Statements presentation and disclosures issued by Financial Services Authority (OJK).

b. Basis of Measurement and Preparation of Financial Statements

The measurement basis used in the financial statements is the historical cost, except for certain financial instruments measured at fair value at the end of each reporting period, as outlined in the accounting policies of each relevant account. Historical cost is a principle of asset valuation that is based on the costs that have been incurred in the past to acquire assets. Fair value is the price received for selling an asset or transferring liabilities based on market value at the time of a transaction between the two market participants.

The financial statements, except for statement of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. Statement of cash flows are prepared using direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Presentation currency used in the preparation of financial statements is Rupiah which also the functional currency of the Company.

When the Company adopts accounting policy retrospectively or restates items in its financial statements or the Company reclassifies the items in its financial statements, the statement of financial position at the beginning of comparative period is presented.

c. Transactions with Related Parties

The Company have made certain transactions with related parties as defined under PSAK 224 (Improvement 2015): "Related Parties Disclosures".

A party is considered to be related to the Company if:

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan perusahaan pelapor jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas perusahaan pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas perusahaan pelapor; atau
 - (iii) personil manajemen kunci perusahaan pelapor atau perusahaan induk perusahaan pelapor.
- b. Suatu perusahaan mempunyai relasi dengan perusahaan pelapor jika perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) perusahaan dan perusahaan pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya perusahaan induk, perusahaan anak, dan perusahaan anak berikutnya terkait dengan perusahaan lain).
 - (ii) satu perusahaan adalah perusahaan asosiasi atau ventura bersama dari perusahaan lain (atau perusahaan asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perusahaan, yang mana perusahaan lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) kedua perusahaan tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) suatu perusahaan adalah ventura bersama dari perusahaan ketiga dan perusahaan yang lain adalah perusahaan asosiasi dari perusahaan ketiga.
 - (v) perusahaan tersebut adalah suatu program imbalan paska kerja untuk imbalan kerja dari salah satu perusahaan pelapor atau perusahaan lain yang terkait dengan perusahaan pelapor. Jika perusahaan pelapor adalah perusahaan yang menyelenggarakan program tersebut, maka perusahaan sponsor juga berelasi dengan perusahaan pelapor.
 - (vi) perusahaan yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (i).
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a.i) memiliki pengaruh signifikan atas perusahaan atau personil manajemen kunci perusahaan (atau perusahaan induk dari perusahaan).

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 37 atas laporan keuangan.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Transactions with Related Parties (continued)

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting company if that person:
 - (i) has control or joint control over the reporting company;
 - (ii) has significant influence over the reporting company; or
 - (iii) is a member of the key management personnel of the reporting company or of a parent of the reporting company.
- b. An company is related to the reporting company if any of the following conditions applies:
 - (i) the company and the reporting company are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - (ii) one company is an associate or joint venture of the other company (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the other company is a member).
 - (iii) both entities are joint ventures of the same third party.
 - (iv) one company is a joint venture of a third company and the other company is an associate of the third company.
 - (v) the company is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting company or an company related to the reporting company. If the reporting company in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting company.
 - (vi) the company is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - (vii) a person identified in (a.i) has significant influence over the company or is a member of the key management personnel of the company (or of a parent of the company).

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 37 to the financial statements

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Pelaporan Segmen

Perusahaan melaporkan informasi segmen yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

Sebuah segmen operasi adalah sebuah komponen dari Perusahaan yang:

- terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari perusahaan yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Perusahaan melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam perusahaan.

e. Instrumen Keuangan

(1) Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Aset keuangan diakui pada posisi keuangan ketika entitas menjadi pihak dalam penyediaan instrumen secara kontraktual.

Semua aset keuangan diakui dan tidak diakui berdasarkan tanggal perdagangan ketika pembelian atau penjualan aset keuangan dilakukan berdasarkan kontrak yang persyaratannya mengharuskan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pasar yang bersangkutan.

Aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, dalam hal investasi tidak diklasifikasikan sebagai sebagai nilai wajar melalui laba atau rugi/fair value through profit or loss (FVTPL), nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan akuisisi atau penerbitan aset keuangan.

Semua aset keuangan yang diakui kemudian diukur secara keseluruhan pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar, tergantung pada klasifikasi aset keuangan tersebut.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Segment Reporting

The Company discloses segment information that will enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entity engages and economic environments in which it operates.

An operating segment is a component of an company:

- that engages in business activities which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same company);*
- whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and*
- for which discrete financial information is available.*

Segment reporting made by the company is based on the financial information used by operating decision makers in evaluating operating segment performance and determining the allocation of its resources. Segmentation based on the activity of each legal entity operating activities in the company.

e. Financial Instruments

(1) Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

Financial assets are recognized on the financial position when the entity becomes a party to the contractual provision of the instrument.

All financial assets are recognized and de-recognized on a trade date basis where the purchase or sale of financial assets is under a contract whose terms require delivery of assets within the time frame established by the market concerned.

Financial assets are initially measured at fair value, in the case of investments not classified as fair value through profit or loss (FVTPL), fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issuance of financial assets.

All recognized financial assets are subsequently measured in their entirety at either amortized cost or fair value, depending on the classification of the financial assets.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(1) Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Instrumen utang yang memenuhi kondisi berikut diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- aset keuangan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Instrumen utang yang memenuhi ketentuan berikut ini selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain / *fair value through other comprehensive income* (FVOCI):

- aset keuangan dimiliki dalam model bisnis yang tujuannya dicapai dengan mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Biaya Perolehan Diamortisasi dan Metode Bunga Efektif

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah jumlah ketika aset keuangan diukur pada pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif dari setiap perbedaan antara jumlah awal dan jumlah jatuh tempo, disesuaikan dengan penyisihan kerugian. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto dari aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang diukur kemudian pada biaya perolehan diamortisasi dan pada FVOCI. Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto dari aset keuangan (basis bruto), kecuali untuk aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

(1) Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- *the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and*
- *the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI):

- *the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets; and*
- *the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Amortized Cost and Effective Interest Method

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for any loss allowance. On the other hand, the gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any loss allowance.

Interest income is recognized using the effective interest method for debt instruments measured subsequently at amortized cost and at FVOCI. For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of a financial asset (gross basis), except for financial assets that have subsequently become credit-impaired.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(1) Aset Keuangan (lanjutan)

Biaya Perolehan Diamortisasi dan Metode Bunga Efektif (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit, pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif pada biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika, pada periode pelaporan berikutnya, risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit meningkat sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit, maka pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto aset keuangan.

Investasi dalam Instrumen Utang yang Diklasifikasikan sebagai FVOCI

Instrumen utang pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selanjutnya, perubahan nilai tercatat instrumen utang sebagai akibat dari keuntungan dan kerugian selisih kurs, keuntungan atau kerugian penurunan nilai, dan pendapatan bunga yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif, diakui dalam laporan laba rugi.

Jumlah yang diakui dalam laba rugi sama dengan jumlah yang akan diakui dalam laporan laba rugi jika aset keuangan tersebut diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Semua perubahan lain dalam nilai tercatat dari aset keuangan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi dalam judul cadangan revaluasi investasi. Ketika aset keuangan ini dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi.

Pada pengakuan awal, Perusahaan dapat membuat pemilihan yang tidak dapat dibatalkan (atas dasar instrumen per instrumen) untuk menetapkan investasi pada instrumen ekuitas sebagai pada FVOCI. Penunjukan FVOCI tidak diizinkan jika investasi ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan atau jika merupakan imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis yang menerapkan PSAK 103.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

(1) Financial Assets (continued)

Amortized Cost and Effective Interest Method (continued)

For financial assets that have subsequently become credit-impaired, interest income is recognized by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset. If, in subsequent reporting periods, the credit risk on the credit-impaired financial instrument improves so that the financial asset is no longer credit-impaired, interest income is recognized by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

Investment in Debt Instruments Classified as at FVOCI

The debt instruments are initially measured at fair value plus transaction costs. Subsequently, changes in the carrying amount of the debt instruments as a result of foreign exchange gains and losses, impairment gains or losses, and interest income calculated using the effective interest method are recognized in profit or loss.

The amounts that are recognized in profit or loss are the same as the amounts that would have been recognized in profit or loss if these financial assets had been measured at amortized cost.

All other changes in the carrying amount of these financial assets are recognized in other comprehensive income and accumulated under the heading of investments revaluation reserve. When these financial assets are derecognized, the cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

On initial recognition, the Company may make an irrevocable election (on an instrument-by-instrument basis) to designate investments in equity instruments as at FVOCI. Designation at FVOCI is not permitted if the equity investment is held for trading or if it is contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination to which PSAK 103 applies.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(1) Aset Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan pada FVTPL

Aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI diukur pada FVTPL.

Secara khusus :

- Investasi pada instrumen ekuitas diklasifikasikan sebagai FVTPL, kecuali Perusahaan menetapkan investasi ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau imbalan kontinjensi yang timbul dari kombinasi bisnis seperti pada FVOCI yang tidak dapat dibatalkan pada pengakuan awal.
- Instrumen utang yang tidak memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau kriteria FVOCI diklasifikasikan sebagai FVTPL. Selain itu, instrumen utang yang memenuhi kriteria biaya diamortisasi atau kriteria FVOCI dapat ditetapkan sebagai FVTPL yang tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal jika penetapan tersebut menghilangkan atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan yang akan timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian.

Aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan, dengan keuntungan atau kerugian nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi sepanjang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi termasuk dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan dan dimasukkan dalam item baris "Keuntungan dan Kerugian Lainnya".

Keuntungan dan Kerugian Selisih Kurs

Nilai tercatat aset keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang asing tersebut dan dijabarkan dengan kurs spot pada setiap tanggal pelaporan.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

(1) Financial Assets (continued)

Financial Assets at FVTPL

Financial assets that do not meet the criteria for being measured at amortized cost or FVOCI are measured at FVTPL.

Specifically :

- Investments in equity instruments are classified as at FVTPL, unless the Entity designates an equity investment that is neither held for trading nor a contingent consideration arising from a business combination as at FVOCI irrevocably on initial recognition.
- Debt instruments that do not meet the amortized cost criteria or the FVOCI criteria are classified as at FVTPL. In addition, debt instruments that meet either the amortized cost criteria or the FVOCI criteria may be designated as at FVTPL irrevocably upon initial recognition if such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would arise from measuring assets or liabilities or recognizing the gains and losses.

Financial assets at FVTPL are measured at fair value as at each reporting date, with any fair value gains or losses recognized in profit or loss to the extent they are not part of a designated hedging relationship. The net gain or loss recognized in profit or loss includes any dividend or interest earned on the financial asset and is included in the "Other Gains and Losses" line item.

Foreign Exchange Gains and Losses

The carrying amount of financial assets that are denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot rate as at each reporting date.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(1) Aset Keuangan (lanjutan)

Keuntungan dan Kerugian Selisih Kurs (lanjutan)

Secara khusus :

- untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan, selisih kurs diakui dalam laporan laba rugi pada item baris "Keuntungan atau Kerugian Selisih Kurs";
- untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan, selisih kurs diakui dalam laporan laba rugi pada item baris "Keuntungan atau Kerugian Selisih Kurs";
- untuk instrumen utang yang diukur pada FVOCI yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan, selisih kurs atas biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang tersebut diakui dalam laporan laba rugi pada item baris "Keuntungan atau Kerugian Selisih Kurs";
- untuk aset keuangan yang diukur pada FVTPL yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan, selisih kurs diakui dalam laporan laba rugi pada item baris "Keuntungan atau Kerugian Selisih Kurs"; dan
- untuk instrumen ekuitas yang diukur dengan FVOCI, selisih kurs diakui dalam pendapatan komprehensif lain dalam cadangan revaluasi investasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas investasi dalam instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada FVOCI, piutang sewa, aset kontrak, serta komitmen pinjaman pada kontrak jaminan keuangan. Tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk investasi pada instrumen ekuitas.

Jumlah kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal atas instrumen keuangan tersebut.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

(1) Financial Assets (continued)

Foreign Exchange Gains and Losses (continued)

Specifically :

- for financial assets measured at amortized cost that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss in the "Gains or Losses on Foreign Exchange" line item;
- for financial assets measured at amortized cost that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss in the "Gains or Losses on Foreign Exchange" line item;
- for debt instruments measured at FVOCI that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences on the amortized cost of the debt instrument are recognized in profit or loss in the "Gains or Losses on Foreign Exchange" line item;
- for financial assets measured at FVTPL that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss in the "Gains or Losses on Foreign Exchange" line item; and
- for equity instruments measured at FVOCI, exchange differences are recognized in other comprehensive income in the investments revaluation reserve.

Impairment of Financial Assets

The Company recognizes a loss allowance for expected credit losses ("ECL") on investments in debt instruments that are measured at amortized cost or at FVOCI, lease receivables, contract assets, as well as on loan commitments financial guarantee contracts. No impairment loss is recognized for investments in equity instruments.

The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(1) Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Perusahaan selalu mengakui ECL sepanjang umur untuk piutang usaha, aset kontrak dan piutang sewa. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan ini diestimasi dengan menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan, disesuaikan untuk faktor-faktor yang spesifik bagi debitur, kondisi ekonomi secara umum dan penilaian terhadap arah saat ini maupun arah kondisi perkiraan kerugian pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu uang jika sesuai.

Risiko Kredit Meningkat Signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar (*default*) yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar (*default*) yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal.

Dalam melakukan penilaian ini, Perusahaan mempertimbangkan informasi kuantitatif dan kualitatif yang wajar dan dapat didukung, termasuk pengalaman historis dan informasi berwawasan ke depan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Informasi berwawasan ke depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri tempat debitur Perusahaan beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analis keuangan, badan pemerintah, lembaga pemikir (*think-tanks*) terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal dan memperkirakan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Perusahaan.

Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, pada tanggal Perusahaan menjadi salah satu pihak dari komitmen yang tidak dapat dibatalkan dianggap sebagai tanggal pengakuan awal untuk tujuan penilaian penurunan nilai instrumen keuangan. Dalam menilai apakah terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal atas komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, Perusahaan mempertimbangkan perubahan risiko di mana debitur tertentu akan gagal bayar (*default*) dalam kontrak.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

(1) Financial Assets (continued)

Impairment of Financial Assets (Continued)

The Company always recognizes lifetime ECL for trade receivables, contract assets and lease receivables. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Company's historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

Significant Increase in Credit Risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition.

In making this assessment, the Company considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the industries in which the Company's debtors operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, governmental bodies, relevant think-tanks and other similar organizations, as well as consideration of various external sources of actual and forecast economic information that relate to the Company's core operations.

For loan commitments and financial guarantee contracts, the date that the Company becomes a party to the irrevocable commitment is considered to be the date of initial recognition for the purposes of assessing the financial instrument for impairment. In assessing whether there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition of a loan commitment and financial guarantee contract, the Company considers the changes in the risk that the specified debtor will default on the contract.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(1) Aset Keuangan (lanjutan)

Risiko Kredit Meningkat Signifikan (lanjutan)

Perusahaan secara berkala memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlah tersebut jatuh tempo.

Kebijakan Penghapusan

Perusahaan menghapus aset keuangan jika terdapat informasi yang menunjukkan bahwa debitur berada dalam kesulitan keuangan yang parah dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis. Aset keuangan yang dihapuskan mungkin masih tunduk pada aktivitas penegakan hukum berdasarkan prosedur pemulihan Perusahaan, dengan mempertimbangkan advis hukum jika sesuai. Setiap pemulihan yang dilakukan diakui dalam laporan laba rugi.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan hanya jika hak kontraktual atas arus kas dari aset tersebut berakhir, atau saat aset keuangan tersebut dialihkan dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset kepada pihak lain. Jika Perusahaan tidak mengalihkan atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan dan terus mengendalikan aset yang dialihkan, Perusahaan mengakui hak kepemilikannya atas aset dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang dialihkan, Perusahaan tetap mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar hasil yang diterima.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

(1) Financial Assets (continued)

Significant Increase in Credit Risk (continued)

The Company regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

Write-off Policy

The Company writes off a financial asset when there is information indicating that the debtor is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Company's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

Derecognition of Financial Assets

The Company derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another party. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(2) Liabilitas Keuangan

Semua liabilitas keuangan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif atau pada FVTPL.

Namun, liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat untuk penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, kontrak dan komitmen jaminan keuangan yang diterbitkan oleh Perusahaan, diukur sesuai dengan kebijakan akuntansi spesifik yang ditetapkan di bawah ini.

Liabilitas Keuangan pada FVTPL

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika liabilitas keuangan merupakan imbalan kontinjensi dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan sebagai FVTPL.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- telah diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal, ini merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang diidentifikasi yang dikelola bersama oleh Perusahaan dan memiliki pola pengambilan keuntungan jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif, kecuali untuk derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif.

Liabilitas Keuangan Selanjutnya Diukur pada Biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan imbalan kontinjensi dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, tidak dimiliki untuk diperdagangkan, atau ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

(2) Financial Liabilities

All financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method or at FVTPL.

However, financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies, financial guarantee contracts and commitments issued by the Company, are measured in accordance with the specific accounting policies set out below.

Financial Liabilities at FVTPL

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liability is contingent consideration of an acquirer in a business combination, held for trading or it is designated as at FVTPL.

A financial liability is classified as held for trading if:

- *it has been acquired principally for the purpose of repurchasing it in the near term; or*
- *on initial recognition it is part of a portfolio of identified financial instruments that the Company manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or*
- *it is a derivative, except for a derivative that is a financial guarantee contract or a designated and effective hedging instrument.*

Financial Liabilities Subsequently Measured at Amortized Cost

Financial liabilities that are not contingent consideration of an acquirer in a business combination, not held-for-trading, or designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(2) Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan Selanjutnya Diukur pada Biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Metode suku bunga efektif adalah metode untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran tunai di masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan premi atau diskon lainnya) selama perkiraan umur kewajiban keuangan, atau (jika sesuai) periode yang lebih singkat, untuk biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan.

Keuntungan dan Kerugian Selisih Kurs

Untuk liabilitas keuangan dalam mata uang asing dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan, keuntungan dan kerugian selisih kurs ditentukan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi instrumen tersebut.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs ini diakui dalam "Keuntungan atau Kerugian Selisih Kurs" dalam laporan laba rugi untuk liabilitas keuangan yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan. Untuk liabilitas yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai untuk lindung nilai atas risiko mata uang asing, keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi dalam komponen ekuitas yang terpisah.

Nilai wajar dari liabilitas keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang asing tersebut dan dijabarkan dengan kurs spot pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL, komponen valuta asing merupakan bagian dari keuntungan atau kerugian nilai wajar dan diakui dalam laporan laba rugi untuk liabilitas keuangan yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

(2) Financial Liabilities (continued)

Financial Liabilities Subsequently Measured at Amortized Cost (continued)

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period, to the amortized cost of a financial liability.

Foreign Exchange Gains and Losses

For financial liabilities that are denominated in a foreign currency and are measured at amortized cost as at each reporting date, the foreign exchange gains and losses are determined based on the amortized cost of the instruments.

These foreign exchange gains and losses are recognized in the "Gains or Losses on Foreign Exchange" in profit or loss for financial liabilities that are not part of a designated hedging relationship. For those which are designated as a hedging instrument for a hedge of foreign currency risk, foreign exchange gains and losses are recognized in other comprehensive income and accumulated in a separate component of equity.

The fair value of financial liabilities denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot rate at the end of the reporting period. For financial liabilities that are measured as at FVTPL, the foreign exchange component forms part of the fair value gains or losses and is recognized in profit or loss for financial liabilities that are not part of a designated hedging relationship.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(2) Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangannya jika, dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dilepaskan, dibatalkan, atau habis masa berlakunya. Selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan terutang, termasuk aset non tunai yang dialihkan atau liabilitas yang diambil alih, diakui dalam laporan laba rugi.

Ketika Perusahaan menukar dengan pemberi pinjaman yang eksis, suatu instrumen utang ke instrumen lain dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Perusahaan mencatat modifikasi substansial dari persyaratan liabilitas yang ada atau bagian darinya sebagai penghapusan liabilitas keuangan asli dan pengakuan liabilitas baru.

(3) Pengaturan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah bersih disajikan di laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang dapat diberlakukan secara hukum untuk menghapus jumlah yang diakui; dan bermaksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak untuk kompensasi harus tersedia saat ini daripada bergantung pada peristiwa di masa depan dan harus dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak lawan, baik dalam kegiatan bisnis normal dan dalam hal terjadi gagal bayar (*default*), keadaan tidak dapat membayar (*insolvency*) atau kebangkrutan.

Untuk aset keuangan, diperlukan reklasifikasi antara FVTPL, FVOCI dan biaya perolehan diamortisasi, jika dan hanya jika tujuan model bisnis entitas untuk aset keuangannya berubah sehingga penilaian model sebelumnya tidak berlaku lagi.

Jika reklasifikasi sudah sesuai, maka harus dilakukan secara prospektif sejak tanggal reklasifikasi yang ditetapkan sebagai hari pertama periode pelaporan pertama setelah perubahan model bisnis. Perusahaan tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian, atau bunga yang diakui sebelumnya.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

(2) Financial Liabilities (continued)

Derecognition of Financial Liabilities

The Company derecognizes financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or they expire. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognized in profit or loss.

When the Company exchanges with the existing lender one debt instrument into another one with the substantially different terms, such exchange is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, the Company accounts for substantial modification of terms of an existing liability or part of it as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new liability.

(3) Offsetting Arrangements

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when, and only when, the Company has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

For financial assets, reclassification is required between FVTPL, FVOCI and amortized cost, if and only if the entity's business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

If reclassification is appropriate, it must be done prospectively from the reclassification date which is defined as the first day of the first reporting period following the change in business model. The Company does not restate any previously recognized gains, losses, or interest.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(3) Pengaturan Saling Hapus (lanjutan)

PSAK 109 tidak mengizinkan reklasifikasi:

- untuk investasi ekuitas yang diukur pada FVOCI, atau
- di mana opsi nilai wajar telah dilaksanakan dalam kondisi apapun untuk aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan tidak dapat direklasifikasi.

f. Kas dan Setara Kas dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan entitas. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sehubungan dengan persyaratan perjanjian pinjaman atau perjanjian lainnya disajikan sebagai "Kas di Bank dan Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya" sebagai aset tidak lancar.

Kas di bank dan deposito berjangka yang akan digunakan untuk membayar liabilitas yang akan jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun, disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

g. Investasi

Hasil investasi dari deposito berjangka, obligasi dan reksa dana diakui atas dasar proporsi waktu sesuai dengan jumlah pokok dan suku bunga yang berlaku.

Piutang hasil investasi dan Pendapatan investasi termasuk aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi yang diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

h. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

Uang muka merupakan pembayaran diawal yang dilakukan manajemen Perusahaan bertujuan menunjang kegiatan Perusahaan.

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus, kecuali untuk biaya dibayar di muka fee based yang diamortisir secara sistematis sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

(3) Offsetting Arrangements (continued)

PSAK 109 does not allow reclassification:

- for equity investments measured at FVOCI, or
- where the fair value option has been exercised under any circumstances for the financial asset or financial liability.

The financial liability shall not be reclassified.

f. Cash and Cash Equivalents and Restricted Cash

Cash is the means of payment that ready and free to be used to finance the activities of the entity. Cash equivalents are investments that are highly liquid, short-term, and it can quickly become cash in the amount that can be determined and have the risk of changes in value are not significant with maturities of three months or less from the date of placement and not pledged as collateral or restricted in usage.

Cash in banks and deposits that are restricted with respect to the terms of the loan or other agreement are presented as "Restricted Cash in Banks and Deposits" as non-current assets.

Cash in banks and deposits will be used to pay liabilities due within 1 (one) year, is presented as part of current assets.

g. Investments

Interest income from investment in time deposits, bonds and mutual funds is recognized on a time proportion basis, based on principal outstanding and prevailing interest rates.

Interest receivables and Investment income include Financial assets at amortized acquisition costs are measured at the amount recognized at the time of initial recognition minus principal payments, plus or minus cumulative amortization using the effective interest rate metric calculated from the difference between the initial value and its maturity value and subtracted from the impairment loss reserve.

h. Advances and Prepaid Expenses

Advances is an initial payment made by Company's management to support Company activities.

Prepaid expenses are amortized over their beneficial or contract periods using the straight-line method, except for prepaid expenses of fee based which are amortized on a systematic basis according to the pattern of recognition of guarantee fee.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

i. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Renovasi dan Partisi
 Kendaraan
 Inventaris

Tahun / Years

3 tahun/year
 3 tahun/year
 3 tahun/year

Renovation and partitioning
 Vehicle
 Inventory

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

j. Sewa

Pada tanggal inisiasi kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa berdasarkan apakah kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal permulaan sewa. Aset hak-guna pada awalnya diukur berdasarkan jumlah pengukuran awal liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima, ditambah dengan biaya langsung awal yang terjadi dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan berdasarkan masa sewa, menggunakan metode garis lurus yang mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi masa depan.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Fixed Assets

Property and equipment are carried at cost, excluding day-to-day servicing, less accumulated depreciation and any impairment in value.

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended use.

Expenses incurred after fixed assets are used, such as repair and maintenance expenses, are charged to profit and loss at the time of occurrence. If these expenses cause an increase in future economic benefits from the use of fixed assets that may exceed their normal performance, they are capitalized in addition to the cost of acquiring fixed assets.

j. Lease

At inception of a contract, the Company assesses whether a contract is, or contains, a lease based on whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Company recognized a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured based on the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, less any lease incentives received, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located. The right-of-use asset is subsequently depreciated based on the lease term, using the straight-line method which closely reflects the expected pattern of consumption of the future economic benefits.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

j. Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa pada awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan. Liabilitas sewa selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

k. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan pascakerja kepada karyawan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja (UUTK) No.13 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang "Cipta Kerja" dan Peraturan Perusahaan.

Perhitungan liabilitas imbalan pascakerja tersebut didasarkan pada metode aktuarial *Projected Unit Credit*.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang pada laporan posisi keuangan merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti serta penyesuaian atas biaya jasa lalu. Perusahaan mengakui seluruh keuntungan atau kerugian aktuarial melalui penghasilan komprehensif lain, jika relevan.

l. Pengakuan Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 115 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

- (1) Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- (2) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
- (3) Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Lease (continued)

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Company's incremental borrowing rate. The lease liability is subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

k. Post-employment Benefits Liabilities

The Company recognizes post-employment benefit obligations to employees in accordance with the Manpower Law (UUTK) No. 13 of 2003, Government Regulation no. 35 of 2021 which is the implementation of Law no. 11 of 2020 concerning "Job Creation" and Company Regulations.

The calculation of the post-employment benefits liabilities is based on the Projected Unit Credit actuarial method.

The amount recognized as long-term postemployment benefits liabilities in the statement of financial position represents the present value of defined benefit obligation and the adjustment for past service costs. The Company recognized all actuarial gains or losses through other comprehensive income, if relevant.

l. Recognition Guarantee Revenue

The Company has applied PSAK No. 115, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

- (1) Identify contracts with a customer;*
- (2) Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*
- (3) Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Company estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

1. Pengakuan Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (lanjutan)

- (4) Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin;
- (5) Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Imbal jasa penjaminan ditentukan berdasarkan hasil dari identifikasi hak dan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak.

Dalam perspektif bisnis penjaminan, hak dan kewajiban dimaksud merupakan risiko yang akan dan telah dialihkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam kontrak. Kontrak dimaksud memiliki jangka waktu pelaksanaan, maka dari itu kewajiban pelaksanaan entitas diukur berdasarkan risiko yang akan dan telah dilepas sepanjang kontrak berlaku.

Pendapatan imbal jasa penjaminan diakui sejak bulan sertifikat penjaminan diterbitkan dan diamortisasi berdasarkan metode jumlah angka tahun sepanjang jangka waktu penjaminan.

Biaya atas perolehan kontrak diakui sebagai biaya inkremental. Biaya tersebut secara eksplisit dibebankan kepada pelanggan, yang diamortisir secara sistematis sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan.

Imbal jasa penjaminan atas resiko yang dialihkan ke penjamin ulang diakui sebagai beban penjaminan ulang yang diakui sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Komisi diterima dari penjamin ulang diakui sebagai pendapatan komisi pada saat resiko dialihkan. Penerimaan dari pelanggan atas resiko yang belum terealisasi diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

1. Recognition Guarantee Revenue (continued)

- (4) Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin;
- (5) Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

Implementation obligations can be fulfilled in 2 ways, namely:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

The amount of the guarantee fee is determined based on the results of the identification of performance rights and obligations in the contract.

In the underwriting business perspective, these rights and obligations are risks that will and have been transferred as stated in the contract. The contract in question has a performance period, therefore the entity's obligation to perform is measured based on the risks that will be disposed of as long as the contract is valid.

Guarantee fee is recognized based upon the issuance of guarantee certificate and amortized based on sum of the year digits method over the term of the guarantee.

The cost of obtaining the contract are recognized as incremental cost. The cost are explicitly charged to the customer, which are systematically amortized according to the pattern of recognition of the guarantee fee.

Guarantee fee for the risk transferred to the re-guaranteed is recognized as re-guarantee premium expense in accordance with the pattern of guarantee fee recognition. Commission received from the re-guaranteed is recognized as commission income when the risk is transferred. Receipt from costumers for unrealized risk are recognized as deferred income.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

m. Beban Klaim

Estimasi atas klaim yang terjadi baik sudah dilaporkan maupun belum dilaporkan diakui sebagai cadangan klaim. Pengukuran cadangan klaim mengacu pada konsep perhitungan penurunan nilai dalam PSAK 109 instrumen keuangan yang dihitung dengan melakukan estimasi variabel makro yang berkorelasi dengan probabilitas klaim dan didasari total saldo penjaminan bruto. Estimasi klaim atas risiko yang dialihkan ke penjaminan ulang diakui sebagai aset penjaminan ulang dan diukur dengan pola pembentukan cadangan klaim yang didasari dari selisih antara total saldo penjaminan bruto dan total saldo penjaminan neto.

Perubahan jumlah utang klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan

Hak subrogasi atas klaim diakui sebagai pendapatan subrogasi pada saat hak subrogasi dapat direalisasi.

n. Perpajakan

Perusahaan menerapkan PSAK 212 Pajak Penghasilan". Selain itu, Perusahaan juga menerapkan ISAK 20 "Pajak Penghasilan: Perubahan Dalam Status Pajak Perusahaan atau Para Pemegang Saham".

Pengakuan

Jumlah pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya, yang belum dibayar, diakui sebagai liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terhutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya diakui sebagai aset.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- pengakuan awal *goodwill* ; atau
- pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang
 - bukan dari transaksi kombinasi bisnis; dan
 - pada saat transaksi, tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak (rugi pajak).
- perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada Perusahaan anak, cabang dan Perusahaan asosiasi, dan bagian partisipasi dalam pengaturan bersama, tetapi hanya sepanjang bahwa Perusahaan mampu mengontrol waktu pembalikan perbedaan dan besar kemungkinan pembalikan tidak akan terjadi pada perkiraan masa mendatang.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Claim Expense

The estimated of claim incurred and reported and claim incurred but not yet reported are recognized as claim reserved. Measurement of claim reserved refers to the concept of impairment calculating as in PSAK 109: Financial Instrument that is calculated by estimating macro variables that are correlated with the probability of claims and based on the total gross balance of the guarantor. Estimated claims for risk transferred to reinsurance are recognized as re-guarantor assets and are measured using the pattern of reserves for claims based on the difference between the total gross guarantee balance and the total net guarantee balance.

Changes in the amount of debt claims arising from the result of a further review process and the difference between the amount of debt claim and claims paid are recognized in the profit or loss at the year of change.

Subrogation risk on claims are recognized as subrogation income when subrogation rights can be realized.

n. Taxation

The Company adopted PSAK 212 "Income Taxes". Besides, the Company also adopted IFAS 20 "Income Taxes: Changes in the Tax Status of an Enterprise or its Shareholders".

Recognition

Current tax for current and prior periods, to the extent unpaid, is recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess is recognized as an asset.

Deferred tax liability is recognized for all taxable temporary differences unless the deferred tax liability arises from:

- initial recognition of goodwill; or
- the initial recognition of an asset or liability of a transaction which
 - other than in a business combination; and
 - at the time of the transaction, does not affect either the accounting or the taxable profit (fiscal loss).
- temporary differences associated with investments in subsidiaries, branches, and associates, and interests in joint arrangements, but only to the extent that the Company is able to control the timing of the reversal of the differences and it is probable that the reversal will not occur in the foreseeable future.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

n. Perpajakan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan, kerugian fiskal dan kredit pajak yang belum dimanfaatkan sepanjang besar kemungkinan akan ada laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup memadai sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan kecuali jika timbul perbedaan temporer dapat dikurangkan yang berasal dari :

- a. pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang:
 - i. bukan dari transaksi kombinasi bisnis; dan
 - ii. pada saat transaksi, tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak (rugi pajak).
- b. perbedaan temporer dapat dikurangkan yang ditimbulkan dari Perusahaan anak, cabang dan Perusahaan asosiasi, serta bagian partisipasi dalam ventura bersama sepanjang dan hanya sepanjang kemungkinan besar terjadi:
 - i. perbedaan temporer akan terpulihkan pada masa depan yang dapat diperkirakan; dan
 - ii. laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan.

Pengukuran

Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar (direstitusi) kepada otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada periode pelaporan.

Aset dan Liabilitas pajak tangguhan tidak boleh didiskontokan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada akhir periode pelaporan. Perusahaan mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang cukup memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Pengurangan jumlah tercatat aset pajak tangguhan dilakukan pembalikan apabila kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya cukup memadai.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Taxation (continued)

Deferred tax asset is recognized for deductible temporary differences, unused tax losses and unused tax credits to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences can be utilized unless the deferred tax asset arises from :

- a. *the initial recognition of an asset or liability of a transaction which*
 - i. *other than in a business combination; and*
 - ii. *at the time of the transaction, does not affect either the accounting or the taxable profit (fiscal loss).*
- b. *deductible temporary differences arising from investments in subsidiaries, branches and associates, and interests in joint arrangements, are only recognized to the extent that it is probable that:*
 - i. *the temporary difference will reverse in the foreseeable future and*
 - ii. *taxable profit will be available against which the temporary difference will be utilized.*

Measurement

Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods is measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted for the reporting period.

Deferred tax assets and liabilities shall be measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted for the reporting period.

Deferred tax assets and liabilities may not be discounted.

The carrying amount of a deferred tax asset shall be reviewed at the end of each reporting period. An Company shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

n. Perpajakan (lanjutan)

Alokasi

Untuk transaksi atau peristiwa lainnya yang diakui dalam laba rugi, setiap pengaruh pajak terkait juga diakui dalam laba rugi. Untuk transaksi atau peristiwa lainnya yang diakui diluar laba rugi (baik dalam OCI maupun langsung dalam ekuitas), setiap pengaruh pajak terkait juga diakui diluar laba rugi (baik dalam OCI maupun langsung dalam ekuitas, masing-masing). Demikian juga, pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan dalam kombinasi bisnis mempengaruhi jumlah goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis tersebut atau keuntungan dari pembelian dengan diskon.

Saling Hapus

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika, dan hanya jika, memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait Perusahaan kena pajak yang sama, atau Perusahaan berniat untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

o. Transaksi Dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Perusahaan menerapkan PSAK 221 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing".

Standar ini mengatur pengukuran dan penyajian mata uang suatu Perusahaan di mana pengukuran mata uang harus menggunakan mata uang fungsional sementara penyajian mata uang dapat menggunakan mata uang selain mata uang fungsional.

Dalam menentukan mata uang fungsional, Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- mata uang yang paling mempengaruhi harga jual untuk barang dan jasa, atau dari suatu negara yang kekuatan persaingan dan perundang-undangannya sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasa;
- mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, material dan biaya-biaya lain dari pengadaan barang atau jasa;
- mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan (antara lain penerbitan instrumen utang dan ekuitas) dihasilkan; dan
- mata uang dalam mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Taxation (continued)

Allocation

For transactions and other events recognized in profit or loss, any related tax effects are also recognized in profit or loss. For transactions and other events recognized outside profit or loss (either in OCI or directly in equity), any related tax effects are also recognized outside profit or loss (either in OCI or directly in equity, respectively). Similarly, the recognition of deferred tax assets and liabilities in a business combination affects the amount of goodwill arising in that business combination or the amount of the bargain purchase gain recognized.

Offset

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if, and only if, legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to the same taxable Company, or the Company intends to settle its current tax assets and liabilities on a net basis.

o. Foreign Currency Transactions And Balances

The Company adopted PSAK 221 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates".

This standard sets up measurement and presentation currency of an Company in which the measurement currency should use a functional currency as the presentation currency may use a currency other than the functional currency.

In determining the functional currency of the Company to consider the following factors:

- currency that most influences the selling price for goods and services, or from a country whose competitive forces and legislation largely determine the selling price of goods and services;
- currency that most influences the cost of labor, material and other costs of the procurement of goods or services;
- the currency in which funds from financing activities (i.e. issuing debt and equity instruments) are produced; and
- the currency in which receipts from operating activities are usually retained.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

o. Transaksi Dan Saldo Dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

Perusahaan menggunakan mata uang Rupiah sebagai mata uang fungsional dan mata uang pelaporan.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat kedalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode tersebut. Laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kurs yang digunakan adalah kurs tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia, sebagai berikut :

	2025
USD	16.162

p. Penurunan Nilai atas Aset Nonkeuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi sebagai "rugi penurunan nilai".

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Foreign Currency Transactions And Balances (continued)

The Company using the Indonesian Rupiah currency as the functional currency and the reporting currency.

Transactions in foreign currencies are recorded into Indonesian Rupiah using the exchange rate at the transactions incurred. On the date of the statement of financial position, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Indonesian Rupiah using the middle rate set by Bank Indonesia on the last banking day of the period. Gains or losses are credited or charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The exchange rates used are the middle exchange rate announced by Bank Indonesia, as follows :

	2024	
USD	15.416	USD

p. Impairment on Non-financial Assets

The Company assesses at end of each annual reporting year whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available-for-use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash generating unit (CGU)'s fair value less costs to sell and its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or group of assets.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses are recognized in the profit or loss as "impairment losses".

A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

p. Penurunan Nilai atas Aset Nonkeuangan

Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan yang dibebankan disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai residu, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

q. Cadangan Klaim dan Aset Penjaminan Ulang

Cadangan klaim dan aset penjamin ulang diukur dengan mengacu pada penurunan nilai yang diatur dalam PSAK 109, dan estimasi yang dibentuk dengan mempertimbangkan pertumbuhan klaim yang telah terjadi, nilai seluruh penjaminan, faktor makro ekonomi yang relevan dan terkorelasi, serta profitabilitas tertimbang atas skenario-skenario ekonomi yang mungkin terjadi.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG MATERIAL

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 3.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Impairment on Non-financial Assets

If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

q. Claim Reserves and Re-Guarantee Assets

Claim reserved and re-guaranteed assets are measured by referring to the impairment set forth in PSAK 109, and estimated established by considering the occurred claim development, total sum of guaranteed, relevant and correlated macro economic factors, and weighted profitability under economic scenarios that might happen.

4. MATERIAL OF ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

In the application of the Company's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Classification of Financial Assets and Liabilities

The company determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by assessing whether these assets and liabilities meet the criteria set out in PSAK No. 109. Financial assets and financial liabilities are recorded in accordance with the Company's accounting policies as disclosed in Note 3.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (forward-looking), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan

Perusahaan mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Perusahaan mengukur Cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

c. Komitmen Sewa Operasi-Perusahaan Sebagai Penyewa

Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa. Perusahaan menentukan bahwa sewa tersebut memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa sesuai dengan PSAK No. 116, Sewa.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

4. MATERIAL OF ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Allowance for Impairment Losses of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Company shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Company shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which is forward-looking, that is available without undue cost or effort.

The Company shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Company shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12 month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

c. Operating Lease Commitments-Company as Lessee

The company has signed a number of lease agreements. The Company has determined that those leases meet the criteria for recognition and measurement of right-to-use assets and lease liabilities in accordance with PSAK No. 116, Leases.

d. Income Tax

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan diungkapkan pada Catatan 39.

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap tersebut.

c. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

4. MATERIAL OF ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Company based its estimates and assumptions on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. Interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial assets are set out in Note 39.

b. Estimated Useful Lives of Fixed Assets

The useful life of each of the item of the Company's property and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of property and equipment would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

c. Impairment of Non-Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 23 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

e. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

f. Cadangan Klaim dan Aset Penjaminan Ulang

Cadangan klaim dan aset penjamin ulang diukur dengan mengacu pada penurunan nilai yang diatur dalam PSAK 109, dan estimasi yang dibentuk dengan mempertimbangkan pertumbuhan klaim yang telah terjadi, nilai seluruh penjaminan, faktor makro ekonomi yang relevan dan terkorelasi, serta profitabilitas tertimbang atas skenario-skenario ekonomi yang mungkin terjadi.

4. MATERIAL OF ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

d. Long-Term Employee Benefits

The determination of the long-term employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in Note 23 and include, among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company's assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods.

While it is believed that the Company's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of long-term employee benefits liability.

e. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets and are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets and liabilities that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

f. Claim Reserves and Re-Guarantee Assets

Claim reserved and re-guaranteed assets are measured by referring to the impairment set forth in PSAK 109, and estimated established by considering the occurred claim development, total sum of guaranteed, relevant and correlated macroeconomic factors, and weighted profitability under economic scenarios that might happen.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consists of:

	2025	2024	
Kas	22.057.356	46.172.949	Cash on hand
Bank			Cash in Banks
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Bank DKI	962.104.462	1.564.717.738	PT Bank DKI
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	203.842.563	2.376.124	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	88.412.455	34.636.606	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank KB Bukopin Tbk	49.931.875	2.384.801	PT Bank KB Bukopin Tbk
Kospin Jasa	26.928.518	3.027.417	Kospin Jasa
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.806.600	9.717.758	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT BPRS Buana Mitra Perwira	4.982.172	4.912.964	PT BPRS Buana Mitra Perwira
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	4.309.308	6.697.331	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.261.088	1.973.868	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Raya Indonesia	1.860.000	-	PT Bank Raya Indonesia
PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia	1.837.217	1.826.833	PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia
PT BPRS Harta Insan Karimah	-	1.522.970	PT BPRS Harta Insan Karimah
PT BPR Bahana Ekonomi	-	9.265.817	PT BPR Bahana Ekonomi
PT Bank MNC Internasional Tbk	-	1.925.000	PT Bank MNC Internasional Tbk
Jumlah Bank	1.354.276.258	1.644.985.227	Total Cash in Banks
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(58.978.361)	(58.978.361)	Allowance for impairment losses
Jumlah	1.295.297.897	1.586.006.866	Total
Deposito Berjangka			Time Deposit
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Bank DKI	50.450.000.000	67.000.000.000	PT Bank DKI
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.000.000.000	10.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	9.900.000.000	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.000.000.000	4.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen	-	12.700.000.000	PT Bank Mandiri Taspen
PT BPRS Harta Insan Karimah	-	1.000.000.000	PT BPRS Harta Insan Karimah
Jumlah Deposito Berjangka	84.350.000.000	94.700.000.000	Total Time Deposit
Kas dalam proses	-	6.400.000.000	Cash in transit
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(114.501.289)	(114.501.289)	Allowance for impairment losses
Jumlah	85.552.853.964	102.617.678.526	Total

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Deposito berjangka merupakan penempatan dana untuk investasi Perusahaan dengan jangka waktu kurang dari tiga (3) bulan dengan suku bunga deposito tahun 2025 dan 2024 masing-masing berkisar 3,25%- 6,00% dan 3,50%- 5,00%.

Kas dalam proses merupakan penjualan reksa dana insight money senilai Rp5.400.000.000 dan pelepasan deposito Bank MNC International senilai Rp1.000.000.000 pada tanggal 30 Desember 2024 yang di Tahun 2025 sudah settle.

6. INVESTASI

Akun ini terdiri dari:

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Time deposits represent placements of funds for the Company's investments with maturities of less than three (3) months with interest rates for deposits in 2025 and 2024 ranging from 3.25% - 6.00% and 3.50% - 5.00%, respectively.

Cash in process represents the sale of insight money mutual funds worth Rp5,400,000,000 and the release of Bank MNC International deposits worth Rp1,000,000,000 on December 30, 2024 that have be settled in 2025.

6. INVESTMENTS

This account consists of:

	2025	2024	
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi	719.323.604.970	743.851.634.349	Financial assets measured amortization cost
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	211.250.429.444	84.772.474.689	Financial assets measured at fair value through Other comprehensive income
Jumlah	930.574.034.414	828.624.109.038	Total
i. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi			i. Financial assets measured at amortized acquisition cost
	2025	2024	
Deposito berjangka	100.000.000.000	129.610.000.000	Time deposit
Obligasi	619.323.604.970	614.241.634.349	Bonds
Jumlah	719.323.604.970	743.851.634.349	Total
ii. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			ii. Financial assets measured at amortized acquisition cost
	2025	2024	
Reksa dana - bersih	200.770.429.444	84.772.474.689	Mutual funds - net
Obligasi (Tersedia untuk dijual)-bersih	10.480.000.000	-	Bonds (Available for sale)-net
Jumlah	211.250.429.444	84.772.474.689	Total
Berdasarkan jenis investasi			Type of investment
a. Deposito Berjangka			a. Time Deposit
	2025	2024	
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Bank DKI	75.000.000.000	86.000.000.000	PT Bank DKI
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	17.000.000.000	17.000.000.000	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.000.000.000	26.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.000.000.000	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT BPRS Buana Mitra Perwira	-	325.000.000	PT BPRS Buana Mitra Perwira
PT BPRS Harta Insan Karimah	-	285.000.000	PT BPRS Harta Insan Karimah
Sub Jumlah	25.000.000.000	43.610.000.000	Sub total
Jumlah	100.000.000.000	129.610.000.000	Total
Suku bunga per tahun	3,00%-6,00%	3,75%-8,19%	Interest rate per annum

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. INVESTASI (lanjutan)

a. Deposito Berjangka (lanjutan)

Deposito berjangka merupakan penempatan dana untuk investasi Perusahaan dengan jangka waktu 6 sampai dengan 12 bulan.

b. Reksa Dana

6. INVESTMENTS (continued)

a. Time Deposit (continued)

Time deposit is a placement of funds for the Company's investment with a period of 6 to 12 months.

b. Mutual Funds

	2025	2024	
Reksa Dana BRI			<i>Mutual Fund of BRI</i>
Gebyar Indonesia II	21.241.619.475	5.067.498.368	<i>Gebyar Indonesia II</i>
Reksa Dana BRI Seruni			<i>Mutual Fund of BRI Seruni</i>
Pasar Uang III	16.036.323.903	-	<i>Money Market III</i>
Reksa Dana Trimegah Dana tetap			<i>Mutual Fund of Trimegah Dana</i>
Syariah Kelas A	16.368.725.578	-	<i>Tetap Sharia Class A</i>
Reksa Dana Danamas			<i>Mutual Fund of Danamas</i>
Rupiah Plus	15.618.652.343	6.631.034.981	<i>Rupiah Plus</i>
Reksa Dana Syariah PNM			<i>Sharia Mutual Fund of PNM</i>
Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIX	15.028.350.000	-	<i>Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIX</i>
Reksa Dana Sucorinvest			<i>Mutual Fund of Sucorinvest</i>
Pasar Uang Syariah	15.257.801.828	-	<i>Sharia Money Market</i>
Reksa Dana Danamas Stabil	15.193.467.485	4.510.709.512	<i>Mutual Fund of Danamas Stabil</i>
Reksa Dana Ventura Capital	14.212.940.000	14.224.140.000	<i>Mutual Fund of Venture Capital</i>
Reksa Dana Insight Money			<i>Mutual Fund of Insight Money</i>
Pasar Uang Syariah	12.624.422.350	11.427.969.763	<i>Sharia Money Market</i>
Reksa Dana BNI AM Short Duration			<i>Mutual Fund of BNI AM Short</i>
Bonds Index Kelas II	11.187.453.228	-	<i>Duration Bonds Index Class II</i>
Reksa Dana BNI AM Utama	10.816.576.206	5.148.810.232	<i>Mutual Fund of BNI AM Utama</i>
Reksa Dana Mandiri Investa Dana			<i>Mutual Fund of Mandiri Investa</i>
Utama Kelas A	9.949.979.175	-	<i>Dana Utama Class A</i>
Reksa Dana Trimegah Fixed			<i>Mutual Fund of Trimegah Fixed</i>
Income Plan Syariah	7.207.832.524	-	<i>Income Plan Sharia</i>
Reksa Dana BNI AM Dana			<i>Mutual Fund of BNI AM Dana</i>
Likuid Kelas II	5.502.319.624	-	<i>Likuid Class II</i>
Reksa Dana Ventura Capital II	5.005.850.000	5.014.000.000	<i>Mutual Fund of Venture Capital II</i>
Reksa Dana Mandiri Investa Dana			<i>Mutual Fund of Mandiri Investa</i>
Syariah Kelas A	5.078.993.237	-	<i>Dana Sharia Class A</i>
Reksa Dana Sucorinvest			<i>Mutual Fund of Sucorinvest</i>
Pasar Uang	4.670.401.933	4.417.844.104	<i>Money Market</i>
Reksa Dana Syariah PNM			<i>Sharia Mutual Fund of PNM</i>
Pembiayaan Mikro BUMN Seri XII	-	15.097.650.000	<i>Pembiayaan Mikro BUMN Seri XII</i>
Reksa Dana Insight Money			<i>Mutual Fund of Insight Money</i>
Pasar Uang	-	13.396.556.434	<i>Money Market</i>
Reksa Dana PNM Pembiayaan			<i>Mutual Fund of PNM</i>
Mikro BUMN Seri XI	-	-	<i>Pembiayaan Mikro BUMN Seri XI</i>
Sub Jumlah	201.001.708.889	84.936.213.394	Sub Total
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Cadangan kerugian			<i>Allowance for</i>
penurunan nilai	(231.279.445)	(163.738.705)	<i>impairment losses</i>
Jumlah Reksa Dana - Bersih	200.770.429.444	84.772.474.689	Total Mutual Fund - Net

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. INVESTASI (lanjutan)

c. Obligasi

	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga per Tahun/Interest Rate per Annum	31 Desember 2025/ Nilai Nominal/ Nominal Value	December 31, 2025 Nilai Pasar/ Market Value
Aset lancar/Current assets :				
Surat Berharga Negara Seri FR0103	15-Jul-2035	6,75%	10.000.000.000	10.480.000.000
	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga per Tahun/Interest Rate per Annum	31 Desember 2025/ Nilai Nominal/ Nominal Value	December 31, 2025 Nilai Amortisasi/ Amortized Value
Aset tidak lancar/Non current assets :				
Surat Berharga Negara Seri FR0076	15-May-2048	7,38%	72.400.000.000	75.220.948.188
Surat Berharga Negara Seri FR0075	15-May-2038	7,50%	66.000.000.000	65.522.198.139
Surat Berharga Negara Seri FR0089	15-Aug-2051	6,88%	59.424.000.000	59.449.571.067
Surat Berharga Negara Seri FR0083	15-Apr-2040	7,50%	46.000.000.000	46.595.380.911
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS038	15-Dec-2049	6,88%	40.692.000.000	40.226.453.146
Surat Berharga Negara Seri FR0092	15-Jun-2042	7,13%	36.500.000.000	36.702.275.293
Surat Berharga Negara Seri FR0097	15-Jun-2043	7,13%	36.000.000.000	36.484.170.891
Surat Berharga Negara Seri FR0074	15-Aug-2032	7,50%	32.500.000.000	32.847.850.259
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	15-Mar-2034	6,38%	30.000.000.000	29.357.627.578
Surat Berharga Negara Seri FR0100	15-Feb-2034	6,63%	25.000.000.000	24.993.302.986
Surat Berharga Negara Seri FR0078	15-May-2029	8,25%	20.000.000.000	20.790.178.590
Surat Berharga Negara Seri FR0082	15-Sep-2030	7,00%	18.000.000.000	17.991.324.983
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS033	15-Jun-2047	6,75%	18.000.000.000	17.529.687.150
Surat Berharga Negara Seri FR0065	15-May-2033	6,63%	16.705.000.000	16.795.336.929
Surat Berharga Negara Seri FR0088	15-Jun-2036	6,25%	14.000.000.000	13.957.480.508
Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR0006	15-Mar-2030	10,25%	10.500.000.000	11.744.245.774
Surat Berharga Negara Seri FR0072	15-May-2036	8,25%	11.000.000.000	11.716.180.554
Surat Berharga Negara Seri FR0102	15-Jul-2054	6,88%	11.000.000.000	10.936.796.601
Surat Berharga Negara Seri FR0101	15-May-2029	6,88%	10.000.000.000	9.946.941.703
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS005	15-Apr-2043	6,75%	7.000.000.000	6.885.738.538
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS004	15-Feb-2037	6,10%	6.500.000.000	6.379.832.825
Surat Berharga Negara Seri FR0054	15-Jul-2031	9,50%	5.000.000.000	5.743.356.322
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	15-Nov-2031	8,88%	5.000.000.000	5.062.187.877
Surat Berharga Negara Seri FR0098	15-May-2038	7,13%	5.000.000.000	4.991.189.093
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS037	15-May-2036	6,88%	5.000.000.000	4.891.031.829
Surat Berharga Negara Seri FR0087	15-Feb-2031	6,50%	3.000.000.000	2.958.049.327
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS028	15-Oct-2046	7,75%	2.000.000.000	2.111.834.281
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS003	15-Jan-2027	6,00%	1.500.000.000	1.492.433.628
Jumlah/ Total			623.721.000.000	629.803.604.970

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. INVESTASI (lanjutan)

c. Obligasi (lanjutan)

	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga per Tahun/Interest Rate per Annum	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
			Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Amortisasi/ Amortized Value
Surat Berharga Negara Seri FR0076	15-May-2048	7,38%	72.400.000.000	75.347.043.332
Surat Berharga Negara Seri FR0075	15-May-2038	7,50%	66.000.000.000	65.483.571.854
Surat Berharga Negara Seri FR0089	15-Aug-2051	6,88%	59.424.000.000	59.450.569.082
Surat Berharga Negara Seri FR0083	15-Apr-2040	7,50%	46.000.000.000	46.636.935.486
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS038	15-Dec-2049	6,88%	40.692.000.000	40.207.019.866
Surat Berharga Negara Seri FR0092	15-Jun-2042	7,13%	36.500.000.000	36.714.568.080
Surat Berharga Negara Seri FR0097	15-Jun-2043	7,13%	36.000.000.000	36.511.909.452
Surat Berharga Negara Seri FR0074	15-Aug-2032	7,50%	32.500.000.000	32.900.372.204
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	15-Mar-2034	6,38%	30.000.000.000	29.279.315.643
Surat Berharga Negara Seri FR0100	15-Feb-2034	6,63%	25.000.000.000	24.992.478.842
Surat Berharga Negara Seri FR0078	15-May-2029	8,25%	20.000.000.000	21.024.662.481
Surat Berharga Negara Seri FR0082	15-Sep-2030	7,00%	18.000.000.000	17.989.481.920
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS033	15-Jun-2047	6,75%	18.000.000.000	17.507.766.043
Surat Berharga Negara Seri FR0065	15-May-2033	6,62%	16.705.000.000	16.807.594.542
Surat Berharga Negara Seri FR0088	15-Jun-2036	6,25%	14.000.000.000	13.953.414.103
Surat Berharga Negara Seri FR0072	15-May-2036	8,25%	11.000.000.000	11.785.232.736
Surat Berharga Negara Seri FR0102	15-Jul-2054	6,88%	11.000.000.000	10.934.581.812
Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR0006	15-Mar-2030	10,25%	10.500.000.000	12.040.301.646
Surat Berharga Negara Seri FR0101	15-May-2029	6,88%	10.000.000.000	9.930.803.138
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS005	15-Apr-2043	6,75%	7.000.000.000	6.879.129.119
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS004	15-Feb-2037	6,10%	6.500.000.000	6.369.032.279
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	15-Nov-2031	8,88%	5.000.000.000	5.072.774.899
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS037	15-May-2036	6,88%	5.000.000.000	4.880.353.823
Surat Berharga Negara Seri FR0098	15-May-2038	7,13%	5.000.000.000	4.990.476.805
Surat Berharga Negara Seri FR0087	15-Feb-2031	6,50%	3.000.000.000	2.949.865.471
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS028	15-Oct-2046	7,75%	2.000.000.000	2.117.213.763
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS003	15-Jan-2027	6,00%	1.500.000.000	1.485.165.928
Jumlah/ Total			608.721.000.000	614.241.634.349

7. DEPOSITO YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Akun ini terdiri dari:

7. RESTRICTED DEPOSIT

This account consists of:

	2025	2024	
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Bank DKI	43.000.000.000	43.000.000.000	PT Bank DKI
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30.000.000.000	30.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	21.000.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Jumlah	104.000.000.000	83.000.000.000	Total

7. DEPOSITO YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Berita acara No. 1177/JJ-1/KBP.00.06/BA/2025 pada tanggal 21 April 2025 tentang Kontra Bank Garansi, Perusahaan diwajibkan untuk menempatkan deposito yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp21.000.000.000 sampai dengan jangka waktu kerja sama berakhir.

PT Bank DKI

- a. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank DKI No. 034/Jamkrida/XII/2022 pada tanggal 22 Desember 2022 tentang penjaminan kredit multiguna, Perusahaan diwajibkan menempatkan deposito yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank DKI sebesar Rp10.000.000.000.
- b. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 023/Jamkrida/VII/2022 pada tanggal 5 Juli 2022 tentang kafalah KUR iB, Perusahaan diwajibkan mempertahankan penempatan dana sebesar Rp3.000.000.000 pada penerima jaminan.
- c. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 006/Jamkrida/VII/2020 pada tanggal 20 Juli 2020 tentang penjaminan (kafalah) pembiayaan multiguna dan multijasa, Perusahaan wajib menempatkan deposito yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank DKI sebesar Rp10.000.000.000.
- d. Berdasarkan perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank DKI No. 002/Jamkrida/II/2017 pada tanggal 20 Februari 2017 tentang penjaminan kredit mikro dan kecil, Perusahaan diwajibkan untuk menempatkan deposito yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank DKI sebesar Rp10.000.000.000.
- e. Berdasarkan perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank DKI No. 001/Jamkrida/II/2017 pada tanggal 20 Februari 2017 tentang Penjaminan kredit usaha, Perusahaan diwajibkan untuk menempatkan deposito yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank DKI sebesar Rp10.000.000.000.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

- a. Sesuai dengan surat No. HBK.GI2/SPPK.069/2022 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 6 Desember 2022 perihal Surat Penawaran Pemberian Fasilitas Commercial Line . Perusahaan wajib menempatkan dana minimal sebesar 10% dari fasilitas Commercial Line dari sebesar Rp200.000.000.000 yang diatur sebagai syarat efektif Perjanjian Minimal sebesar Rp20.000.000.000 untuk Penerbitan Kontra Bank Garansi.
- b. Berdasarkan akta addendum I No. 22 tanggal 14 Juni 2024 tentang perjanjian pemberian fasilitas commercial line kontra bank garansi, Bank Mandiri (Persero) Tbk setuju memberikan fasilitas commercial line kontra bank garansi menjadi Rp300.000.000.000 sehingga deposito yang dibatasi penggunaannya menjadi sebesar Rp30.000.000.000.

7. RESTRICTED DEPOSIT (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Based on Minutes No. 1177/JJ-1/KBP.00.06/BA/2025 dated April 21, 2025 concerning Counter Bank Guarantee, the Company is required to place a restricted deposit with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the amount of Rp21,000,000,000 until the cooperation period ends.

PT Bank DKI

- a. Based on the Cooperation Agreement with PT Bank DKI No. 034/Jamkrida/XII/2022 dated December 22, 2022 concerning multipurpose credit guarantees, the Company is required to place a time-restricted deposit at PT Bank DKI of Rp10,000,000,000.
- b. In the Cooperation Agreement No. 023/Jamkrida/VII/2022 on July 5, 2022 concerning KUR iB kafalah, the Company is required to maintain the placement of funds of Rp3,000,000,000 to the guarantee recipient.
- c. Based on the Cooperation Agreement No. 006/Jamkrida/VII/2020 dated July 20, 2020 concerning the guarantee (kafalah) of multipurpose financing and mutijasa, the Company is required to place a deposit that is limited in use to PT Bank DKI worth Rp10,000,000,000.
- d. Based on the Cooperation Agreement with PT Bank DKI No. 002/Jamkrida/II/2017 dated February 20, 2017 concerning micro and small credit guarantees, the Company is required to place a time-restricted deposit at PT Bank DKI of Rp10,000,000,000.
- e. Based on the Cooperation agreement with PT Bank DKI No. 001 / Jamkrida / II / 2017 dated February 20, 2017 concerning Business Credit Guarantee, the Company is required to place a deposit that is limited in use to PT Bank DKI worth Rp10,000,000,000.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

- a. In accordance with letter No. HBK.GI2/SPPK.069/2022 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dated December 6, 2022 regarding the Offer Letter for the Provision of Commercial Line Facilities. The Company is required to place a minimum of 10% of the Commercial Line facility from Rp200,000,000,000 which is regulated as an effective condition of the Minimum Agreement of Rp20,000,000,000 for the Issuance of Counter Bank Guarantee.
- b. Based on the deed of addendum I No. 22 dated June 14, 2024 concerning the agreement to provide commercial line facilities against bank guarantees, Bank Mandiri (Persero) Tbk agreed to provide commercial line facilities against bank guarantees to Rp300,000,000,000 so that the deposits that are restricted from use are Rp30,000,000,000.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. DEPOSITO YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 2822/JJ-1/KBP/01.06/PKS/2024 pada tanggal 18 September 2024 tentang Kontra Bank Garansi, Perusahaan diwajibkan untuk menempatkan deposito yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar Rp10.000.000.000 sampai dengan jangka waktu kerja sama berakhir.

8. PIUTANG HASIL INVESTASI

Akun ini terdiri dari:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Hasil investasi dari:		
Obligasi	5.844.326.476	6.189.410.445
Sukuk	2.193.771.042	1.388.833.542
Deposito	590.130.262	303.055.781
Jumlah	<u>8.628.227.780</u>	<u>7.881.299.768</u>

9. PIUTANG PENJAMINAN ULANG

Akun ini terdiri dari:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
PT Best One Asia		
Reinsurance Brokers	32.999.509.456	7.747.875.393
PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi	23.727.108.306	24.674.217.453
PT Esa Bina Sejati	6.512.399.363	2.336.828.908
PT Asuransi Jiwa RelianceIndonesia	129.831.483	110.658.618
Sub Jumlah	<u>63.368.848.608</u>	<u>34.869.580.372</u>
Cadangan penurunan nilai	(13.327.101.010)	(18.333.994.863)
Piutang Penjaminan Ulang - Bersih	<u>50.041.747.598</u>	<u>16.535.585.509</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai piutang penjaminan ulang pada tanggal 31 Desember 2025 cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut.

Piutang yang tersaji diatas merupakan tagihan Broker kepada Perusahaan Reasuransi.

Berdasarkan Surat Keterangan Kerjasama dan Akseptasi pada tanggal 18 Februari 2026 No. 130/DIR/NR/II/2026, PT Reasuransi Nasional Indonesia telah memberikan dukungan dan akseptasi reasuransi periode 2025 dan 2024 kepada Perusahaan melalui PT Esa Bina Sejati.

Berdasarkan Surat Keterangan Kerjasama dan Akseptasi pada tanggal 18 Februari 2026 No. 131/DIR/NR/II/2026, PT Reasuransi Nasional Indonesia telah memberikan dukungan dan akseptasi reasuransi periode 2025 dan 2024 kepada Perusahaan melalui PT Best One Asia Reinsurance Brokers.

7. RESTRICTED DEPOSIT (continued)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Based on the Cooperation Agreement No. 2822/JJ-1/KBP/01.06/PKS/2024 dated September 18, 2024 concerning Counter Bank Guarantees, the Company is required to place a restricted deposit in PT Bank Syariah Indonesia Tbk in the amount of Rp10,000,000,000 until the cooperation period ends.

8. INVESTMENT INCOME RECEIVABLES

This account consists of:

Interest from:
 Bonds
 Sukuk
 Time deposits
Total

9. RE-GUARANTEE RECEIVABLES

This account consists of:

PT Best One Asia
 Reinsurance Brokers
 PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi
 PT Esa Bina Sejati
 PT Asuransi Jiwa RelianceIndonesia
Sub Total

Allowance for impairment
Re-guarantee Receivable - Net

Management believes that the impairment reserves for re-guarantee e receivables as of December 31, 2025 are sufficient to cover losses on impairment of such receivables.

The receivables presented above are the Broker's bills to the Reinsurance Company.

Based on the Letter of Cooperation and Acceptance dated February 18, 2026 No. 130/DIR/NR/II/2026, PT Reasuransi Nasional Indonesia has provided reinsurance support and acceptance for the 2025 and 2024 periods to the Company through PT Esa Bina Sejati.

Based on the Letter of Cooperation and Acceptance dated February 18, 2026 No. 131/DIR/NR/II/2026, PT Reasuransi Nasional Indonesia has provided reinsurance support and acceptance for the 2025 and 2024 periods to the Company through PT Best One Asia Reinsurance Brokers.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PIUTANG PENJAMINAN ULANG (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keterangan Kerjasama dan Akseptasi pada tanggal 19 Februari 2026 No. 039/DIV/SYR/II/2026, PT Reasuransi Nasional Indonesia telah memberikan dukungan dan akseptasi reasuransi periode 2025 dan 2024 kepada Perusahaan melalui PT Jakarta Raya Pialang Reinsurance Brokers.

10. PIUTANG PENJAMINAN BERSAMA

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
PT Sinarmas Penjamin Kredit	29.697.383.645	5.331.858.545
PT Jamkrida Jawa Barat	15.097.545.529	3.976.979.465
Sub Jumlah	44.794.929.174	9.308.838.010
Cadangan penurunan nilai	(5.938.384.533)	(456.331.898)
Piutang Penjaminan Bersama - Bersih	38.856.544.641	8.852.506.112

Mutasi Cadangan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo awal	(456.331.898)	(61.580.549)
Cadangan penurunan nilai	(5.482.052.635)	(394.751.349)
Saldo akhir	(5.938.384.533)	(456.331.898)

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai piutang penjaminan bersama pada tanggal 31 Desember 2025 cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut.

11. ASET PENJAMINAN ULANG

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset penjaminan ulang masing-masing sebesar Rp96.617.165.556 dan Rp81.650.075.422.

Aset penjamin ulang merupakan bagian penjamin ulang atas cadangan klaim yang diakui Perusahaan (Catatan 19).

12. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024*
Jangka Pendek:		
Biaya Dibayar Di Muka:		
IJP reasuransi dan		
Penjaminan bersama	24.998.111.782	29.464.626.151
Fee based income	2.819.032.929	3.018.282.732
PPh 25	-	-
Sewa	627.491.892	66.600.000
Jasa profesional	405.516.967	-
Asuransi	114.169.527	234.869.726
Lain-lain	2.352.622.956	25.710.000
Jumlah Biaya Dibayar Dimuka	31.316.946.053	32.810.088.609

9. RE-GUARANTEE RECEIVABLES (continued)

Based on the Letter of Cooperation and Acceptance dated February 19, 2026 No. 039/DIV/SYR/II/2026, PT Reasuransi Nasional Indonesia has provided reinsurance support and acceptance for the 2025 and 2024 periods to the Company through PT Jakarta Raya Pialang Reinsurance Brokers.

10. CO-GUARANTEE RECEIVABLES

This account consists of:

	2025	2024
PT Sinarmas Penjamin Kredit	29.697.383.645	5.331.858.545
PT Jamkrida Jawa Barat	15.097.545.529	3.976.979.465
Sub Total	44.794.929.174	9.308.838.010
Cadangan penurunan nilai	(5.938.384.533)	(456.331.898)
Co-guarantee Receivable - Net	38.856.544.641	8.852.506.112

The mutation of the Allowance for impairment is as follows:

	2025	2024
Beginning balance	(456.331.898)	(61.580.549)
Allowance for impairment	(5.482.052.635)	(394.751.349)
Ending balance	(5.938.384.533)	(456.331.898)

Management believes that the impairment reserves for co-guarantee receivables as of December 31, 2025 are sufficient to cover losses on impairment of such receivables.

11. RE-GUARANTEE ASSETS

As of December 31, 2025 and 2024 re-guarantee assets amounted to Rp96,617,165,556 and Rp81,650,075,422 respectively.

Re-guarantee assets are portion of re-guarantee on claim reserve that is recognized by the Company (Note 19).

12. PREPAID EXPENSE AND ADVANCES

This account consists of:

	2025	2024*
Short-term:		
Prepaid Expenses:		
IJP reasuransi and		
coguarantee	24.998.111.782	29.464.626.151
Fee based income	2.819.032.929	3.018.282.732
PPh 25	-	-
Rent	627.491.892	66.600.000
Profesional fee	405.516.967	-
Insurance	114.169.527	234.869.726
Other	2.352.622.956	25.710.000
Total Prepaid Expenses	31.316.946.053	32.810.088.609

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA
(lanjutan)

	<u>2025</u>	<u>2024*</u>
Jangka Pendek:		
Uang Muka:		
Operasional	116.076.385	22.900.000
Jumlah Uang Muka	116.076.385	22.900.000
Jumlah	31.433.022.438	32.832.988.609
Jangka Panjang:		
Biaya Dibayar Dimuka:		
IJP reasuransi dan		
Penjaminan bersama	130.505.731.284	111.408.136.577
Fee based income	14.965.396.144	13.004.086.392
Uang jaminan	539.608.578	-
Jumlah	146.010.736.006	124.412.222.969

Fee based income diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya sertifikat penjaminan.

IJP reasuransi dan Penjaminan bersama merupakan bagian Imbal Jasa Penjaminan yang telah diterima sehubungan dengan porsi penjaminan ulang dan penjaminan bersama, dengan Sertifikat Penjaminan (SP) yang telah diterbitkan sesuai dengan masa penjaminannya.

IJP Reasuransi dan Penjaminan Bersama merupakan penyajian kembali, hal tersebut dilakukan karena pos pendapatan IJP diterima dimuka yang sebelumnya disajikan secara netto kini disajikan secara bruto.

12. PREPAID EXPENSE AND ADVANCES (continued)

Short-term:
Advances:
Operational
Total Advances

Long-term:
Prepaid Expenses:
IJP reasuransi and
coguarantee
Fee based income
Deposit fee
Total

Fee based income is recognized during the guarantee period and is allocated based on the month the guarantee certificate is issued.

Reinsurance and Joint Guarantee IJP is a part of the Guarantee Service Fee that has been received in connection with the reinsurance and joint guarantee portion, with the Guarantee Certificate (SP) that has been issued in accordance with the guarantee period.

IJP Reinsurance and Joint Guarantee is a restated, this was done because the IJP income item received in advance which was previously presented on a net basis is now presented on a gross basis.

13. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari:

13. FIXED ASSETS

This account consists of:

31 Desember 2025/December 31, 2025					
	<u>Saldo awal / Beginning Balance</u>	<u>Penambahan / Additions</u>	<u>Pengurangan / Deduction</u>	<u>Saldo akhir / Ending Balance</u>	
Biaya Perolehan:					Acquisition Cost:
Inventaris kantor	2.976.724.535	617.051.006	-	3.593.775.541	Office equipment
Renovasi kantor	659.567.754	2.673.881.421	-	3.333.449.175	Office renovation
Kendaraan	47.960.000	-	-	47.960.000	Vehicle
Jumlah	3.684.252.289	3.290.932.427	-	6.975.184.716	Total
Akumulasi					Accumulated
Penyusutan:					Depreciation:
Inventaris kantor	2.386.036.560	231.882.855	-	2.617.919.415	Office equipment
Renovasi kantor	602.088.700	601.623.322	-	1.203.712.022	Office renovation
Kendaraan	27.326.500	5.430.000	-	32.756.500	Vehicle
Jumlah	3.015.451.760	838.936.177	-	3.854.387.937	Total
Nilai Buku	668.800.529			3.120.796.779	Book Value

13. ASET TETAP (lanjutan)

13. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2024/December 31, 2024					
	Saldo awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deduction	Saldo akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan:					Acquisition Cost:
Inventaris kantor	2.672.790.111	303.934.424	-	2.976.724.535	Office equipment
Renovasi kantor	659.567.754	-	-	659.567.754	Office renovation
Kendaraan	29.860.000	18.100.000	-	47.960.000	Vehicle
Jumlah	3.362.217.865	322.034.424	-	3.684.252.289	Total
Akumulasi					Accumulated
Penyusutan:					Depreciation:
Inventaris kantor	2.308.739.640	77.296.920	-	2.386.036.560	Office equipment
Renovasi kantor	602.088.700	-	-	602.088.700	Office renovation
Kendaraan	26.874.000	452.500	-	27.326.500	Vehicle
Jumlah	2.937.702.340	77.749.420	-	3.015.451.760	Total
Nilai Buku	424.515.525			668.800.529	Book Value

Beban penyusutan pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp838.936.177 dan Rp77.749.420 (Catatan 34).

Depreciation expense of fixed assets in 2025 and 2024 amounted to Rp838,936,177 and Rp77,749,420, respectively (Note 34).

Pada tanggal 4 dan 5 Agustus 2025, Perusahaan mengasuransikan aset tetap berupa kendaraan bermotor dengan nomor polis 12.5N0.0002.39104, 12.5N0.0002.39041 dan 12.5N0.0002.38997 senilai Rp18.000.000, Rp10.000.000 dan Rp10.000.000 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Simas Insurtech, untuk tiga unit kendaraan roda dua. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko kemudian hari.

On August 4 and 5, 2025, the Company insured fixed assets in the form of motor vehicles with policy numbers 12.5N0.0002.39104, 12.5N0.0002.39041 and 12.5N0.0002.38997 worth Rp18,000,000, Rp10,000,000 and Rp10,000,000 issued by PT Asuransi Simas Insurtech, for three units of two-wheeled vehicles. Management is of the opinion that the sum insured is sufficient to cover the possibility of loss on future risks.

14. ASET HAK GUNA

14. RIGHT OF USE ASSETS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

31 Desember 2025/ December 31, 2025					
	Saldo awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deduction	Saldo akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan:					Acquisition Cost:
Aset hak guna	3.219.318.934	1.924.488.494	2.323.068.848	2.820.738.580	Right of use assets
Jumlah	3.219.318.934	1.924.488.494	2.323.068.848	2.820.738.580	Total
Akumulasi					Accumulated
Penyusutan:					Depreciation:
Aset hak guna	2.460.972.487	562.320.940	2.323.068.848	700.224.579	Right of use assets
Jumlah	2.460.972.487	562.320.940	2.323.068.848	700.224.579	Total
Nilai Buku	758.346.447			2.120.514.001	Book Value

14. ASET HAK GUNA (lanjutan)

14. RIGHT OF USE ASSETS (continued)

31 Desember 2024/ December 31, 2024				
	Saldo awal / <i>Beginning Balance</i>	Penambahan / <i>Additions</i>	Pengurangan / <i>Deduction</i>	Saldo akhir / <i>Ending Balance</i>
Biaya Perolehan:				<i>Acquisition Cost:</i>
Aset hak guna	3.219.318.934	-	-	3.219.318.934
Jumlah	3.219.318.934	-	-	3.219.318.934
Akumulasi				<i>Accumulated</i>
Penyusutan:				<i>Depreciation:</i>
Aset hak guna	1.787.287.795	673.684.692	-	2.460.972.487
Jumlah	1.787.287.795	673.684.692	-	2.460.972.487
Nilai Buku	1.432.031.139			758.346.447

Beban amortisasi pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp562.320.940 dan Rp673.684.692 (Catatan 34).

Amortization expense charged to operations in 2025 and 2024 amounted to Rp562,320,940 and Rp673,684,692, respectively (Note 34).

15. ASET TAKBERWUJUD

15. INTANGIBLE ASSETS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

31 Desember 2025/ December 31, 2025				
	Saldo awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deduction	Saldo akhir / Ending Balance
Biaya Perolehan:				Acquisition Cost:
Piranti lunak	1.760.550.000	-	-	Software
Jumlah	1.760.550.000	-	-	Total
Akumulasi				Accumulated
Penyusutan:				Depreciation:
Piranti lunak	1.708.750.003	51.799.997		Software
Jumlah	1.708.750.003	51.799.997	-	Total
Nilai Buku	51.799.997			Book Value
31 Desember 2024/ December 31, 2024				
	Saldo awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deduction	Saldo akhir / Ending Balance
Biaya Perolehan:				Acquisition Cost:
Piranti lunak	1.760.550.000	-	-	Software
Jumlah	1.760.550.000	-	-	Total
Akumulasi				Accumulated
Penyusutan:				Depreciation:
Piranti lunak	1.656.949.999	51.800.004	-	Software
Jumlah	1.656.949.999	51.800.004	-	Total
Nilai Buku	103.600.001			Book Value

Beban amortisasi pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp51.799.997 dan Rp51.800.004 (Catatan 34).

Amortization expense in 2025 and 2024 amounted to Rp51,799,997 and Rp51,800,004 respectively (Note 34).

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG PENJAMINAN ULANG

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
PT Best One Asia		
Reinsurance Brokers	37.768.133.331	7.269.367.256
PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi	12.636.991.040	11.680.564.737
PT Esa Bina Sejati	6.527.429.758	4.164.562.286
PT Jasa Advisindo Sejahtera	3.044.842.756	-
PT Asuransi Sinarmas	253.802.429	-
PT Asuransi Simas Jiwa	50.265.375	-
Jumlah	60.281.464.689	23.114.494.279

17. UTANG PENJAMINAN BERSAMA

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
PT Sinarmas Penjaminan Kredit	36.276.412.943	9.363.134.555
PT Jamkrida Jawa Barat	15.535.021.181	6.471.535.113
Jumlah	51.811.434.124	15.834.669.668

18. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Insentif, tantiem dan jasa produksi	7.632.532.340	10.519.427.486
Jaminan kas	7.506.919.417	1.744.022.346
Beban klaim	3.879.762.801	8.364.783.197
Biaya lainnya	5.388.800.869	2.369.149.463
Jumlah	24.408.015.427	22.997.382.492

Biaya insentif dan jasa produksi yang masih harus dibayar merupakan kewajiban Perusahaan berupa beban jasa produksi karyawan dan tantiem manajemen yang akan diselesaikan melalui keputusan Direksi dan RUPS.

Beban akrual atas klaim terdiri dari produk penjaminan mikro dan kecil, kafalah penjaminan mikro dan kecil, serta penjaminan usaha. Pencatatan beban akrual atas klaim dilakukan berdasarkan tanggal diterbitkannya persetujuan klaim.

19. CADANGAN KLAIM

Cadangan klaim pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing Rp259.985.367.196 dan Rp189.084.673.472.

Cadangan klaim merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

Cadangan klaim dihitung sesuai dengan definisi kontrak jaminan, maka identifikasi akun terdampak pada liabilitas cadangan klaim, dengan mengukurnya menggunakan basis ECL sesuai dengan PSAK 109, dengan memperhatikan faktor-faktor makro sebagai variabel bebas yang berdampak pada variabel terikatnya.

16. RE-GUARANTEE PAYABLES

This account consists of:

	2025	2024
PT Best One Asia		
Reinsurance Brokers	37.768.133.331	7.269.367.256
PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi	12.636.991.040	11.680.564.737
PT Esa Bina Sejati	6.527.429.758	4.164.562.286
PT Jasa Advisindo Sejahtera	3.044.842.756	-
PT Asuransi Sinarmas	253.802.429	-
PT Asuransi Simas Jiwa	50.265.375	-
Total	60.281.464.689	23.114.494.279

17. CO-GUARANTEE PAYABLES

This account consists of:

	2025	2024
PT Sinarmas Penjaminan Kredit	36.276.412.943	9.363.134.555
PT Jamkrida Jawa Barat	15.535.021.181	6.471.535.113
Total	51.811.434.124	15.834.669.668

18. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

	2025	2024
Incentive, tantiem, and bonus	7.632.532.340	10.519.427.486
Cash collateral	7.506.919.417	1.744.022.346
Claim expense	3.879.762.801	8.364.783.197
Others	5.388.800.869	2.369.149.463
Total	24.408.015.427	22.997.382.492

Accrued incentive and bonus pertain to employee bonus expenses and management bonuses to be settled in accordance with the Director's decision and General Meeting of Shareholders (RUPS).

Accrued expenses on claims represent micro and small guarantee products, micro and small guarantee kafalah, and business guarantee. The recording of accrued expenses on claims is based on the date of issuance of claim approval.

19. CLAIM RESERVE

Claim reserves as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp259,985,367,196 and Rp189,084,673,472 respectively.

Claim reserves is the reserve of claim that might occur in the coming years from the guarantee that has not mature yet.

The reserve for claims is calculated in accordance with the definition of a guarantee contract, then the identification of the affected account on the claim reserve liability, by measuring it on the ECL basis in accordance with PSAK 109, taking into account macro factors as independent variables that have an impact on the dependent variable.

19. CADANGAN KLAIM (lanjutan)

Sejak tahun 2025, Perusahaan melakukan perhitungan Cadangan klaim berdasarkan POJK no 11 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan Pasal 30 ayat (2) b "penjumlahan dari 100% (seratus persen) dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat Klaim dilaporkan, dan Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan".

20. PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024*
Pendapatan ditangguhkan	408.296.645.951	364.012.271.931
Dikurangi bagian jangka pendek	(62.688.124.020)	(61.497.404.666)
Jumlah	345.608.521.931	302.514.867.265

Pendapatan ditangguhkan merupakan Imbal Jasa penjaminan yg sudah diterima dan sertifikat penjaminannya sudah diterbitkan, tetapi belum diakui sebagai imbalan jasa penjaminan karena pengakuannya mengikuti jangka waktu penjaminan kredit.

19. CLAIM RESERVE (continued)

Since 2025, the Company has calculated Claim Reserves based on POJK no. 11 of 2025 concerning the Implementation of Guarantee Institution Business Article 30 paragraph (2) b "the sum of 100% (one hundred percent) of the guarantee value borne by the Company itself at the time the Claim is reported, and Claims that have occurred but have not been reported."

20. DEFERRED INCOME

This account consists of:

Deferred income
Less short-time portion
Long-Term Portion

Deferred income is a guarantee fee that has been received and the guarantee certificate has been issued, but has not been recognized as a guarantee service fee because the recognition follows the credit guarantee period.

21. LIABILITAS LAIN-LAIN DALAM PENYELESAIAN

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
IJP dalam proses	37.144.416.063	21.851.118.652
Tampungan subrogasi	7.166.029.786	6.147.086.313
Jumlah	44.310.445.849	27.998.204.965

IJP dalam proses merupakan imbal jasa penjaminan yang telah diterima, namun belum diterbitkan sertifikat penjaminan karena berkas permohonan penerbitan sertifikat penjaminan belum lengkap atau terdapat kekurangan pembayaran imbal jasa penjaminan.

Tampungan subrogasi merupakan subrogasi yang telah diterima namun datanya belum dapat teridentifikasi.

Liabilitas lain-lain dalam penyelesaian merupakan uang masuk yang berumur kurang dari 1 tahun.

21. OTHER LIABILITIES IN PROGRESS

This account consists of:

IJP in process
Subrogation deposit
Total

The IJP in the process is a guarantee fee that has been received, but has not been issued a guarantee certificate because the application file for the issuance of a guarantee certificate is incomplete or there is a lack of payment of guarantee fees.

Subrogation reservoir is a subrogation that has been received but the data has not been identified.

Other liabilities in progress represent received cash that are less than 1 years.

22. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
PT BRI Multifinance Indonesia	1.548.587.315	-
PT BNI Multifinance	560.611.322	449.595.878
PT Surya Sudeco	-	319.695.863
Jumlah	2.109.198.637	769.291.741
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	560.611.322	567.487.213
Bagian Jangka Panjang Jatuh Tempo Lebih dari Satu Tahun	1.548.587.315	201.804.528

PT BRI Multifinance Indonesia
PT BNI Multifinance
PT Surya Sudeco
Total

Less short - term portion
Long-Term portion

22. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Perjanjian Kerja Sama

PT BRI Multifinance Indonesia

Pada tahun 2025, Perusahaan melakukan kontrak sewa kendaraan dengan nomor perjanjian 3531/JJ-1/PNG.00.03/PKS/2025 antara PT BRI Multifinance Indonesia dengan Perusahaan yang dibuat pada tanggal 20 November 2025, untuk 2 unit kendaraan bermotor dengan jangka waktu selama 48 bulan.

PT BNI Multifinance

Pada tahun 2019, Perusahaan melakukan kontrak sewa kendaraan dengan nomor perjanjian BNIMF/6.2/038(A)007/Jamkrida-/III/2019 antara PT BNI Multifinance dengan Perusahaan yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2019, untuk 6 unit kendaraan bermotor dengan jangka waktu selama 48 bulan dan 4 unit kendaraan bermotor jangka waktu selama 60 bulan.

Pada tahun 2021, dilakukan addendum kontrak sewa kendaraan dengan nomor perjanjian BNIMF/6.2/038(A) (I)014/add/Jamkrida/XI/2021 yang dibuat pada tanggal 4 November 2021. Berdasarkan addendum tersebut Perusahaan melakukan penambahan sewa kendaraan sebanyak 6 unit kendaraan bermotor dengan Jangka waktu selama 48 bulan dan 5 unit kendaraan bermotor jangka waktu selama 60 bulan.

PT Surya Sudeco

Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan kontrak baru sewa kendaraan dengan nomor perjanjian No.695.1/JJ-3.1/PNG.00.03/PKS/2023 antara PT Surya Sudeco dengan Perusahaan yang dibuat pada tanggal 16 Juni 2023, untuk 4 unit kendaraan bermotor dengan jangka waktu 36 bulan.

23. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang No.6/2023 pada tahun 2023 dan Undang-Undang No.11/2020 pada tahun 2022.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut masing-masing sebanyak 53 orang pada tahun 2025 dan 2024.

Beban imbalan kerja jangka panjang yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

	2025	2024
Beban jasa kini	759.585.203	664.812.000
Beban bunga	79.485.057	40.597.000
Aktuaria	277.485.799	122.168.000
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi	1.116.556.059	827.577.000

22. LEASE PAYABLES (continued)

Cooperation Agreement

PT BRI Multifinance Indonesia

In 2025, the Company obtained vehicle lease contract with the agreement number 3531/JJ-1/PNG.00.03/PKS/2025 between PT BRI Multifinance Indonesia and the Company made on November 20, 2025, for 2 units of motorized vehicles for a period of 48 months.

PT BNI Multifinance

In 2019, the Company obtained vehicle lease contract with the agreement number BNIMF/6.2/038(A)007/Jamkrida-/III/2019 between PT BNI Multifinance and the Company made on March 14, 2019, for 6 units of motorized vehicles for a period of 48 months and 4 units of motor vehicles for a period of 60 months.

In 2021, an addendum to the vehicle lease contract was carried out with agreement number BNIMF/6.2/038(A) (I)014/add/Jamkrida/XI/2021, which was made on November 4, 2021. Based on the addendum, the Company leases additional 6 units of motor vehicles for a period of 48 months and 5 units of motor vehicles for a period of 60 months.

PT Surya Sudeco

In 2023, the Company entered into a new vehicle lease contract with agreement number No.695.1/JJ-3.1/PNG.00.03/PKS/2023 between PT Surya Sudeco and the Company made on June 16, 2023, for 4 units of motor vehicles with a period of 36 months.

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

The amount of post-employment remuneration is calculated based on applicable regulations, namely Law No. 6/2023 in 2023 and Law No. 11/2020 in 2022.

The number of employees entitled to the post-employment compensation is 53 people in 2025 and 2024, respectively.

Long-term employee benefit expense recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income follows:

Current service costs
Interest costs
Actuarial
Components of defined benefit costs recognized in profit or loss

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

	2025	2024	
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:			Remeasurement on the defined benefit liability:
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:			Actuarial losses (gain) arising from:
Perubahan asumsi keuangan	133.332.199	156.000	Changes in financial assumptions
Penyesuaian pengalaman	(3.235.413)	168.773.000	Experiences adjustment
Pengembalian aset rencana	85.651.994	311.318.000	Return on plan assets
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di penghasilan komprehensif lain	215.748.780	480.247.000	Components of defined benefit cost recognized in other comprehensive income
Jumlah	1.332.304.839	1.307.824.000	Total

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Movements of long-term employee benefits liability are as follows:

	2025	2024	
Liabilitas imbalan kerja pada awal tahun	1.588.139.000	1.069.755.000	Employee benefits liability at beginning of the year
Beban imbalan kerja tahun berjalan	1.116.556.059	827.577.000	Current year's employee benefit expense
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:			Remeasurement on the defined benefit liability:
Kerugian (keuntungan) aktuarial	130.096.786	168.929.000	Actuarial losses (gain)
Pengembalian rencana aset	85.651.994	311.318.000	Return on plan assets
Pembayaran imbalan kerja	(270.347.400)	(103.428.000)	Payment of employee benefits
Pembayaran iuran periode berjalan	(650.912.241)	(686.012.000)	Payment of contributions for current period
Liabilitas imbalan kerja akhir tahun	1.999.184.198	1.588.139.000	Employee benefits liability at the end of the year

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan imbalan pasti pasca-kerja:

The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	2025	2024	
Tingkat diskonto	7,35%	7,10%	Discount rate
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	6,00%	6,00%	Future salary increases
Tabel mortalita	TMI IV (2019)	TMI IV (2019)	Mortality table
Tingkat cacat	10%	10%	Rate of disablement
Usia Pensiun	56	56	Retirement age

Perhitungan aktuarial terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal, aktuaris independen, dalam Laporan No. 25031/JAKJ/DF/01/2026 tanggal 23 Januari 2026.

The latest actuarial calculations for long-term employee benefit liabilities were carried out by the Actuarial Consultant Firm Enny Diah Awal, an independent actuary, in Report No. 25031/JAKJ/DF/01/2026 dated January 23, 2026.

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2025 and 2024 adalah sebagai berikut:

The sensitivities of the overall long-term employee benefits liability to changes in the weighted principal assumptions as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

2025

	Dampak terhadap kenaikan (penurunan) liabilitas imbalan kerja jangka panjang/ Impact of increase (decrease) on long-term employee benefits liability			
	Penurunan			
	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	asumsi/ Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1,00%	1.637.625.733	1.582.761.762	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1,00%	1.582.949.303	1.637.938.203	Salary growth rate

2024

	Dampak terhadap kenaikan (penurunan) liabilitas imbalan kerja jangka panjang/ Impact of increase (decrease) on long-term employee benefits liability			
	Penurunan			
	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	asumsi/ Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1,00%	1.234.764.000	1.180.100.000	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1,00%	1.180.071.000	1.235.249.000	Salary growth rate

24. MODAL SAHAM

24. SHARE CAPITAL

Berdasarkan Akta No. 62 tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn., dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0073131.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 6 April 2024, Pemegang Saham menyetujui penerbitan sejumlah 200.000 lembar saham yang sepenuhnya diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Penyertaan Modal Daerah. Dengan demikian, modal disetor dan ditempatkan Perseroan yang semula sebesar Rp400.000.000.000 atau 400.000 lembar saham, menjadi sebesar Rp600.000.000.000 atau 600.000 lembar saham.

Based on Deed No. 62 dated March 22, 2024 by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., and approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU- 0073131.AH.01.11.TAHUN 2024 dated April 6, 2024, the Shareholders approved the issuance of 200,000 shares which were fully subscribed by the Provincial Government of DKI Jakarta as Regional Capital Participation. Thus, the Company's paid-up and issued capital, which was originally Rp400,000,000,000 or 400,000 shares, became Rp600,000,000,000 or 600,000 shares.

Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sepenuhnya pada tanggal 30 Januari 2024, sebesar 100% atau setara dengan 200.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp200.000.000.000. Realisasi atas penyertaan modal daerah telah dilakukan oleh Perusahaan sebagai penambahan investasi pada instrumen keuangan berupa reksadana, obligasi, dan deposito.

The authorized capital has been fully invested and paid up on January 30, 2024, amounting to 100% or equivalent to 200,000 shares with a total nominal value of Rp200,000,000,000. The realization of regional capital participation has been carried out by the Company as additional investment in financial instruments in the form of mutual funds, bonds, and deposits.

Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 9 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn., modal dasar Perusahaan mengalami perubahan dari semula sebesar Rp400.000.000.000 menjadi Rp1.600.000.000.000. Perubahan ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU- 0033628.AH.01.02 Tahun 2023.

Based on Deed No. 14 dated June 9, 2023 made before Ashoya Ratam, SH, M.Kn., the authorized capital of the Company was amended from Rp400,000,000,000 to Rp1,600,000,000,000. This change has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Decree No. AHU- 0033628.AH.01.02 of 2023.

24. MODAL SAHAM (lanjutan)

Susunan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2025/ December 31, 2025				
Pemegang Saham	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah Modal Disetor/Total paid-up capital stock	Stockholder
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	595.000	99,17%	595.000.000.000	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Perumda Pasar Jaya	5.000	0,83%	5.000.000.000	Perumda Pasar Jaya
Jumlah	600.000	100%	600.000.000.000	Total
31 Desember 2024/ December 31, 2024				
Pemegang Saham	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah Modal Disetor/Total paid-up capital stock	Stockholder
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	595.000	99,17%	595.000.000.000	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Perumda Pasar Jaya	5.000	0,83%	5.000.000.000	Perumda Pasar Jaya
Jumlah	600.000	100%	600.000.000.000	Total

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Sesuai dengan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, Perusahaan penjaminan dengan lingkup provinsi diwajibkan memiliki modal sendiri (ekuitas) minimum sebesar Rp50.000.000.000 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah memperoleh izin usaha. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut.

25. DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan Akta Notaris No. 04 tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, SH., M.Kn., para Pemegang Saham menyetujui pembagian dividen saham sebesar 40% dari laba bersih, yaitu senilai Rp10.961.035.962. Dividen tersebut dibagikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp10.870.059.364 atau sebesar 99,17% pada tanggal 17 Mei 2025 dan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp90.976.598 atau sebesar 0,83% pada tanggal 23 Juni 2025.

Selain dari itu Pemegang Saham juga memutuskan untuk membentuk cadangan umum dan cadangan tujuan masing-masing sebesar Rp6.850.647.477 dan Rp9.590.906.467.

24. SHARE CAPITAL (continued)

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2025 and 2024 is as follows:

Capital Management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

In accordance with article 31 paragraph 3 of the Regulation of Financial Services Authority No. 2/POJK.05/2017 concerning Implementation of Guarantee Institution, a guarantee Company with a provincial scope shall be required to have a minimum equity of Rp50,000,000,000 during the period of 3 (three) years after obtaining a business license. As of December 31, 2025 and 2024, the Company has complied with the regulation.

25. CASH DIVIDENDS

Based on the Notary Deed No. 04 dated March 27, 2025 made before Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, SH., M.Kn., the Shareholders approved the distribution of share dividends of 40% of net profit, which is worth Rp10,961,035,962. The dividends were distributed to the DKI Jakarta Provincial Government worth Rp10,870,059,364 or 99.17% on May 17, 2025 and to Perumda Pasar Jaya worth Rp90,976,598 or 0.83% on June 23, 2025.

In addition, the Shareholders also resolved to establish general reserve and purpose reserve amounting to Rp6,850,647,477 and Rp9,590,906,467, respectively.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. IMBAL JASA PENJAMINAN / KAFALAH

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
<u>Konvensional</u>		
Penjaminan mikro dan kecil	210.661.697.215	185.511.222.172
Penjaminan multiguna	47.266.376.943	39.194.818.605
Kredit usaha rakyat (KUR)	14.082.694.182	19.130.553.302
Penjaminan usaha	9.945.393.137	12.907.590.891
Penjaminan konstruksi	6.599.603.400	5.666.912.572
Kontra bank garansi	4.372.309.902	4.204.137.181
Customs bond	2.829.909.259	1.118.879.446
Kredit pemilikan rumah (KPR)	1.096.773.353	1.961.613.554
Surety bond	640.665.721	530.983.336
Anjak piutang	414.079.525	74.509.676
Sub Jumlah Konvensional	297.909.502.637	270.301.220.735

Syariah

Kafalah pembiayaan mikro dan kecil	64.878.808.469	45.009.574.656
Kafalah pembiayaan multiguna	5.870.063.992	4.094.520.590
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	2.758.385.996	2.932.814.011
Kafalah pembiayaan konstruksi	1.493.228.858	868.920.059
Kafalah pembiayaan usaha	1.278.107.593	1.438.331.353
Kredit pemilikan rumah (KPR)	352.682.918	192.771.609
Kafalah kontrak bank garansi jaminan	243.595.687	37.401.346
Surety bond	25.820.869	30.592.652
Sub Jumlah Syariah	76.900.694.382	54.604.926.276

Jumlah	374.810.197.018	324.906.147.011

Pendapatan imbal jasa penjaminan adalah imbal jasa yang diterima oleh Perusahaan dari pelanggan dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya imbal jasa penjaminan dihitung dari tarif imbal jasa penjaminan, plafon kredit dan jangka waktu penjaminan.

26. GUARANTEE FEES

This account consists of:

	2025	2024
<u>Conventional</u>		
Guarantee micro and small	210.661.697.215	185.511.222.172
Guarantee multipurpose	47.266.376.943	39.194.818.605
People's business credit	14.082.694.182	19.130.553.302
Guarantee business	9.945.393.137	12.907.590.891
Guarantee construction	6.599.603.400	5.666.912.572
Bank guarantee	4.372.309.902	4.204.137.181
Customs bond	2.829.909.259	1.118.879.446
House ownership credit	1.096.773.353	1.961.613.554
Surety Bond	640.665.721	530.983.336
Factoring	414.079.525	74.509.676
Sub Total Conventional	297.909.502.637	270.301.220.735

Sharia

Guarantee micro and small	64.878.808.469	45.009.574.656
Guarantee multipurpose	5.870.063.992	4.094.520.590
People's business credit.	2.758.385.996	2.932.814.011
Guarantee construction	1.493.228.858	868.920.059
Guarantee business	1.278.107.593	1.438.331.353
House ownership credit	352.682.918	192.771.609
Surety Bond	243.595.687	37.401.346
Surety Bond	25.820.869	30.592.652
Sub Total Sharia	76.900.694.382	54.604.926.276

Total

Guarantee fee is the amount received by the Company from customers. The amount of guarantee fee is measured using guarantee fee rate, credit limit, and guarantee period.

27. PENDAPATAN PENJAMINAN LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
<u>Konvensional</u>		
Pendapatan subrogasi	10.772.894.128	10.864.865.875
Pendapatan komisi	7.343.581.011	10.323.165.293
Sub Jumlah Konvensional	18.116.475.139	21.188.031.168
<u>Syariah</u>		
Pendapatan komisi	1.867.878.519	2.051.012.594
Pendapatan subrogasi	1.292.232.884	872.715.691
Sub Jumlah Syariah	3.160.111.403	2.923.728.285
Jumlah	21.276.586.542	24.111.759.453

27. OTHER GUARANTEE REVENUES

This account consists of:

	2025	2024
<u>Conventional</u>		
Subrogation income	10.772.894.128	10.864.865.875
Commission income	7.343.581.011	10.323.165.293
Sub Total Conventional	18.116.475.139	21.188.031.168
<u>Sharia</u>		
Commission income	1.867.878.519	2.051.012.594
Subrogation income	1.292.232.884	872.715.691
Sub Total Sharia	3.160.111.403	2.923.728.285
Total	21.276.586.542	24.111.759.453

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. BEBAN KLAIM

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
<u>Konvensional</u>		
Penjaminan mikro dan kecil	99.935.576.224	78.544.623.259
Penjaminan multiguna	22.111.289.369	15.627.375.543
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	3.385.502.699	7.898.098.074
Kredit pemilikan rumah (KPR)	1.030.292.962	183.555.479
Penjaminan usaha	667.079.987	4.591.285.725
Penjaminan konstruksi	-	798.061.431
Sub Jumlah Konvensional	127.129.741.241	107.642.999.511
<u>Syariah</u>		
Kafalah pembiayaan mikro dan kecil	19.477.580.397	16.078.222.830
Kafalah pembiayaan multiguna	4.220.068.432	291.246.194
Sub Jumlah Syariah	23.697.648.829	16.369.469.024
Jumlah	150.827.390.070	124.012.468.535

28. CLAIM EXPENSES

This account consists of:

<u>Conventional</u>	
Guarantee micro and small	
Guarantee multipurpose	
People's business credit (KUR)	
House ownership credit (KPR)	
Guarantee business	
Guarantee construction	
Sub Total Conventional	
<u>Sharia</u>	
Guarantee micro and small	
Guarantee multipurpose	
Sub Total Sharia	
Total	

29. BEBAN PENJAMINAN ULANG DAN BERSAMA

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
<u>Konvensional</u>		
Penjaminan ulang	65.484.512.696	61.863.732.540
Penjaminan bersama	55.792.285.065	47.038.520.849
Sub Jumlah Konvensional	121.276.797.761	108.902.253.389
<u>Syariah</u>		
Penjaminan bersama	27.136.465.455	20.283.160.513
Penjaminan ulang	11.885.557.207	8.183.208.651
Sub Jumlah Syariah	39.022.022.662	28.466.369.164
Jumlah	160.298.820.423	137.368.622.553

29. RE-GUARANTEE AND CO-GUARANTEE EXPENSE

This account consists of:

<u>Conventional</u>	
Re-Guarantee	
Co-Guarantee	
Sub Total Conventional	
<u>Sharia</u>	
Co-Guarantee	
Re-Guarantee	
Sub Total Sharia	
Total	

30. BEBAN FEE BASED INCOME

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
<u>Konvensional</u>		
Penjaminan mikro dan kecil	11.106.857.845	10.578.643.868
Penjaminan multiguna	2.439.561.219	2.445.773.961
Customs bond	408.622.862	154.970.418
Bank garansi	341.623.794	311.432.128
Penjaminan konstruksi	235.704.653	201.907.337
Penjaminan usaha	103.710.543	295.905.583
Anjak Piutang	27.582.191	3.003.534
Surety bond	33.509.209	13.320.218
Sub Jumlah Konvensional	14.697.172.316	14.004.957.047

30. FEE BASED INCOME EXPENSE

This account consists of:

<u>Conventional</u>	
Guarantee micro and small	
Guarantee multipurpose	
Customs bond	
Guarantee bank	
Guarantee construction	
Guarantee business	
Factoring	
Surety bond	
Sub Total Conventional	

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. BEBAN FEE BASED INCOME (lanjutan)

30. FEE BASED INCOME EXPENSE (continued)

	2025	2024	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
Kafalah pembiayaan mikro dan kecil	2.727.620.398	1.804.332.262	Guarantee micro and small
Kafalah pembiayaan multiguna	246.976.479	172.792.562	Guarantee multipurpose
Kafalah pembiayaan usaha	23.985.218	44.194.683	Guarantee business
Kafalah pembiayaan konstruksi	14.647.133	35.820.339	Guarantee construction
Kafalah bank garansi	952.169	130.994	Kafalah bank guarantee
Sub Jumlah Syariah	3.014.181.397	2.057.270.840	Sub Total Sharia
Jumlah	17.711.353.713	16.062.227.887	Total

31. PENDAPATAN INVESTASI

31. INVESTMENT INCOME

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2025	2024	
Obligasi dan sukuk	40.047.628.106	37.882.245.776	Bonds and sukuk
Deposito	9.900.726.125	8.717.967.790	Time deposits
Laba penjualan investasi	5.131.132.956	3.254.729.585	Profit on sell of investment
Amortisasi diskon (premium) obligasi	(737.189.379)	(604.376.856)	Amortization discount (premium) on bond
Jumlah	54.342.297.808	49.250.566.295	Total

32. BEBAN SUMBER DAYA MANUSIA

32. PERSONNEL EXPENSE

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2025	2024	
Gaji dan tunjangan	15.843.803.640	16.508.447.711	Salaries and benefits
PPh pasal 21	2.360.949.066	1.598.312.034	Income tax article 21
Tunjangan pensiun	1.891.313.973	734.897.397	Retirement allowance
Tunjangan hari raya	1.494.145.913	1.101.395.017	Special day allowance
Asuransi kesehatan	960.567.411	938.335.208	Healthcare insurance
Tunjangan cuti	876.651.673	660.519.483	Leave allowance
Insentif, tantiem dan jasa produksi	518.955.446	1.944.051.072	Incentive, tantiem, and bonus
Pendidikan dan pelatihan	296.124.621	145.498.403	Education and training
Kompensasi	65.289.000	80.430.000	Compensation
Imbalan kerja (Catatan 23)	1.116.556.059	827.577.000	Employee benefit (Note 23)
Jumlah	25.424.356.802	24.539.463.325	Total

33. BEBAN OPERASIONAL

33. OPERATING EXPENSE

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2025	2024	
Iklan dan promosi	3.249.599.312	2.053.715.718	Advertising and promotion
Sewa	2.560.288.586	1.852.732.924	Rent
Biaya penagihan	1.627.982.673	697.814.686	Collection fee
Perjalanan dinas	134.525.691	236.589.141	Business travel
Jumlah	7.572.396.262	4.840.852.469	Total

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024	
Keperluan kantor	2.541.635.666	2.071.637.378	Office supplies
Jasa profesional	1.095.277.074	3.640.230.265	Professional fee
Penyusutan aset tetap (Catatan 13)	838.936.177	77.749.420	Depreciation of fixed assets (Note 13)
Amortisasi aset hak guna (Catatan 14)	562.320.940	673.684.692	Amortization of right of use assets (Note 14)
Komunikasi dan energi	541.024.351	449.032.502	Communication and energy
Alat tulis kantor	328.337.902	376.289.175	Office stationery
Transportasi	210.254.130	339.088.495	Transportation
Rapat kerja	113.213.066	144.450.555	Business meeting
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 15)	51.799.997	51.800.004	Amortization of intangible assets (Note 15)
Lain-lain (dibawah Rp100.000.000)	163.473.095	148.485.288	Others (below Rp100,000,000)
Jumlah	6.446.272.398	7.972.447.774	Total

34. ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES

This account consists of:

35. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024	
Pendapatan lain-lain			Other income
Jasa giro	110.004.576	233.408.242	Current account service
Lain-lain	1.072.762.857	(210.410.672)	Others
	1.182.767.433	22.997.570	
Beban lain-lain			Other expenses
Beban pajak	(1.282.134.121)	(813.870.560)	Tax expense
Administrasi bank	(307.781.453)	(482.555.590)	Bank administration
	(1.589.915.574)	(1.296.426.150)	
Jumlah	(407.148.141)	(1.273.428.580)	Total

35. OTHER INCOME (EXPENSES)

This account consists of:

36. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Di Muka

	2025	2024	
Pajak penghasilan:			Income Taxes:
Pasal 21	424.010.956	127.468.660	Article 21
Pasal 23	86.353.075	-	Article 23
Pasal 28a	50.384.630	-	Article 28a
	560.748.661	127.468.660	Total

b. Utang Pajak

	2025	2024	
Pajak penghasilan:			Income Taxes:
Pasal 25	669.484.156	6.826.890.078	Article 25
Pasal 4 ayat 2	21.111.111	286.500	Article 4 (2)
Pasal 23	10.116.712	96.759.154	Article 23
Pasal 29	-	1.206.919.662	Article 29
PPN Keluaran	260.450.926	-	VAT-Out
Jumlah	961.162.905	8.130.855.394	Total

a. Prepaid Tax

b. Taxles Payable

36. PERPAJAKAN (lanjutan)

36. TAXES (continued)

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

c. Income Tax Benefit (Expense)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between profit before income tax and the Company's estimated taxable income for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Pajak kini	(8.250.602.800)	(8.033.809.740)	Current tax
Pajak tangguhan	177.423.754	2.078.780.736	Deferred tax
Beban Pajak			Income Tax
Penghasilan - Bersih	<u>(8.073.179.046)</u>	<u>(5.955.029.004)</u>	Expenses - Net
	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	24.074.080.511	33.357.618.910	Profit before income tax statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan Temporer:			Temporary Differences:
Cadangan kerugian penurunan nilai	542.699.522	9.358.890.070	Reserve allowance for receivables
Liabilitas imbalan kerja	195.296.418	38.137.000	Employee benefits liabilities
Amortisasi	24.049.998	32.375.004	Amortization
Penyusutan	44.425.672	19.601.272	Depreciation
Sub Jumlah	806.471.609	9.449.003.346	Sub Total
Perbedaan Tetap:			Permanent Differences:
Cadangan klaim	55.971.804.597	32.623.952.459	Claim reserve
Akrual insentif, tantiem dan jasa produksi	2.959.508.471	6.752.504.036	Accrual incentive, tantiem, and bonus
Iklan dan promosi	3.249.599.311	2.053.715.718	Advertising and promotion
Administrasi dan umum	791.244.843	1.321.145.697	Administrative and general
Beban pajak	2.360.949.066	813.870.560	Tax expense
Administrasi bank	1.589.915.572	482.555.590	Bank administration
Perjalanan dinas	134.525.688	236.589.141	Official trips
Representasi	16.946.421	12.876.234	Representation
Sumber daya manusia	-	(1.312.950.208)	Human resources
Pendapatan yang telah dikenakan PPh final:			Income already subjected to final tax:
Pendapatan investasi	(54.342.297.808)	(49.250.566.295)	Investment income
Pendapatan jasa giro	(110.004.576)	(22.997.570)	Bank interest income
Sub Jumlah	12.622.191.585	(6.289.304.638)	Sub Total
Laba Fiskal Tahun Berjalan	<u>37.502.743.705</u>	<u>36.517.317.618</u>	Fiscal Profit For the Year
Pembulatan (Penghasilan Kena Pajak)	<u>37.502.743.705</u>	<u>36.517.317.618</u>	Rounding (Taxable Income)
Beban Pajak Kini	<u>8.250.603.615</u>	<u>8.033.809.740</u>	Current Tax Expense
Dikurangi pajak dibayar di muka:			Deduct taxes paid in advance:
PPh Pasal 25	8.300.987.430	6.826.890.078	Income Tax Article 25
Pajak Penghasilan Kurang Bayar (Lebih Bayar)	<u>(50.383.815)</u>	<u>1.206.919.662</u>	Under (Over) Payment of Income Tax

36. PERPAJAKAN (lanjutan)

36. TAXES (continued)

d. Pajak tangguhan

d. Deferred tax

31 Desember 2025/December 31, 2025					
Dikreditkan (dibebankan) ke/Credit (charge) to					
	(Dibebankan) Dikreditkan ke Laba Rugi/ (Charged) Credited to Profit or Loss	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lainnya/Credited to Other Comprehensive Income		31 Desember 2025/December 31, 2025	
1 Januari 2025/January 1, 2025					
Aset pajak tangguhan					Deffered tax assets
Aset tetap	50.057.252	9.773.648	-	59.830.900	Fixed assets
Amortisasi	77.834.168	5.290.999	-	83.125.167	Amortization
Libilitas imbalan kerja	349.390.800	42.965.212	47.464.732	439.820.744	Employee benefit liabilities
Piutang penjaminan	3.133.507.869	119.393.895	-	3.252.901.764	Guarantee receivable
Jumlah	3.610.790.089	177.423.754	47.464.732	3.835.678.575	Total
31 Desember 2024/December 31, 2024					
Dikreditkan (dibebankan) ke/Credit (charge) to					
	(Dibebankan) Dikreditkan ke Laba Rugi/ (Charged) Credited to Profit or Loss	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lainnya/Credited to Other Comprehensive Income		31 Desember 2024/December 31, 2024	
1 Januari 2024/January 1, 2024					
Aset pajak tangguhan					Deffered tax assets
Aset tetap	45.744.972	4.312.280	-	50.057.252	Fixed assets
Amortisasi	70.711.667	7.122.501	-	77.834.168	Amortization
Libilitas imbalan kerja	235.346.320	8.390.140	105.654.340	349.390.800	Employee benefit liabilities
Piutang penjaminan	1.074.552.055	2.058.955.814	-	3.133.507.869	Guarantee receivable
Jumlah	1.426.355.014	2.078.780.735	105.654.340	3.610.790.089	Total

37. SIFAT DAN HUBUNGAN DAN TRANSAKSI
DENGAN PIHAK BERELASI

37. NATURE OF RELATIONSHIPS AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Sifat hubungan dengan pihak berelasi

Nature of relationships with related parties

- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan pemegang saham Perusahaan.
- PT Bank DKI adalah perusahaan yang berada di bawah pengendalian yang sama dengan perusahaan
- Regional Government of DKI Jakarta is a stockholder of the Company.
- PT Bank DKI is a company which is under common control as the Company.

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. SIFAT DAN HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

37. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Transactions with Related Parties

	2025	2024	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets		
			2025	2024	
Aset kas dan setara kas	51.412.104.462	68.564.717.738	3,4%	6,0%	Assets cash and cash equivalent
Investasi deposito	75.000.000.000	86.000.000.000	5,0%	7,5%	Investment time deposit
Deposito yang dibatasi penggunaannya	43.000.000.000	33.000.000.000	2,9%	2,9%	Restricted deposit
Jumlah	169.412.104.462	187.564.717.738	11,3%	16,3%	Total

38. INFORMASI SEGMENT

38. SEGMENT INFORMATION

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

31 Desember 2025/ December 31, 2025			
Laporan Posisi Keuangan Segmen/ Segment Statement of Financial Position			
	Unit Usaha Syariah/ Sharia Business Unit	Unit Konvensional/ Conventional Unit	Gabungan/ Combined
ASET			
ASET LANCAR			Current Assets
Kas dan setara kas			Cash and cash equivalents
	11.228.382.657	74.324.471.307	85.552.853.964
Investasi			Invesments
Obligasi	-	10.480.000.000	10.480.000.000
Reksadana	56.537.775.518	144.232.653.926	200.770.429.444
Deposito	17.000.000.000	83.000.000.000	100.000.000.000
Piutang			Receivables
Piutang hasil investasi	2.534.409.505	6.093.818.275	8.628.227.780
Piutang penjaminan ulang	5.784.523.691	44.257.223.907	50.041.747.598
Piutang penjaminan bersama	21.595.379.513	17.261.165.128	38.856.544.641
Aset penjaminan ulang	-	96.617.165.556	96.617.165.556
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	6.633.424.607	24.799.597.831	31.433.022.438
Pajak dibayar dimuka	-	560.748.661	560.748.661
Jumlah Aset Lancar	121.313.895.491	501.626.844.590	622.940.740.082
ASET TIDAK LANCAR			Non Current Assets
Investasi-Obligasi	125.681.072.624	493.642.532.346	619.323.604.970
Deposito yang dibatasi penggunaannya	10.000.000.000	94.000.000.000	104.000.000.000
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	26.589.519.274	119.421.216.732	146.010.736.006
Aset tetap - bersih	971.065	3.119.825.714	3.120.796.779
Aset hak guna	-	2.120.514.001	2.120.514.001
Aset pajak tangguhan	-	3.835.678.575	3.835.678.575
Jumlah Aset Tidak Lancar	162.271.562.963	716.139.767.368	878.411.330.331
JUMLAH ASET	283.585.458.454	1.217.766.611.959	1.501.352.070.413
			TOTAL ASSETS

38. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

38. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Desember 2025/ December 31, 2025			
	Laporan Posisi Keuangan Segmen/ Segment Statement of Financial Position			
	Unit Usaha Syariah/ Sharia Business Unit	Unit Konvensional/ Conventional Unit	Gabungan/ Combined	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				Current Liabilities
Utang pajak	-	961.162.905	961.162.905	Trade payables
Utang				Payables
Utang penjaminan ulang	16.289.784.434	43.991.680.255	60.281.464.689	Re-guarantee payables
Utang penjaminan bersama	22.754.619.350	29.056.814.774	51.811.434.124	Co - guarantee payables
Beban akrual	4.064.535.437	20.343.479.990	24.408.015.427	Accrued expenses
Cadangan klaim	21.240.165.968	238.745.201.228	259.985.367.196	Claim reserve
Pendapatan ditangguhkan	11.758.922.638	50.929.201.382	62.688.124.020	Deferred income
Liabilitas lain-lain				Other liabilities
dalam penyelesaian	11.667.619.504	32.642.826.346	44.310.445.849	in progress
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang :				Current maturities of long term liabilities :
Utang sewa pembiayaan	-	560.611.322	560.611.322	Lease payable
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	87.775.647.331	417.230.978.201	505.006.625.532	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				Non Current Liabilities
Pendapatan ditangguhkan	64.932.950.827	280.675.571.104	345.608.521.931	Deferred income
Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	-	1.999.184.198	1.999.184.198	Liabilities for post employee benefit
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu 1 tahun mendatang :				Long term liabilities-net of current maturities within 1 year :
Utang sewa pembiayaan	-	1.548.587.315	1.548.587.315	Lease payable
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	64.932.950.827	284.223.342.617	349.156.293.444	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	152.708.598.158	701.454.320.818	854.162.918.976	Total Liabilities
EKUITAS				
Modal saham	135.500.000.000	464.500.000.000	600.000.000.000	Capital stock
Komponen ekuitas lainnya	490.670.901	4.934.651.829	5.425.322.730	Other equity component
Saldo laba				Retained Earnings
Ditentukan penggunaannya	-	27.364.585.222	27.364.585.222	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	3.914.160.359	11.309.545.851	15.223.706.210	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	-	(824.462.725)	(824.462.725)	Other comprehensive income
Jumlah Ekuitas	139.904.831.260	507.284.320.177	647.189.151.437	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	292.613.429.418	1.208.738.640.995	1.501.352.070.412	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMKRIDA JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

38. SEGMENT INFORMATION (continued)

31 Desember 2025/ December 31, 2025				
Laporan Laba Rugi Segmen/				
Segment Statement of Profit or Loss				
	Unit Usaha Syariah/ Sharia Business Unit	Unit Konvensional/ Conventional Unit	Gabungan/ Combined	
PENDAPATAN PENJAMINAN				GUARANTEE REVENUES
Imbal jasa penjaminan/kafalah	78.768.572.901	305.253.083.648	384.021.656.548	Guarantee fees
Pendapatan penjaminan lainnya	1.292.232.884	10.772.894.128	12.065.127.012	Other guarantee revenues
Jumlah Pendapatan Penjaminan	80.060.805.785	316.025.977.776	396.086.783.560	Total Guarantee Revenues
BEBAN PENJAMINAN				GUARANTEE EXPENSES
Beban klaim	23.697.648.829	127.129.741.241	150.827.390.070	Claim expense
Beban penjaminan ulang & bersama	39.022.022.662	121.276.797.761	160.298.820.423	Re-guarantee and co-guarantee expense
Beban fee based income	3.014.181.397	14.697.172.316	17.711.353.713	Fee based income expense
Beban restitusi	32.234.439	239.135.189	271.369.628	Restitution expense
Kenaikan estimasi klaim	624.109.358	55.347.695.239	55.971.804.597	Increase in estimated claims
Jumlah beban penjaminan	66.390.196.685	318.690.541.746	385.080.738.431	Total Guarantee Expenses
LABA BERSIH PENJAMINAN	13.670.609.099	(2.664.563.970)	11.006.045.129	NET GUARANTEE PROFIT
Pendapatan Investasi	11.283.566.965	43.058.730.843	54.342.297.808	Investment Income
Beban sumber daya manusia	5.451.285.948	19.973.070.854	25.424.356.802	Personnel expense
Beban operasional	1.571.949.178	6.000.447.084	7.572.396.262	Operating expense
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	1.522.110.928	(979.411.406)	542.699.522	Allowance for impairment losses
Beban administrasi dan umum	855.585.071	5.590.687.327	6.446.272.398	Administrative and general expenses
Beban sistem, teknologi, dan pengembangan usaha	177.828.843	703.560.458	881.389.301	System, technology, and operating development expense
	9.400.931.125	30.584.793.859	40.867.114.285	
LABA USAHA	15.553.244.939	9.809.373.013	24.481.228.652	OPERATING INCOME
Beban lain-lain, bersih	24.155.942	1.565.759.632	1.589.915.574	Others expenses, net
Pendapatan lain-lain	(22.041.700)	1.204.809.133	1.182.767.433	Other income
	46.197.642	360.950.499	407.148.141	
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	15.507.047.297	9.448.422.514	24.074.080.511	INCOME (LOSS) BEFORE TAX

39. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Tabel berikut menyajikan pengukuran nilai wajar aset tertentu Perusahaan:

39. FAIR VALUE MEASUREMENT

The following table provides the fair value measurement of the Company's certain assets:

2025					
Pengukuran nilai wajar menggunakan: / Fair value measurement using:					
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Harga kuotasian dalam pasar aktif (tahap 1)/ Quoted prices in active market (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (tahap 2)/ Significant observable input (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (tahap 3)/ Significant unobservable input (level 3)	
Aset yang dimiliki					Assets measurement
Pada nilai wajar:					At fair value:
Obligasi dimiliki					Hold to
hingga jatuh tempo	619.323.604.970	651.843.232.500	-	-	mature bonds
Obligasi tersedia					Bonds available
untuk dijual	10.480.000.000	10.380.000.000	-	-	for sale
Reksa dana tersedia					Mutual funds
untuk dijual	<u>200.770.429.444</u>	<u>200.770.429.444</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	available for sale
2024					
Pengukuran nilai wajar menggunakan: / Fair value measurement using:					
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Harga kuotasian dalam pasar aktif (tahap 1)/ Quoted prices in active market (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (tahap 2)/ Significant observable input (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (tahap 3)/ Significant unobservable input (level 3)	
Aset yang dimiliki					Assets measurement
Pada nilai wajar:					At fair value:
Obligasi dimiliki					Hold to
hingga jatuh tempo	614.241.634.349	603.774.331.152	-	-	mature bonds
Reksa dana tersedia					Mutual funds
untuk dijual	<u>84.772.474.689</u>	<u>84.772.474.689</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	available for sale

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Kuotasi harga pasar yang digunakan untuk aset keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan adalah harga penawaran (bid price) terkini. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Nilai wajar investasi pada unit reksa dana diukur berdasarkan kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The fair value of a financial instrument traded in active market is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. The quoted market price used for financial assets held by the Company is the current bid price. The instruments are included in level 1. The fair value of investment in mutual funds is measured based on quoted market price published as of December 31, 2025 and 2024.

40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan adalah risiko penjaminan, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Perusahaan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko penjaminan kredit, risiko likuiditas, dan risiko kredit.

Risiko Penjaminan Kredit

Risiko penjaminan kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat dilihat pada besarnya default rate dan tingkat NPL kredit yang dijamin, serta tingkat pengembalian piutang subrogasi.

Untuk meminimalkan risiko penjaminan, maka pada proses penjaminan kredit dilakukan identifikasi risiko menggunakan 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Conditions, dan Collateral*. Item yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait.

Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya risiko penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif untuk setiap aspek 5C. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan *56 instal scoring* dan atau kelayakan risiko termasuk mitigasi risiko melalui pendekatan *Installment to Disposable Income Ratio (IDIR)* untuk melihat kemampuan bayar, *56 installment* informasi debitur Bank Indonesia, *56 installment* keuangan dan *Loan To Value (LTV)* untuk melihat kecukupan jaminan yang diberikan. Berdasarkan score ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing-masing Terjamin atau sekelompok Terjamin, atau suatu produk baru.

Penjaminan Ulang

Perusahaan mengadakan perjanjian penjaminan ulang dengan PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi, PT Best One Asia Reinsurance Broker dan PT Esa Bina Sejati, sehubungan dengan manajemen risiko atas sertifikat penjaminan. Jumlah risiko retensi sendiri Perusahaan di tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The main risks arising from the Company's financial instruments are credit guarantee risk, credit risk and liquidity risk. The operational activities of the Company are managed in a prudent manner by managing those risks to minimize potential losses.

Risk management is the responsibility of the Board of Directors (BOD). The BOD has the responsibility to determine the basic principles of the Company's risk management as well as principles covering specific areas, such as credit guarantee risk, liquidity risk and credit risk.

Credit Guarantee Risk

Credit guarantee risk is the risk arising from the failure to fulfill obligations guaranteed. Risk can be seen in the amount of default risk and a guaranteed level of non-performing loan, and returns subrogation receivables.

To minimize the risk of guarantee, then on the process of guarantee, there is a risk identify using the 5C's, Character, Capacity, Capital, Conditions, and Collateral. Items that must be considered for each of these aspects are adapted to the characteristics of credit to be secured, and elaborated on in the system and the related guarantee procedures.

The results of the risk identification process and then followed with the establishment of guarantee risk prediction to determine the amount of guarantee risk. In the implementation, risk prediction can be done qualitatively and / or quantitatively to every aspect of the 5C. Quantitative predictions made by the scoring system and or risk worthiness including the risk mitigation through 56 installment approach to Disposable Income Ratio (IDIR) to look at the ability to pay, Bank Indonesia debtor information system, financial analysis and loan to value (LTV) to look at the adequacy of the guarantee provided. Based on the underwriting risk prediction score is assigned to each Secured or Secured Group, or a new product.

Re – Guarantee

The Company entered into re-guarantee agreements with PT Jakarta Raya Pialang Reinsurance, PT Best One Asia Reinsurance Broker and PT Esa Bina Sejati, in connection with the risk management of the guarantee certificates. The amount of the Company's own retention risk in 2025 and 2024 is as follows:

40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Penjaminan Ulang (lanjutan)

Re – Guarantee (continued)

PT Best One Reinsurance Broker dan PT Esa Bina Sejati

PT Best One Reinsurance Broker and PT Esa Bina Sejati

2025			
Jenis Produk/ Type of Product	Batas Perjanjian/ Treaty Limit	Retensi Sendiri/ Own Retention	Sesi Reasuransi/ Reinsurance Session
a. Kredit non produktif/ Non- productive credit (konsumer/multiguna/KPR)/ (consumer/multipurpose/KPR)	< 25.000.000 22.500.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 2.000.000.000	75% 25.000.000 60%	25% excess 25.000.000 40%
b. Kredit produktif/ Productive credit (mikro dan kecil)/(micro and small)	< 25.000.000 22.500.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 750.000.000	75% 25.000.000 60%	25% excess 25.000.000 40%
c. Kredit produktif/ Productive credit (Kredit usaha/umum/anjak piutang)/ (Business/general credit/factoring)	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 60.000.000.000	75% 25.000.000 75%	25% excess 25.000.000 25%
d. Kredit konstruksi dan pengadaan barang dan jasa/ Construction credit and procurement of goods and services	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 50.000.000.000	75% 25.000.000 70%	25% excess 25.000.000 30%
e. Kredit Lembaga Dana Bergulir (LPDB)/ Revolving Fund Credit Institution	< 25.000.000 22.500.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 2.500.000.000	75% 25.000.000 75%	25% excess 25.000.000 25%
f. Surety bond dan custom bond/ Surety bond and custom bond	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 60.000.000.000	75% 25.000.000 85%	25% excess 25.000.000 15%
g. Bank garansi/Bank guarantee	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 60.000.000.000	75% 25.000.000 85%	25% excess 25.000.000 15%
h. Kredit Usaha Rakyat/people's business credit	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 500.000.000	80% 25.000.000 70%	20% excess 25.000.000 30%

PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi

PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi

2025			
Jenis Produk/ Type of Product	Batas Perjanjian/ Treaty Limit	Retensi Sendiri/ Own Retention	Sesi Reasuransi/ Reinsurance Session
a. Kafalah Pembiayaan Non Produktif (Konsumer/ Multiguna/ KPR)/ Kafalah Non-Productive Financing (Consumer/Multipurpose/KPR)	< 25.000.000 22.500.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 500.000.000	87,50% 25.000.000 80%	12,50% excess 25.000.000 20%
b. Kafalah Pembiayaan Produktif (Mikro & Kecil)/Productive Financing Kafalah (Micro & Small)	< 25.000.000 22.500.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 500.000.000	87,50% 25.000.000 80%	12,50% excess 25.000.000 20%
c. Kafalah Pembiayaan Produktif (Usaha/Umum)/	< 25.000.000 22.500.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 20.000.000.000	87,50% 25.000.000 87,50%	12,50% excess 25.000.000 12,50%

40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Penjaminan Ulang (lanjutan)

PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (lanjutan)

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Re – Guarantee (continued)

PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (continued)

2025			
Jenis Produk/ Type of Product	Batas Perjanjian/ Treaty Limit	Retensi Sendiri/ Own Retention	Sesi Reasuransi/ Reinsurance Session
d. Kafalah Pembiayaan Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa/ Kafalah Construction Financing & Procurement of Goods/Services	< 25.000.000 22.500.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 2.000.000.000	87,50% 25.000.000 85%	12,50% excess 25.000.000 15%
e. Kontra Bank garansi/Cons of Bank guarantee	< 25.000.000 22.500.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 10.000.000.000	87,50% 25.000.000 87,50%	12,50% excess 25.000.000 12,50%
f. Surety bond dan Custom bond/ Surety bond and Custom bond	< 25.000.000 22.500.000 - 50.000.000 > 25.000.000 - 500.000.000	87,50% 25.000.000 80%	12,50% excess 25.000.000 20%

PT Best One Reinsurance Broker dan PT Esa Bina Sejati

PT Best One Reinsurance Broker and PT Esa Bina Sejati

2024			
Jenis Produk/ Type of Product	Batas Perjanjian/ Treaty Limit	Retensi Sendiri/ Own Retention	Sesi Reasuransi/ Reinsurance Session
a. Kredit non produktif/ Non- productive credit (konsumer/ multiguna)/ consumer/ multipurpose)	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 2.000.000.000	75% 25.000.000 60%	25% excess 25.000.000 40%
b. Kredit produktif/ Productive credit (Kredit mikro)/(micro credit)	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 750.000.000	75% 25.000.000 60%	25% excess 25.000.000 40%
c. Kredit produktif/ Productive credit (Kredit usaha/umum)/ (Business/general credit)	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 40.000.000.000	75% 25.000.000 75%	25% excess 25.000.000 25%
d. Kredit konstruksi dan pengadaan barang dan jasa/ Construction credit and procurement of goods and services	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 40.000.000.000	75% 25.000.000 70%	25% excess 25.000.000 30%
e. Surety bond, custom bond dan bank garansi/ Surety bond, custom bond and bank guarantee	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 20.000.000.000	75% 25.000.000 80%	25% excess 25.000.000 10%
f. Kredit produktif (Kredit usaha rakyat)/ Productive credit (People's Business Credit)	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 750.000.000	80% 25.000.000 80%	20% excess 25.000.000 20%
g. Kafalah non produktif/ Non- productive kafalah (konsumer/multiguna)/ (consumer/multipurpose)	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 2.000.000.000	87,5% 25.000.000 80%	12,5% excess 25.000.000 20%

40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Penjaminan Ulang (lanjutan)

Re – Guarantee (continued)

PT Best One Reinsurance Broker dan PT Esa Bina Sehati (lanjutan)

PT Best One Reinsurance Broker and PT Esa Bina Sehati (continued)

2024			
Jenis Produk/ Type of Product	Batas Perjanjian/ Treaty Limit	Retensi Sendiri/ Own Retention	Sesi Reasuransi/ Reinsurance Session
h. Kafalah produktif / <i>Productive kafalah</i> (Kredit mikro)/ (<i>micro credit</i>)	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 750.000.000	87,5% 25.000.000 80%	12,5% excess 25.000.000 20%
i. Kafalah produktif/ <i>Productive kafalah</i> (Kredit usaha/umum)/ (<i>Business/general credit</i>)	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 39.000.000.000	87,5% 25.000.000 87,50%	12,5% excess 25.000.000 12,5%
j. Kafalah konstruksi dan pengadaan barang dan jasa/ <i>Construction kafalah and procurement of goods and services</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 39.000.000.000	87,5% 25.000.000 87,5%	12,5% excess 25.000.000 12,5%
k. <i>Surety bond</i> dan <i>custom bond</i> / <i>Surety bond and custom bond</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 20.000.000.000	87,5% 25.000.000 80%	12,5% excess 25.000.000 20%
l. Bank garansi/ <i>Bank guarantee</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 20.000.000.000	87,5% 25.000.000 87,5%	12,5% excess 25.000.000 12,5%

PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi

PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi

2024			
Jenis Produk/ Type of Product	Batas Perjanjian/ Treaty Limit	Retensi Sendiri/ Own Retention	Sesi Reasuransi/ Reinsurance Session
a. Kredit non produktif/ <i>Non-productive credit</i> (konsumer/multiguna)/ (<i>consumer/multipurpose</i>)	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 2.000.000.000	75% 25.000.000 70%	25% excess 25.000.000 30%
b. Kredit produktif/ <i>Productive credit</i> (Kredit mikro)/ (<i>micro credit</i>)	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 750.000.000	75% 25.000.000 75%	25% excess 25.000.000 25%
c. Kredit produktif/ <i>Productive credit</i> (Kredit usaha/umum)/ (<i>Business/general credit</i>)	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 39.000.000.000	75% 25.000.000 90%	25% excess 25.000.000 10%
d. Kredit konstruksi dan pengadaan barang dan jasa/ <i>Construction credit and procurement of goods and services</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 39.000.000.000	75% 25.000.000 80%	25% excess 25.000.000 20%
e. Kafalah non produktif/ <i>Non-productive kafalah</i> (konsumer/multiguna)/ (<i>consumer/multipurpose</i>)	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 2.000.000.000	75% 25.000.000 70%	25% excess 25.000.000 30%

40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Penjaminan Ulang (lanjutan)

PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (lanjutan)

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Re – Guarantee (continued)

PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (continued)

2024			
Jenis Produk/ Type of Product	Batas Perjanjian/ Treaty Limit	Retensi Sendiri/ Own Retention	Sesi Reasuransi/ Reinsurance Session
f. Kafalah produktif/ <i>Productive kafalah</i> (Kredit mikro)/ <i>(micro credit)</i>	< 25.000.000 > 50.000.000 - 750.000.000 25.000.000 - 50.000.000	75% 25.000.000 75%	25% excess 25.000.000 25%
g. Kafalah konstruksi dan pengadaan barang dan jasa/ <i>Construction kafalah and procurement of goods and services</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 39.000.000.000	75% 25.000.000 80%	25% excess 25.000.000 20%
h. <i>Surety bond/ Surety bond</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 20.000.000.000	75% 25.000.000 80%	25% excess 25.000.000 20%
i. <i>Custom bond</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 20.000.000.000	75% 25.000.000 70%	25% excess 25.000.000 30%
j. Bank garansi/ <i>Bank guarantee</i>	< 25.000.000 25.000.000 - 50.000.000 > 50.000.000 - 20.000.000.000	75% 25.000.000 80%	25% excess 25.000.000 20%

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Company is not enough to cover the liabilities which become due.

In managing the liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash deemed adequate to finance the Company's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

The table below summarizes the maturity profile of financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of December 31, 2025 and 2024:

31 Desember 2025/December 31, 2025						
	<= 1 tahun/ ≤ 1 year	1-2 tahun/ 1-2 year	3-5 tahun/ 3-5 year	Jumlah/ Total	Nilai Tercatat/ As Reported	
Liabilitas						Liabilities
Utang penjaminan ulang	54.915.739.538	5.216.476.793	149.248.358	60.281.464.689	60.281.464.689	Co-guarantee payable
Beban akrual	24.408.015.427	-	-	24.408.015.427	24.408.015.427	Accrued expenses
Utang penjaminan bersama	51.808.471.059	2.963.065	-	51.811.434.124	51.811.434.124	Co-guarantee payables
Utang sewa pembiayaan	560.611.322	1.548.587.315	-	2.109.198.637	2.109.198.637	Lease payables
Cadangan klaim	259.985.367.196	-	-	259.985.367.196	259.985.367.196	Claim reserve
Jumlah	391.678.204.542	6.768.027.173	149.248.358	398.595.480.072	398.595.480.072	Total

40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

31 Desember 2024/December 31, 2024					
	<= 1 tahun/ <= 1 year	1-2 tahun/ 1-2 year	3-5 tahun/ 3-5 year	Jumlah/ Total	Nilai Tercatat/ As Reported
Liabilitas					
Utang penjaminan ulang	18.162.080.254	4.952.414.025	-	23.114.494.279	23.114.494.279
Beban akrual	22.997.382.492	-	-	22.997.382.492	22.997.382.492
Utang penjaminan bersama	15.816.240.696	18.428.972	-	15.834.669.668	15.834.669.668
Utang sewa pembiayaan	567.487.213	201.804.528	-	769.291.741	769.291.741
Cadangan klaim	189.084.673.472	-	-	189.084.673.472	189.084.673.472
Jumlah	246.627.864.127	5.172.647.525	-	251.800.511.652	251.800.511.652

Liabilities
Co-guarantee payable
Accrued expenses
Co-guarantee payables
Lease payables
Claim reserve
Total

Risiko Pasar

Perusahaan menghadapi eksposur risiko pasar, yaitu risiko akibat dari menurunnya nilai suatu investasi karena kondisi pasar misalnya suku bunga. Risiko pasar berasal dari posisi terbuka yang terkait dengan produk suku bunga, dan ekuitas yang seluruhnya dipengaruhi oleh pergerakan pasar baik secara spesifik maupun umum dan perubahan volatilitas tingkat suku bunga pasar atau harga seperti suku bunga dan produk ekuitas.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko suku bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko nilai suku bunga wajar adalah risiko dimana nilai dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Perusahaan menghadapi dampak dari fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku baik atas risiko nilai wajar maupun arus kas. Marjin suku bunga bisa meningkat sebagai hasil dari perubahan tersebut namun juga dapat mengurangi kerugian ketika terdapat pergerakan yang tidak diharapkan. Direksi menetapkan batas atas tingkat ketidaksesuaian dari suku bunga repricing dan value at risk yang bisa dilakukan, yang dimonitor secara harian oleh Divisi yang membidangi investasi.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Perusahaan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih.

Berikut adalah eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

Market Risk

The company faces market risk exposure, which is the risk arising from the decline in the value of an investment due to market conditions such as interest rates. Market risk originates from open positions related to interest rate products, and equities that are entirely influenced by market movements both specifically and generally, and changes in the volatility of market interest rates or prices such as interest rates and equity products.

Interest Rate Risk

Interest rate cash flow risk is the risk where the future cash flows of a financial instrument fluctuate due to changes in market interest rates. Fair value interest rate risk is the risk where the value of a financial instrument fluctuates due to changes in market interest rates. Companies face the impacts of fluctuations in market interest rates, both on fair value and cash flows. The interest rate margin may increase as a result of these changes but can also reduce losses when unexpected movements occur. The board sets the upper limits of the mismatch level of repricing interest rates and value at risk that can be undertaken, which are monitored daily by the investment division.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Company will incur a loss arising from the customers or counterparties failure to fulfill their contractual obligations. The Company manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, setting internal policies on verifications and authorizations of credit, and regularly monitoring the collectability of receivables to reduce the exposure to bad debts.

The table below shows statement of financial position maximum exposures related to credit risk as of December 31, 2025 and 2024:

40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

	2025	2024
Kas dan setara kas	85.552.853.964	102.617.678.526
Aset penjamin ulang	96.617.165.556	81.650.075.422
Investasi - deposito berjangka	100.000.000.000	129.610.000.000
Deposito yang dibatasi penggunaannya	104.000.000.000	83.000.000.000
Reksa dana	200.770.429.444	84.772.474.689
Piutang hasil investasi	8.628.227.780	7.881.299.768
Obligasi	619.323.604.970	614.241.634.349
Jumlah	1.214.892.281.714	1.103.773.162.754

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Credit Risk (continued)

Cash and cash equivalents
Re-guarantee assets
Investment - time deposits
Restricted time deposits
Mutual funds
Interest receivable
bond
Total

41. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan telah menyajikan kembali Laporan keuangan tahun 2024 atas perubahan penyajian dibayar dimuka dan pendapatan ditangguhkan, yang sebelumnya disajikan secara neto menjadi disajikan secara bruto, dengan rincian sebagai berikut:

41. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS

The Company has restated its 2024 financial statements regarding changes in the presentation of prepaid and deferred income, which were previously presented on a net basis to be presented on a gross basis, with the following details:

	31 Desember 2024/December 31, 2024		
	Sebelum Disajikan kembali/ Before Restated	Disajikan kembali/ Restated	Setelah Disajikan kembali/ After Restated
Laporan Posisi Keuangan			
Biaya dibayar dimuka dan uang muka lancar	3.368.362.458	29.464.626.151	32.832.988.609
Biaya dibayar dimuka dan uang muka tidak lancar	13.004.086.392	111.408.136.577	124.412.222.969
Pendapatan ditangguhkan jangka pendek	32.036.004.188	29.461.400.478	61.497.404.666
Pendapatan ditangguhkan jangka panjang	191.103.505.015	111.411.362.250	302.514.867.265

Statement of Financial Position
Current Prepaid expense and advances
Non current Prepaid expense and advances
Current Deferred income
Non current Deferred income

42. PERJANJIAN DAN KOMITMEN

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian dan perikatan, sebagai berikut:

- PT Bank DKI perihal penjaminan kredit mikro dan kecil, penjaminan kredit usaha, penjaminan kredit multiguna, penjaminan kredit konstruksi, pengadaan barang atau jasa, bank garansi, kafalah pembiayaan multiguna dan multijasa.
- PT Bank DKI perihal penjaminan kredit pemilikan rumah program pemerintah.
- PT Bank DKI perihal penjaminan kredit usaha rakyat.
- PT Radana Bhaskara Finance, Tbk perihal penjaminan pembiayaan factoring (anjak piutang).

42. AGREEMENTS AND COMMITMENTS

The Company entered into various agreements, as follows:

- PT Bank DKI on credit guarantee for micro and small, credit guarantee, multipurpose guarantee, credit guarantee construction, procurement of goods or services, bank guarantee and financing kafalah multipurpose and multiservice.
- PT Bank DKI on credit guarantee for government program housing loan.
- PT Bank DKI on credit guarantee for people's business credit.
- PT Radana Bhaskara Finance, Tbk on factoring financing guarantees.

42. PERJANJIAN DAN KOMITMEN (lanjutan)

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian dan perikatan, sebagai berikut:(lanjutan)

- PT Mandiri Tunas Finance perihal penjaminan kredit usaha dan kredit modal kerja anjak piutang.
- LPDB-KUMKM tentang penjaminan pinjaman/pembiayaan KUMKM.
- PT Mitra Proteksi Madani tentang pengelolaan program penjaminan dan pembiayaan mikro Mekaar untuk kepentingan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM), Grup PNM, dan/atau nasabah/klien/mitra atau afiliasinya, yang meliputi kegiatan administrasi untuk proses penutupan penjaminan, pembayaran IJP/kontribusi dan pengajuan klaim.
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, perihal pemberian fasilitas Commercial Line - kontra garansi bank.
- PT Bringin Sejahtera Makmur tentang pengelolaan program penjaminan untuk kepentingan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Grup Bank BRI atau afiliasinya, yang meliputi kegiatan administrasi untuk proses penutupan penjaminan, pembayaran IJP/kontribusi dan pengajuan klaim.
- Pusat Investasi Pemerintah perihal kafalah pembiayaan kepada penyalur pembiayaan ultra mikro.
- PT Pegadaian (Persero) perihal penjaminan modal produktif.
- PT Bank Syariah Indonesia perihal Kafalah Kontra Bank Garansi dan Kafalah Pembiayaan Value Chain.
- PT Bank Niaga perihal Penjaminan Kredit Usaha untuk modal kerja BPR kepada end user pembiayaan.
- PT Bringin Sejahtera Makmur (PT BSM) tentang penjaminan untuk kepentingan PT Bank Raya Indonesia Tbk terhadap produk Pinang Mikro dan Pinang Ritel.
- PT Bank Raya Indonesia Tbk perihal Penjaminan Kredit Karyawan Tetap.
- PT Bank MNC perihal Penjaminan Kredit Usaha.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) perihal penjaminan Kontra Bank Garansi.

Penjaminan bersama:

- PT Jamkrida Jawa Barat
- PT Sinarmas Penjaminan Kredit
- PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)

Penjaminan Ulang:

- PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi
- PT Best One Asia Reinsurance
- PT Esa Bina Sejati

42. AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

The Company entered into various agreements, as follows:(continued)

- PT Mandiri Tunas Finance on business credit guarantees and factoring working capital loans.
- LPDB-KUMKM on KUMKM loan/financing.
- PT Mitra Proteksi Madani for managing the guarantee program and micro-financing representing PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM), PNM Group, and/or customers/clients/partners or affiliates, which includes administrative activities of guarantee closing process IJP/contribution payments and claim submissions.
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, on provision of Commercial Line facility- counter bank.
- PT Bringin Sejahtera Makmur regarding the management of the guarantee program for the benefit of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and the BRI Bank Group or affiliates, which includes administrative activities for the guarantee closing process, IJP/contribution payments and claim submissions.
- Government Investment Center on financing kafalah to ultra micro financing distributors.
- PT Pegadaian (Persero) regarding the guarantee of productive capital.
- PT Bank Syariah Indonesia regarding Kafalah Cons Bank Guarantee and Kafalah Value Chain.
- PT Bank Niaga regarding Business Credit Guarantee for BPR working capital to end users of financing.
- PT Bringin Sejahtera Makmur (PT BSM) regarding the guarantee for the benefit of PT Bank Raya Indonesia Tbk for micro pinang and retail pinang products.
- PT Bank Raya Indonesia Tbk regarding permanent employee credit guarantee.
- PT Bank MNC regarding Business Credit Guarantee.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) regarding the guarantee of counter bank guarantee.

Joint Guarantee:

- PT Jamkrida Jawa Barat
- PT Sinarmas Penjaminan Kredit
- PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)

Re-Guarantee:

- PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi
- PT Best One Asia Reinsurance
- PT Esa Bina Sejati

43. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Berdasarkan Surat Keterangan Kerjasama dan Akseptasi pada tanggal 18 dan 19 Februari 2026 No. 130/DIR/NR/II/2026, 131/DIR/NR/II/2026 dan 039/DIV/SYR/II/2026 dari PT Reasuransi Nasional Indonesia dan PT Reasuransi Nasional Indonesia Divisi Syariah sebagai pihak reasuransi yang memiliki saldo Utang dan Piutang kepada Perusahaan melalui pihak broker yaitu PT Esa Bina Sejati Reinsurance Brokers (FLRe), PT Best One Asia Reinsurance Brokers (BOARe) dan PT Jakarta Raya Pialang Reinsurance Brokers (JakRe), dinyatakan bahwa PT Reasuransi Nasional Indonesia dan PT Reasuransi Nasional Indonesia Divisi Syariah berkomitmen untuk menyelesaikan hak dan kewajiban tersebut kepada Perusahaan untuk tahun 2025 dan 2024.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan audit ini, Perusahaan telah menyelesaikan transaksi utang-piutang dengan Broker PT Best One Asia Reinsurance Brokers dan PT Esa Bina Sejati.

Piutang dengan PT Best One Asia Reinsurance Brokers telah berkurang sebesar Rp29.832.877.639 dari Rp32.999.509.456, dan Piutang dengan PT Esa Bina Sejati telah berkurang sebesar Rp3.213.679.216 dari Rp6.512.399.363.

Utang dengan PT Best One Asia Reinsurance Brokers telah berkurang sebesar Rp31.194.565.041 dari Rp37.768.133.331, dan Utang dengan PT Esa Bina Sejati telah berkurang sebesar Rp6.447.109.327 dari Rp6.527.429.759.

44. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang telah diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2026.

43. SUBSEQUENT EVENT

Based on the Letter of Cooperation and Acceptance dated February 18 and 19, 2026 No. 130/DIR/NR/II/2026, 131/DIR/NR/II/2026 and 039/DIV/SYR/II/2026 from PT Reasuransi Nasional Indonesia and PT Reasuransi Nasional Indonesia Syariah Division as reinsurance parties who have balances of Debt and Receivables to the Company through brokers namely PT Esa Bina Sejati Reinsurance Brokers (FLRe), PT Best One Asia Reinsurance Brokers (BOARe) and PT Jakarta Raya Pialang Reinsurance Brokers (JakRe), it is stated that PT Reasuransi Nasional Indonesia and PT Reasuransi Nasional Indonesia Syariah Division are committed to settle these rights and obligations to the Company for 2025 and 2024.

As of the issuance of this audited financial report, the Company has completed the debt-receivable transactions with Brokers PT Best One Asia Reinsurance Brokers and PT Esa Bina Sejati.

Receivables with PT Best One Asia Reinsurance Brokers have decreased by Rp29,832,877,639 from Rp32,999,509,456, and Receivables with PT Esa Bina Sejati have decreased by Rp3,213,679,216 from Rp6,512,399,363.

Debt with PT Best One Asia Reinsurance Brokers has decreased by Rp31,194,565,041 from Rp37,768,133,331, and Debt with PT Esa Bina Sejati has decreased by Rp6,447,109,327 from Rp6,527,429,759.

44. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Management is responsible for the preparation of financial statements that have been authorized for issue by the Directors on February 27, 2026.

Berkolaborasi Membangun **UMKM Tangguh & Berkelanjutan**

Together, we strengthen MSMEs for a sustainable future.



PT Jamkrida Jakarta

Gedung Jaya Lantai 3

Jl. M. H. Thamrin No. 12, Kelurahan Kebon Sirih,
Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI
Jakarta – 10340

KONTAK | CONTACTS

[TELP] (021) 31927872 | [FAX] (021) 22346335
mail@jamkrida-jakarta.co.id